

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

Vol. 16, No. 1 JUNI 2025

P-ISSN: 2086-6313
E-ISSN: 2528-4673

- Analisis Transformasi Ekonomi Indonesia Dalam Tiga Dekade Terakhir Dengan Pendekatan Mixed Methods Research
Rasbin, Siti Jamilah, dan Waryun
- Manfaat Sertifikasi Produk Bagi Daya Saing: Studi Kasus Industri Mikro dan Kecil di Indonesia Tahun 2019
Tirza Magdalena Simamora dan Khoirunurrofik
- Menimbang Urgensi Formulasi Kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Indana Fiersy Tsabita Arsil dan Achmad Lutfi
- Dampak Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kemiskinan di Indonesia
Muhammad Akbar Ramadhani dan Muhammad Wakhid Musthofa
- Bibliometric Analysis: Green Economy Research on Poverty Eradication
Atur Rejeki, Ali Akbar, dan Septiana Dwiputrianti
- Dampak Otonomi Khusus Dalam Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia
Mu'amar Wicaksono dan Nining Indroyono Soesilo
- Assessing Green Financing Opportunities and Challenges in Indonesia's Climate Mitigation and Adaptation Priority Sectors
Lenny Hidayat, Michael Timothy Tasliman, dan Cholisa Amalia
- Analisis Permasalahan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2019-2024
Yanuar Arif Wibowo

JEKP

Vol. 16

No. 1

Hal.
1 – 140

Jakarta
Juni 2025

P-ISSN: 2086-6313
E-ISSN: 2528-4673



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemen Badan Keshlian
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

ISSN 2086-6313



Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 16, NO. 1, JUNI 2025

ISSN: 2086-6313

Analisis Transformasi Ekonomi Indonesia Dalam Tiga Dekade Terakhir Dengan Pendekatan *Mixed Methods Research*

Rasbin, Siti Jamilah, dan Waryun

Manfaat Sertifikasi Produk Bagi Daya Saing: Studi Kasus Industri Mikro dan Kecil di Indonesia Tahun 2019

Tirza Magdalena Simamora dan Khoirunurrofik

Menimbang Urgensi Formulasi Kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Indana Fiersy Tsabita Arsil dan Achmad Lutfi

Dampak Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Muhammad Akbar Ramadhani dan Muhammad Wakhid Musthofa

Bibliometric Analysis: Green Economy Research on Poverty Eradication

Atur Rejeki, Ali Akbar, dan Septiana Dwiputrianti

Dampak Otonomi Khusus Dalam Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Mu'amar Wicaksono dan Nining Indroyono Soesilo

Assessing Green Financing Opportunities and Challenges in Indonesia's Climate Mitigation and Adaptation Priority Sectors

Lenny Hidayat, Michael Timothy Tasliman, dan Cholisa Amalia

Analisis Permasalahan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2019-2024

Yanuar Arif Wibowo

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 16, NO. 1, JUNI 2025

ISSN: 2086-6313

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vii-xiii
Analisis Transformasi Ekonomi Indonesia Dalam Tiga Dekade Terakhir Dengan Pendekatan <i>Mixed Methods Research</i>	
<i>Rasbin, Siti Jamilah, dan Waryun</i>	1-17
Manfaat Sertifikasi Produk Bagi Daya Saing: Studi Kasus Industri Mikro dan Kecil di Indonesia Tahun 2019	
<i>Tirza Magdalena Simamora dan Khoirunurrofik</i>	19-33
Menimbang Urgensi Formulasi Kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	
<i>Indana Fiersy Tsabita Arsil dan Achmad Lutfi</i>	35-51
Dampak Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kemiskinan di Indonesia	
<i>Muhammad Akbar Ramadhani dan Muhammad Wakhid Musthofa</i>	53-67
<i>Bibliometric Analysis: Green Economy Research on Poverty Eradication</i>	
<i>Atur Rejeki, Ali Akbar, dan Septiana Dwiputrianti.....</i>	69-85
Dampak Otonomi Khusus Dalam Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	
<i>Mu'amar Wicaksono dan Nining Indroyono Soesilo</i>	87-104
<i>Assessing Green Financing Opportunities and Challenges in Indonesia's Climate Mitigation and Adaptation Priority Sectors</i>	
<i>Lenny Hidayat, Michael Timothy Tasliman, dan Cholisa Amalia.....</i>	105-124
Analisis Permasalahan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2019-2024	
<i>Yanuar Arif Wibowo</i>	125-140

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

KATA PENGANTAR

Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEKP) untuk para pembaca dalam JEKP Vol 16. No. 1 Tahun 2025. Terdapat delapan tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan baik dari penulis eksternal maupun internal Pusat Analisis Keparlemenan. Tulisan pertama membahas transformasi ekonomi Indonesia dengan judul “Analisis Transformasi Ekonomi Indonesia dalam Tiga Dekade Terakhir dengan Pendekatan *Mixed Methods Research*”, yang ditulis oleh Rasbin dari Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jenderal DPR RI. Tulisan ini menggunakan pendekatan gabungan (*mixed methods research*). Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui analisis *Input-Output* (IO) untuk mengevaluasi indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan sektor-sektor ekonomi. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui *systematic literature review* (SLR) terhadap berbagai penelitian empiris yang relevan dengan topik penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor makanan, minuman, dan tembakau; serta sektor penawaran listrik, gas, dan air bersih, merupakan *leading sector* dalam tiga dekade terakhir. Sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi unggulan karena kontribusi ekonominya yang signifikan, sedangkan sektor penawaran listrik, gas, dan air bersih berperan penting dalam mendukung efisiensi operasional berbagai industri, termasuk industri makanan dan minuman. Temuan ini memberikan arah strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia guna mencapai target pembangunan jangka panjang. Namun, penelitian ini dibatasi oleh: (1) model IO statis yang tidak menangkap dinamika harga, substitusi input, dan perubahan teknologi; (2) agregasi sektor pangan, minuman, dan tembakau yang menyembunyikan perbedaan subsektor; serta (3) ketidakmampuan IO tradisional dalam memasukkan distribusi manfaat dan eksternalitas lingkungan. Penelitian selanjutnya sebaiknya menerapkan *dynamic* IO atau CGE, mengembangkan IO regional, dan memanfaatkan data firm-level serta big data (IoT, transaksi e-commerce) untuk memetakan *linkage* secara *real-time* dan meningkatkan ketahanan sistem.

Tulisan kedua oleh Tirza Magdalena Simamora dan Khoirunurrofik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, berjudul “Manfaat Sertifikasi Produk bagi Daya Saing: Studi Kasus Industri Mikro dan Kecil di Indonesia Tahun 2019”. Tulisan ini menganalisis dampak penerapan sertifikasi produk yaitu SNI, sertifikat nasional lainnya, sertifikasi internasional, dan merek dagang terhadap peningkatan daya saing industri mikro dan kecil di Indonesia. Daya saing diukur dengan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, dan ekspor. Hasil estimasi Dengan menggunakan data *cross-section* dari Survei IMK Tahun 2019 oleh BPS dan metode regresi OLS dan Logit menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat internasional dan merek dagang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, dan ekspor IMK. Sedangkan sertifikat SNI hanya berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel-variabel kontrol yang digunakan juga berpengaruh dalam meningkatkan daya saing IMK, seperti pendapatan, pengeluaran, jumlah tenaga kerja, intensitas modal, umur usaha, pendidikan pengusaha, rasio tenaga kerja produksi, rasio tenaga kerja usia produktif, akses internet, kemitraan, dan pelatihan.

Masih dari Universitas Indonesia, penulis ketiga Indana Fiersy Tsabita Arsil dan Achmad Lutfi mengambil judul “Menimbang Urgensi Formulasi Kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022”. menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam serta diskusi dengan pembuat kebijakan, pengawas kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pihak swasta. Penelitian ini mengadaptasi kerangka kerja EMMIE oleh Croci, Laycock, & Chainey (2022) dan dimensi-dimensi di dalamnya: dampak, moderator, mekanisme, implementasi, dan ekonomi intervensi; dengan tetap mengacu pada konsep kebijakan publik, formulasi kebijakan, hubungan keuangan pusat dan daerah, dan pajak daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa urgensi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu terletak pada fungsinya sebagai kebijakan pajak daerah yang mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Namun, kurangnya konsensus pemangku kepentingan menjadi tantangan tersendiri, seperti yang ditunjukkan oleh pengajuan gugatan pihak swasta ke Mahkamah Konstitusi.

Tulisan keempat oleh Muhammad Akbar Ramadhani dan Muhammad Wakhid Musthofa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil judul “Dampak Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kemiskinan di Indonesia”. Pendekatan pengujian menerapkan metode *Ordinary Least Square* digunakan penulis untuk menguji pengaruh implementasi Perpres No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terhadap kemiskinan di Indonesia selama tahun 2008 – 2022. Perpres dioperasikan sebagai variabel dummy pada model pertama dan diestimasi berdasarkan indikator yang relevan pada model kedua. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan Perpres berdampak negatif signifikan bagi penurunan kemiskinan di Indonesia. Dengan diberlakukannya Perpres, angka kemiskinan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada saat tidak diberlakukannya Perpres. Pada model kedua, pengeluaran pada aspek kesehatan dan perluasan akses kredit berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan bagi kemiskinan. Sementara itu, pengeluaran di bidang pendidikan dan pengeluaran pada subsidi berdampak negatif dan juga signifikan bagi penurunan kemiskinan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting bagi penentuan rancangan kebijakan dan mengevaluasi Kembali program-program yang telah ada, hal ini perlu dilakukan agar efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan program benar-benar terwujud.

Selanjutnya, Atur Rejeki, Ali Akbar, dan Septiana Dwiputrianti dari Politeknik STIA LAN Bandung menulis “Analisis Bibliometri: Riset Ekonomi Hijau terhadap Pemberantasan Kemiskinan” Melalui analisis bibliometrik terhadap 102 publikasi yang terindeks dalam database Scopus selama periode 2009 hingga 2023, serta bantuan perangkat lunak VOSviewer, dilakukan analisis terhadap tren publikasi per tahun, kontribusi negara dan lembaga pendanaan, penulis kunci, kolaborasi antarpengarang, serta keterkaitan kata kunci. Hasil menunjukkan tren publikasi yang berfluktuasi, dengan puncak signifikan pada tahun 2022. China menjadi negara teratas dalam jumlah publikasi, didukung oleh National Natural Science Foundation of China. Tidak ada penulis tunggal yang dominan, namun Middleton, Gyawali, Allouche, dan Shahbaz menonjol dengan lebih dari 200 sitasi. Lima kluster tematik berhasil diidentifikasi, mencerminkan fokus riset terkini mengenai ekonomi hijau dan kemiskinan. Kluster-kluster ini menawarkan arah yang bernilai bagi studi selanjutnya. Studi ini menekankan pentingnya kebijakan sebagai alat untuk mengintegrasikan strategi ekonomi hijau dalam pengentasan kemiskinan, serta potensi perubahan sistemik melalui kerangka kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti.

Tulisan keenam mengambil topik kemiskinan dan ketimpangan pendapatan disusun oleh Mu’ammur Wicaksono dan Nining Indroyono Soesilo dari FEB Universitas Indonesia dengan judul “Dampak Otonomi Khusus Dalam Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”. Penulis menggunakan data panel 34 provinsi (2002-2019) dengan pendekatan *fixed effect methode*, untuk melihat dampak kebijakan pemberian otonomi khusus terhadap penurunan kemiskinan. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemberian otonomi khusus telah tepat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan, namun terdapat faktor eksternal lainnya yang perlu dibenahi yang memengaruhi kebijakan otonomi khusus sehingga akan berjalan lebih efektif.

Tulisan ketujuh berfokus pada pembiayaan hijau dengan judul “*Assessing Green Financing Opportunities and Challenges In Indonesia’s Climate Mitigation and Adaptation Priority Sectors*” disusun oleh Lenny Hidayat, Michael Timothy Tasliman, dan Cholisa Amalia dari Greenwise Consulting dan PT Surveyor Indonesia. Metode analisis PESTLE dan Model Pencocokan Investasi Berdampak, diterapkan untuk mengevaluasi keselarasan antara tujuan pembiayaan hijau dan ekspektasi investor, sehingga dapat memperkuat identifikasi sumber pendanaan potensial dan kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor energi terbarukan memiliki potensi terbesar untuk menarik investasi hijau karena model bisnis yang mapan dan sumber daya melimpah. Sebaliknya, sektor AFOLU dan ketahanan pangan menghadapi hambatan signifikan, termasuk kompleksitas regulasi, tantangan dalam akuisisi lahan, dan ketidakefisienan dalam sistem distribusi pangan. Studi ini menekankan pentingnya kerangka kebijakan yang terintegrasi dan peningkatan kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk membuka peluang pembiayaan hijau. Dengan mengatasi tantangan ini, Indonesia dapat memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi iklimnya, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan ketahanan di sektor-sektor utama.

Terakhir, tulisan kedelapan menggunakan analisis ekonomi politik dalam penyediaan air bersih, yang ditulis oleh Yanuar Arif Wibowo, Anggota Komisi V DPR RI. Dengan judul “Analisis Ekonomi Politik dalam Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Banyumas (2019-2024)”. Permasalahan air bersih di kabupaten Banyumas masih menjadi masalah besar khususnya terkait ketersediaan air baku sebagai sumber pengelolaan air bersih. Kekeringan yang melanda Banyumas, Jawa Tengah, menjadi tantangan serius.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa kekeringan di bagian selatan Banyumas disebabkan oleh dua faktor utama: kondisi geografis dan iklim yang rawan kekeringan, serta faktor antropogenik, khususnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur air seperti embung. Pembangunan embung yang tidak berbasis riset dan tidak melibatkan pemangku kepentingan serta ahli tata ruang mengakibatkan embung lebih menguntungkan sektor pariwisata daripada sektor pertanian. Sektor agraria yang seharusnya mendapat prioritas dalam hal pengairan justru terabaikan, memperburuk ketimpangan antara sektor-sektor yang ada. Penanggulangan kekeringan di Banyumas telah melibatkan berbagai aktor, termasuk BPBD, BAZNAS, dan PJ Bupati, dalam distribusi air bersih dan bantuan kemanusiaan, namun upaya tersebut masih belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih holistik, berbasis riset, dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam merancang infrastruktur yang dapat mendukung air baku untuk keperluan air bersih, khususnya dalam pengelolaan air yang efektif selama musim kemarau. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan air bersih di kabupaten Banyumas.

Demikian kedelapam tulisan terpilih yang sudah melalui proses panjang setelah mendapat masukan dan pertimbangan, baik dari Mitra Bestari maupun Editor. Beragam topik yang dibahas semoga dapat memberikan informasi dan sedikit-banyak menambah pengetahuan serta wawasan para pembaca. Harapan kami kedelapan tulisan di atas bermanfaat bukan hanya bagi para pembaca, tetapi juga dapat menjadi pertimbangan bagi Anggota DPR RI dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, Juni 2025

Redaksi

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 16, NO. 1, JUNI 2025

ISSN: 2086-6313

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi.

Rasbin, Siti Jamilah, dan Waryun (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama dan Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Analisis Transformasi Ekonomi Indonesia Dalam Tiga Dekade Terakhir Dengan Pendekatan *Mixed Methods Research*

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, hal. 1-17

Abstrak

Transformasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk keluar dari *middle income trap* dan mencapai status negara maju pada 2045. Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah melebihi 6%, padahal pertumbuhan ekonomi sebesar 6–7% secara berkelanjutan diperlukan untuk keluar dari jebakan ini. Penelitian ini menganalisis transformasi ekonomi Indonesia dalam tiga dekade terakhir dengan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan tinggi sebagai sektor unggulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (*mixed methods research*). Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui analisis Input-Output (IO) untuk mengevaluasi kedua indeks tersebut, sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan *systematic literature review* (SLR) terhadap studi-studi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor makanan, minuman, dan tembakau serta sektor penawaran listrik, gas, dan air bersih merupakan *leading sectors* dalam tiga dekade terakhir. Sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi unggulan karena kontribusi ekonominya yang signifikan, sedangkan sektor penawaran listrik, gas, dan air bersih berperan penting dalam mendukung efisiensi operasional berbagai industri, termasuk industri makanan dan minuman. Temuan ini memberikan arah strategis untuk percepatan transformasi ekonomi Indonesia. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain: (1) penggunaan model IO statis yang tidak menangkap dinamika harga, substitusi input, dan perubahan teknologi; (2) agregasi sektor makanan, minuman, dan tembakau yang menghilangkan perbedaan subsektor; dan (3) ketidakmampuan IO tradisional dalam memasukkan distribusi manfaat dan eksternalitas lingkungan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan IO dinamik dan/atau mengembangkan IO regional untuk analisis keterkaitan antar sektor yang lebih dinamis dan presisi.

Kata kunci: transformasi ekonomi; *middle income trap*; *pendekatan gabungan*; analisis *input-output*; sektor unggulan.

Tirza Magdalena Simamora dan Khoirunurrofik (Universitas Indonesia)

Manfaat Sertifikasi Produk Bagi Daya Saing: Studi Kasus Industri Mikro dan Kecil di Indonesia Tahun 2019

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, hal. 19-33

Abstrak

Daya saing industri merupakan permasalahan klasik bagi industri pengolahan Indonesia khususnya sektor mikro dan kecil. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing adalah penerapan sertifikasi produk. Dengan menggunakan data *cross-section* dari Survei IMK Tahun 2019 oleh BPS dan metode regresi OLS dan Logit, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan sertifikasi produk yaitu SNI, sertifikat nasional lainnya, sertifikasi internasional, dan merek dagang terhadap peningkatan daya saing industri mikro dan kecil di Indonesia. Daya saing diukur dengan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, dan ekspor. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat internasional dan merek dagang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, dan ekspor IMK. Sedangkan sertifikat SNI hanya berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel-variabel kontrol yang digunakan juga berpengaruh dalam meningkatkan daya saing IMK, seperti pendapatan, pengeluaran, jumlah tenaga kerja, intensitas modal, umur usaha, pendidikan pengusaha, rasio tenaga kerja produksi, rasio tenaga kerja usia produktif, akses internet, kemitraan, dan pelatihan. Dengan demikian, pemerintah dapat melanjutkan dan mengintegrasikan program fasilitasi sertifikasi produk bagi IMK sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing IMK.

Kata kunci: daya saing; nilai tambah; produktivitas tenaga kerja; ekspor; sertifikasi produk; industri mikro dan kecil.

Indana Fiersy Tsabita Arsil dan Achmad Lutfi (Universitas Indonesia)

Menimbang Urgensi Formulasi Kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, hal. 35-51

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dan pentingnya kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi dan pertanyaan mengenai urgensinya dari pihak swasta yang terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam serta diskusi dengan pembuat kebijakan, pengawas kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pihak swasta. Penelitian ini mengadaptasi kerangka kerja EMMIE oleh Croci, Laycock, & Chainey dan dimensi-dimensi di dalamnya: dampak, moderator, mekanisme, implementasi, dan ekonomi intervensi; dengan tetap mengacu pada konsep kebijakan publik, formulasi kebijakan, hubungan keuangan pusat dan daerah, dan pajak daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa urgensi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu terletak pada fungsinya sebagai kebijakan pajak daerah yang mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Namun, kurangnya konsensus pemangku kepentingan menjadi tantangan tersendiri, seperti yang ditunjukkan oleh pengajuan gugatan pihak swasta ke Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, DPR RI perlu melibatkan pihak swasta, sebagai pemangku kepentingan, di dalam formulasi kebijakan pajak untuk menciptakan iklim ekonomi yang aman dan maju.

Kata kunci: pajak daerah; formulasi kebijakan; urgensi

Muhammad Akbar Ramadhani dan Muhammad Wakhid Musthofa (UIN Sunan Kalijaga)

Dampak Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kemiskinan di Indonesia

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, hal. 53-67

Abstrak

Kemiskinan menjadi masalah penting untuk ditangani karena eksistensinya bertentangan dengan amanat konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum. Artikel ini bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi Perpres No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terhadap kemiskinan di Indonesia selama tahun 2008 – 2022. Pendekatan pengujian menerapkan metode *Ordinary Least Square*, Perpres dioperasikan sebagai variabel dummy pada model pertama dan diestimasi berdasarkan indikator yang relevan pada model kedua. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan Perpres berdampak negatif signifikan bagi penurunan kemiskinan di Indonesia. Dengan diberlakukannya Perpres, angka kemiskinan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada saat tidak diberlakukannya Perpres. Pada model kedua, pengeluaran pada aspek kesehatan dan perluasan akses kredit berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan bagi kemiskinan. Sementara itu, pengeluaran di bidang pendidikan dan pengeluaran pada subsidi berdampak negatif dan juga signifikan bagi penurunan kemiskinan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting bagi penentuan rancangan kebijakan dan mengevaluasi kembali program-program yang telah ada, hal ini perlu dilakukan agar efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan program benar-benar terwujud.

Kata kunci: kemiskinan; peraturan presiden; percepatan penanggulangan kemiskinan

Atur Rejeki, Ali Akbar, dan Septiana Dwiputrianti (Politeknik STIA LAN Bandung)

Analisis Bibliometri: Riset Ekonomi Hijau Terhadap Pemberantasan Kemiskinan

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, hal. 69-85

Abstrak

Ekonomi hijau merupakan pendekatan yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial ke dalam kebijakan ekonomi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sejak 2009, diskusi global mengenai topik ini semakin memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok rentan. Studi ini bertujuan untuk menyajikan peta pengetahuan yang komprehensif mengenai keterkaitan antara ekonomi hijau dan pengentasan kemiskinan. Melalui analisis bibliometrik terhadap 102 publikasi yang terindeks dalam database Scopus selama periode 2009 hingga 2023, serta bantuan perangkat lunak VOSviewer, dilakukan analisis terhadap tren publikasi per tahun, kontribusi negara dan lembaga pendanaan, penulis kunci, kolaborasi antarpengarang, serta keterkaitan kata kunci. Hasil menunjukkan tren publikasi yang berfluktuasi, dengan puncak signifikan pada tahun 2022. China menjadi negara teratas dalam jumlah publikasi, didukung oleh National Natural Science Foundation of China. Tidak ada penulis tunggal yang dominan, namun Middleton, Gyawali, Allouche, dan Shahbaz menonjol dengan lebih dari 200 sitasi. Lima kluster tematik berhasil diidentifikasi, mencerminkan fokus riset terkini mengenai ekonomi hijau dan kemiskinan. Kluster-kluster ini menawarkan arah yang bernilai bagi studi selanjutnya. Studi ini menekankan pentingnya kebijakan sebagai alat untuk mengintegrasikan strategi ekonomi hijau dalam pengentasan kemiskinan, serta potensi perubahan sistemik melalui kerangka kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti.

Kata kunci: ekonomi hijau; kemiskinan; analisis bibliometrik

Mu'amar Wicaksono dan Nining Indroyono Soesilo (Universitas Indonesia)

Dampak Otonomi Khusus Dalam Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, hal. 87-104

Abstrak

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah-masalah utama yang dihadapi di dunia baik bagi negara maju dan berkembang khususnya di Indonesia. Keduanya menjadi tujuan utama dari aksi global yang perlu dibenahi sebagaimana diamanatkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui tema “Mengubah Dunia Ketiga: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Dalam rangka mendukung SDGs, Indonesia secara konsisten telah menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui otonomi untuk menciptakan pembangunan sosial ekonomi secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara khusus, Indonesia juga menerapkan otonomi khusus yang diberikan kepada beberapa daerah yang memperoleh otonomi khusus berikut tambahan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari otonomi khusus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau efektivitas dari penerapan kebijakan otonomi khusus terhadap upaya penurunan kemiskinan serta terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data panel 34 provinsi (2002-2019) dan pendekatan *fixed effect methode*, digunakan untuk melihat efektivitas kebijakan pemberian otonomi khusus terhadap penurunan kemiskinan. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemberian otonomi khusus telah tepat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan, namun terdapat faktor eksternal lainnya yang perlu dibenahi yang memengaruhi kebijakan otonomi khusus sehingga akan berjalan lebih efektif.

Kata kunci: otonomi khusus; kemiskinan; ketimpangan pendapatan

Lenny Hidayat, Michael Timothy Tasliman, dan Cholisa Amalia (Greenwise Consulting dan PT Surveyor Indonesia)

Menilai Peluang dan Tantangan Pembiayaan Hijau di Sektor Prioritas Mitigasi dan Adaptasi Iklim di Indonesia

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, hal. 105-124

Abstrak

Ancaman perubahan iklim semakin nyata dirasakan oleh Indonesia. Beberapa dampak termasuk banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut yang mempengaruhi aktivitas perekonomian, sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Studi ini melihat peluang dan tantangan dalam mengakses pembiayaan hijau di empat sektor prioritas: air dan air limbah, energi terbarukan, pertanian, pangan dan penggunaan lahan (AFOLU). Dengan menggunakan metode kualitatif seperti tinjauan pustaka, wawancara, dan diskusi kelompok terarah, penelitian ini mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat utama di dimensi politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan melalui analisis PESTLE. Selain itu, Model Pencocokan Investasi Berdampak diterapkan untuk mengevaluasi keselarasan antara tujuan pembiayaan hijau dan ekspektasi investor, sehingga dapat memperkuat identifikasi sumber pendanaan potensial dan kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor energi terbarukan memiliki potensi terbesar untuk menarik investasi hijau karena model bisnis yang mapan dan sumber daya melimpah. Sebaliknya, sektor AFOLU dan ketahanan pangan menghadapi hambatan signifikan, termasuk kompleksitas regulasi, tantangan dalam akuisisi lahan, dan ketidakefisienan dalam sistem distribusi pangan. Studi ini menekankan pentingnya kerangka kebijakan yang terintegrasi dan peningkatan kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk membuka peluang pembiayaan hijau. Dengan mengatasi tantangan ini, Indonesia dapat memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi iklimnya, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan ketahanan di sektor-sektor utama.

Kata kunci: pembiayaan hijau; mitigasi iklim; adaptasi iklim; sektor prioritas

Yanuar Arif Wibowo (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

Analisis Permasalahan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2019-2024

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, hal. 125-140

Abstrak

Kekeringan yang melanda Kabupaten Banyumas periode 2019–2024 menimbulkan krisis penyediaan air bersih, terutama di wilayah selatan yang rentan secara geografis akibat jarak dari sumber mata air, kedekatan dengan wilayah pesisir, dan pengaruh fenomena iklim seperti El Niño. Perubahan iklim global, degradasi lingkungan, dan kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan konservasi sumber daya air memperburuk kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan memetakan permasalahan kekeringan di Banyumas, menilai efektivitas infrastruktur buatan seperti embung, serta menganalisis dinamika kebijakan dan ketimpangan sektoral dalam pengelolaan sumber daya air. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara dengan pejabat desa, Dinas Perumahan dan Permukiman, BPBD, serta masyarakat terdampak, yang dilengkapi studi literatur berbasis perspektif ekonomi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi penanggulangan yang dilakukan BPBD, Pemerintah Daerah, dan BAZNAS melalui distribusi air bersih (*dropping*) hanya memberikan solusi jangka pendek dan belum menyentuh akar permasalahan. Pembangunan embung yang seharusnya menjadi cadangan air justru lebih diarahkan untuk kepentingan estetika dan pariwisata, sehingga mengabaikan sektor agraria yang krusial bagi ketahanan pangan dan air. Ketimpangan sektoral ini memperlihatkan dominasi kepentingan politik-ekonomi jangka pendek dibandingkan kebutuhan dasar masyarakat. Kesimpulannya, penanggulangan kekeringan di Banyumas memerlukan kebijakan berbasis riset, perencanaan tata ruang yang tepat, serta sinergi eksekutif-legislatif untuk memastikan infrastruktur air bersih dibangun sesuai prioritas kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung ketahanan air jangka panjang.

Kata kunci: air bersih; infrastruktur air; kebijakan daerah; ekonomi politik

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 16, NO. 1, JUNI 2025

ISSN: 2086-6313

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing.
These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Rasbin, Siti Jamilah, dan Waryun (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama dan Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Analysis of Indonesia's Economic Transformation in The Last Three Decades Using a Mixed Methods Research Approach

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, pp. 1-17

Abstract

Economic transformation has become an urgent necessity for Indonesia to escape the middle-income trap and achieve developed country status by 2045. Over the past decade, Indonesia's economic growth has never exceeded 6%, whereas sustained growth of 6–7% is required to break free from the trap. This study analyzes Indonesia's economic transformation over the past three decades by identifying economic sectors with high dispersion and sensitivity indices as leading sectors. A mixed methods research approach is employed. The quantitative approach uses Input-Output (IO) analysis to evaluate these indices, while the qualitative approach involves a systematic literature review (SLR) of relevant empirical studies. The analysis reveals that the food, beverages, and tobacco sector, along with the electricity, gas, and clean water supply sector, have served as leading sectors over the last thirty years. The food, beverages, and tobacco sector is considered prominent due to its significant economic contribution, whereas the electricity, gas, and clean water sector plays a vital role in enhancing operational efficiency across various industries, including food and beverage. These findings offer strategic direction for accelerating Indonesia's economic transformation. However, the study has several limitations, including: (1) the use of a static IO model, which fails to capture price dynamics, input substitution, and technological changes; (2) the aggregation of the food, beverages, and tobacco sector, which conceals subsector differences; and (3) the traditional IO model's inability to incorporate benefit distribution and environmental externalities. Future research is recommended to adopt dynamic IO and/or develop regional IO models to enable more dynamic and precise intersectoral linkage analysis.

Keywords: *economic transformation; middle income trap; mixed methods research; input-output analysis; leading sectors*

Tirza Magdalena Simamora dan Khoirunurrofik (Universitas Indonesia)

Benefits of Product Certification for Competitiveness: Case Study of Micro and Small Industries in Indonesia, 2019

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, pp. 19-33

Abstract

Industrial competitiveness is a long-standing issue for Indonesia's manufacturing economy, particularly in the micro and small sectors. Product certification is one method for increasing competitiveness. This study uses cross-sectional data from BPS's Survey IMK 2019 and OLS and Logit regression methods to examine the impact of product certification, specifically SNI, other national certificates, international certifications, and trademarks, on the competitiveness of micro and small industries in Indonesia. Income, labor productivity, and exports are all indicators of competitiveness. The findings suggest that owning international certifications and trademarks improves value added, labor productivity, and IMK exports. While the SNI certificate just influences labor productivity. This study also discovered that the control variables used had an effect on increasing the competitiveness of IMK, such as income, expenses, number of workers, capital intensity, age of business, entrepreneur education, ratio of production workforce, ratio of productive age workforce, internet access, partnerships, and training. As a result, the government can continue and incorporate certificate facilitation for IMK to increase its competitiveness.

Keywords: competitiveness, value added, labor productivity, export, product certification, micro and small industry.

Indana Fiersy Tsabita Arsil dan Achmad Lutfi (Universitas Indonesia)

Weighing the Urgency of The Policy Formulation of Certain Goods and Services Tax Policy in Law Number 1 of 2022

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, pp. 35-51

Abstract

This research aims to determine the importance and the urgency in the process of formulating the Certain Goods and Services Tax policy which was introduced by Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations. This policy raised disagreements and questionings of its importance from the private sector affected. This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection methods through literature study and in-depth interviews and discussions with policy makers, policy supervisors, policy implementers, and the private sector. The research adapted the EMMIE framework by Croci, Laycock, & Chainey and the dimensions within it: the effect, the moderator, the mechanism, the implementation, and the economics of an intervention; while referring to the concept of public policy, policy formulation, central and regional financial relations, and local tax. The results of the analysis show that the urgency in the Certain Goods and Services Tax policy lie in its function as a regional tax policy that supports the regional governments' authority in managing regional revenues in hopes that it will then reduce regional governments' dependency on central government's transfer. However, the lack of stakeholder consensus challenges its urgency as shown by the private sector's submission to the constitutional court. Furthermore, The Indonesian House of Representatives needs to involve the private sector, with their place as stakeholders, in the formulation of tax policies to create a secure and advanced economic climate.

Keywords: local taxes; policy formulation; urgency

Muhammad Akbar Ramadhani dan Muhammad Wakhid Musthofa (UIN Sunan Kalijaga)

The Impact of Presidential Regulation Number 15 of 2010 on the Acceleration of Poverty Alleviation on Poverty in Indonesia

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, pp. 53-67

Abstract

Poverty is a crucial issue that needs to be addressed, as its existence contradicts the constitutional mandate and the aspirations of the Indonesian nation to promote general welfare. This article aims to examine the impact of the implementation of Presidential Regulation No. 15 of 2010 on the Acceleration of Poverty Alleviation on poverty in Indonesia from 2008 to 2022. The analysis employs the Ordinary Least Squares (OLS) method, with the regulation operationalized as a dummy variable in the first model and estimated based on relevant indicators in the second model. The research findings indicate that the enactment of the regulation has a significant negative effect on reducing poverty in Indonesia. With the regulation in place, poverty levels are lower compared to conditions when the regulation was not enforced. In the second model, expenditures on healthcare and the expansion of credit access have a negative but insignificant effect on poverty. Meanwhile, expenditures in education and subsidies have a negative and significant impact on reducing poverty. The Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) plays a vital role in designing policies and reevaluating existing programs. This process is essential to ensure the effectiveness and efficiency of program implementation.

Keywords: poverty; presidential regulation; acceleration of poverty alleviation

Atur Rejeki, Ali Akbar, dan Septiana Dwiputrianti (Politeknik STIA LAN Bandung)

Bibliometric Analysis: Green Economy Research on Poverty Eradication

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, pp. 69-85

Abstract

The green economy is an approach that integrates environmental sustainability and social equity into economic policies to support sustainable development. Since 2009, global discussions on this topic have increasingly considered the needs of poor and vulnerable populations. This study aims to provide a comprehensive knowledge map connecting the green economy with poverty alleviation. Using bibliometric analysis, 102 publications indexed in the Scopus database from 2009 to 2023 were examined with the support of VOSviewer software. The analysis includes annual publication trends, contributing countries and funding institutions, key authors, author collaborations, and keyword co-occurrences. Findings reveal a fluctuating publication trend over the years, with a notable peak in 2022. China leads in the number of publications, largely supported by the National Natural Science Foundation of China. No single author dominates the field, although Middleton, Gyawali, Allouche, and Shahbaz stand out for having over 200 citations each. Five thematic clusters were identified, reflecting current research priorities related to the green economy and poverty. These clusters offer meaningful directions for future studies. The study underscores the importance of policy as a tool to integrate green economic strategies with poverty reduction efforts, highlighting the potential for systemic change through evidence-based, inclusive policy frameworks.

Keywords: green economy; poverty; bibliometric analysis

Mu'amar Wicaksono dan Nining Indroyono Soesilo (Universitas Indonesia)

The Effect of Special Autonomy on Poverty Alleviation and Income Inequality in Indonesia

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, pp. 87-104

Abstract

Poverty and income inequality are the main problems faced in the world for both developed and developing countries, especially in Indonesia. Both are the main goals of global action that need to be addressed as mandated in the Sustainable Development Goals (SDGs) through the theme "Changing the Third World: The 2030 Agenda for Sustainable Development". In order to support SDGs, Indonesia has consistently implemented decentralization through regional autonomy in the management of its government system. The authority between the central government and regional government is divided through autonomy to create sustainable socio-economic development for the creation of a fair and prosperous social life. Indonesia had implemented special autonomy which was granted to several regions receiving special autonomy along with additional transfer funds from the central government. This study aims to assess the effectiveness of autonomy policy in poverty alleviation and reducing income inequality using fixed effect method with panel data from 34 provinces (2002-2019). This study proves that the special autonomy policy is appropriate in the context of poverty alleviation and reducing income inequality, however there are other external factors that need to be addressed that affect special autonomy policy so that it will run more effectively.

Keywords: special autonomy; poverty; income inequality

Lenny Hidayat, Michael Timothy Tasliman, dan Cholisa Amalia (Greenwise Consulting dan PT Surveyor Indonesia)

Assessing Green Financing Opportunities and Challenges in Indonesia's Climate Mitigation and Adaptation Priority Sectors

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, pp. 105-124

Abstract

Indonesia faces significant and unavoidable challenges due to climate change, including flooding, droughts, and sea-level rise, which disproportionately affect vulnerable coastal communities. This study assesses the opportunities and barriers for accessing green financing across four priority sectors: water and wastewater, renewable energy, Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU), and food security. Utilizing qualitative methods such as desk reviews, in-depth interviews, and focus group discussions, the research identifies critical drivers and obstacles across political, economic, social, technological, legal, and environmental dimensions through the PESTLE analysis framework. Additionally, an Impact Investment Matchmaking Model is applied to evaluate alignment between green financing goals and investor expectations, enhancing the identification of potential financing sources and partnerships. The findings reveal that the renewable energy sector has the greatest potential for attracting green investment due to its established business models and abundant resources. Conversely, the AFOLU and food sectors encounter significant barriers, including regulatory complexities, land acquisition challenges, and inefficiencies in food distribution systems. This study underscores the necessity of integrated policy frameworks and enhanced public-private partnerships to unlock green financing opportunities. By addressing these challenges, Indonesia can strengthen its climate mitigation and adaptation efforts, promoting sustainable development and resilience in its key sectors.

Keywords: green financing; climate mitigation; climate adaptation; priority sectors

Yanuar Arif Wibowo (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

Analysis of Clean Water Supply Challenges in Banyumas Regency Period 2019-2024

JEKP, Vol. 16, No. 1, Juni 2025, pp. 125-140

Abstract

The drought that struck Banyumas Regency during 2019–2024 has triggered a clean water crisis, particularly in the southern region, which is geographically vulnerable due to its distance from natural springs, proximity to coastal areas, and the influence of climate phenomena such as El Niño. Global climate change, environmental degradation, and development policies that overlook water resource conservation have further exacerbated this condition. This study aims to map drought-related problems in Banyumas, assess the effectiveness of artificial infrastructure such as reservoirs (embung), and analyze policy dynamics and sectoral disparities in water resource management. The research employs a qualitative descriptive approach through field observations, interviews with village officials, the Housing and Settlement Agency, the Regional Disaster Management Agency (BPBD), and affected communities, complemented by literature studies grounded in a political economy perspective. The findings reveal that interventions by BPBD, the local government, and BAZNAS through clean water distribution (dropping) provide only short-term relief without addressing the root causes. The construction of reservoirs, which should serve as water reserves, has been primarily directed toward aesthetic and tourism purposes, neglecting the agricultural sector that is crucial for food and water security. This sectoral disparity reflects the dominance of short-term political–economic interests over the fundamental needs of the community. In conclusion, drought mitigation in Banyumas requires research-based policies, proper spatial planning, and synergy between the executive and legislative bodies to ensure that clean water infrastructure is built according to priority needs and effectively supports long-term water security.

Keywords: clean water; water infrastructure; local policy; political economy

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Analisis Transformasi Ekonomi Indonesia Dalam Tiga Dekade Terakhir Dengan Pendekatan *Mixed Methods Research*

(Analysis of Indonesia's Economic Transformation in The Last Three Decades Using a Mixed Methods Research Approach)

Rasbin¹, Siti Jamilah², dan Waryun³

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama, Jl. H.M. Joyomartono, Bekasi, Jawa Barat;
e-mail korespondensi: rasbinss7@gmail.com*

²³*Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta,
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten;
e-mail: jamilah17.febumj@gmail.com; waryunayun@gmail.com*

Naskah diterima: 3 Januari 2025

Naskah direvisi: 13 Juni 2025

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2025

Abstract

Economic transformation has become an urgent necessity for Indonesia to escape the middle-income trap and achieve developed country status by 2045. Over the past decade, Indonesia's economic growth has never exceeded 6%, whereas sustained growth of 6–7% is required to break free from the trap. This study analyzes Indonesia's economic transformation over the past three decades by identifying economic sectors with high dispersion and sensitivity indices as leading sectors. A mixed methods research approach is employed. The quantitative approach uses Input-Output (IO) analysis to evaluate these indices, while the qualitative approach involves a systematic literature review (SLR) of relevant empirical studies. The analysis reveals that the food, beverages, and tobacco sector, along with the electricity, gas, and clean water supply sector, have served as leading sectors over the last thirty years. The food, beverages, and tobacco sector is considered prominent due to its significant economic contribution, whereas the electricity, gas, and clean water sector plays a vital role in enhancing operational efficiency across various industries, including food and beverage. These findings offer strategic direction for accelerating Indonesia's economic transformation. However, the study has several limitations, including: (1) the use of a static IO model, which fails to capture price dynamics, input substitution, and technological changes; (2) the aggregation of the food, beverages, and tobacco sector, which conceals subsector differences; and (3) the traditional IO model's inability to incorporate benefit distribution and environmental externalities. Future research is recommended to adopt dynamic IO and/or develop regional IO models to enable more dynamic and precise intersectoral linkage analysis.

Keywords: economic transformation; middle income trap; mixed methods research; input-output analysis; leading sectors

Abstrak

Transformasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap dan mencapai status negara maju pada 2045. Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah melebihi 6%, padahal pertumbuhan ekonomi sebesar 6–7% secara berkelanjutan diperlukan untuk keluar dari jebakan ini. Penelitian ini menganalisis transformasi ekonomi Indonesia dalam tiga dekade terakhir dengan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan tinggi sebagai sektor unggulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (*mixed methods research*). Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui analisis Input-Output (IO) untuk mengevaluasi kedua indeks tersebut, sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan *systematic literature review* (SLR) terhadap studi-studi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor makanan, minuman, dan tembakau serta sektor penawaran listrik, gas, dan air bersih merupakan *leading sectors* dalam tiga dekade terakhir. Sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi unggulan karena kontribusi ekonominya yang signifikan, sedangkan sektor penawaran listrik, gas, dan air bersih berperan penting dalam mendukung efisiensi operasional berbagai industri, termasuk industri makanan dan minuman. Temuan ini memberikan arah strategis untuk percepatan transformasi ekonomi Indonesia. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain: (1) penggunaan model IO statis yang tidak menangkap dinamika harga, substitusi input, dan perubahan teknologi; (2) agregasi sektor makanan, minuman, dan tembakau yang menghilangkan perbedaan subsektor; dan (3) ketidakmampuan IO tradisional dalam memasukkan distribusi manfaat dan eksternalitas lingkungan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan IO dinamik dan/atau mengembangkan IO regional untuk analisis keterkaitan antar sektor yang lebih dinamis dan presisi.

Kata kunci: transformasi ekonomi; *middle income trap*; pendekatan gabungan; analisis input-output; sektor unggulan

PENDAHULUAN

Indikator ekonomi makro Indonesia pada tahun 2023 masih menunjukkan kinerja yang solid. Salah satu indikator utama yang mencerminkan hal tersebut adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam satu dekade terakhir, perekonomian Indonesia secara umum mengalami tren pertumbuhan positif, kecuali pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi sebesar -2,07% (*year-on-year*, *yoy*). Meskipun demikian, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia

tidak pernah mencapai angka 6,0% sepanjang periode tersebut. Bahkan, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tercatat hanya sebesar 5,05% (yoy).

Menurut ekonom senior Raden Pardede, salah satu prasyarat agar Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*) adalah mencatatkan pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 6-7%. Pertumbuhan pada tingkat ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita hingga mencapai US\$30.000—angka yang dianggap sebagai ambang batas untuk keluar dari *middle income trap*. Namun, hingga Juli 2023, PNB per kapita Indonesia hanya mencapai US\$4.580, atau sekitar satu per tujuh dari nilai yang disyaratkan (Rasbin, 2024). Berdasarkan data ini, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam upaya keluar dari *middle income trap*. Pertumbuhan ekonomi yang moderat, meskipun stabil, belum cukup untuk mendorong transformasi struktural yang diperlukan guna meningkatkan daya saing ekonomi dan pendapatan nasional secara substansial.

Indikator lain yang menunjukkan kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2023 adalah ekspor dan neraca perdagangan. Data BPS mencatat bahwa nilai ekspor Indonesia mencapai US\$258,82 miliar sepanjang tahun 2023. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impor pada periode yang sama, yaitu sebesar US\$221,89 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia (NPI) tetap mencatatkan surplus sebesar US\$36,93 miliar sepanjang tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Namun, tren kinerja ekspor dan surplus neraca perdagangan menunjukkan penurunan hingga tahun 2023.

Bank Dunia (2024) melaporkan bahwa sektor industri manufaktur, sebagai kontributor utama ekspor Indonesia, masih didominasi oleh produk dengan kategori teknologi rendah atau produk berbasis ekstraksi sumber daya alam. Produk-produk ini umumnya memiliki nilai tambah (*value added*, VA) yang rendah serta kontribusi yang terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Kondisi ini mencerminkan kurangnya diversifikasi dan transformasi struktural dalam sektor industri nasional. Apabila kondisi ini tidak mengalami perubahan signifikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit memenuhi prasyarat untuk keluar dari *middle income trap*. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi berkualitas—yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan—akan sulit tercapai (Daryanto, 2017). Fakta-fakta ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai status negara maju dengan pendapatan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Dibutuhkan upaya transformasi struktural yang terencana untuk mendorong diversifikasi ekspor, meningkatkan nilai tambah produk manufaktur, dan mengoptimalkan kontribusi sektor industri terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Transformasi ekonomi menjadi kunci strategis bagi Indonesia untuk keluar dari *middle income trap*. Transformasi ekonomi merupakan proses pemindahan sumber daya, terutama sumber daya manusia (SDM), dari sektor-sektor dengan produktivitas rendah ke sektor-sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi melalui perubahan struktural yang berkelanjutan. Proses ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (Dahuri, 2023). Selain itu, transformasi ekonomi juga bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian dari yang sebelumnya berbasis pada eksploitasi sumber daya alam dan komoditas menjadi ekonomi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi (Sugiarto, 2019). Transformasi semacam ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional serta menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi pembangunan jangka panjang. Proses ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Meskipun Bank Dunia telah menetapkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle income*) sejak awal Juli 2023, transformasi ekonomi tetap menjadi agenda strategis yang harus dilanjutkan (Kuncoro, 2023). Transformasi ini penting agar Indonesia dapat mencapai target pembangunan nasional dan berhasil keluar dari *middle income trap*. Namun demikian, dinamika geopolitik global, seperti konflik Rusia-Ukraina, perang Hamas-Israel, serta ketegangan di wilayah Laut Merah, terus memengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Selain itu, dampak pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku masyarakat serta mengganggu rantai produksi global, yang pada akhirnya memberikan tekanan pada perekonomian domestik Indonesia. Tantangan-tantangan ini menuntut respons kebijakan yang adaptif dan inovatif untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan daya saing global Indonesia.

Sejumlah studi empiris telah menganalisis transformasi ekonomi di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Aggarwal (2021) melakukan analisis komprehensif terkait proses transformasi struktural di beberapa negara berkembang di Asia. Studi ini menggunakan metode *shift-share analysis* (SSA) untuk mengevaluasi kontribusi pergeseran antarsektoral dan peningkatan produktivitas dalam sektor tertentu terhadap pertumbuhan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Zhao et al. (2020) juga menyajikan analisis empiris komprehensif mengenai perlambatan ekonomi, dengan pendekatan sistem persamaan simultan untuk mengeksplorasi hubungan antara pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan proporsi konsumsi terhadap total *output* ekonomi. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran penting investasi asing langsung (*foreign direct investment*, FDI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan alat analisis SSA dan *Growth Ratio Model* (GRM). Dengan mengintegrasikan hasil kuantitatif dan dinamika ekonomi yang lebih luas, Zhao et al. (2020) menekankan perlunya pendekatan analitis yang beragam untuk memahami kompleksitas transformasi ekonomi di negara-negara berpendapatan menengah. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi negara seperti Indonesia yang sedang dalam proses transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Studi Rizani (2020) melakukan analisis komprehensif terhadap sektor-sektor unggulan pembangunan ekonomi di Kota Malang dengan menggunakan berbagai alat analisis, termasuk *Location Quotient* (LQ), SSA, dan GRM. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi kekuatan ekonomi regional sekaligus memberikan masukan strategis untuk perencanaan transformasi ekonomi. Dengan mengintegrasikan kerangka analisis tersebut, studi ini memberikan wawasan penting mengenai kinerja sektoral dan potensi pertumbuhan ekonomi, sehingga berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika ekonomi di wilayah tertentu.

Dengan menggunakan LQ dan SSA, studi Abadi et al. (2024) mengidentifikasi sektor-sektor utama seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor dengan potensi ekonomi yang signifikan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kinerja positif sektor pendidikan dan kesehatan dalam mendukung pembangunan strategis jangka panjang. Studi Mukhlis et al. (2018) mengeksplorasi hubungan antara aglomerasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Dengan memanfaatkan alat analisis LQ dan SSA, penelitian ini mengidentifikasi kekuatan ekonomi daerah serta pergeseran sektoral yang signifikan. Mukhlis et al. (2018) menemukan bahwa aglomerasi berperan penting dalam memengaruhi transformasi ekonomi sekaligus memperluas kesenjangan pendapatan, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi daerah dan dampaknya terhadap pembangunan.

Penelitian lain oleh Palumpun et al. (2017) menggunakan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) dan SSA untuk menganalisis transformasi ekonomi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Studi ini memberikan wawasan berharga mengenai dinamika sektoral di wilayah dengan karakteristik ekonomi yang unik. Selain itu, Andriansyah et al. (2023) memanfaatkan metode SSA untuk mengkaji transformasi struktural di Indonesia, memberikan pandangan holistik mengenai kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi Kim et al. (2020) melengkapi perspektif ini dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif untuk memahami transformasi ekonomi dalam konteks sosial dan kebijakan. Temuan-temuan tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika transformasi ekonomi di berbagai konteks regional, serta implikasinya terhadap perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi.

Meskipun studi-studi tersebut—seperti yang dilakukan oleh Rizani (2020), Zhao et al. (2020), Aggarwal (2021), hingga Abadi et al. (2024)—memberikan kontribusi penting dalam menganalisis transformasi ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional, sebagian besar di antaranya masih menggunakan pendekatan penelitian tunggal, yaitu hanya kuantitatif atau kualitatif. Selain itu, sebagian besar studi berfokus pada sektor atau wilayah tertentu tanpa mengaitkan secara integratif antara dinamika sektoral dan kebijakan nasional secara longitudinal. Akibatnya, pemahaman mengenai transformasi ekonomi bersifat parsial dan belum menyeluruh. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) dalam bentuk kebutuhan akan pendekatan yang mampu menggabungkan kekuatan analisis kuantitatif dan kedalaman pemahaman kualitatif. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengadopsi pendekatan *mixed methods research* (MMR) yang memungkinkan analisis komprehensif terhadap proses transformasi ekonomi Indonesia selama tiga dekade terakhir.

Pendekatan MMR adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ini sebagai kebaruan dari studi-studi sebelumnya terkait transformasi ekonomi di Indonesia.

Pendekatan MMR menawarkan keunggulan dalam menggabungkan kekuatan analisis kuantitatif—yang mampu mengidentifikasi pola dan tren ekonomi secara luas—dengan pendekatan kualitatif yang memberikan pemahaman kontekstual dan mendalam terhadap dinamika sosial-ekonomi. Dalam konteks studi transformasi ekonomi yang kompleks dan multidimensional, MMR memungkinkan triangulasi data, memperkaya interpretasi hasil, dan meningkatkan validitas temuan (Creswell & Clark, 2017; Saraswati & Devi, 2023). Keunggulan ini menjadikan MMR sebagai pendekatan yang relevan dan strategis dalam menelaah perubahan struktural ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, yang menghadapi tantangan struktural dan kebijakan secara simultan.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis proses transformasi ekonomi Indonesia selama tiga dekade terakhir secara holistik untuk mengidentifikasi sektor-sektor prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan berkualitas dan keluar dari *middle income trap*, dengan menggunakan pendekatan MMR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi ekonomi di Indonesia selama tiga dekade terakhir. Secara spesifik, tujuan penelitian ini meliputi: (1) mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki indeks daya penyebaran (*backward linkage*) dan derajat kepekaan (*forward linkage*) yang tinggi dalam perekonomian Indonesia, dan (2) menganalisis sektor-sektor ekonomi yang dapat berfungsi sebagai *leading sector* dalam transformasi ekonomi. Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya penyebaran dan derajat kepekaan tinggi serta berpotensi menjadi sektor unggulan diharapkan dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mendukung pencapaian target RPJPN 2025–2045. Target tersebut mencakup terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif, sehingga Indonesia dapat keluar dari *middle income trap* dan mencapai status sebagai negara maju.

METODE

Jenis dan Sumber Data

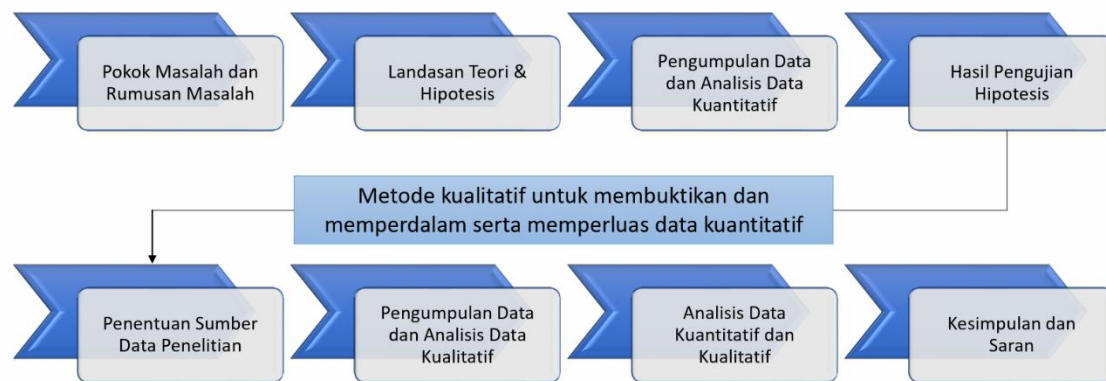
Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang bersumber dari publikasi instansi resmi tertentu. Dalam penelitian ini, data sekunder dibedakan menjadi dua jenis yaitu data sekunder berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Data sekunder berbentuk data kuantitatif meliputi Tabel IO untuk tahun 2000, 2010, 2020, dan 2022 yang dipublikasikan oleh Asian Development Bank (ADB). Data sekunder berbentuk data kualitatif diperoleh melalui SLR terhadap berbagai penelitian empiris yang relevan dengan topik penelitian. Data kualitatif ini berfungsi untuk mendukung, memperdalam, dan memperluas analisis terhadap data kuantitatif yang telah dikumpulkan.

Untuk menjaga konsistensi antartahun dan memungkinkan analisis transformasi ekonomi jangka panjang, penelitian ini menggunakan Tabel IO Indonesia yang diharmonisasi oleh ADB menjadi 35 sektor ekonomi. Proses harmonisasi ini dilakukan oleh ADB melalui pendekatan agregasi sektoral berbasis standar klasifikasi internasional yang terstruktur dan komparabel lintas waktu. Agregasi dilakukan berdasarkan konversi dari klasifikasi ISIC (*International Standard Industrial Classification*), khususnya ISIC Rev. 3 dan Rev. 4, yang menjadi rujukan internasional untuk klasifikasi kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, sektor-sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ISIC A01–A05) digabung ke dalam satu sektor agregat, yaitu sektor *agriculture, forestry, and fishing*, sementara industri makanan, minuman, dan tembakau (ISIC C10–C12) digabung ke dalam sektor *food, beverages, and tobacco*.

ADB juga menstandarkan definisi, cakupan, dan batasan sektor dalam setiap kategori agar tetap konsisten antar tahun dan antar negara. Harmonisasi ini mencakup penyesuaian nilai transaksi dalam harga dasar, penyusunan kembali matriks koefisien teknis, dan pembentukan struktur IO yang seragam. Prosedur ini memungkinkan penyusunan Tabel IO dengan format tetap 35 sektor untuk seluruh tahun analisis yang digunakan dalam studi ini, yaitu 2000, 2010, 2020, dan 2022.

Metode Analisis

Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan MMR, model *sequential explanatory design* (SED). Model SED adalah salah satu jenis MMR, di mana analisis data kuantitatif dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan analisis data kualitatif untuk mengeksplorasi temuan menarik dari tahap analisis data kuantitatif (Yusuf, 2015). Proses penelitian secara rinci dengan pendekatan MMR menggunakan model SED digambarkan pada Gambar 1.



Sumber: Mulyadi et al. (2020)

Gambar 1. Pendekatan penelitian MMR model *sequential explanatory design*

Dalam pendekatan SED yang digunakan dalam penelitian ini, hasil dari analisis kuantitatif *Input-Output* (IO) berperan penting dalam menentukan arah eksplorasi kualitatif. Analisis IO dilakukan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki indeks daya penyebaran (*spread effect*) dan derajat kepekaan (*sensitivity degree*) di atas rata-rata. Indeks daya penyebaran disebut juga dengan *backward linkages index* sedangkan indeks derajat kepekaan disebut juga *forward linkages index*. Sektor-sektor dengan nilai indeks > 1 dianggap sebagai sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi ekonomi nasional (Daryanto & Hafizrianda, 2010). Temuan kuantitatif ini tidak hanya mengungkap struktur keterkaitan antarsektor secara statistik, tetapi juga berfungsi sebagai dasar seleksi dalam penentuan ruang lingkup literatur yang akan ditelaah lebih lanjut dalam analisis kualitatif.

Untuk mendukung dan memperdalam temuan dari hasil analisis IO, analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui *systematic literature review* (SLR). SLR merupakan metode penelaahan literatur yang terstruktur dan eksplisit, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Metode ini sangat penting dalam dunia akademis karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara komprehensif dengan pendekatan yang minim bias (Anurahman et al., 2023; Saleh et al., 2023).

SLR dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri dan menyaring bukti empiris terkait peran dan kontribusi sektor-sektor unggulan hasil analisis IO dalam proses transformasi ekonomi Indonesia. Prosedur pelaksanaan SLR dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah merumuskan fokus pertanyaan telaah literatur. Tahap kedua melibatkan pencarian literatur pada basis data bereputasi internasional, yaitu Scopus (kriteria Q1 hingga Q4) dan Google Scholar (selain kriteria Q1-Q4, juga menggunakan kriteria Sinta 1 hingga 3). Tahap ketiga adalah penerapan kriteria inklusi dan eksklusi. Terakhir, tahap keempat mencakup penyusunan sintesis tematik dan naratif berdasarkan temuan dari studi-studi yang telah dipilih.

Dalam melakukan pencarian literatur yang relevan, studi ini menggunakan perangkat lunak seperti Publish or Perish, VOSviewer, dan Zotero. Kata kunci yang digunakan adalah bentuk *boolean*, yakni "(("indeks daya penyebaran" OR "dispersion index" OR "indeks derajat kepekaan" OR "sensitivity degree" OR "leading sector" OR "forward linkage" OR "backward linkage") AND (Indonesia OR "perekonomian Indonesia"))". Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal *peer-reviewed* dan literatur akademik yang relevan secara empiris dan konseptual dengan konteks Indonesia. Literatur yang ditelaah harus tersedia dalam bentuk teks lengkap, diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2000 hingga 2025, dan membahas dinamika transformasi sektoral, *linkage* antarsektor ekonomi, kebijakan ekonomi, atau kontribusi terhadap pembangunan jangka panjang. Sementara itu, literatur yang tidak memenuhi standar akademik atau tidak relevan dengan sektor unggulan hasil IO dikecualikan dari proses analisis.

Sintesis literatur dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-naratif dan tematik, dengan fokus pada pola kontribusi sektor, dan implikasi kebijakan. Hasil *review* ini tidak hanya memperkaya interpretasi atas temuan analisis kuantitatif, tetapi juga memberikan konteks sosial, kelembagaan, dan historis yang relevan bagi analisis transformasi ekonomi Indonesia.

Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan metode analisis IO, yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak STATA. Tujuan dari analisis IO ini adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor

ekonomi yang memiliki indeks daya penyebaran (*spread effect*) dan derajat kepekaan (*sensitivity degree*) yang tinggi dalam perekonomian Indonesia selama tiga dekade terakhir. Daya penyebaran dan derajat kepekaan mengukur dampak, baik secara langsung (ke belakang) maupun tidak langsung (ke depan), terhadap rata-rata seluruh dampak antar sektor. Oleh karena itu, kedua indeks ini digunakan untuk menganalisis hubungan sektor-sektor ekonomi dalam konteks keterkaitan *backward* dan *forward* dalam sistem perekonomian. Kedua indeks tersebut sering disebut sebagai rasio *backward linkage effect* dan *forward linkage effect*. Dengan menggunakan kedua indeks ini, peneliti dapat melakukan perbandingan tingkat keterkaitan antar sektor ekonomi dan menentukan sektor-sektor yang berpotensi menjadi sektor kunci atau sektor unggulan (*leading sector*) dalam pembangunan ekonomi (Daryanto & Hafizrianda, 2010). Rumusan dari indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan dapat dilihat pada persamaan (1) dan (2).

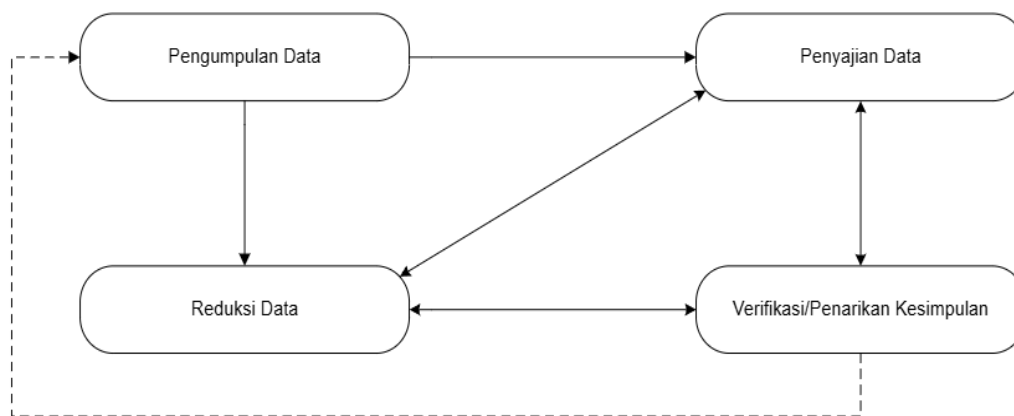
$$\alpha_j = \frac{\sum_{i=1}^n g_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij}} \quad (1)$$

$$\beta_i = \frac{\sum_{j=1}^n g_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij}} \quad (2)$$

di mana α_j menunjukkan indeks daya penyebaran dari sektor j dalam perekonomian, sedangkan β_i merupakan indeks derajat kepekaan dari sektor i . Notasi g_{ij} adalah elemen pada matriks *inverse* Leontief, $G = (I - A)^{-1}$.

Apabila nilai indeks daya penyebaran sektor j lebih besar dari satu ($\alpha_j > 1$), maka permintaan akhir sektor j dalam merangsang pertumbuhan produksi relatif lebih besar dibandingkan dengan rata-rata, sehingga sektor ini dapat dianggap sebagai sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, derajat kepekaan ($\beta_i > 1$) menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki peran strategis, karena kemampuannya dalam memenuhi permintaan akhir melebihi kapasitas rata-rata sektor lainnya (Daryanto & Hafizrianda, 2010).

Untuk data kualitatif, analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, induktif, naratif, dan kontinu. Secara khusus, analisis data kualitatif mengacu pada Model Miles dan Huberman, yang menggunakan model analisis interaktif komponen (Yusuf, 2015). Secara rinci, analisis dengan model interaktif komponen dari Miles dan Huberman disajikan dalam Gambar 2.



Sumber: Yusuf (2015)

Gambar 2. Model analisis data interaktif dari Model Miles dan Huberman (1984)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi ekonomi di Indonesia selama tiga dekade terakhir. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan (*leading sectors*) berdasarkan kriteria indeks daya penyebaran dan derajat sensitivitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan MMR, model SED. Tahap pertama melibatkan analisis kuantitatif menggunakan analisis IO, sementara tahap kedua mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan SLR. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk mengonfirmasi sektor-sektor ekonomi yang, berdasarkan indeks daya penyebaran dan derajat sensitivitasnya, memiliki potensi tinggi untuk menjadi sektor unggulan.

Pendekatan Penelitian Kuantitatif

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis IO. Analisis ini dilakukan dengan memanfaatkan data Tabel IO yang diperoleh dari ADB, untuk menghitung indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan, yakni menggunakan persamaan (1) dan (2). Secara rinci, hasil estimasi indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan untuk sektor-sektor ekonomi di Indonesia pada tahun 2000, 2010, 2020, dan 2022 disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Perbandingan Indeks Daya Penyebaran Sektor Ekonomi Indonesia Tahun 2000, 2010, 2020, dan 2022

Sektor	2000	2010	2020	2022
1	0,8017	0,7441	0,7462	0,7633
2	0,7163	0,7930	0,8115	0,8315
3	1,1616	1,1464	1,1373	1,1679
4	1,0708	0,9801	0,7958	0,7186
5	1,0272	0,9547	0,7352	0,7349
6	1,1133	1,0721	1,0547	1,0813
7	1,1608	1,1788	1,1574	1,1559
8	0,9237	0,9784	0,9915	1,0138
9	1,0121	1,0727	1,1133	1,0929
10	1,0316	1,1308	1,1333	1,1054
11	1,0225	1,0949	1,1223	1,1095
12	1,1640	1,0608	1,1079	1,0818
13	0,9331	0,9592	1,1350	1,0733
14	1,1268	1,0268	1,1199	1,0415
15	0,9706	0,9801	0,9930	1,0108
16	1,1941	1,0926	1,0920	1,0892
17	1,1454	1,4664	1,3811	1,3170
18	1,1447	1,1115	1,1787	1,1932
19	0,9765	0,8480	0,8442	0,8550
20	0,8899	0,8669	0,8575	0,8754
21	0,8903	0,8671	0,8562	0,8712
22	1,1423	1,0884	1,0505	1,0689
23	1,0511	0,9782	0,9816	0,9843
24	1,0986	1,1278	1,1578	1,1787
25	1,0836	1,0530	1,1044	1,1132
26	0,9900	0,9850	1,0027	1,0242
27	0,8213	0,8789	0,8607	0,8713
28	0,8060	0,8336	0,8171	0,8358
29	0,7679	0,7590	0,7544	0,7664
30	0,9786	0,9351	0,9328	0,9392
31	0,8881	0,9148	0,9505	0,9722
32	0,9333	0,9045	0,8837	0,8847
33	1,0323	1,0849	1,0844	1,0869
34	0,9295	1,0313	1,0554	1,0910

Keterangan: Sektor pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan (1), pertambangan dan penggalian (2), makanan, minuman, dan tembakau (3), tekstil dan produk tekstil (4), kulit, produk kulit, dan alas kaki (5), kayu dan produk kayu serta gabus (6), pulp, kertas, produk kertas, percetakan, dan penerbitan (7), kokas, minyak bumi olahan, dan bahan bakar nuklir (8), bahan kimia dan produk kimia (9), karet dan plastik (10), mineral nonlogam lainnya (11), logam dasar dan logam olahan (12), mesin, yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (13), peralatan listrik dan optik (14), peralatan transportasi (15), manufaktur, yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain; daur ulang (16), pasokan listrik, gas, dan air (17), konstruksi (18), penjualan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan bermotor dan sepeda motor; penjualan eceran bahan bakar (19), perdagangan besar dan perdagangan komisi, kecuali kendaraan bermotor dan sepeda motor (20), perdagangan eceran, kecuali kendaraan bermotor dan sepeda motor; perbaikan barang-barang rumah tangga (21), hotel dan restoran (22), transportasi darat (23), transportasi air (24), transportasi udara (25), kegiatan transportasi pendukung dan tambahan lainnya; kegiatan agen perjalanan (26), pos dan telekomunikasi (27), intermediasi keuangan (28), kegiatan real estat (29), penyewaan peralatan dan mesin serta kegiatan bisnis lainnya (30), administrasi publik dan pertahanan; jaminan sosial wajib (31), pendidikan (32), kesehatan dan pekerjaan sosial (33), dan layanan masyarakat, sosial, dan pribadi lainnya (34).

Sumber: data diolah (2024).

Indeks daya penyebaran digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi strategis yang memiliki kemampuan memacu pertumbuhan ekonomi. Suatu sektor ekonomi dikategorikan sebagai sektor yang strategis jika nilai indeks daya penyebarannya lebih dari satu ($\alpha_j > 1$). Menurut Daryanto dan Hafizrianda (2010), sektor ekonomi dengan indeks daya penyebaran tinggi memiliki kemampuan signifikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengaruhnya terhadap sektor hilir. Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2000, sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya penyebaran tinggi meliputi sektor manufaktur, yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain; daur ulang (16), sektor logam dasar dan logam olahan (12), serta sektor makanan, minuman, dan tembakau (3). Sektor-sektor tersebut menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam mendorong aktivitas sektor lainnya melalui permintaan *output* sebagai input bagi sektor lain (*leading sector*). Temuan studi ini sejalan dengan studi Muchdie dan Imansyah (2019) yang menemukan bahwa sektor ekonomi 12 dan 16 memiliki nilai indeks daya penyebaran paling tinggi.

Ada beberapa faktor yang mendorong sektor ekonomi 16, 12, dan 3 menjadi *leading sectors* pada tahun 2000. Pertama, kelimpahan sumber daya mineral, struktur rantai nilai yang terintegrasi, liberalisasi perdagangan dan investasi, serta kapasitas ekspor yang kompetitif menjadikan sektor logam dasar dan produk logam olahan (12) sebagai *leading sectors* pada tahun 2000 (Molnar & Leshner, 2008). Akibatnya, sektor ini sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan industri nasional maupun ekspor. Kedua, permintaan domestik yang tahan guncangan (*inelastic demand*), insentif tarif untuk pengolahan di dalam negeri, keunggulan komparatif ekspor, serta keterkaitan antarsektor yang sangat tinggi mendorong sektor makanan, minuman, dan tembakau berhasil memerankan diri sebagai *leading sector* di perekonomian Indonesia tahun 2000 (Asian Development Bank, 2022).

Pada tahun 2010, tiga sektor ekonomi dengan nilai indeks daya penyebaran tertinggi dan menjadi *leading sector* adalah sektor pasokan listrik, gas, dan air (17), sektor *pulp*, kertas, produk kertas, percetakan, dan penerbitan (7), dan sektor ekonomi 3. Sektor ekonomi 7 merupakan sektor hulu bagi banyak subsektor industri (pengemasan, penerbitan, periklanan, percetakan kemasan), sehingga belanja input-nya (kertas, bubur kayu, tinta) mendorong pertumbuhan sektor kehutanan, kimia, dan logistik. Kertas dan pulp juga menyerap tenaga kerja relatif padat, meningkatkan multiplikasi lapangan kerja lokal. Muchdie dan Imansyah (2019) menyebut bahwa *pulp* dan *paper* sebagai salah satu *key sectors* di Indonesia pada 2010 dengan nilai *backward linkage* yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat meningkatkan permintaan infrastruktur energi, air, dan layanan publik dasar, sehingga sektor ekonomi 17 menjadi salah satu *leading sectors* tahun 2010 dalam mendukung pertumbuhan kota-kota besar. Dalam studinya, Muchdie dan Imansyah (2019) menyoroti pentingnya sektor infrastruktur dasar, khususnya energi (listrik dan gas), sebagai sektor yang memiliki efek *multiplier* yang tinggi terhadap aktivitas ekonomi lainnya. Aggarwal (2021) dan Andriansyah et al. (2021) menjelaskan bahwa dalam tahap lanjut transformasi struktural ekonomi, sektor berbasis jasa dan infrastruktur menjadi lebih dominan dibandingkan sektor manufaktur tradisional. Kedua sektor ini (sektor ekonomi 17 dan 7) berperan penting seiring dengan modernisasi ekonomi dan digitalisasi informasi yang meningkat tajam pada periode tersebut.

Sektor ekonomi 3 tetap kuat dan menjadi *leading sectors* karena permintaan domestik yang stabil, bahkan meningkat seiring dengan tumbuhnya kelas menengah. Studi Rizani (2020) dan Palumpun et al. (2017) menyebutkan bahwa sektor pangan senantiasa memiliki *linkage* kuat dan stabil karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat, terutama di tengah periode pemulihan ekonomi. Hal ini yang menyebabkan sektor ekonomi 3 tetap menjadi *leading sector* pada tahun 2000 dan 2010.

Sektor ekonomi 17, sektor konstruksi (18), dan sektor transportasi air (24) merupakan tiga sektor utama atau *leading sectors* pada tahun 2020. Pola ini tidak mengalami perubahan signifikan pada tahun 2022, di mana sektor ekonomi 17, 18, dan 24 tetap menjadi sektor dengan indeks daya penyebaran tertinggi (*leading sectors*). Sektor ekonomi 17, 18, dan 24 menjadi *leading sectors* pada tahun 2020 dan 2022 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ekspansi infrastruktur sebagai strategi pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia secara masif meningkatkan pembangunan infrastruktur, termasuk energi, air bersih, dan sanitasi, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Kedua, pertumbuhan ekonomi digital dan revolusi industri 4.0. Ekonomi digital yang berkembang pesat membutuhkan pasokan listrik yang stabil serta infrastruktur yang modern. Ini memperkuat posisi sektor ekonomi 17. Ketiga, peningkatan investasi infrastruktur publik dan swasta. Kebijakan fiskal ekspansif untuk sektor konstruksi (sektor ekonomi 18), termasuk pembangunan jalan tol, bendungan, dan bandara baru yang didukung oleh skema investasi publik-swasta, menjadikan sektor ini

sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Keempat, kebijakan hilirisasi dan nilai tambah Pergeseran fokus pemerintah dari ekspor komoditas mentah menuju produk bernilai tambah tinggi membutuhkan infrastruktur energi, transportasi, dan konstruksi yang lebih baik dan luas.

Studi Rizani (2020) dan Palumpun et al. (2017) menyatakan bahwa sektor ekonomi 17 dan 24 merupakan sektor strategis karena perannya dalam memperkuat konektivitas ekonomi regional maupun global. Kim et al. (2020) mengidentifikasi bahwa investasi dalam sektor infrastruktur menjadi elemen krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini menegaskan bahwa sektor-sektor infrastruktur dasar, termasuk energi dan konstruksi, merupakan sektor utama yang menjadi tulang punggung dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini.

Analisis IO berdasarkan kriteria indeks daya penyebaran selama kurun waktu tahun 2000, 2010, 2020, dan 2022 menunjukkan adanya perubahan *leading sectors*. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia mengalami transformasi struktural pada tiga dekade tersebut. Transformasi ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang menjadi *leading sector* berdasarkan indeks daya penyebaran mengalami perubahan. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia berubah dari sektor manufaktur dan sektor berbasis sumber daya (tahun 2000) ke sektor jasa dan infrastruktur (tahun 2020 dan 2022). Atau dengan kata lain, terjadi pergeseran alokasi sumber daya ekonomi dari sektor-sektor yang memiliki produktivitas rendah (umumnya sektor pertanian dan sektor primer lainnya) ke sektor-sektor yang lebih tinggi produktivitasnya, seperti sektor industri dan jasa (Aggarwal, 2021). Hal senada juga dinyatakan oleh Aggarwal (2021) dan Andriansyah et al. (2021) bahwa terjadi pergeseran ekonomi dari sektor primer dan manufaktur menuju sektor tersier. Perubahan *leading sectors* di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2020 disebabkan oleh kombinasi faktor domestik dan global yang kompleks. Pertama, pertumbuhan kebutuhan infrastruktur yang masif akibat urbanisasi dan perkembangan ekonomi digital. Kedua, kebijakan pemerintah yang pro-infrastruktur dan integrasi global, dengan prioritas investasi publik dalam sektor-sektor strategis tersebut. ketiga, digitalisasi dan revolusi industri 4.0, yang meningkatkan ketergantungan pada sektor infrastruktur energi dan teknologi informasi.

Tabel 2. Perbandingan Indeks Derajat Kepekaan Sektor Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2000, 2010, 2020, dan 2022

Sektor	2000	2010	2020	2022
1	1,8721	1,6733	1,5762	1,4714
2	1,8934	2,1118	1,8595	2,1448
3	1,3467	1,2183	1,2464	1,1822
4	0,7462	0,7085	0,6395	0,6695
5	0,6659	0,6371	0,5869	0,6461
6	0,6862	0,7962	0,6932	0,7345
7	1,1373	1,2164	0,8616	0,8594
8	1,0780	1,4624	1,1890	1,2323
9	0,9479	1,2184	1,4863	1,1939
10	0,8499	0,8717	0,7986	0,8167
11	0,7083	0,6983	0,6701	0,7138
12	1,3408	0,8453	0,8008	0,7972
13	0,6616	0,8118	0,8598	0,8483
14	0,7003	0,8099	0,9224	0,9842
15	0,8237	0,8853	0,7744	0,8090
16	0,6554	0,6638	0,6382	0,6725
17	1,1914	1,5531	1,5765	1,4690
18	0,7404	1,0335	1,5394	1,2624
19	1,4216	0,9175	0,8718	0,9189
20	1,9667	1,7211	1,7145	1,6525
21	1,4549	1,2564	1,2455	1,2502
22	0,7526	0,7730	0,7532	0,7995
23	0,9692	0,9313	0,9995	1,0266
24	0,8753	0,7451	0,7165	0,7736
25	0,6727	0,6673	0,7000	0,8108
26	0,8690	0,8145	0,9823	0,9924

Sektor	2000	2010	2020	2022
27	0,8194	0,9897	1,0528	1,0459
28	1,3911	1,2446	1,3634	1,3012
29	0,9089	0,6805	0,6683	0,7053
30	1,1359	1,0398	1,2487	1,2002
31	0,6588	0,6910	0,6712	0,7007
32	0,6593	0,6319	0,6294	0,6753
33	0,6484	0,6637	0,6699	0,7065
34	0,7507	1,0177	0,9945	1,0234

Sumber: data diolah (2024).

Indeks derajat kepekaan (*sensitivity degree index*) menyatakan bahwa sektor ekonomi dianggap sebagai sektor strategis apabila mampu memenuhi permintaan akhir dengan kemampuan di atas rata-rata sektor ekonomi lainnya, yang ditunjukkan oleh nilai indeks lebih dari satu ($\beta_i > 1$). Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2000, sektor-sektor ekonomi dengan nilai indeks derajat kepekaan tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan perdagangan komisi, kecuali kendaraan bermotor dan sepeda motor (20); sektor pertambangan dan penggalian (2); serta sektor pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan (1). Tiga sektor ekonomi yang masih menunjukkan nilai indeks derajat kepekaan tertinggi tahun 2010 meliputi sektor ekonomi 2, sektor ekonomi 20, dan sektor ekonomi 1. Sektor ekonomi 2, sektor ekonomi 20, dan sektor ekonomi 17 tercatat sebagai tiga sektor ekonomi dengan indeks derajat kepekaan tertinggi atau *leading sectors* pada tahun 2020. Pola serupa juga terlihat pada tahun 2022, di mana sektor ekonomi 2, sektor ekonomi 20, dan sektor ekonomi 1 menjadi *leading sectors*. Ini menunjukkan bahwa *leading sectors* berdasarkan indeks derajat kepekaan pada periode tersebut tidak mengalami perubahan. Atau dengan kata lain, sektor ekonomi di Indonesia tidak mengalami transformasi struktural.

Secara konsisten, sektor ekonomi 2, 20, dan 1 merupakan sektor-sektor ekonomi dengan indeks derajat kepekaan tertinggi selama tiga dekade terakhir, yang menandakan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional. Menurut Daryanto dan Hafizrianda (2010), tingginya indeks derajat kepekaan pada sektor-sektor tersebut disebabkan oleh kemampuannya untuk memenuhi permintaan akhir di atas rata-rata kemampuan sektor lainnya. Dengan kata lain, sektor ekonomi 2, 20, dan 1 memiliki peran penting dalam menciptakan permintaan bagi sektor-sektor hulu, sehingga memengaruhi dinamika rantai nilai dalam perekonomian secara keseluruhan di Indonesia.

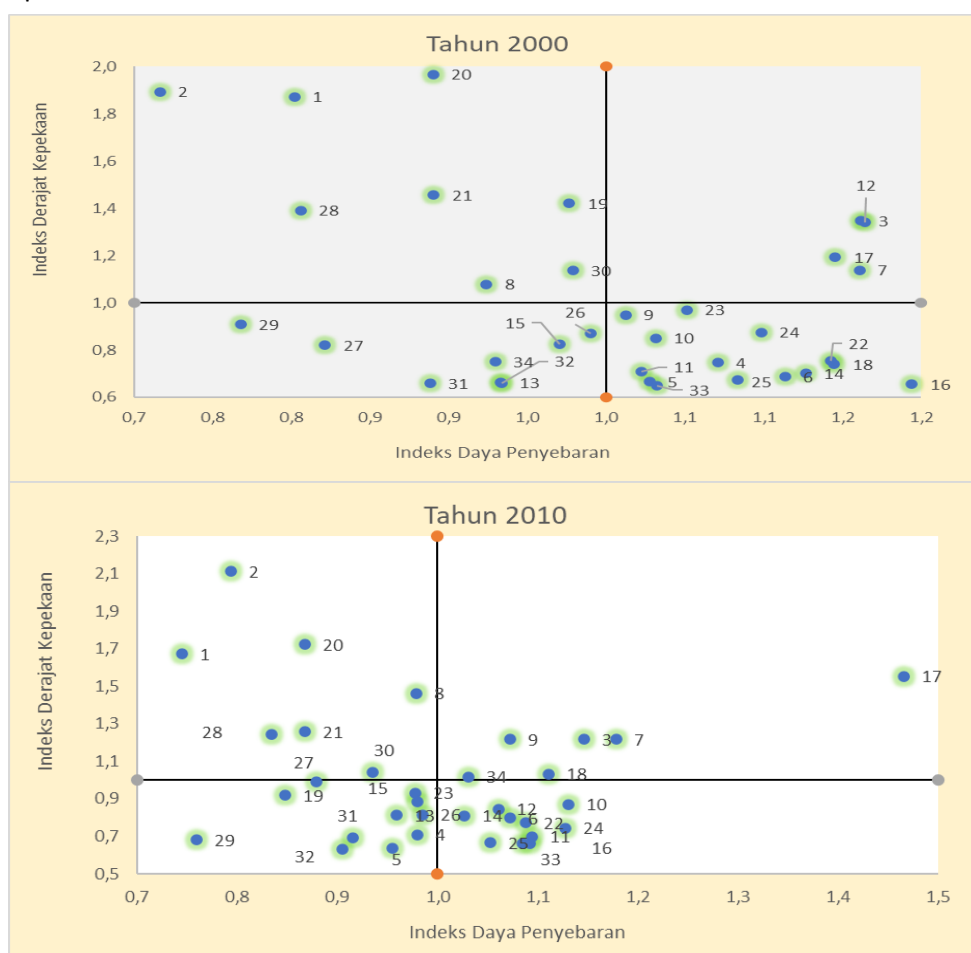
Sektor ekonomi 20 menjadi *leading sectors* dalam tiga dekade terakhir karena sektor ini berfungsi sebagai distribusi barang strategis. Sektor perdagangan besar berperan penting dalam distribusi barang input dan *output* ke berbagai sektor ekonomi lainnya. Hampir semua sektor, mulai dari industri manufaktur, pertanian, hingga jasa, memerlukan layanan perdagangan besar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan produk konsumsi. Menurut Muchdie dan Imansyah (2019), sektor perdagangan memiliki keterkaitan sangat kuat dalam struktur IO Indonesia karena posisinya sebagai penyedia produk antarsektor, menjadikannya sektor yang memiliki *forward linkage* kuat secara konsisten. Abadi et al. (2024) juga menyatakan perdagangan sebagai sektor basis ekonomi yang kuat di berbagai wilayah Indonesia karena perannya sebagai penyalur barang dan jasa antar wilayah, sehingga konsisten memiliki derajat kepekaan tinggi.

Selain sektor ekonomi 20, sektor ekonomi 2 juga menjadi *leading sectors* di Indonesia dalam tiga dekade terakhir. Kim et al. (2020) menunjukkan bahwa sektor pertambangan memainkan peran sentral dalam mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena keterkaitan kuatnya dengan sektor industri manufaktur, energi, dan konstruksi. Menurut Rizani (2020) dan Palumpun et al. (2017), sektor pertambangan memiliki peran strategis karena menjadi penyedia input primer bagi berbagai industri hilir, termasuk energi dan industri manufaktur yang esensial bagi perekonomian.

Sektor ekonomi 2, 20, dan 1 menjadi *leading sectors* dalam tiga dekade terakhir, berdasarkan indeks derajat kepekaan, berkaitan erat dengan stagnasi pada sektor industri manufaktur dan perubahan kebijakan transformasi ekonomi nasional. Pertama, stagnasi kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB. Selama dua dekade terakhir, kontribusi sektor industri manufaktur Indonesia terhadap PDB relatif stagnan, bahkan cenderung menurun. Data BPS menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB yang sempat mencapai >25% pada awal 2000-an, kini menurun ke kisaran 18–19% pada 2020-an. Fenomena ini dikenal sebagai fenomena *premature deindustrialization* (Rodrik, 2016). Suatu fenomena di mana sektor industri manufaktur mengalami stagnansi atau penurunan kontribusi sebelum negara

mencapai tahap pendapatan tinggi. Menurut Andriansyah et al. (2021) dan Kim et al. (2020), pertumbuhan sektor industri Indonesia tertahan oleh rendahnya nilai tambah domestik dan keterbatasan inovasi, sehingga sektor industri sulit menjadi pusat keterkaitan ekonomi lintas sektor. Stagnasi pada sektor industri manufaktur menyebabkan (1) produk-produk industri manufaktur tidak berkembang sebagai input strategis untuk sektor lain, (2) permintaan sektor lain terhadap *output* industri manufaktur menjadi lebih rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan dan pertambangan; dan (3) indeks derajat kepekaan sektor industri manufaktur cenderung lebih rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Kedua, kaitan dengan perubahan kebijakan transformasi ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi Indonesia bergeser dari sektor industri manufaktur ke sektor infrastruktur dan ekstraktif. Kebijakan seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Nawacita, hingga kebijakan hilirisasi era 2020-an, lebih banyak menstimulasi permintaan terhadap sektor-sektor seperti pertambangan, perdagangan, dan utilitas dasar, ketimbang sektor industri pengolahan berbasis teknologi. Selain itu, kebijakan ekonomi Indonesia cenderung memfokuskan pengolahan komoditas primer (seperti nikel, batubara, dan *crude palm oil* atau CPO) dalam rangka ekspor dan industrialisasi berbasis sumber daya. Menurut Kim et al. (2020), arah kebijakan Indonesia telah berpindah dari industrialisasi berbasis manufaktur menuju pembangunan berbasis infrastruktur dan komoditas. Muchdie dan Imansyah (2019) menekankan bahwa sektor-sektor ekonomi dengan indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan tinggi bukan lagi didominasi industri, melainkan sektor perdagangan dan ekstraktif. Selain menggunakan indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan secara parsial, penentuan *leading sector* juga dilakukan dengan mengintegrasikan kedua indeks tersebut melalui pendekatan diagram kartesius. Integrasi tersebut menampilkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai kedua indeks paling tinggi baik indeks daya penyebaran maupun derajat kepekaan. Visualisasi hasil analisis untuk tahun 2000, 2010, 2020, dan 2022 ditampilkan pada Gambar 3 dan Gambar 4.

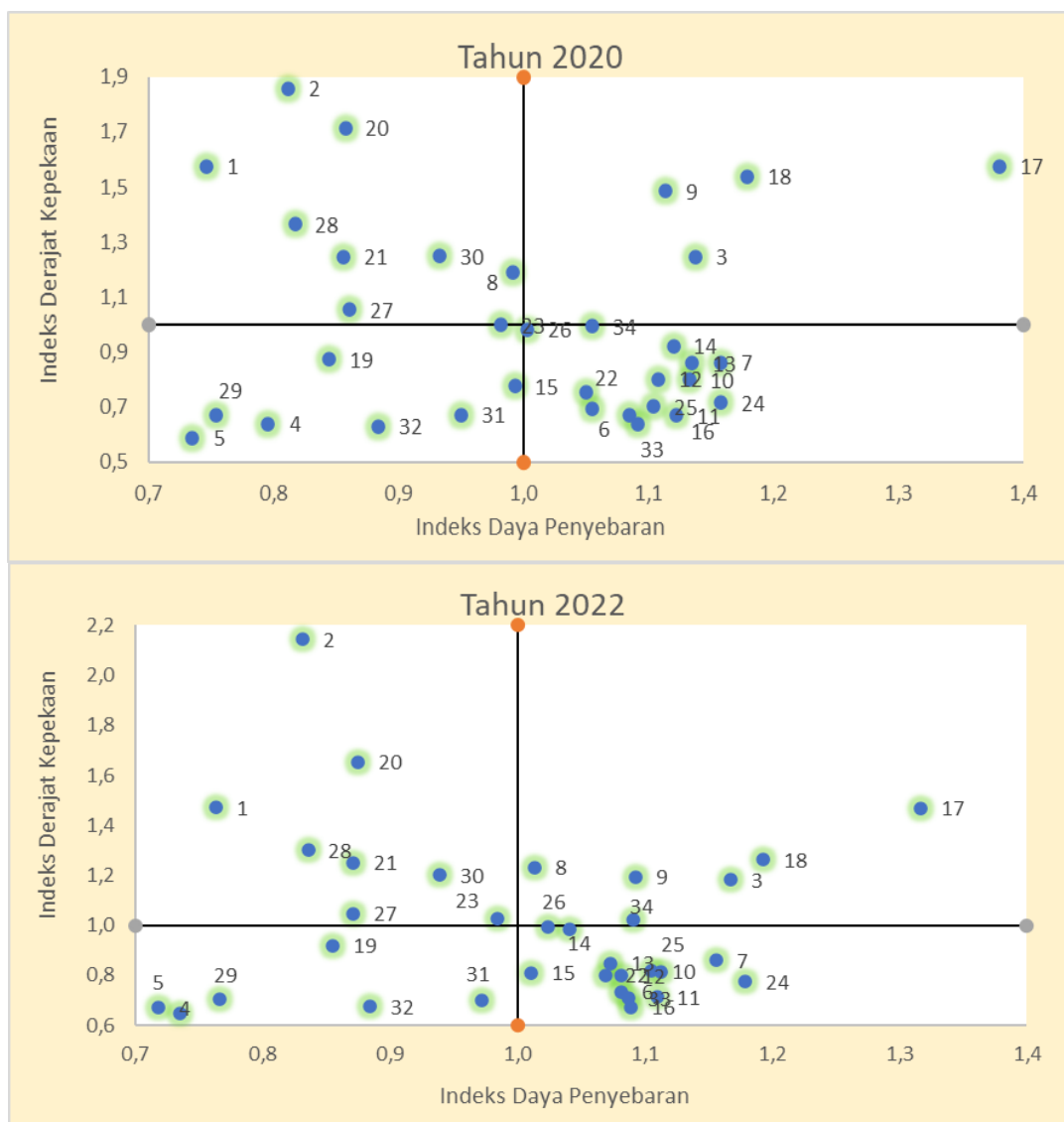


Sumber: data diolah (2024)

Gambar 3. Diagram Kartesius Indeks Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan Tahun 2000 dan 2010

Berdasarkan Gambar 3, sektor ekonomi yang diidentifikasi sebagai *leading sector* baik memiliki indeks daya penyebaran maupun derajat kepekaan tinggi pada tahun 2000 adalah sektor ekonomi 3, 7, 12, dan 17. Pada tahun 2010, *leading sector* terdiri dari sektor ekonomi 3, 7, 9, 17, 18, dan 34. Selanjutnya, Gambar 4 menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang menjadi *leading sector* pada tahun 2020 adalah sektor ekonomi 3, 9, 17, dan 18. Adapun pada tahun 2022, *leading sector*-nya meliputi sektor ekonomi 3, 8, 9, 17, 18, dan 34.

Secara keseluruhan, ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi yang konsisten menjadi *leading sector* dalam tiga dekade terakhir baik berdasarkan indeks daya penyebaran maupun derajat kepekaan adalah sektor ekonomi 3 dan 17. Perubahan permintaan akhir pada kedua sektor tersebut memicu peningkatan *output* di banyak sektor lain (efek *multiplier* yang kuat). Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia cenderung tidak mengalami transformasi struktural yang signifikan selama periode tersebut. Dengan kata lain, perekonomian Indonesia masih bergantung pada sektor-sektor tertentu yang dominan sejak tahun 2000 hingga 2022. Temuan ini sejalan dengan studi Nugroho (2022) yang menegaskan bahwa subsektor makanan/minuman dan utilitas listrik/gas menempati peringkat tertinggi dalam mendorong aktivitas ekonomi lintas sektor.



Sumber: data diolah (2024).

Gambar 4. Diagram Kartesius Indeks Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan Tahun 2020 dan 2022

Terdapat beberapa faktor yang mendorong konsistensi sektor ekonomi 3 dan 17 menjadi *leading sector* dalam tiga dekade terakhir. Pertama, kebutuhan dasar yang stabil—pangan sebagai kebutuhan primer yang permintaannya inelastis dan utilitas sebagai input wajib untuk hampir semua aktivitas ekonomi dan rumah

tangga. Kedua, prioritas kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan periode sebelumnya yang menempatkan pembangunan infrastruktur energi, air minum, sanitasi, dan ketahanan pangan sebagai agenda utama untuk pertumbuhan inklusif dan pengurangan kesenjangan wilayah. Ketiga, modernisasi dan investasi berkelanjutan—program modernisasi agroindustri dan hilirisasi komoditas meningkatkan nilai tambah subsektor pangan serta menuntut pasokan listrik dan air yang andal untuk fasilitas pengolahan dan distribusi dingin. Nugroho (2022) menggarisbawahi bagaimana investasi tersebut memperkuat *backward linkage* sektor makanan/minuman dan utilitas. Keempat, transisi energi dan digitalisasi utilitas (*smart grid*, proyek pembangkit terbarukan) yang memicu permintaan input teknologi, konstruksi, dan tenaga terampil, sehingga utilitas terus menjadi penggerak multiplikatif ekonomi.

Pendekatan Penelitian Kualitatif

Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan model SED dari pendekatan MMR, bertujuan untuk memperdalam dan memperjelas temuan yang diperoleh dari analisis kuantitatif. SLR untuk analisis kualitatif dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak Publish or Perish untuk menyaring literatur-literatur dari *database* jurnal internasional, yakni Scopus dan Google Scholar. Penjaringan literatur dari *database* Scopus menggunakan kriteria Q1 hingga Q4 pada periode 2000–2025. Begitu juga dengan *database* Google Scholar, literatur-literatur relevan yang disaring dari *database* Google Scholar akan disaring lagi kualitasnya melalui perangkat Rapid Journal Quality Check. Jadi, literatur-literatur yang sangat relevan dengan topik penelitian ini memiliki indeks Scopus Q1 sampai Q4 dan indeks Sinta 1 – Sinta 3.

Analisis kuantitatif IO dengan kriteria indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan menyebutkan bahwa sektor ekonomi yang menjadi *leading sector* dalam tiga dekade terakhir di Indonesia adalah sektor makanan, minuman, dan tembakau (3); dan sektor penyediaan listrik, gas, dan air bersih (17). Kedua sektor ekonomi ini memiliki nilai kedua indeks tersebut, baik indeks daya penyebaran maupun derajat kepekaan, paling tinggi dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Selain sektor ekonomi yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dua sektor ini juga memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan akhir melebihi kapasitas rata-rata sektor lainnya. Sektor makanan, minuman, dan tembakau merupakan sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia, mengingat kontribusi ekonominya yang signifikan (Bui et al., 2022; Chowdhury et al., 2020; Rahmiyati, 2022). Faktor pertumbuhan populasi yang pesat, berimplikasi pada meningkatnya permintaan terhadap produk makanan dan minuman. Sebagaimana dinyatakan oleh Ali (2023), pertambahan jumlah penduduk mendorong peningkatan kebutuhan makanan dan minuman. Temuan ini selaras dengan Tamin et al. (2024), didukung oleh data keuangan korporasi (Rahmiyati 2022), dan diperkuat oleh studi tentang *digital supply chain* (Saryatmo & Sukhotu 2021) serta strategi *resiliency* (Chowdhury et al. 2020). Hal ini mempertegas peran sentral sektor tersebut dalam mendorong transformasi industri dan inklusi ekonomi di Indonesia.

Sejalan dengan Tamin et al. (2024), sektor makanan dan minuman menjadi *leading sector* karena memiliki nilai indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan yang paling tinggi. Atau dengan kata lain, sektor ini memiliki keterkaitan hulu dan hilir yang kuat. Kompleksitas rantai nilai, seperti infrastruktur pengemasan, distribusi, dan pengolahan lanjutan, juga memperkuat posisi ini. Temuan ini juga mencerminkan besarnya lapangan kerja dan permintaan faktor produksi yang tergerak oleh aktivitas sektor makanan, minuman, dan tembakau.

Transformasi digital dalam rantai pasok, seperti *smart inventory*, *internet of things* (IoT), dan *cold chain*, menurut Saryatmo dan Sukhotu (2021) meningkatkan efektivitas operasional dan keandalan pasokan pada industri makanan dan minuman Indonesia, mendukung kontinuitas produksi dan keterkaitan antarsektor. Faktor ini juga mendorong sektor makanan dan minuman menjadi *leading sector* di Indonesia. Selain itu, sektor ini juga memiliki ketahanan yang cukup kuat terhadap guncangan eksternal. Chowdhury et al. (2020) mencatat bahwa strategi diversifikasi pemasok, kemitraan distribusi baru, dan fleksibilitas operasional memperkuat *resilience* sektor makanan dan minuman selama pandemi Covid-19, menjaganya tetap sebagai penggerak ekonomi meski terjadi krisis global.

Terdapat beberapa peran sektor makanan, minuman, dan tembakau sebagai pengungkit transformasi ekonomi. Pertama, sektor ini menggerakkan permintaan input antarsektor. Dengan nilai indeks daya penyebaran lebih dari satu, sektor ini memicu peningkatan *output* di sektor pertanian, kemasan, energi, dan

logistik. Investasi dalam pengembangan infrastruktur pasokan (air, listrik, *cold storage*) menambah *multiplier* ekonomi (Tamin et al., 2024). Kedua, penciptaan pendapatan dan lapangan kerja. *Income multiplier* tinggi memperlihatkan bahwa sektor ini bukan hanya mendorong PDB, tetapi juga langsung meningkatkan daya beli rumah tangga, memperkuat konsumsi domestik dan mendorong pertumbuhan sektor jasa dan ritel (Tamin et al., 2024). Ketiga, sinergi dengan kebijakan hilirisasi dan industri 4.0. Kebijakan hilirisasi (Badan Litbang instansi terkait) dan *Roadmap Making* Indonesia 4.0 memerlukan fasilitas pengolahan pangan modern dan digitalisasi manufaktur, di mana sektor F&B menjadi ujung tombak hilirisasi komoditas dan transformasi industri (Bui et al., 2022).

Selain itu, sektor makanan, minuman, dan tembakau telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa selama masa krisis ekonomi, seperti pandemi COVID-19. Ketahanan ini memperlihatkan peran penting sektor tersebut dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung stabilitas ekonomi Indonesia (Yijo et al., 2021). Dengan demikian, sektor ini tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi tetapi juga pilar penting dalam menghadapi tantangan global yang berdampak pada sistem ekonomi dan pangan.

Di samping itu, kemampuan sektor makanan dan minuman untuk beradaptasi terhadap dinamika pasar, seperti pertumbuhan *e-commerce* dan digitalisasi rantai pasokan, semakin memperkuat posisinya sebagai sektor unggulan. Perusahaan di sektor ini semakin mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memenuhi ekspektasi konsumen, yang merupakan faktor krusial dalam mempertahankan daya saing di pasar yang berkembang dengan cepat (Saryatmo & Sukhotu, 2021). Kemampuan adaptasi tersebut menjadi esensial dalam mendukung pertumbuhan sektor ini, terutama di tengah tekanan eksternal, termasuk persaingan produk impor dan tuntutan inovasi yang terus meningkat (Tjoa & Arief, 2022).

Studi ini juga menyoroti pentingnya sektor penyediaan listrik, gas, dan air bersih sebagai *leading sector* dalam mendukung perekonomian nasional. Sektor ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional berbagai industri, termasuk industri makanan dan minuman, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian. Kondisi tersebut memperkuat keterkaitan antarsektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Rahmiyati, 2022). Ketergantungan yang tinggi antarsektor ini menunjukkan pentingnya menjaga pasokan energi yang stabil untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi.

Sektor penyediaan listrik, gas, dan air mengalami pertumbuhan yang signifikan. Keberadaan sumber daya energi, seperti gas alam, memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan sektor ini. Menurut Erdiwansyah et al. (2020), konsumsi gas alam di Indonesia, khususnya untuk kebutuhan industri dan pembangkit listrik, mencapai angka yang substansial. Selain berfungsi sebagai energi domestik, gas alam juga menjadi salah satu komoditas ekspor utama negara. Lebih lanjut, sektor ini memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan infrastruktur energi yang mendukung keberlangsungan sektor lain, termasuk sektor industri dan layanan publik (Lubis & Putra, 2022).

Sektor industri pengolahan, terutama pada subsektor makanan dan minuman, memiliki hubungan erat dengan sektor pertanian sebagai penyedia utama bahan baku. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa perkembangan subsektor makanan dan minuman tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian secara keseluruhan (Armelly et al., 2021). Sementara itu, sektor penyediaan listrik, gas, dan air berperan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan energi yang diperlukan untuk berbagai kegiatan ekonomi, baik di sektor industri maupun rumah tangga (Oktaviani & Asrol, 2022).

Kedua sektor ini, sektor makanan, minuman, dan tembakau serta sektor penyediaan listrik, gas, dan air, memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, khususnya terkait dengan peningkatan akses terhadap energi yang terjangkau dan berkelanjutan (Kurniawan, 2024). Kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan serta upaya pengurangan emisi gas rumah kaca mendorong transformasi sektor listrik dan gas menuju sistem yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan (Erdiawansyah et al., 2020). Dengan demikian, kombinasi antara meningkatnya permintaan, dukungan kebijakan pemerintah, serta keterkaitan strategis dengan sektor lainnya menjadikan sektor makanan, minuman, dan tembakau, serta sektor penyediaan listrik, gas, dan air sebagai pilar unggulan dalam perekonomian Indonesia.

KESIMPULAN

Sektor makanan, minuman, dan tembakau; serta sektor penyediaan listrik, gas, dan air bersih teridentifikasi sebagai *leading sectors* dalam perekonomian Indonesia selama tiga dekade terakhir. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dapat difokuskan pada sektor-sektor tersebut. Pengembangan lebih lanjut dan peningkatan efisiensi di kedua sektor ini berpotensi menghasilkan manfaat yang luas bagi perekonomian Indonesia. Secara bersamaan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerintah juga disarankan untuk memprioritaskan pengembangan sektor-sektor ekonomi dengan indeks daya penyebaran atau derajat kepekaan yang tinggi tetapi belum optimal. Upaya ini bertujuan agar sektor-sektor tersebut dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan, sehingga menyusul dua *leading sectors* tersebut di masa mendatang. Namun, ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, penggunaan model IO statis tidak dapat menangkap dinamika harga, substitusi input, dan perubahan teknologi. Kedua, agregasi sektor makanan, minuman, dan tembakau dapat menghilangkan perbedaan subsektornya. Ketiga, IO tradisional tidak mempunyai kemampuan dalam memasukkan distribusi manfaat dan eksternalitas lingkungan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan IO dinamik dan/atau mengembangkan IO regional untuk analisis keterkaitan antar sektor yang lebih dinamis dan presisi.

DPR RI memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia melalui pelaksanaan tiga fungsinya. Dalam fungsi legislasi, DPR RI dapat merumuskan regulasi yang mendorong penguatan sektor-sektor unggulan. Melalui fungsi anggaran, DPR RI berperan dalam mengawal alokasi APBN agar tepat sasaran, khususnya untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut. Sementara itu, melalui fungsi pengawasan, DPR RI memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan sesuai arah kebijakan strategis, dengan fokus pada sektor-sektor unggulan dan sektor-sektor ekonomi lain yang memiliki potensi keterkaitan tinggi (*high linkage sectors*) namun belum dioptimalkan. Melalui tiga fungsi tersebut, DPR RI dapat memainkan peran kunci dalam mengarahkan strategi pembangunan ekonomi berbasis sektor unggulan dan keterkaitan tinggi. Hal ini penting untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi menjelang Indonesia Emas 2045.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas dukungan dana penelitian yang telah diberikan (dana hibah penelitian 2024). Tanpa bantuan dan kepercayaan yang diberikan, pelaksanaan studi ini tidak akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan temuan yang bermanfaat. Ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama yang telah memfasilitasi proses administrasi, *monitoring*, dan evaluasi. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M., Zahrah, Z., Puhakka-Tarvainen, H., & Katsume, H. (2024). Analysis of economic development on west coast regency, indonesia, based on location quotient (lq) and shift share (ss). *Journal of Economics, Innovative Management and Entrepreneurship*, 2(1). <https://doi.org/10.59652/jeime.v2i1.176>
- Aggarwal, R. (2021). Comparative analysis of structural transformation process of selected asian developing economies. *Journal of Asian Economic Integration*, 3(1), 7-24. <https://doi.org/10.1177/2631684621989809>
- Andriansyah, Nurwanda, A., & Rifai, B. (2023). Structural change and regional economic growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 91-117.
- Anurahman, D., Pramuka, B.A., & Putri, N.K. (2023). Systematic literature review of electronic zakat payment. *Oikonomika: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 38-51. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.654>

- Armelly, A., Rusdi, M., & Pasaribu, E. (2021). Analisis sektor unggulan perekonomian indonesia: model input-output. *Sorot*, 16(2), 119. <https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.119-134>
- Asian Development Bank. (2022). Economic insights from input-output tables for Asia and The Pacific. ADB. <https://dx.doi.org/10.22617/TCS220300-2>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Perkembangan ekspor dan impor Indonesia Desember 2023 (No. 06/01/Th.XXVII). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/01/15/2298/ekspor-desember-2023-mencapai-us-22-41-miliar--naik-1-89-persen-dibanding-november-2023-dan-impor-desember-2023-senilai-us-19-11-miliar--turun-2-45-persen-dibanding-november-2023.html>
- Bank Dunia. (2024). Medium and high-tech exports (% manufactured exports)-Indonesia. <https://data.worldbank.org/indicator/TX.MNF.TECH.ZS.UN?view=chart&locations=ID>
- Bui, T., Aminah, H., Wang, C., Tseng, M., Iranmanesh, M., & Lim, M. K. (2022). Developing a food and beverage corporate sustainability performance structure in indonesia: enhancing the leadership role and tenet value from an ethical perspective. *Sustainability*, 14(6), 3658. <https://doi.org/10.3390/su14063658>
- Chowdhury, M. T., Sarkar, A., Paul, S. K., & Moktadir, M. A. (2020). A case study on strategies to deal with the impacts of covid-19 pandemic in the food and beverage industry. *Operations Management Research*, 15(1-2), 166-178. <https://doi.org/10.1007/s12063-020-00166-9>
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dahuri, R. (2023, 18 Agustus). Transformasi struktural ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. *Kompas*. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/17/transformasi-struktural-ekonomi-menusu-indonesia-emas-2045?open_from=Section_Artikel_Terkait
- Daryanto, A. (2017). Pertumbuhan yang berkualitas, dalam Indef (Eds.), Menuju ketangguhan ekonomi: Sumbang saran 100 ekonom Indonesia (pp. 380-384). Kompas Media Nusantara.
- Daryanto, A., & Hafizrianda, Y. (2010). *Analisis input-output dan social accounting matrix untuk pembangunan ekonomi daerah*. IPB Press.
- Erdiawansyah, E., Mahidin, M., Husin, H., Nasaruddin, N., Khairil, K., Zaki, M., & Jalaluddin, J. (2020). Investigation of availability, demand, targets, economic growth, and development of renewable energy in 2017-2050: a case study in indonesia.. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-29395/v2>
- Kim, K., Mungsunti, A., Sumner, A., & Yusuf, A.A. (2020). Structural transformation and inclusive growth. *WIDER Working Paper*, 2020/31.
- Kuncoro, A. (2023, 18 Agustus). Transformasi ekonomi pascapandemi. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/16/transformasi-ekonomi-pasca-pandemi>
- Lubis, M. S., & Putra, I. M. (2022). Sectoral potential analysis for development planning in binjai, deli serdang, karo (bidangro) metropolitan area. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 7(1), 41-50. <https://doi.org/10.14710/ijpd.7.1.41-50>
- Molnar, M., & Leshner, M. (2008). Recovery and beyond: Enhancing competitiveness to realise Indonesia's trade potential. *OECD Trade Policy Papers*, No. 82. <http://dx.doi.org/10.1787/227205773037>
- Mukhlis, I., Hidayah, I., & Sariyani, S. (2018). Economic agglomeration, economic growth and income inequality in regional economy. *Economic Journal of Emerging Markets*, 10(2), 205-212. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol10.iss2.art9>
- Mulyadi, S., Basuki, & Prabowo. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan mixed method: Perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu social, kemanusiaan dan budaya*. Rajawali Pers.
- Oktaviani, M., & Asrol, M. (2022). Supply chain performance analysis and improvement for electricity industry. *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering*, 12(7), 128-139. https://doi.org/10.46338/ijetae0722_14
- Palumpun, D.L., Umar, H.B., & Patinggi, P.N. (2017). Analisis sektor-sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.56076/jkesp.v4i1.2080>
- Rahmiyati, N. (2022). Financial performance analysis of food and beverage companies in the listed food and beverage sector on the indonesia stock exchange. *International Journal of Social Science and Business*, 6(3), 350-356. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i3.49990>
- Rasbin. (2024). Urgensi perubahan struktur ekspor. *Kajian Policy Brief*, 29(1), 7-12.

- Rizani, A. (2020). Analysis of leading sectors potential for economic development planning in Malang city. *Journal of Developing Economies*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.20473/jde.v5i1.18547>
- Saleh, C., Hidayati, F., & Rasyid, N.H. (2023). Public human resources development systematic literature review. In F. Hidayati et al. (Eds.), *International Conference of Public Administration and Governance 2022* (pp. 249-262). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-082-4_24
- Saraswati, P., & Devi, A. (2023). Mixed Methods-Research Methodology an Overview. *Mathews Journal of Nursing and Health Care*. <https://doi.org/10.30654/mjnh.100024>
- Saryatmo, M. A., & Sukhotu, V. (2021). The influence of the digital supply chain on operational performance: a study of the food and beverage industry in indonesia. *Sustainability*, 13(9), 5109. <https://doi.org/10.3390/su13095109>
- Sugiarto, E.C. (2019). Transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*. https://www.setneg.go.id/baca/index/transformasi_ekonomi_menuju_indonesia_maju
- Tjoa, Y., & Arief, M. (2022). Determinants of innovative work behavior: the role of job satisfaction as mediation and environmental dynamism as moderating variable. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. <https://doi.org/10.46254/eu05.20220445>
- Yijo, S., Asnawati, A., Darma, S., Achmad, G. N., Arizandi, M. A. P., Hidayati, T., & Darma, D. C. (2021). Social experiments on problems from tomato farmers during covid-19 -indonesia case. *SAR Journal - Science and Research*, 7-13. <https://doi.org/10.18421/sar41-02>
- Yusuf, A.M. (2015). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Prenadamedia Group.
- Zhao, D., Anwar, S., & Alexander, W. R. J. (2020). Sources of economic slowdown: a simultaneous equations approach. *International Journal of Finance & Economics*, 27(2), 2549-2565. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2286>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

**Manfaat Sertifikasi Produk Bagi Daya Saing:
Studi Kasus Industri Mikro dan Kecil di Indonesia Tahun 2019**
(*Benefits of Product Certification for Competitiveness:
Case Study of Micro and Small Industries in Indonesia, 2019*)

Tirza Magdalena Simamora¹ dan Khoirunurrofik²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No.4, RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, e-mail: ¹tirzasimamora@gmail.com dan ²khoirunurrofik@ui.ac.id

Naskah diterima: 16 Mei 2023
Naskah direvisi: 12 April 2025
Naskah diterbitkan: 30 Juni 2025

Abstract

Industrial competitiveness is a long-standing issue for Indonesia's manufacturing economy, particularly in the micro and small sectors. Product certification is one method for increasing competitiveness. This study uses cross-sectional data from BPS's Survey IMK 2019 and OLS and Logit regression methods to examine the impact of product certification, specifically SNI, other national certificates, international certifications, and trademarks, on the competitiveness of micro and small industries in Indonesia. Income, labor productivity, and exports are all indicators of competitiveness. The findings suggest that owning international certifications and trademarks improves value added, labor productivity, and IMK exports. While the SNI certificate just influences labor productivity. This study also discovered that the control variables used had an effect on increasing the competitiveness of IMK, such as income, expenses, number of workers, capital intensity, age of business, entrepreneur education, ratio of production workforce, ratio of productive age workforce, internet access, partnerships, and training. As a result, the government can continue and incorporate certificate facilitation for IMK to increase its competitiveness.

Keywords: competitiveness, value added, labor productivity, export, product certification, micro and small industry.

Abstrak

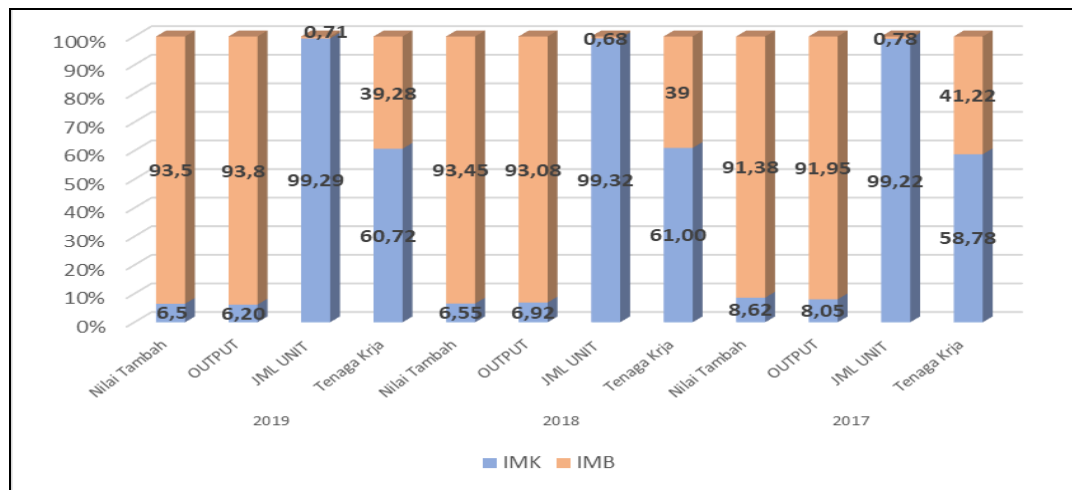
Daya saing industri merupakan permasalahan klasik bagi industri pengolahan Indonesia khususnya sektor mikro dan kecil. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing adalah penerapan sertifikasi produk. Dengan menggunakan data *cross-section* dari Survei IMK Tahun 2019 oleh BPS dan metode regresi OLS dan Logit, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan sertifikasi produk yaitu SNI, sertifikat nasional lainnya, sertifikasi internasional, dan merek dagang terhadap peningkatan daya saing industri mikro dan kecil di Indonesia. Daya saing diukur dengan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, dan ekspor. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat internasional dan merek dagang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, dan ekspor IMK. Sedangkan sertifikat SNI hanya berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel-variabel kontrol yang digunakan juga berpengaruh dalam meningkatkan daya saing IMK, seperti pendapatan, pengeluaran, jumlah tenaga kerja, intensitas modal, umur usaha, pendidikan pengusaha, rasio tenaga kerja produksi, rasio tenaga kerja usia produktif, akses internet, kemitraan, dan pelatihan. Dengan demikian, pemerintah dapat melanjutkan dan mengintegrasikan program fasilitasi sertifikasi produk bagi IMK sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing IMK.

Kata kunci: daya saing, nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, ekspor, sertifikasi produk, industri mikro dan kecil.

PENDAHULUAN

Peran sektor industri pengolahan nonmigas masih menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia. Namun begitu, daya saing sektor industri pengolahan nonmigas Indonesia jauh tertinggal dengan negara lainnya. Indeks performa daya saing Indonesia pada tahun 2018 menempati urutan ke 39 dari total 152 negara, berada di bawah Malaysia, Thailand bahkan Vietnam. (UNIDO, 2019). Permasalahan daya saing merupakan permasalahan klasik dan menjadi perhatian khusus bagi industri pengolahan Indonesia, terlebih bagi sektor industri mikro dan kecil (IMK). Hal ini dapat dilihat dari kinerja IMK yang masih sangat rendah, di mana kontribusi jumlah *output* dan nilai tambahnya sangat kecil dan berbanding terbalik dengan jumlahnya yang mendominasi populasi industri (Gambar 1).

Untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia, pemerintah memberlakukan standarisasi secara nasional bagi produk dan/atau jasa yang dijual di dalam negeri yang diberi nama Standar Nasional Indonesia (SNI). Diharapkan SNI dapat meningkatkan jaminan mutu barang maupun jasa yang diperdagangkan dan juga dapat memfasilitasi produk nasional diterima dalam pasar global (BSN, 2017).



Sumber : BPS 2020, (diolah)

Gambar 1. Grafik Kinerja IMK dan IMB

Selain SNI, terdapat sertifikasi-sertifikasi lain yang harus dimiliki perusahaan untuk dapat bersaing dalam pasar. Sertifikasi lainnya seperti Izin Edar BPOM, Sertifikasi Pangan Produk Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Halal, *Good Manufacturing Practice* (GMP), *Hazard Analysis* dan *Critical Point* (HACCP), merek, paten, hingga *International Organization for Standardization* (ISO).

Studi mengenai manfaat sertifikasi ISO telah dilakukan di banyak negara berkembang, seperti yang dilakukan oleh Mahmood & Hasan (2012); Wilcocks & Boys (2017); Barbosa et al. (2021); dan Magodi et al. (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan sertifikat ISO 9001 berpengaruh terhadap peningkatan kinerja operasional, kinerja bisnis, manajemen rantai pasok, loyalitas pelanggan, dan pengakuan pasar industri di negara Pakistan, Guyana, Brazil, dan Afrika Selatan.

Hasil berbeda dikemukakan oleh Ochieng et al. (2015) yang menyatakan sertifikat ISO 9001 hanya berpengaruh terhadap pengembalian aset, tetapi tidak memengaruhi tingkat pendapatan dan profit industri di Kenya, dan juga Cândido et al. (2016) yang menyatakan bahwa tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan antara perusahaan yang kehilangan sertifikasi dan perusahaan yang melakukan kembali sertifikasi ISO 9001 di Portugal.

Selain itu, terdapat hasil kajian yang dilaporkan oleh *International Trademark Association* (INTA), (2017) yang menyatakan bahwa penggunaan merek dagang pada industri di 5 negara ASEAN: Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura memberikan kontribusi ekonomi yang besar seperti PDB Nasional, lapangan pekerjaan, pangsa pasar ekspor hingga nilai tambah per tenaga kerja.

Di Indonesia juga telah dilakukan studi mengenai manfaat sertifikasi produk terhadap peningkatan daya saing Industri antara lain oleh Sutaminingsih (2018) dan Nurcahyo & Habiburrahman (2021) yang menyatakan sertifikat ISO 9001, penggunaan merek dan kemasan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan daya saing IMK Jawa Timur dan kinerja operasional serta kinerja bisnis industri otomotif Indonesia. Tampubolon et al. (2013) serta Nainggolan & Purwanggono (2019) juga menemukan bahwa penerapan SNI pada produk AMDK dan garam akan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi. Bakhri (2021) menyatakan bahwa kepemilikan sertifikat halal dapat meningkatkan pendapatan pelaku IMK Cirebon sekitar 2,4 kali.

Namun Rahman & Monandes (2021) menemukan hasil yang berbeda dimana penerapan sertifikat SNI pada produk kelapa sawit dan turunannya tidak secara langsung memiliki pengaruh terhadap penguatan daya saing industri nasional, melainkan hanya sebagai kontrol kualitas bagi pasar dalam negeri dan tidak memberikan jaminan akan diterima di pasar luar negeri.

Berdasarkan studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya, sertifikasi produk memberikan dampak yang beragam terhadap peningkatan daya saing industri negara berkembang. Selain itu, studi mengenai manfaat sertifikasi produk terhadap daya saing industri Indonesia hanya dilakukan pada salah satu provinsi atau salah satu sektor industri saja dengan menggunakan sampel yang cukup kecil sehingga belum mampu mencerminkan informasi secara nasional. Hal ini telah dilakukan oleh Sutaminingsih (2018) yang melakukan studi mengenai manfaat sertifikasi ISO, merek, dan kemasan bagi peningkatan daya saing IMK Jawa Timur dengan 75 responden; Nurcahyo & Habiburrahman (2021) dengan studi mengenai hubungan sertifikat ISO

dengan kinerja bisnis dan kinerja operasional industri otomotif Indonesia dengan 50 responden; dan Bakhri (2021) melalui studi mengenai manfaat sertifikasi halal kepada IMK Cirebon dengan 43 responden.

Oleh karena itu, studi ini akan mengisi kesenjangan penelitian dalam menguji hubungan antara sertifikasi terhadap daya saing industri mikro dan kecil di tingkat nasional. Dengan menggunakan unit analisis di tingkat mikro secara nasional dan seluruh sektor Industri, studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan rekomendasi kebijakan nasional untuk meningkatkan daya saing Industri Mikro dan Kecil di Indonesia melalui peningkatan sertifikasi produk. Studi ini akan menggunakan metode regresi OLS dan Logit pada data pengamatan tahun 2019, sesuai ketersediaan variabel sertifikasi produk yang hanya tersedia pada survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) Tahun 2019. Variabel peningkatan daya saing dalam studi ini dibatasi pada variabel nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, dan ekspor.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam studi ini berupa data *cross section* yang diperoleh dari Survei IMK tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BPS. Dalam penelitian ini dilakukan *cleansing* data dari jumlah observasi awal sebanyak 90.295 perusahaan menjadi 89.000 perusahaan. Selain itu dilakukan beberapa agregasi data observasi dari beberapa kelompok KBLI yang memiliki karakteristik yang sama, dikarenakan jumlah unit observasinya yang terlalu sedikit dan nilai dari variabel independen utamanya bernilai 0 semua, sehingga dalam penelitian ini terdapat 16 kelompok KBLI dari semula 33 KBLI.

Berikut agregasi kelompok KBLI yang dilakukan:

- | | |
|---|--|
| 10. Makanan | 22. Karet, barang dari karet dan plastik |
| 11. Minuman | 23. Barang galian bukan logam |
| 12. Pengolahan tembakau | 25. Logam dasar dan barang logam, bukan mesin dan peralatannya |
| 13. Tekstil | 28. Komputer, barang elektronik dan dan optik; peralatan listrik; mesin dan perlengkapan; serta jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan |
| 14. Pakaian jadi | 29. Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer dan alat angkutan lainnya |
| 15. Kulit, barang dari kulit dan alas kaki | 31. Furnitur |
| 16. Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenis | 32. Pengolahan lainnya |
| 18. Pencetakan dan reproduksi media rekaman serta kertas dan barang dari kertas | |
| 20. Bahan kimia, barang dari bahan kimia, farmasi, obat kimia dan tradisional | |

Metode Analisis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak sertifikasi produk dalam meningkatkan daya saing industri mikro dan kecil. Secara teoritis, pendekatan yang paling umum digunakan yaitu fungsi produksi *Cobb-Douglas*. Fungsi produksi menunjukkan hubungan ketergantungan antara tingkat produksi yang dihasilkan (*output*) dengan pemakaian faktor produksi (*input*). Sedangkan fungsi produksi menurut Putong (2014) adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel independen (variabel X) dengan variabel dependen (variabel Y), yang dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut.

$$\ln Y_i = \alpha \ln K_i + \beta \ln L_i + \ln A_i \dots\dots\dots (1)$$

Di mana:

$\ln Y_i$ = nilai log dari pendapatan

$\ln K_i$ = nilai log dari pengeluaran,

$\ln L_i$ = nilai log dari input tenaga kerja perusahaan

$\ln A_i$ = nilai log dari efisiensi biasanya diwakili oleh kemajuan teknologi

α = koefisien elastisitas input modal

β = koefisien elastisitas input tenaga kerja

Menurut Munawir (1995), modal kerja harus mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan, sehingga modal kerja diproyeksikan dengan pengeluaran. Ukuran daya saing dalam penelitian

ini merujuk pada pengukuran yang digunakan oleh UNIDO dan Bappenas dengan menggunakan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, dan ekspor. Nilai tambah merupakan selisih dari pendapatan dan pengeluaran, serta produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan dari pendapatan terhadap jumlah tenaga kerja. Sedangkan ekspor adalah variabel *dummy* dengan 1 (satu) untuk industri yang melakukan ekspor dan 0 (nol) yang tidak melakukan ekspor, sehingga penelitian ini menggunakan metode regresi *Ordinary Least Square* (OLS) untuk melihat dampak sertifikasi produk terhadap nilai tambah dan produktivitas tenaga kerja, dan menggunakan metode regresi logit untuk melihat dampak sertifikasi produk terhadap keputusan untuk melakukan ekspor.

Untuk memastikan keandalan dan konsistensi hasil estimasi model, dilakukan uji ketahanan (*robustness test*) dengan menambahkan beberapa variabel kontrol yang relevan. Penambahan variabel kontrol bertujuan untuk mengidentifikasi apakah hubungan antara variabel independen utama dan variabel dependen tetap konsisten setelah memasukkan faktor-faktor tambahan yang dapat memengaruhi hasil. Berikut 3 (tiga) model penelitian yang digunakan:

1. Model Nilai Tambah

Berdasarkan fungsi produksi Cobb-douglass dan mengacu pada model penelitian yang dilakukan oleh Tunggal & Joesron (2019), yang dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut.

$$\ln Y_i = a + a_1 \ln K_i + a_2 \ln L_i + U \dots\dots\dots (2)$$

Di mana:

Variabel Y (*output*) diproyeksikan oleh nilai tambah, K merupakan modal yang dalam hal ini diproyeksikan dengan pengeluaran, L merupakan jumlah tenaga kerja, dan U merupakan variabel indepen lainnya/variabel kontrol yang memengaruhi tingkat nilai tambah.

Untuk variabel indepen utama dalam penelitian ini adalah sertifikasi produk (*sni*, sertifikat nasional lainnya, sertifikat internasional, dan merek), sehingga terbentuk model persamaan regresi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \ln_nilai\text{tambah}_i = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{sni}_i + \alpha_2 \text{s_nasional}_i + \alpha_3 \text{s_global}_i + \alpha_4 \text{merek}_i + \\ & \alpha_5 \ln_pengeluaran_i + \alpha_6 \ln_tenagakerja_i + \alpha_7 \text{umur_usaha}_i + \alpha_8 \text{educ_pengusaha}_i + \\ & \alpha_9 \text{r_tk_produksi}_i + \alpha_{10} \text{r_usiaproduktif}_i + \alpha_{11} \text{internet}_i + \alpha_{12} \text{kemitraan}_i + \alpha_{13} \text{pelatihan}_i + \\ & i.kbli_i + \varepsilon_i \end{aligned} \dots\dots\dots (3)$$

Di mana:

$\ln_nilai\text{tambah}$	= log natural (pendapatan-pengeluaran) dalam juta rupiah
sni	= kepemilikan sertifikat SNI (<i>dummy</i> var 1=memiliki; 0= tidak)
s_nasional	= kepemilikan sertifikat nasional lainnya (<i>dummy</i> var 1=memiliki; 0=tidak)
s_global	= kepemilikan sertifikat internasional (<i>dummy</i> var 1=memiliki; 0= tidak)
merek	= kepemilikan sertifikat merek (<i>dummy</i> var 1=memiliki; 0= tidak)
$\ln_pengeluaran$	= log natural pengeluaran dalam juta rupiah
$\ln_tenagakerja$	= ln jumlah tenaga kerja
umur_usaha	= tahun survei (2019) - tahun awal usaha mulai beroperasi
educ_pengusaha	= tingkat pendidikan terakhir pemilik usaha (<i>dummy</i> var 1= <i>high education</i> (DI-S3); 0= <i>low education</i> (tidak lulus SD-SMA/SMK))
r_tk_produksi	= jumlah pekerja produksi/ jumlah tenaga kerja dalam persentase
r_usiaproduktif	= Jumlah pekerja berusia 15-49/ jumlah tenaga kerja dalam persentase
internet	= penggunaan internet (<i>dummy</i> var 1=menggunakan; 0= tidak)
kemitraan	= menjalin kemitraan dalam 1 tahun terakhir (<i>dummy</i> var 1=ya; 0= tidak)
pelatihan	= mendapat pelatihan dalam 1 tahun terakhir (<i>dummy</i> var 1=ya; 0= tidak)
$i.kbli$	= variabel <i>individual spesific efect</i>

2. Model Produktivitas Tenaga Kerja

Mengacu pada model penelitian yang dilakukan oleh Karentina (2019) yang mengubah bentuk persamaan fungsi produksi Cobb-douglass dengan cara melakukan pembagian dengan variabel tenaga kerja (L) dan dinyatakan dengan persamaan berikut.

$$\log \frac{Y_i}{L_i} = \log A_i + a \log \frac{K_i}{L_i} \dots\dots\dots (4)$$

Di mana:

$\log \frac{Y_i}{L_i}$ merupakan produktivitas tenaga kerja dan $\log \frac{K_i}{L_i}$ merupakan intensitas modal.

Dengan menambahkan variabel independen utama sertifikasi produk dan variabel kontrol, sehingga terbentuk model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln_produktif_tk_i = \beta_0 + \beta_1 sni_i + \beta_2 s_nasional_i + \beta_3 s_global_i + \beta_4 merek_i + \beta_5 \ln_intmodal_i + \beta_6 umur_usaha_i + \beta_7 educ_pengusaha_i + \beta_8 r_tk_produksi_i + \beta_9 r_usiaproduktif_i + \beta_{10} internet_i + \beta_{11} kemitraan_i + \beta_{12} pelatihan_i + i.kbli_i \quad (2) \quad \dots\dots\dots (5)$$

dimana:

$\ln_produktif_tk$ = log natural (pendapatan/jumlah pekerja) dalam juta rupiah/orang
 sni = kepemilikan sertifikat SNI (dummy var 1=memiliki; 0= tidak)
 $s_nasional$ = kepemilikan sertifikat nasional lainnya (dummy var 1=memiliki; 0=tidak)
 s_global = kepemilikan sertifikat internasional (dummy var 1=memiliki; 0= tidak)
 $merek$ = kepemilikan sertifikat merek (dummy var 1=memiliki; 0= tidak)
 $\ln_int_modal$ = log natural (pengeluaran/jumlah pekerja) dalam juta rupiah/orang
 $umur_usaha$ = tahun survei (2019) - tahun mulai beroperasi
 $educ_pengusaha$ = tingkat pendidikan terakhir pemilik usaha (dummy var 1= *high education* (DI-S3); 0= *low education* (tidak lulus SD-SMA/SMK))
 $r_tk_produksi$ = jumlah pekerja produksi/ jumlah tenaga kerja dalam persentase
 $r_usiaproduktif$ = Jumlah pekerja berusia 15-49/ jumlah tenaga kerja dalam persentase
 $internet$ = penggunaan internet dalam usaha (dummy var 1=ya; 0= tidak)
 $kemitraan$ = menjalin kemitraan 1 tahun terakhir (dummy var 1=ya; 0= tidak)
 $pelatihan$ = mendapat pelatihan 1 tahun terakhir (dummy var 1=ya; 0= tidak)
 $i.kbli$ = variabel *individual spesific efect*

3. Model Ekspor

Model ini menggunakan regresi logit, karena menggunakan *dummy variable* ekspor sebagai variabel dependennya, dengan nilai 1 untuk industri yang melakukan ekspor dan 0 yang tidak melakukan ekspor. Berdasarkan hasil studi Ginting (2011), faktor yang memengaruhi UMKM untuk ekspor adalah peningkatan pangsa pasar dan biaya logistik yang murah. Maka dalam penelitian ini pendapatan diproksikan sebagai pangsa pasar dan pengeluaran sebagai biaya logistik karena dalam data survei IMK tahun 2019 hanya terdapat informasi total pengeluaran. Untuk variabel independen utama dan variabel kontrol lainnya sama dengan 2 model sebelumnya, sehingga terbentuk model persamaan regresi sebagai berikut.

$$d_ekspor_i = \gamma_0 + \gamma_1 sni_i + \gamma_2 s_nasional_i + \gamma_3 s_global_i + \gamma_4 merek_i + \gamma_5 \ln_pendapatan_i + \gamma_6 \ln_pengeluaran_i + \gamma_7 \ln_tenagakerja_i + \gamma_8 umur_usaha_i + \gamma_9 educ_pengusaha_i + \gamma_{10} r_tk_produksi_i + \gamma_{11} r_usiaproduktif_i + \gamma_{12} internet_i + \gamma_{13} kemitraan_i + \gamma_{14} pelatihan_i + i.kbli_i + e_i \quad \dots\dots\dots (6)$$

di mana:

d_ekspor = keputusan melakukan ekspor (dummy var 1= ya; 0= tidak)
 sni = kepemilikan sertifikat SNI (dummy var 1=memiliki; 0= tidak)
 $s_nasional$ = kepemilikan sertifikat nasional lainnya (dummy var 1=memiliki; 0= tidak)
 s_global = kepemilikan sertifikat internasional (dummy var 1=memiliki; 0= tidak)
 $merek$ = kepemilikan sertifikat merek (dummy var 1=memiliki; 0= tidak)
 $\ln_pengeluaran$ = log natural pengeluaran dalam juta rupiah
 $\ln_tenagakerja$ = ln jumlah tenaga kerja
 $umur_usaha$ = tahun survei (2019) - tahun mulai beroperasi
 $educ_pengusaha$ = tingkat pendidikan terakhir pemilik usaha (dummy var 1= *high education* (DI-S3); 0= *low education* (tidak lulus SD-SMA/SMK))
 $r_tk_produksi$ = jumlah pekerja produksi/ jumlah tenaga kerja dalam persentase
 $r_usiaproduktif$ = Jumlah pekerja berusia 15-49/ jumlah tenaga kerja dalam persentase

internet	= penggunaan internet dalam usaha (dummy var 1=ya; 0= tidak)
kemitraan	= menjalin kemitraan dalam 1 tahun terakhir (dummy var 1=ya; 0= tidak)
pelatihan	= mendapat pelatihan dalam 1 tahun terakhir (dummy var 1=ya; 0= tidak)
i.kbli	= variable individual spesifik effect

Untuk memastikan validitas hasil estimasi memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), dilakukan uji asumsi klasik pada regresi model nilai tambah dan produktivitas tenaga kerja. Untuk mengatasi potensi heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan robust standard error, yang memungkinkan hasil estimasi tetap reliabel meskipun varians error tidak homogen. Selain itu, efek tetap (fixed effect) pada tingkat kategori Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) diterapkan dengan menambahkan variable individual spesifik effect yaitu i.kbli untuk mengontrol variasi spesifik antar kelompok industri yang tidak terobservasi tetapi tetap konstan dalam data. Pendekatan ini mengurangi risiko bias estimasi akibat variabel omitted yang bersifat tetap antar kelompok KBLI.

Pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk semua variabel independen berada di bawah ambang batas 5, yang mengindikasikan tidak adanya masalah multikolinearitas. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui karakteristik variabel-variabel yang digunakan dalam model penelitian digunakan analisis statistik deskriptif. Dengan mengetahui karakteristik dari setiap variable, diharapkan dapat ditemukan gejala maupun indikasi yang dapat mendukung analisis penelitian.

Tabel 1. Jumlah IMK Menurut KBLI

KBLI	Freq.	Percent
10	21.150	23.76
11	4.199	4.72
12	2.312	2.60
13	6.276	7.05
14	11.683	13.13
15	1.814	2.04
16	11.754	13.21
18	2.191	2.46
20	1.651	1.86
22	630	0.71
23	8.401	9.44
25	5.742	6.45
28	614	0.69
29	947	1.06
31	4.597	5.17
32	5.039	5.66
Total	89.000	100.00

Sumber: BPS, 2019 (diolah)

Tabel 2. Persentase Sertifikat Produk

Var	Freq.	Percent
SNI		
Tidak	88.132	99.02
Ya	868	0.98
Total	89.000	100.00
Sertifikat Nasional		
Tidak	86.018	96.65
Ya	2.982	3.35
Total	89.000	100.00
Sertifikat Internasional		
Tidak	88.778	99.75
Ya	222	0.25
Total	89.000	100.00
Sertifikat Merek		
Tidak	86.802	97.53
Ya	2.198	2.47
Total	89.000	100.00

Sumber: BPS, 2019 (diolah)

Dari Tabel 1 di atas dapat kita lihat bahwa 3 jenis usaha (KBLI) yang mendominasi data observasi ini adalah KBLI 10, 16 dan 14. Di mana KBLI 10 berada pada urutan pertama 23,76 persen atau 21.150 unit observasi merupakan industri makanan. Urutan kedua KBLI 16 sebesar 13,21 persen atau 11.754 unit observasi merupakan industri kayu tidak termasuk furnitur serta barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. Urutan ketiga adalah KBLI 14 sebesar 13,13 persen atau 11.683 unit observasi merupakan industri pakaian jadi. Hal ini mencerminkan kebutuhan utama masyarakat yakni sandang, pangan, dan papan. Sedangkan Tabel 2 menyajikan persentase penerapan sertifikasi produk pada unit observasi. Di mana penerapan sertifikasi produk hingga tahun 2019 masih sangat minim, hanya 868 IMK (1%) yang memiliki sertifikat SNI, 2.982 IMK (3,35%) yang memiliki sertifikat nasional lainnya, 222 IMK (0,25%) yang memiliki sertifikat internasional, dan 2.198 IMK (2,47%) yang memiliki merek. Biaya yang tidak sedikit dan proses yang cukup panjang menjadi alasan minimnya IMK memiliki sertifikasi.

Oleh sebab itu, DPR sebagai lembaga legislative mempunyai tiga fungsi strategis untuk mengatasi hal tersebut: 1) fungsi legislasi, DPR telah menyusun UU pengganti UU terkait Cipta Kerja yang salah satunya mengatur terkait penerapan perizinan berusaha berdasarkan resiko, dimana Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal industri dengan tingkat risiko rendah. Untuk industry dengan tingkat resiko menengah dan tinggi perizinan berupa NIB dan sertifikat standar sesuai yang dipersyaratkan; 2) fungsi anggaran, DPR telah menyetujui anggaran (APBN) terkait program pembinaan dan fasilitasi sertifikasi produk IMK yang telah disusun oleh kementerian teknis terkait. Terdapat beberapa contoh program/kegiatan yang berasal dari APBN, antara lain: SEHATI (sertifikasi halal gratis) yang diselenggarakan oleh BPJPH Kementerian Agama, kegiatan pendampingan dan fasilitasi sertifikat halal yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian, program pendampingan penerapan SNI (termasuk fasilitasi biaya pengujian dan pemeliharaan) yang diselenggarakan oleh BSN, program fasilitasi merek dan hak cipta serta sertifikasi HACCP yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM; 3) fungsi pengawasan, DPR perlu meminta laporan dan mengevaluasi program sertifikasi yang dijalankan oleh kementerian/lembaga, apakah benar-benar berdampak dan merata diseluruh daerah di Indonesia. Selain itu DPR juga dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan asosiasi pelaku usaha/industry mikro dan kecil terkait hambatan dalam memperoleh sertifikasi dan memperjuangkannya dalam sidang-sidang komisi terkait.

Hasil Regresi

1. Pengaruh Sertifikasi Produk terhadap Peningkatan Nilai Tambah

Tabel 3 menunjukkan 5 model estimasi hubungan antara sertifikasi produk dan nilai tambah, dimana model 1 merupakan model dasar, model 2 merupakan model dasar dengan penambahan *variable individual spesific efect* yaitu i.kbli dan model 3-5 merupakan model dengan penambahan kontrol. Dari 5 model tersebut dipilih model 4 karena menghasilkan nilai estimasi yang terbaik dan variable sertifikasi internasional signifikan, sedangkan model 5 penambahan variable control membuat nilai estimasi menurun dan tidak signifikan (*under estimated*).

Berdasarkan model 4, hasil menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah IMK hanya dipengaruhi oleh kepemilikan sertifikat internasional dan sertifikat merek dagang. Di mana, IMK yang mempunyai sertifikat internasional memiliki nilai tambah 0,102 persen lebih tinggi daripada yang tidak memiliki sertifikat internasional. Dengan menerapkan sertifikasi internasional, maka IMK dapat menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi ataupun dapat mengurangi biaya produksinya dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya yang tidak memiliki sertifikat internasional. Hal ini sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Mahmood & Hasan (2012); Wilcock & Boys (2017); Sutaminingsih (2018); serta Nurcahyo & Habiburrahman (2021) yang menyatakan sertifikat ISO berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan maupun pengurangan biaya produksi.

Tabel 3. Hasil Regresi Sertifikasi Produk terhadap Variabel Nilai Tambah

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VARIABLES	ln_nilai tambah	ln_nilai tambah	ln_nilai tambah	ln_nilai tambah	ln_nilai tambah
sni	0.0155 (0.0381)	0.00336 (0.0380)	0.00545 (0.0380)	-0.00377 (0.0380)	-0.00488 (0.0380)
s_nasional	-0.0163 (0.0181)	0.0177 (0.0179)	0.0184 (0.0179)	0.0130 (0.0179)	0.0129 (0.0179)
s_global	0.158** (0.0703)	0.111* (0.0693)	0.112* (0.0693)	0.102* (0.0692)	0.0933 (0.0691)
merek	0.131*** (0.0236)	0.159*** (0.0237)	0.159*** (0.0237)	0.141*** (0.0238)	0.142*** (0.0237)
ln_pengeluaran	0.539*** (0.00224)	0.544*** (0.00234)	0.545*** (0.00235)	0.543*** (0.00238)	0.540*** (0.00238)
ln_tk	0.100*** (0.00630)	0.0730*** (0.00649)	0.0720*** (0.00651)	0.0647*** (0.00651)	0.0596*** (0.00665)
d_umurusaha			0.0291*** (0.00585)	0.0336*** (0.00587)	0.0577*** (0.00608)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VARIABLES	ln_nilai tambah	ln_nilai tambah	ln_nilai tambah	ln_nilai tambah	ln_nilai tambah
educ_pengusaha			-0.00862 (0.0137)	-0.0183 (0.0137)	-0.0202 (0.0138)
d_kemitraan				0.151*** (0.0119)	0.150*** (0.0119)
d_pelatihan				0.00953 (0.0150)	0.00738 (0.0150)
d_internet				0.0453*** (0.00881)	0.0357*** (0.00883)
r_tk_produksi					0.0361* (0.0204)
r_tk_usiaproduktif					0.116*** (0.00740)
i.kbli	NO	YES	YES	YES	YES
Constant	0.137*** (0.00410)	-0.132*** (0.00642)	-0.144*** (0.00690)	-0.155*** (0.00695)	-0.268*** (0.0217)
Observations	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000
R-squared	0.598	0.619	0.619	0.620	0.621

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: Hasil output Stata (diolah)

Bagi IMK yang mempunyai sertifikat merek dagang memiliki nilai tambah lebih tinggi 0,159 persen daripada yang tidak memiliki sertifikat merek dagang. Dengan mempunyai sertifikat merek dagang sebuah produk memiliki identitas yang menjadi pembeda dengan produk lainnya. Konsumen dapat dengan mudah mengenali produk melalui merek dagang sehingga berdampak pada peningkatan penjualan, yang secara langsung meningkatkan nilai tambah bagi industri. Hal ini sejalan dengan hasil yang temukan INTA (2017) yang menyatakan industri insentif merek dagang secara langsung berkontribusi sepertiga hingga seperlima terhadap PDB nasional. Selain itu dengan adanya sertifikat merek perusahaan memiliki jaminan hukum atas penggunaan merek dagang tersebut.

Sedangkan untuk sertifikat SNI dan sertifikat nasional lainnya tidak berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah. Hal ini sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Rahman & Monandes (2021) serta Jannati & Zaenudin (2024) di mana sertifikat SNI tidak berpengaruh terhadap peningkatan daya saing produk dan sertifikasi halal tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan UMKM namun hanya berpengaruh terhadap kinerja operasional. Gilang (2015) juga menemukan bahwa penerapan SNI di Indonesia belum optimal dan menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, biaya pengujian atau sertifikasi yang mahal, dan kurangnya sosialisasi sistem manajemen mutu di industri. Hambatan-hambatan tersebut yang dapat mengurangi efektivitas penerapan SNI dalam meningkatkan nilai tambah produk sehingga penerapan SNI dan sertifikat nasional lainnya tidak berpengaruh terhadap nilai tambah.

Selain itu hasil menunjukkan bahwa modal, jumlah tenaga kerja, umur usaha, pendidikan pengusaha, pelatihan, kemitraan, dan penggunaan internet juga memengaruhi peningkatan nilai tambah imk. Hal ini sejalan dengan penelitian Tunggal & Joesron (2019) yang menemukan bahwa modal, tenaga kerja, pelatihan dan internet berpengaruh positif terhadap nilai tambah; Diana (2019) yang menemukan bahwa umur perusahaan di atas 10 tahun lebih berpotensi untuk mendapatkan permodalan dari bank sehingga dapat meningkatkan nilai tambah; serta Nirwesti & Nachrowi (2018) yang menemukan bahwa kemitraan meningkatkan akses pasar dan transfer teknologi sehingga meningkatkan penjualan yang secara langsung meningkatkan pendapatan dan juga mengurangi pengeluaran.

2. Pengaruh Sertifikasi Produk terhadap Produktivitas Tenaga Kerja

Tabel 4 menunjukkan hubungan antara sertifikasi produk dan produktivitas tenaga kerja dimana model 4 karena menghasilkan nilai estimasi yang terbaik dan variable independen berpengaruh secara signifikan dengan nilai Adj R-square tetap sebesar 0,853.

Berdasarkan model 4, hasil menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh kepemilikan sertifikat SNI, sertifikat internasional, dan sertifikat merek dagang. Hanya sertifikat nasional lainnya yang tidak berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja didefinisikan sebagai banyaknya *output* yang dihasilkan oleh setiap pekerja, maka peningkatan produktivitas tenaga kerja diakibatkan dari meningkatnya *output*/pendapatan maupun berkurangnya jumlah tenaga kerja yang digunakan, sehingga sertifikat internasional dan sertifikat merek dagang yang berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah (selisih dari pendapatan dan pengeluaran) akan berpengaruh juga terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Dari hasil regresi, dapat dilihat bahwa IMK yang memiliki sertifikat SNI memiliki produktivitas tenaga kerja 0,03 persen lebih tinggi daripada yang tidak memiliki sertifikat SNI. Dengan menerapkan sertifikasi SNI, maka IMK dapat meningkatkan *output*/pendapatannya maupun mengefisienkan tenaga kerja dengan penggunaan teknologi dibandingkan pesaingnya. Hal ini sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Tampubolon et al. (2013) serta Nainggolan & Purwanggono (2019) yang menyatakan SNI berpengaruh dalam meningkatkan nilai ekonomi suatu produk.

Selanjutnya, dari hasil regresi terlihat bahwa IMK yang memiliki sertifikat internasional, memiliki produktivitas tenaga kerja 0,117 persen lebih tinggi daripada yang tidak memiliki sertifikat internasional. Mahmood & Hasan (2012); Wilcock & Boys (2017); Barbosa et al. (2021); serta Sutaminingsih (2018) menyatakan sertifikat ISO (sertifikat yang diakui secara internasional) berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi karyawan, berkurangnya pengerjaan ulang, hingga peningkatan omset.

Berdasarkan hasil regresi juga dapat dilihat bahwa IMK yang memiliki sertifikat merek dagang memiliki produktivitas tenaga kerja lebih tinggi 0,056 persen daripada yang tidak memiliki sertifikat merek dagang. Hal ini sejalan dengan hasil yang temukan INTA (2017) yang menyatakan industri insentif merek dagang juga memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan nilai tambah per pekerja sekitar 90 persen.

Tabel 4. Hasil Regresi Sertifikasi Produk terhadap Produktivitas Tenaga Kerja

VARIABLES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ln_produk tivities_tk	ln_produk tivities_tk	ln_produk tivities_tk	ln_produk tivities_tk	ln_produk tivities_tk
sni	0.0298* (0.0176)	0.0269 (0.0172)	0.0291* (0.0172)	0.0304* (0.0172)	0.0255 (0.0172)
s_nasional	-0.0115 (0.00927)	0.0103 (0.00908)	0.0109 (0.00908)	0.0110 (0.00907)	0.00857 (0.00908)
s_global	0.159*** (0.0425)	0.120*** (0.0413)	0.121*** (0.0413)	0.117*** (0.0412)	0.111*** (0.0409)
merek	0.0449*** (0.0114)	0.0527*** (0.0114)	0.0548*** (0.0114)	0.0563*** (0.0114)	0.0485*** (0.0114)
ln_intmodal	0.719*** (0.00152)	0.724*** (0.00155)	0.725*** (0.00156)	0.724*** (0.00159)	0.724*** (0.00160)
d_umurusaha			0.00503 (0.00328)	0.0168*** (0.00338)	0.0174*** (0.00338)
educ_pengusaha			-0.0323*** (0.00648)	-0.0310*** (0.00649)	-0.0306*** (0.00653)
r_tk_produksi				0.133*** (0.00972)	0.137*** (0.00975)
r_tk_usiaproduktif				0.0563*** (0.00433)	0.0551*** (0.00434)
d_kemitraan					0.114*** (0.00706)
d_pelatihan					-0.0228*** (0.00794)
d_internet					-0.00504 (0.00432)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VARIABLES	ln_produk tivitas_tk	ln_produk tivitas_tk	ln_produk tivitas_tk	ln_produk tivitas_tk	ln_produk tivitas_tk
i.kbli	NO	YES	YES	YES	YES
Constant	0.816*** (0.00173)	0.660*** (0.00279)	0.659*** (0.00315)	0.492*** (0.0103)	0.482*** (0.0103)
Observations	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000
R-squared	0.842	0.853	0.853	0.853	0.854

Robust standard errors in parentheses *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Sumber: Hasil output Stata (diolah)

Selain itu, ditemukan bahwa intensitas modal, umur usaha, rasio tenaga kerja produksi dan rasio tenaga kerja usia produktif juga memengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja IMK. Hal ini sejalan dengan hasil yang ditemukan Karentina (2019) bahwa intensitas modal memengaruhi produktivitas tenaga kerja. Selain itu juga sejalan dengan temuan Tunggal & Joesron (2019) yang menunjukkan bahwa semakin lama usaha beroperasi menandakan pengalaman yang dimiliki juga semakin banyak sehingga meningkatkan produktivitas, keuntungan, dan menurunkan hutang. Serta sejalan dengan penelitian Mahmood & Hasan (2012) yang menyatakan bahwa karyawan berusia muda/berusia produktif lebih mudah beradaptasi sehingga memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Namun di sisi lain terdapat temuan yang berbeda di mana pendidikan pengusaha berpengaruh secara negatif terhadap produktivitas tenaga kerja di mana IMK dengan pengusaha yang berpendidikan tinggi memiliki produktivitas tenaga kerja. Hasil ini sejalan dengan Tunggal & Joesron (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi kurang diperlukan untuk mengelola IMK.

3. Pengaruh Sertifikasi Produk terhadap Ekspor

Tabel 5 menunjukkan hubungan sertifikasi produk dengan keputusan melakukan ekspor. Terdapat perbedaan jumlah observasi pada model 1 yang berjumlah 89.000 unit dengan model 2-5 yang berjumlah 86.688 unit. Hal ini dikarenakan pada KBLI 12 variabel ekspor bernilai 0 semua sehingga KBLI 12 yang berjumlah 2.312 unit observasi dihilangkan pada model regresi. Dalam regresi logit untuk menentukan model terbaik dapat dilihat dari nilai AIC, dan BIC yang paling kecil, maupun nilai *Log likelihood* yang paling besar. Maka dipilih model 5 sebagai model terbaik.

Table 5. Hasil Regresi Logit Sertifikasi Produk terhadap Ekspor

VARIABEL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
d_ekspor	odds ratio	odds ratio	odds ratio	odds ratio	odds ratio
sni	0.811 (0.295)	0.791 (0.295)	0.792 (0.295)	0.681 (0.257)	0.669 (0.253)
s_nasional	1.068 (0.254)	1.410 (0.331)	1.411 (0.331)	1.240 (0.298)	1.231 (0.296)
s_global	6.087*** (2.263)	4.932*** (1.928)	4.936*** (1.930)	4.400*** (1.771)	4.253*** (1.713)
merek	4.123*** (0.851)	4.136*** (0.865)	4.130*** (0.864)	3.050*** (0.658)	3.053*** (0.660)
ln_pendapatan	1.938*** (0.133)	1.824*** (0.136)	1.824*** (0.136)	1.749*** (0.134)	1.721*** (0.133)
ln_pengeluaran	0.621*** (0.0335)	0.715*** (0.0414)	0.715*** (0.0414)	0.657*** (0.0393)	0.656*** (0.0395)
d_umurusaha			1.039 (0.105)	1.218* (0.125)	1.285** (0.136)
educ_pengusaha				1.805*** (0.284)	1.773*** (0.279)
d_kemitraan				1.281* (0.184)	1.276* (0.183)

VARIABEL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
d_ekspor	odds ratio	odds ratio	odds ratio	odds ratio	odds ratio
d_pelatihan				1.343 (0.242)	1.355* (0.244)
d_internet				3.543*** (0.428)	3.443*** (0.417)
r_tk_produksi					0.654 (0.212)
r_tk_usiaproduktif					1.360** (0.199)
i.kbli	NO	YES	YES	YES	YES
Constant	0.00202*** (0.000203)	0.000736*** (0.000141)	0.000723*** (0.000143)	0.000563*** (0.000113)	0.000683*** (0.000262)
Observations	89,000	86,688	86,688	86,688	86,688
Pseudo R-squared	0.113	0.113	0.113	0.113	0.113
AIC	5022.9	4747.0	4748.8	4611.3	4609.1
BIC	5088.6	4943.7	4955.0	4854.9	4871.4
Log lik-	-2504.4	-2352.5	-2352.4	-2279.6	-2276.5

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: Hasil output Stata (diolah)

Dalam regresi logit, besarnya pengaruh ditunjukkan dengan nilai *odds ratio*. Hasil estimasi model 5 menunjukkan hanya sertifikat internasional dan sertifikat merek dagang yang berpengaruh terhadap peluang peningkatan ekspor IMK. Hasil menunjukkan bahwa IMK yang memiliki sertifikat produk internasional berpeluang untuk melakukan ekspor 4,25 kali lebih tinggi daripada IMK yang tidak memiliki sertifikat internasional. IMK yang memiliki sertifikat merek dagang berpeluang untuk melakukan ekspor 3,05 kali lebih tinggi daripada IMK yang tidak memiliki sertifikat merek dagang. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barbosa et al. (2021) yang menyatakan sertifikat internasional dapat meningkatkan pengakuan oleh pasar baik domestik maupun internasional dan INTA (2017) yang menyatakan merek dagang berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Dengan memiliki sertifikat internasional dan merek maka IMK mendapatkan pengakuan baik di pasar domestik maupun pasar global yang mengakibatkan peningkatan penjualan, nilai tambah hingga peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya peningkatan seperti itu peluang IMK untuk melakukan ekspor semakin tinggi.

Namun di sisi lain, hasil menunjukkan bahwa sertifikat SNI dan sertifikat nasional lainnya tidak berpengaruh terhadap peluang peningkatan ekspor IMK. Hasil ini sejalan dengan temuan Rahman & Monandes (2021) yang menyatakan penerapan SNI hanya sebagai pemberi kontrol kualitas bagi pasar dalam negeri saja dan tidak ada jaminan akan diterima di pasar luar negeri. Hal ini juga berlaku pada sertifikat nasional lainnya karena syarat-syarat suatu produk dapat diperjual belikan di suatu negara akan berbeda dengan negara lainnya, dan untuk negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika memiliki standar atau syarat yang lebih ketat dibandingkan negara berkembang.

Selain itu variabel kontrol lainnya berpengaruh terhadap peningkatan peluang ekspor hanya variabel rasio pekerja produksi yang tidak berpengaruh. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Ginting (2011) yang menyatakan bahwa pangsa pasar (dalam penelitian ini diproksikan oleh pendapatan) yang lebih besar dan biaya logistik (dalam penelitian ini diproksikan oleh pengeluaran) yang lebih murah akan mendorong IMK untuk meningkatkan ekspor. Sejalan dengan Nirwesti & Nachrowi (2018) yang menyebutkan bahwa kemitraan akan menciptakan konsolidasi yang memberikan manfaat bagi IMK, antara lain terbukanya akses untuk informasi pasar, transfer teknologi dan pengetahuan serta peningkatan nilai tawar, hal tersebut dapat meningkatkan peluang IMK untuk ekspor. Selain itu IMK yang mendapatkan pelatihan berpeluang melakukan ekspor lebih tinggi, sejalan dengan temuan yang diperoleh Mahmood & Hasan (2012) di mana industri yang mendapatkan pelatihan secara berkala berpengaruh terhadap peningkatan *competitive advantage* dan *customer satisfaction*, sehingga peluang ekspor semakin besar.

4. Pengaruh Sertifikasi Produk berdasarkan Ukuran Usaha

Regresi ini dilakukan untuk melihat dampak sertifikasi produk terhadap nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, dan ekspor pada industri mikro dan industri kecil secara terpisah. Model penelitian yang digunakan tetap sama dengan model nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, dan ekspor yang sebelumnya. Dari Tabel 6 terlihat bahwa jumlah industri mikro jauh lebih banyak yaitu 82.949 unit atau sebesar 90,32 persen, sedangkan industri kecil hanya 6.058 unit atau sebesar 9,68 persen dari jumlah observasi. Untuk model regresi ekspor jumlah observasi berkurang karena unit observasi pada KBLI 12 dihilangkan (tidak ada yang melakukan ekspor/bernilai 0 semua), sehingga jumlah industri mikro menjadi 81.539 unit dan industri kecil menjadi 5,026 unit.

Berdasarkan hasil regresi (Tabel 6) pada kolom 1, hanya sertifikat merek yang memengaruhi nilai tambah secara positif baik di industri mikro maupun industri kecil. Di mana pengaruh merek lebih besar pada industri kecil dengan nilai estimasi sebesar 0,159 persen sedangkan nilai estimasi merek terhadap nilai tambah sebesar 0,130 persen pada industri mikro. Hasil ini menunjukkan bahwa skala usaha juga berperan dalam bagaimana merek dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah. Industri kecil memiliki kapasitas produksi, jaringan pemasaran, dan sumber daya yang lebih baik dibandingkan industri mikro, sehingga dapat lebih maksimal memanfaatkan keuntungan dari kepemilikan merek.

Hasil regresi pada kolom 2 menunjukkan pengaruh sertifikasi produk berbeda terhadap produktivitas tenaga kerja antara industri mikro dan industri kecil. Pada industri mikro, sertifikat SNI, internasional dan merek berpengaruh secara positif terhadap produktivitas tenaga kerja, sedangkan pada industri kecil hanya sertifikat merek yang berpengaruh secara positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Hasil ini menunjukkan bahwa industri kecil lebih membutuhkan penguatan merek untuk ekspansi pasar yang berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dibandingkan sertifikasi SNI dan Internasional karena industri kecil mungkin sudah memiliki standar produksi yang lebih baik. Sedangkan bagi industri mikro sertifikasi/standar produk dan merek dapat memberikan kepercayaan pasar, peningkatan kualitas produk, dan efisiensi dalam proses produksi, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas.

Berdasarkan hasil regresi pada kolom 3, sertifikasi produk memiliki pengaruh yang berbeda terhadap industri mikro dan industri kecil. Pada industri mikro, sertifikat nasional lainnya, internasional dan merek berpengaruh secara positif terhadap peluang ekspor, sedangkan pada industri kecil hanya sertifikat merek yang berpengaruh secara positif terhadap peluang ekspor. Hasil ini mengindikasikan bahwa bagi industri mikro, sertifikasi nasional lainnya masih berperan dalam membantu mereka mendapatkan akses ke pasar ekspor, dan sertifikasi internasional serta merek dapat meningkatkan kepercayaan konsumen luar negeri terhadap produk mereka. Sedangkan bagi industri kecil yang mungkin sudah memiliki pengalaman ekspor sertifikasi tambahan tidak signifikan memberikan manfaat namun penguatan merek lebih penting dalam menarik pelanggan internasional dan bersaing di pasar ekspor.

Tabel 6. Hasil Regresi Sertifikasi Produk berdasarkan Ukuran Usaha

VARIABEL	ln_nilai tambah		ln_produkтив_tk		Odds ratio ekspor	
	mikro	kecil	Mikro	kecil	mikro	kecil
Sni	-0.0121 (0.0356)	0.0358 (0.0777)	0.0344* (0.0202)	0.0353 (0.0227)	0.744 (0.378)	0.429 (0.250)
s_nasional	0.0112 (0.0175)	0.0130 (0.0567)	0.0107 (0.00993)	-0.00615 (0.0165)	1.594* (0.405)	0.391 (0.239)
s_global	0.0815 (0.0607)	0.286 (0.180)	0.125*** (0.0344)	0.0598 (0.0524)	4.543*** (2.063)	2.947* (2.704)
merek	0.130*** (0.0235)	0.159*** (0.0529)	0.0641*** (0.0133)	0.0438*** (0.0154)	2.857*** (0.755)	3.497*** (1.293)
control	YES	YES	YES	YES	YES	YES
i.kbli	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Constant	-0.155*** (0.00717)	-0.414*** (0.0651)	0.496*** (0.0124)	0.371*** (0.0231)	0.00051*** (0.000246)	0.00318*** (0.00296)
Observations	82,942	6,058	82,942	6,058	81,539	5,026
Adj /Pseudo R-quared	0.587	0.474	0.847	0.940	0.0988	0.168

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: Hasil *output* Stata (diolah)

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bukti yang mendukung adanya manfaat dari penerapan sertifikasi produk terhadap peningkatan daya saing industri mikro dan kecil Indonesia. Sebagian penerapan sertifikasi produk berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, dan ekspor IMK, di mana kepemilikan sertifikat internasional dan sertifikat merek dagang berpengaruh positif dalam meningkatkan nilai tambah IMK, dan pengaruh paling besar diberikan oleh sertifikat merek dagang. Kepemilikan sertifikat SNI, sertifikat internasional dan sertifikat merek dagang berpengaruh positif dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja IMK, dan pengaruh paling besar diberikan oleh sertifikat internasional. Kepemilikan sertifikat internasional dan sertifikat merek dagang berpeluang lebih besar dalam meningkatkan keputusan melakukan ekspor IMK. Namun hanya kepemilikan sertifikat nasional lainnya yang tidak berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, maupun keputusan melakukan ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi dari lembaga nasional terindikasi kurang diakui di tingkat internasional maupun nasional. Selain itu, cakupan sertifikat nasional lainnya dalam observasi ini tidak dijelaskan, hal ini juga dapat menjadi salah satu penyebab tidak berpengaruhnya sertifikat nasional lainnya terhadap peningkatan daya saing IMK di Indonesia.

Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel-variabel kontrol yang digunakan juga berpengaruh dalam meningkatkan daya saing IMK. Selain itu penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan pengaruh dari sertifikasi produk terhadap berbagai indikator kinerja IMK berdasarkan ukuran perusahaan. Sertifikasi produk lebih berpengaruh pada industri mikro dibandingkan dengan industri kecil, dan hanya sertifikat merek yang berpengaruh terhadap nilai tambah, produktivitas tenaga kerja, dan ekspor pada kedua industri. Sedangkan sertifikat internasional dan SNI hanya berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri mikro namun tidak berpengaruh pada industri kecil.

SARAN

Penelitian ini terbatas pada penggunaan data survei IMK tahun 2019 saja, sehingga diperlukan studi lanjutan untuk melihat dampak sertifikat produk terhadap daya saing dengan periode pengamatan yang lebih lama, agar pengaruh yang diberikan dapat terlihat lebih jelas dengan adanya data yang dinamis. Selain itu diperlukan studi lanjutan untuk melihat dampak dari sertifikasi produk berdasarkan kelompok KBLI mengingat beberapa kelompok KBLI memiliki kebutuhan sertifikasi produk yang berbeda dan perlu adanya *breakdown* dari variabel sertifikat nasional lainnya mengingat sertifikat yang berlaku secara nasional sangat banyak dan berbeda-beda fungsinya.

Berdasarkan temuan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri mikro dan kecil di Indonesia, antara lain: 1) melanjutkan dan meningkatkan program fasilitasi sertifikasi produk dengan fokus utama pada sertifikat internasional dan merek. Dukungan fiskal dapat diberikan oleh eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBN melalui peningkatan anggaran bagi program pembinaan dan fasilitasi sertifikasi produk IMK. Selain itu pihak Legislatif dapat melakukan meningkatkan efisiensi anggaran dengan mendorong pengintegrasian program-program yang tersebar di berbagai K/L dan memastikan pemerataan program diseluruh daerah, misalnya program fasilitasi yang ada di berbagai K/L dan mensosialisasikan program-program tersebut dengan merata; 2) meningkatkan kualitas lembaga sertifikasi nasional agar SNI dan sertifikat nasional lainnya seperti halal dapat diakui oleh masyarakat maupun negara lain. DPR dapat melakukan pengawasan dan mendorong adanya penyederhanaan prosedur sertifikasi agar mudah diakses IMK ; 3) memfasilitasi agar terjalinnya kemitraan IMK dengan Badan Usaha Milik Negara maupun industri besar dan menengah (*Business Matching*) atau dengan industri kecil lainnya dengan membentuk koperasi; 4) meningkatkan akses internet bagi IMK (baik literasi digital maupun sumber daya internet seperti BTS dan kualitas jaringan); 5) memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bagi pengusaha dan tenaga kerja serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih antar program pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Putong, I. (2014). *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Jurnal

- Akbar, G. H. (2015). Peningkatan penerapan SNI guna meningkatkan daya saing Indonesia menghadapi AEC (ASEAN Economic Community) 2015. *Jurnal Media Teknologi*, 3(1), 43-52.
- Bakhri, S. (2020). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil dan Menengah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 54-65.
- Barbosa, L. C. F. M., de Oliveira, O. J., Machado, M. C., Morais, A. C. T., Bozola, P. M., & Santos, M. G. F. (2022). Lessons learned from quality management system ISO 9001: 2015 certification: practices and barrier identification from Brazilian industrial companies. *Benchmarking: An International Journal*, 29(8), 2593-2614.
- Cândido, C. J. F., Coelho, L. M. S., & Peixinho, R. M. T. (2016). The financial impact of a withdrawn ISO 9001 certificate. *International Journal of Operations & Production Management*, 36(1), 23-41.
- Diana, E., & Hastuti, C. S. F. (2019). PENGARUH NON-DEBT TAX SHIELDS DAN KARAKTERISTIK PERSONAL CHIEF EXECUTIVE OFFICER TERHADAP FINANCIAL LEVERAGE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis*, 3(1), 27-38.
- Ginting, A. M. (2011). Upaya peningkatan ekspor sektor usaha mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan daya saing produk. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(1), 395-525.
- Gal, A. N. (2010). Competitiveness of small and medium sized enterprises-a possible analytical framework. *HEJ: ECO-100115-A*, 1-14.
- Jannati & Zaenuddin, M. (2024). *Pengaruh sertifikasi halal terhadap kinerja bisnis pada UMKM di Kota Batam* [Skripsi, Politeknik Negeri Batam]. *Politeknik Negeri Batam Repository*.
- Karentina, R. (2019). The Spillover Effects from Foreign Direct Investment (FDI) on Labor Productivity: Evidence from Indonesian Manufacturing Sector [Efek Spillover dari Foreign Direct Investment (FDI) terhadap Produktivitas Tenaga Kerja: Studi pada Sektor Manufaktur Indonesia]. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 10(1), 19-30.
- Magodi, A. Y., Daniyan, I. A., & Mpofu, K. (2022). an investigation of the effect of the iso 9001 quality management system on small and medium enterprises in gauteng, south africa. *South African Journal of Industrial Engineering*, 33(1), 126-138.
- Mahmood, S., & Hasan, R. (2012). Survey on impact of QMS ISO 9001:2000 in an organization, increases the effectiveness of its operations. Paper presented at the 427-430.
- Nainggolan, K. N., & Purwanggono, B. (2019). Proyeksi Manfaat Ekonomi dari Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan Menggunakan Metodologi ISO pada UMKM Garam. *Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi*, 2019, 323-332.
- Nirwesti, G. W., & Nachrowi, N. D. (2018). Addressing the Limits of Production Resources Through Partnerships to Improve Technical Efficiency: A Case Study of Micro and Small Industries in Indonesia 2014. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(1), 24-39.
- Nurchahyo, R., & Habiburrahman, M. (2021). Relationship between ISO 9001: 2015 and operational and business performance of manufacturing industries in a developing country (Indonesia). *Heliyon*, 7(1), e05537.
- Ochieng, J., Muturi, D., Njihia, S.N., (2015). The impact of ISO 9001 implementation on organizational performance in Kenya. *The TQM Journal*, 27 (6), 761-771.
- Rahman, E., & Monandes, V. Penerapan SNI Produk Kelapa Sawit dan Turunannya dalam Mendukung Ekspor untuk Memperkuat Daya Saing Industri Nasional The SNI Implementation of Palm Oil and Its Derivative Products on Supporting Exports for Intensifying National. *Prosiding Seminar Nasional 2021*.
- Sutaminingsih, Widiana, M. E., Fattah, A. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Standarisasi Produk Terhadap Peningkatan Daya Saing Produk Industri Kecil Menengah Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Branchmarck*, 4(1), 288-297.
- Tampubolon, B. D., Widyatmoko, W., & Louhenapessy, B. B. (2013). Dampak penerapan SNI air minum dalam kemasan terhadap ekonomi nasional. *Jurnal Standardisasi*, 15(2), 112-118.

- Tunggal, H. P., & Joesron, T. S. (2019). Technical efficiency analysis of Indonesian small and micro industries: A stochastic frontier approach (No. 201903). *Department of Economics, Padjadjaran University*.
- Wilcock, A. E., & Boys, K. A. (2017). Improving quality management: ISO 9001 benefits for agrifood firms. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 7(1), 2-20.

Sumber Digital

- International Trademark Association (INTA). (2017). The Economic contribution of trademark-intensive industries in Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/perspectives/industry-research/INTA_ASEAN_Economic_Impact_Study_082717.pdf
- UNIDO. (2019). Competitive industrial performance report 2018. <https://stat.unido.org/content/publications/competitive-industrial-performance-report-2018>
- World Economic Forum. (2019). Global competitiveness report 2019. <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2019/>

Peraturan

- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

Laporan Pemerintah

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Tabel dinamis subjek industri besar dan sedang*. <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html#subjekViewTab5>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Tabel dinamis subjek industri mikro dan kecil*. <https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html#subjekViewTab5>
- Badan Standardisasi Nasional. (2017, Desember 11). *Tentang SNI*. https://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5
- Badan Standardisasi Nasional. (2020, September 29). *Infografis Tentang SNI Wajib dan Sukarela*. <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/11470/s.id/SNIWAJIB>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2019). Outlook perekonomian Indonesia 2019: Meningkatkan daya saing untuk mendukung ekspor. *May 1*, 16-54. <https://ekon.go.id/source/publikasi/buku-outlook-perekonomian-2019.pdf>
- Kementerian Perindustrian. (2019). *IMK berkontribusi 60 persen serapan total tenaga kerja industri*. <https://kemenperin.go.id/artikel/20818/IMK-Berkontribusi-60-Persen-Serapan-Total-Tenaga-Kerja-Industri>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Menimbang Urgensi Formulasi Kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

(Weighing the Urgency of The Policy Formulation of Certain Goods and Services Tax Policy in Law Number 1 of 2022)

Indana Fiersy Tsabita Arsil¹ dan Achmad Lutfi²

^{1,2} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
^{1,2} Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Email: indana.fiersy@ui.ac.id, achmad.lutfi@ui.ac.id

Naskah diterima: 18 November 2024

Naskah direvisi: 27 Juni 2025

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2025

Abstract

This research aims to determine the importance and the urgency in the process of formulating the Certain Goods and Services Tax policy which was introduced by Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations. This policy raised disagreements and questionings of its importance from the private sector affected. This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection methods through literature study and in-depth interviews and discussions with policy makers, policy supervisors, policy implementers, and the private sector. The research adapted the EMMIE framework by Croci, Laycock, & Chainey and the dimensions within it: the effect, the moderator, the mechanism, the implementation, and the economics of an intervention; while referring to the concept of public policy, policy formulation, central and regional financial relations, and local tax. The results of the analysis show that the urgency in the Certain Goods and Services Tax policy lie in its function as a regional tax policy that supports the regional governments' authority in managing regional revenues in hopes that it will then reduce regional governments' dependency on central government's transfer. However, the lack of stakeholder consensus challenges its urgency as shown by the private sector's submission to the constitutional court. Furthermore, The Indonesian House of Representatives needs to involve the private sector, with their place as stakeholders, in the formulation of tax policies to create a secure and advanced economic climate.
Keywords: local taxes; policy formulation; urgency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dan pentingnya kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi dan pertanyaan mengenai urgensinya dari pihak swasta yang terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam serta diskusi dengan pembuat kebijakan, pengawas kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pihak swasta. Penelitian ini mengadaptasi kerangka kerja EMMIE oleh Croci, Laycock, & Chainey dan dimensi-dimensi di dalamnya: dampak, moderator, mekanisme, implementasi, dan ekonomi intervensi; dengan tetap mengacu pada konsep kebijakan publik, formulasi kebijakan, hubungan keuangan pusat dan daerah, dan pajak daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa urgensi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu terletak pada fungsinya sebagai kebijakan pajak daerah yang mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Namun, kurangnya konsensus pemangku kepentingan menjadi tantangan tersendiri, seperti yang ditunjukkan oleh pengajuan gugatan pihak swasta ke Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, DPR RI perlu melibatkan pihak swasta, sebagai pemangku kepentingan, di dalam formulasi kebijakan pajak untuk menciptakan iklim ekonomi yang aman dan maju.
Kata kunci: pajak daerah; formulasi kebijakan; urgensi

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengubah penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda) di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi (Simanjuntak, 2015). Sistem desentralisasi kekuasaan telah dipergunakan di Indonesia sejak berlakunya undang-undang tersebut pada bulan Mei tahun 1999 dan berlaku pada kekuasaan fiskal pemerintah dalam bentuk otonomi daerah. Kepentingan kebijakan otonomi daerah adalah anggapan bahwa pemda sebagai pihak yang paling mengetahui karakteristik daerah sehingga membuatnya mampu menanggapi kebutuhan lokal secara lebih efektif dan untuk meningkatkan hasil pembangunan. Kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangan sendiri dengan ketergantungan terhadap pemerintah pusat seminimal mungkin, menjadi bagian dari faktor penunjuk bahwa suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri (Nurmiati et al., 2019).

Pada tahun 2022, ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang menggantikan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut disahkan dari RUU HKPD dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun 2021-2022 (Komisi XI, 2022). Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai turunan dari UU HKPD di mana PP tersebut mengatur area intervensi kebijakan dan administrasi pajak daerah atas penguatan *local taxing power* (Kahfi, 2023). Penetapan UU HKPD membawa beberapa perubahan termasuk restrukturisasi jenis pajak dan sumber-sumber perpajakan daerah yang baru.

UU HKPD membawa perubahan pada jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Pajak tersebut diintegrasikan menjadi satu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pajak ini juga mengalami perluasan objek konsumsi lain, seperti *valet parking*, wahana permainan air, wahana ekologi, objek olahraga permainan, dan jasa akomodasi yang menggunakan tempat tinggal. Berdasarkan penjelasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada sosialisasi UU HKPD, restrukturisasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah administrasi pembayaran dan pelaporan dari sisi wajib pajak, meningkatkan efisiensi layanan perpajakan dan pengawasan dari sisi pemda. Perubahan yang terjadi mengenai PBJT berada pada penggolongan dan proses administrasinya.

Selain penggabungan dari lima jenis pajak dan perluasan objek, PBJT juga mengatur beberapa penyesuaian terhadap jenis pajak lama. Perubahan ini mencakup perubahan tarif pada dua jenis pajak daerah yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau UU PDRD, yaitu pajak hiburan dan pajak parkir. Sebelumnya, pajak hiburan memiliki aturan berlapis dengan tarif maksimum yang berbeda-beda antara 10 hingga 75 persen disebabkan perbedaan jenis hiburan yang diatur. Peraturan yang baru mengungkapkan bahwa sekarang pajak tersebut dikenakan prinsip tarif tunggal maksimum 10 persen, dengan kewenangan bagi pemda untuk menetapkan tarif yang lebih tinggi untuk jenis hiburan tertentu, seperti yang bersifat mewah atau perlu untuk dikendalikan dengan tarif maksimum 40 persen dalam UU HKPD. Hiburan tersebut seperti bar, spa, diskotik, kelab malam, dan karaoke. Sementara itu, pajak parkir sebelumnya diatur dengan tarif maksimum sebesar 30 persen yang kemudian diatur dalam UU HKPD menjadi tarif tunggal 10 persen maksimum, setara dengan Pajak PBJT lainnya. Ketentuan tarif tersebut dihitung saat pembayaran atau penyerahan barang dan jasa tertentu dan ditetapkan lebih rinci melalui peraturan daerah (perda) setiap daerah. Pengenaan PBJT didasari dari jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, atau berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di daerah yang bersangkutan, apabila tidak terdapat pembayaran (Agustina et al., 2022).

Pajak daerah di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala yang menjadi dasar formulasi kebijakan, sehingga perhatian diarahkan kepada UU HKPD atas perannya dalam mengatasi kendala tersebut. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa *collection rate* dari pajak dan retribusi daerah di Indonesia baru mencapai 60 persen sehingga masih perlu ditingkatkan dalam mengadministrasikan dan mengumpulkan pajak dan retribusi daerah tanpa meningkatkan beban di masing-masing daerah (Kahfi, 2023). Myles (2000) menyatakan bahwa pajak dapat membantu pertumbuhan ekonomi walaupun secara empiris berpengaruh sedikit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021), pajak daerah kabupaten/kota berkontribusi sebesar 6,95 persen pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan berkontribusi sebesar 7,72 persen pada realisasi APBD 2020. Penelitian oleh Bachtiar (2022), menunjukkan adanya potensi pajak daerah kabupaten/kota yang masih belum sepenuhnya dioptimalkan. Perhitungannya yang menggunakan metode *Stochastic Frontier Analysis* (SFA) terhadap 504 daerah menggunakan data tahun 2019 menghasilkan temuan bahwa baru sekitar 73,31 persen potensi pajak daerah yang dioptimalkan oleh pemda. Temuan tersebut menyiratkan bahwa masih ada ruang untuk mengembangkan, sekitar 27 persen potensi yang hilang.

Kebijakan desentralisasi memberikan otonomi daerah dalam wujud sistem politik yang mendistribusikan kekuasaan politik dan administratif kepada pemerintahan sub-nasional. UU HKPD merupakan bentuk pemanfaatan desentralisasi dengan berfungsi sebagai pedoman kebijakan daerah dalam perihal keuangan. Kehadiran kebijakan baru pada pajak PBJT mengundang beberapa perundingan, salah satunya dengan keluhan mengenai tarif di pajak tertentu. Pihak usahawan objek pajak hiburan tertentu menyampaikan ketidakpuasan terhadap pajak yang mencapai 75 persen sehingga Gabungan Industri

Pariwisata Indonesia (GIPI) mengajukan pencabutan kebijakan tarif pajak hiburan 40 sampai 75 persen untuk objek pajak hiburan tertentu ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Chaniago & Prasetya, 2024).

Persoalan yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut mengundang pertanyaan mengenai urgensi yang ada pada proses formulasi kebijakan. Sidney (2017) menyatakan formulasi kebijakan mengasumsikan para pihak dalam proses kebijakan telah mengenali dan mendefinisikan suatu masalah kebijakan, dan memasukkannya ke dalam agenda kebijakan untuk perumusan alternatif terhadap suatu masalah. Analisis isu penyederhanaan pajak menjadi PBJT menggunakan dimensi formulasi kebijakan diharapkan menunjukkan gambaran yang lebih jelas dan detail mengenai pertimbangan dibalik pendesakan kebijakan PBJT dalam UU No.1/2022 ini dan bagaimana urgensi tersebut dirumuskan dalam proses kebijakan publik. Pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana urgensi perubahan kebijakan dalam formulasi kebijakan mengenai PBJT di UU No. 1 Tahun 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan pustaka penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Nömmela & Kaare, (2022), Bertscher, London, & Orgill (2018), Lovell, Nixon, & Betzold (2023), Nielsen et al (2023), Alsukait et al (2020), dan Zhou et al (2022). Perbandingan berbagai ruang lingkup penelitian yang diambil dengan menggunakan kategori topik yang sesuai dengan penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada literatur yang melihat keseluruhan ruang lingkup terkait formulasi kebijakan, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1. Sejauh penelusuran penulis, belum banyak studi yang mengulas urgensi PBJT dalam kerangka formulasi kebijakan fiskal daerah, khususnya dengan pendekatan EMMIE *framework*.

Tabel 1. Matriks Ruang Lingkup Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun Penelitian	Ruang Lingkup Penelitian dengan Pendekatan Formulasi Kebijakan				
			<i>The Effects</i>	<i>The Mechanisms</i>	<i>The Moderators</i>	<i>The Implementation</i>	<i>The Economics of an Intervention</i>
1.	Kaidi Nömmela, Kati Körbe Kaare	2022	X	X		X	
2.	Adam Bertscher, Leslie London, Marsha Orgill	2018		X	X	X	
3.	Heather Lovell, Cynthia Nixon, Alana Betzold	2023				X	
4.	Helle Orsted Nielsen, Maria Theresia Hedegaard Konrad, Anders Branth Pedersen, Steen Gyldenkaerne	2023	X	X			X
5.	Reem Alsukait, Sara Bleich, Parke Wilde, Gitanjali Singh, Sara Folta	2020			X		X
6.	Ke Zhou, Nici Zimmermann, Elanor Warwick, Helen Pineo, Marcella Ucci, Michael Davies.	2022	X	X			
7.	Indana Fiersy Tsabita Arsil	2024	X	X	X	X	X

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian *positivist* dengan menganalisis pertimbangan dalam proses formulasi kebijakan publik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sumber data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam dan studi dokumen dan literatur. Penarikan sampel dilakukan

dengan teknik non-probabilitas. Teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* juga digunakan dengan pertimbangan kesesuaian narasumber dengan topik sesuai dengan pengetahuan dan pendapat peneliti. Data yang terkumpul dianalisis dengan penggunaan hasil wawancara mendalam sebagai data primer sedangkan analisis dokumen dan literatur sebagai data-data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan strategi *illustrative method*. Data dianalisis berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya dalam sebuah “empty box” atau kotak kosong yang berfungsi menampung bukti empiris atau data yang digunakan untuk menegaskan, memodifikasi, atau menolak teori. Dalam penelitian ini, data kualitatif proses kebijakan PBJT di UU No.1/2022 sebagai bukti empiris akan ditempatkan pada kotak kosong untuk menguji teori formulasi kebijakan dengan kerangka kerja EMMIE oleh Croci, Laycock, & Chainey (2022). Penggalan informasi melalui wawancara mendalam akan dilakukan peneliti dengan menentukan pihak yang berkecimpung di bidang terkait dan pihak dari berbagai perspektif. Narasumber yang diwawancarai termasuk pendamping pembuat kebijakan, ahli praktisi, dan pihak akademisi, sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pemetaan Narasumber Wawancara Mendalam

No.	Lembaga	Nama Narasumber	Jabatan	Keterangan
1.	DPR RI	Sony Hendra Permana, SE.,MSE	Analisis Legislatif bidang Ekkuinbang	Narasumber merupakan Analis Legislatif yang mendampingi pembahasan UU No.1/2022.
2.	DPR RI	Dr. Syafrizal	Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI	Narasumber merupakan pihak yang mendampingi pembahasan UU No.1/2022.
3.	DPR RI	Zaqiu Rahman, SH,MH	Perancang Undang-Undang Ahli Madya	Narasumber merupakan perancang UU yang mendampingi pembahasan UU No.1/2022.
4.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anne Patricia Sutanto	Wakil Ketua Bidang Perdagangan APINDO	Narasumber merupakan pihak APINDO yang berfokus pada bidang kebijakan publik sehingga diharapkan memiliki pendapat yang banyak berdasarkan wawasan.
5.	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)	Hariyadi Sukamdani	Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia	Narasumber merupakan pihak PHRI yang berfokus pada bidang kebijakan publik sehingga diharapkan memiliki pendapat yang banyak berdasarkan wawasan.
6.	Universitas Indonesia	Dr. Inayati , M.Si	Dosen Administrasi Fiskal	Narasumber merupakan pihak akademisi yang mendalami bidang fiskal yang termasuk pajak sehingga diharapkan memiliki pendapat yang banyak berdasarkan wawasan.
7.	DJPk	Bonatua Mangaraja	Ketua Tim Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Narasumber merupakan pihak DJPK yang berfokus pada bidang pajak dan retribusi daerah yang merupakan topik yang berkaitan dengan penelitian.
8.	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Dr. Rozi Beni, M.H.,M.Si.	Kepala Sub Direktorat Wilayah 2 Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Narasumber merupakan pihak Kemendagri yang berfokus pada bidang kedaerahan sehingga diharapkan memiliki pendapat yang banyak berdasarkan wawasan, terutama mengenai kesiapan perangkat daerah.
9.	Badan Keuangan Daerah Kota Depok	Wahid Suryono	Direktur Badan Keuangan Daerah Kota Depok	Narasumber merupakan badan yang akan melaksanakan perubahan yang ada di UU No.1/2022, terutama pada bidang pajak daerah.
10.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	Dellieanie Ukman	Ketua Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Narasumber merupakan badan yang akan melaksanakan perubahan yang ada di UU No.1/2022, terutama pada bidang pajak daerah.

Sumber: Diolah, 2024.

KETERBATASAN STUDI

Studi ini memiliki keterbatasan dalam pemberlakuan PBJT yang masih dalam tahap penyesuaian kebijakan setiap daerah untuk implementasi saat penelitian dilakukan sehingga bukti implementasi kebijakan masih rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Formulasi Kebijakan Undang-Undang No.1/2022

UU HKPD merupakan peraturan inisiatif pemerintah pusat, yaitu Kemenkeu. Pihak DJPK, sebagai Ketua Tim Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bonatua (2024) menjelaskan prosedur penyusunan kebijakan UU No.1/2022. Formulasi kebijakan publik melibatkan proses yang kompleks dan dinamis yang menggabungkan beragam perspektif, keahlian, dan kepentingan. Menurut Peters & Fontaine (2022), formulasi kebijakan adalah upaya untuk mengintegrasikan pemahaman yang berbeda mengenai suatu masalah kebijakan dengan konsepsi yang berbeda mengenai instrumen kebijakan yang akan digunakan, dan nilai-nilai yang menjadi dasar penilaian pemerintah, terhadap hasil yang dicapai oleh kebijakan tersebut, seperti hasil yang diharapkan, memuaskan, dapat diterima, dan sebagainya. Siklus kebijakan publik merupakan proses yang telah melewati beberapa penyesuaian seiring waktu. Model Ripley (1985) dalam Muadi, et. al, (2016) terdiri dari: *agenda setting, formulation and legitimation of goals and programs, program implementation, evaluation of implementation, performance, and impacts, dan decisions about the future of the policy and program*. Formulasi kebijakan UU HKPD yang dibahas terkait dengan tiga tahap awal.

A. *Agenda setting*

Undang-undang ini dimulai dari beberapa isu yang memprihatinkan pemerintah. Berdasarkan Kemendagri (2023), terdapat tantangan yang dihadapi, termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang belum optimal, struktur belanja daerah yang belum fokus, *local tax ratio* yang rendah, dan pembiayaan yang masih menghasilkan manfaat yang terbatas, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan hasil pembahasan isu penguatan *local taxing power* daerah.

B. *Formulation and legitimation of goals and programs*

Sebelum menentukan program dan kebijakan, telah dilakukan kajian ilmiah untuk *draft* undang-undang baru. Terdapat beberapa usulan dari pihak DJPK untuk modifikasi pajak dan retribusi daerah yang kemudian dilakukan kajian ilmiah untuk menentukan kebijakan apa saja yang dapat dilakukan. Pengelompokan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan menjadi PBJT dilakukan atas pertimbangan akan memudahkan wajib pajak dan disebut sebagai sebuah simplifikasi, begitu pula pada penyesuaian tarif pajak menjadi rata-rata 10 persen kecuali pada pajak penerangan jalan dan beberapa objek pajak hiburan. Objek pajak hiburan yang ditetapkan tarif pada 40-75 persen berlaku pada objek pajak karaoke, klub malam, bar, diskotek, dan mandi uap. Pertimbangan dibalik pengecualian ini adalah bahwa objek pajak tersebut memiliki eksternalitas negatif yang akan dirasakan oleh wajib pajak dan bahwa layanan tersebut dikonsumsi oleh konsumen yang berkemampuan lebih secara finansial. Selain itu, ada perluasan objek *valet parking*, wahana permainan air, wahana ekologi, objek olahraga permainan, dan jasa akomodasi yang menggunakan tempat tinggal. Objek *valet parking* dan wahana air sebelumnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang dipungut pemerintah pusat. Diskusi dengan pihak DJP Pusat menentukan bahwa beberapa objek menjadi pajak daerah karena penerimaan yang kecil di pusat dan pertimbangan bahwa pelayanan tersebut lebih cocok di pajak konsumsi. Selain itu, penetapan objek lainnya berdasarkan pertimbangan kesesuaian pajak konsumsi dan pengaturan objek yang sebelumnya tidak diatur, termasuk objek yang hadir karena perkembangan lingkungan masyarakat.

Setelah kebijakan ditentukan, pihak DJPK melakukan jaring aspirasi dengan tokoh masyarakat, asosiasi, dan pemda. Sosialisasi termasuk menjelaskan UU HKPD dan pemberian ruang untuk masukan sehingga terjadi *focused group discussion* (FGD). Sejak pembuatan kajian, Kemenkeu bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang mendampingi dalam melakukan pembinaan pemda. Ketika batang tubuh sudah hampir menjadi undang-undang, Kemenkeu membahas bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kementerian terkait jenis-jenis pajak dan retribusi yang dibahas. Setelah dibahas di tingkat pemerintah, undang-undang dibawa Presiden ke Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas kembali. DPR RI adalah pihak non-partisipan sehingga berperan mengkritisi kajian kebijakan pemerintah. Pada 5 Januari 2024, UU No.1/2022 ditetapkan.

UU HKPD membawa perubahan dalam desain pajak daerah dan retribusi daerah dari UU No.28/2009 sebelumnya. Dalam rangka menurunkan *administration* dan *compliance cost*, UU HKPD melakukan salah satunya rasionalisasi retribusi yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif dengan tetap menjaga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kemendagri, 2023). Retribusi dirasionalisasikan dari 32 jenis menjadi 18 jenis. Retribusi jasa umum dari 15 jenis menjadi 5 jenis, retribusi jasa usaha dari 11 jenis menjadi 10 jenis, dan retribusi perizinan tertentu dari 5 jenis menjadi 3 jenis. UU HKPD juga memungkinkan retribusi tambahan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Rasionalisasi tersebut dilakukan atas pertimbangan terdapat layanan retribusi yang seharusnya wajib disediakan oleh pemerintah daerah tanpa pungutan serta penyederhanaan retribusi perizinan tertentu untuk meningkatkan kemudahan bidang usaha (Kemendagri, 2023). Penjelasan lebih dalam mengenai retribusi dibahas dalam PP No.35/2023, seperti rincian objek, tingkat penggunaan jasa, prinsip, dan sasaran penetapan tarif. Rasionalisasi retribusi ditujukan dengan menjaga penerimaan PAD karena pemasukan pemerintah daerah akan meningkat dengan kebijakan pajak yang baru. Penjabaran perubahan jenis retribusi dapat dilihat di Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Jenis Retribusi di UU No.28/2009 dan UU No.1/2022

No.	UU PDRD	UU HKPD
Retribusi Jasa Umum		
1.	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan
2.	Pelayanan Kebersihan	Pelayanan Kebersihan
3.	Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4.	Pelayanan Pemakaman	Pelayanan Pasar
5.	Parkir di Tepi Jalan Umum	Pengendalian Lalu Lintas
6.	Pelayanan Pasar	
7.	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	
8.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
9.	Biaya Cetak Peta	
10.	Penyediaan/Penyedotan Kakus	
11.	Pengolahan Limbah Cair	
12.	Pelayanan Tera/Tera Ulang	
13.	Pelayanan Pendidikan	
14.	Pengendalian Menara Telekomunikasi	
15.	Pengendalian Lalu Lintas (PP No.97/2012)	
Retribusi Jasa Usaha		
1.	Pemakaian Kekayaan Daerah	Pemakaian Kekayaan Daerah
2.	Pasar Grosir/Pertokoan	Pasar Grosir/Pertokoan
3.	Tempat Pelelangan	Tempat Pelelangan
4.	Terminal	Tempat Khusus Parkir
5.	Tempat Khusus Parkir	Penginapan/Villa
6.	Penginapan/Villa	Rumah Potong Hewan
7.	Rumah Potong Hewan	Pelayanan Kepelabuhanan

No.	UU PDRD	UU HKPD
8.	Pelayanan Kepelabuhanan	Tempat Rekreasi dan Olahraga
9.	Tempat Rekreasi dan Olahraga	Penyeberangan di Air
10.	Penyeberangan di Air	Penjualan Produksi Usaha Daerah
11.	Penjualan Produksi Usaha Daerah	
Retribusi Perizinan Tertentu		
1.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Perpanjangan IMTA/PTKA)
3.	Izin Trayek	Pengelolaan Pertambangan Rakyat (PPR)
4.	Izin Usaha Perikanan	
5.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PP No.97/2012)	

Sumber: UU No.28/2009, PP No.97/2012, dan UU No.1/2022 (diolah).

UU HKPD mengadakan perombakan pada penetapan tarif pajak daerah untuk menguatkan pajak daerah. Atas penjabaran Kemendagri (2023), latar belakang perubahan yang dilakukan termasuk untuk mengakomodasi alat pajak baru, yaitu opsen. Pajak MBLB diturunkan menjadi batas atas 20 persen untuk menyesuaikan dengan kebijakan opsen MBLB yang menjadi sumber pendanaan baru. Pajak BBNKB juga mengalami penurunan batas atas tarif dikarenakan pertimbangan beban pada wajib pajak karena opsen BBNKB yang baru. Hal yang sama juga dilakukan pada PKB. Atas panduan dari UU, pemda memiliki kewenangan penetapan tarif melalui perda tetapi dengan adanya UU HKPD, dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mengubah tarif pajak daerah dalam suatu perda untuk menjalankan fiskal nasional. Penjabaran perubahan tarif pajak daerah dari UU No.28/2009 menjadi UU No.1/2022 dapat dilihat di Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Tarif Pajak Daerah antara UU No.28/2009 dan UU No.1/2022

No.	UU No.28/2009		UU No.1/2022	
	Jenis Pajak	Tarif	Jenis Pajak	Tarif
Pajak Provinsi				
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1. Batas atas 1,2% untuk kendaraan bermotor pertama. 2. Batas atas 6% untuk kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dan ditetapkan secara progresif 3. Batas bawah 0,5% dan batas atas 1% untuk kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Tambahan tarif khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom. 1. Batas atas 2% untuk kendaraan bermotor pertama. 2. Batas atas 10% untuk kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dan ditetapkan secara progresif 3. Batas atas 0,5% untuk kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

No.	UU No.28/2009		UU No.1/2022	
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1. Tarif 20% untuk Penyerahan Pertama 2. Tarif 1% untuk Penyerahan Kedua dan Seterusnya 3. Kendaraan pribadi provinsi yang tidak terbagi menjadi kabupaten/kota diperlukan sama dengan kendaraan pribadi daerah lain	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1. Batas atas 12%. 2. Batas atas 20% untuk kendaraan pribadi provinsi yang tidak terbagi menjadi kabupaten/kota
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1. Batas atas 10% 2. Batas atas 50% untuk kendaraan umum.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1. Batas atas 10% 2. Batas atas 50% untuk kendaraan umum. 3. Tidak lagi mengatur batasan kewenangan pemerintah untuk mengubah tarif PBBKB jika terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam UU tentang APBN.
4	Pajak Air Permukaan	Batas atas 10%	Pajak Air Permukaan (PAP)	Batas atas 10%
5	Pajak Rokok	Batas atas 10%	Pajak Rokok	Batas atas 10%
6			Pajak Alat Berat (PAB)	Batas atas 0,2%
7			Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)	Tarif 25%
Pajak Kabupaten/Kota				
1	Pajak Hotel	Batas atas 10%.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)*	Batas atas 10%.
2	Pajak Restoran	Batas atas 10%.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)*	Batas atas 10%.
3	Pajak Hiburan	1. Batas atas 35%. 2. Batas atas 75% untuk hiburan malam 3. Tarif 10% dengan batas atas 30% untuk hiburan kesenian rakyat.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)*	1. Batas atas 10%. 2. Jangka 40% - 75% untuk jasa hiburan eksternalitas negatif.
4	Pajak Parkir	Batas atas 30%.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)*	Batas atas 10%.
5	Pajak Penerangan Jalan	1. Batas atas 3% untuk konsumsi listrik industri dan pertambangan migas. 2. Batas atas 1,5% untuk listrik yang dihasilkan sendiri.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)*	1. Batas atas 3% untuk konsumsi listrik industri dan pertambangan migas. 2. Batas atas 1,5% untuk listrik yang dihasilkan sendiri.
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Batas atas 25%	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)	Batas atas 20%
7	Pajak Reklame	Batas atas 25%	Pajak Reklame	Batas atas 25%
8	Pajak Air Tanah	Batas atas 20%	Pajak Air Tanah (PAT)	Batas atas 20%
9	Pajak Sarang Burung Walet	Batas atas 10%.	Pajak Sarang Burung Walet	Batas atas 10%.

No.	UU No.28/2009		UU No.1/2022
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Batas atas 0,3%	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Batas atas 0,5 %
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Batas atas 5%.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Batas atas 5%.
12			Opsen Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Tarif 66%
13			Opsen Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Balik Tarif 66%

Sumber: UU No.28/2009 dan UU No.1/2022 (diolah).

C. Program implementation

DJPk melakukan proses implementasi kepada pemda. Pada awal Agustus 2023 hingga Desember 2023, telah dilakukan penugasan yang dibagi menjadi empat tim di DJPK terkait perancangan UU HKPD ini, yaitu tim kebijakan dan evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), tim pengembangan potensi PDRD, tim sinkronisasi PDRD, dan tim instrumen PDRD. Setiap tim melakukan perannya untuk implementasi undang-undang. Implementasi UU HKPD dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Peraturan daerah baru yang berdasarkan UU HKPD ditetapkan sampai dengan 5 Januari 2024, sedangkan pengaturan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen Pajak MBLB berlaku sampai dengan 5 Januari 2025.

Formulasi Kebijakan Pajak Barang dan Jasa dalam UU No.1/2022 melalui Kerangka Kerja EMMIE

UU No.1/2022 dapat dilihat dari beberapa dimensi yang diperkenalkan pada kerangka kerja EMMIE oleh Croci, Laycock, & Chainey (2022), yaitu *the effect*, *the mechanism*, *the moderator*, *the implementation*, dan *the economics of an intervention*.

A. Dimensi *The Effect*

Dimensi *the effects* merujuk pada skala dampak suatu kebijakan dan keyakinan pada perkiraan dampak tersebut, termasuk konsekuensi yang disengaja maupun tidak, identifikasi pihak yang untung dan rugi, serta dampak baik dan buruk terhadap pemberlakuan PBJT. Penelitian pada dimensi *the effects* menganalisis beberapa indikator. Indikator pertama merupakan dampak kebijakan PBJT pada kenaikan kekuatan *collection rate* pajak daerah. Sebelumnya, disebutkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, *collection rate* dari pajak dan retribusi daerah di Indonesia baru mencapai 60 persen sehingga menyisakan peluang yang besar (Kahfi, 2023). Pertimbangan dampak pada *collection rate* terlihat sangat minim hingga tidak ada karena lebih cenderung pada penyerahan kekuatan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah. Untuk meningkatkan hingga di angka tersebut adalah sulit karena kebijakan di PBJT lebih banyak di penyederhanaan pelaksanaan dan bukan didesain untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan PBJT cenderung ke penyederhanaan pemungutan, sebagaimana disebutkan oleh Dosen Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, Dr. Inayati, M.Si (2024). Analisis Legislatif Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan (Ekkuinbang) DPR RI, Sony Hendra Permana, SE., MSE, (2024) yang menjadi tim asistensi pembahasan UU No.1/22 menyatakan hal serupa dengan menekankan kembali bahwa kebijakan ini lebih ke peningkatan *local taxing power*, yang termasuk 4 pilar HKPD.

Indikator kedua adalah mengenai kebijakan PBJT yang memberikan dampak kemudahan operasional pemda dalam pemungutan pajak daerah. PBJT akan memudahkan pihak wajib pajak yang memiliki dan menggunakan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, ataupun pajak penerangan jalan sekaligus tidak lagi perlu membayar 5 jenis pajak daerah dan melaporkan 5 jenis Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) (Kemenkumham, 2021). Mengenai hal tersebut, perubahan yang dibawa di PBJT membawa perubahan tetapi tidak menyelesaikan masalah dan tidak signifikan. Di sisi lain, terdapat sistem digital pendukung pelaksanaan e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik). Ketua Tim Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK, Bonatua Mangaraja (2024), menambahkan mengenai fitur pembayaran

melalui bank dan langsung masuk ke kas daerah sehingga wajib pajak tidak perlu melalui penyerahan uang secara fisik. Pada sisi lain, Direktur Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono (2024), menyatakan bahwa praktik kebijakan PBJT sama saja. Begitu pula di Bappenda Kabupaten Bogor (Dellieanie Ukman, 2024) Dalam pelaksanaannya, Wahid Suryono (2024), menyatakan bahwa pemda menurunkan target penerimaan dari jenis pajak yang turun ke 10 persen, sebagai respons terhadap PBJT.

Indikator ketiga memperhatikan dampak kebijakan PBJT terhadap kemudahan wajib pajak dalam melengkapi pajak. Dampak ditunjukkan dalam kemudahan dalam pengaturan tarif dan *compliance cost* atau biaya kepatuhan di wajib pajak, yaitu pengurangan waktu dan biaya yang diperlukan untuk melengkapi pajak. Terkait dampak kemudahan melengkapi pajak oleh wajib, Dr. Syafrizal (2024), sebagai Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI menyatakan:

[...] Disamain semua jadi 10% jadi bisa dibayar. Kalau pemerintah mengusulkan turun cuma anggota DPR karena bisa melihat jasa yang kemarin ramai itu ya. Kalau kemarin ketika masalah itu menguap itu kan mengenai yang mahal itu [...] anggota Dewan ada yang bilang, kalau orang yang ke tempat situ apa segala macam kan berarti dia itu udah berduit lah gitu loh. Bisa dilihat lah penghasilan dia itu tinggi gitu. Ya karena itu ada batas atas batas bawah itu.

Walaupun Sony H. P., (2024) menyatakan dampak akan tetap sama, Inayati (2024) menyatakan bahwa kebijakan bisa membantu pada *compliance cost* atau biaya kepatuhan di wajib pajak, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan pembayaran dan penyetoran perpajakan. Beliau menyebutkan kebijakan PBJT berpotensi mengurangi biaya kepatuhan walaupun sebenarnya pengelompokan pajak akan tetap dipisahkan di pembukuan. Pihak Kepala Sub Direktorat Wilayah 2 Kelembagaan dan Kepegawaian Kemendagri, Dr. Rozi Beni, M.H., M.Si. (2024) menambahkan bahwa kemampuan akan sesuai kebutuhan daerah sehingga daerah melihat kondisi daerahnya mengenai kemampuan penduduknya dalam melengkapi pajak. Bonatua M. (2024) sepemikiran bahwa pemda yang mengetahui kemampuan masyarakat sehingga penetapan tarif diatur pemda.

Indikator keempat adalah pertimbangan kebijakan PBJT memberikan dampak terhadap kemudahan lapor pajak di pemda. Pihak Ekkuinbang DPR RI menyatakan bahwa proses laporan pajak berjalan tetap sama. Sama seperti Inayati (2024) yang menambahkan:

Ini yang kita sebut sebagai tadi *enforcement cost* tadi. Nah, *enforcement cost* di dalamnya itu adalah *cost* untuk *audit* yaitu biaya yang dikeluarkan pemerintah. [...] jadi ketika proses audit maka akan lebih mudah ya tinggal dilihat semuanya kalikan 10% tidak perlu lagi ada pemisahan-pemisahan. Saya kira itu pelaporan dari 5 jadi 1, juga tetap sama waktunya atau iya kalau pelaporan 5 jadi 1 ya tentu sekarang harapannya ya lebih mudah ya. Walaupun proses mengisinya itu lebih mudah tapi bagi WP kan untuk [...] pembukuannya sama aja gitu dia kan tetap harus membukukan secara terpisah.

Ketua Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bappenda Kabupaten Bogor, Dellieanie Ukman (2024) menyatakan bahwa kebijakan tersebut menguntungkan bagi daerah dengan pembayaran yang lebih cepat dan mendukung kebijakan denda tidak lapor pajak, walaupun merubah kebiasaan wajib pajak. Terkait hal tersebut, Ketua Badan Keuangan Daerah (BKD) Depok, Wahid Suryono (2024), menyatakan bahwa prosesi lapor yang baru tersebut membantu karena mengurangi pembayaran yang berlebih atau kurang karena pembayaran dilakukan lebih awal. Perubahan *business process* tersebut juga bisa mengurangi potensi utang. Bonatua M. (2024) menyatakan bahwa pemungutan PBJT dipermudah melalui PP No.35/2023 dalam perihal *check and balances*. Selain wajib pajak diperiksa oleh pemungut pajak, pemungut pajak juga diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

B. Dimensi *The Mechanism*

Dimensi *the mechanisms* adalah alat untuk melihat logika dan prinsip teoritis yang mendasarkan alasan dilakukannya kebijakan penyederhanaan pajak. Penelitian pada dimensi *the mechanisms* menganalisis beberapa indikator. Pertama, kebijakan disusun berdasarkan prinsip teori kriteria efisiensi administrasi perpajakan. Teori ini dibawa oleh Shah, et al (1994) yang merujuk pada tingkat pemerintah yang paling mungkin untuk memiliki informasi terbaik mengenai basis suatu pajak, adalah tingkat yang bertanggung jawab untuk memungut suatu pajak tersebut. PBJT dipungut oleh tingkat pemerintah kabupaten/kota yang paling memiliki data kondisi masyarakat, termasuk jumlah usaha dan masyarakatnya. Kebijakan ini mengikuti konsep *tax assignment*, sebagaimana dinyatakan Inayati (2024):

Ada konsep *tax assignment*. Intinya adalah siapa atau tingkat pemerintahan yang mana, [yang] memungut [...] Nah isu-isu ini biasanya menjadi diskusi dalam konsep yang kita sebut sebagai *tax*

assignment [...] Jadi kalau dilihatnya dari informasi saya pikir menjadi tepat karena sebenarnya kabupaten kota adalah yang paling dekat level pemerintahan yang paling ujung, yang paling dekat, yang sebenarnya paling mengetahui kondisi masyarakatnya. Kondisi lingkungannya, perekonomiannya, semuanya dia lebih tahu sehingga menurut saya menjadi tepat [...] Tentu yang lebih punya info tentang makan minum, perusahaan yang ngurusin Warung, rumah makan, Kan kabupaten kota. Karena juga mereka pegang data perizinan juga.

Sejalan dengan itu, basis data berada di daerah karena pembayaran diserahkan ke daerah (Dr. Syafrizal, 2024).

Kedua, kebijakan disusun berdasarkan prinsip teori kriteria kebutuhan fiskal yang juga disampaikan oleh Shah, et al (1994) merujuk pada tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab atas suatu layanan memiliki instrumen perpajakan yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut lebih lanjut. Inayati (2024) juga sepakat bahwa instrumen perpajakan diamanahkan oleh undang-undang sebagai payung hukumnya. Rozi B. (2024) menyatakan pemda dapat memungut pajak daerah karena ada peraturan daerah. Dasar pemungutan diatur dalam pasal 94 UU HKPD bahwa seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Penyerahan teknis berada di pemerintahan daerah, dinyatakan Sony H. P. (2024), yang menambahkan bahwa teknis ini pun diatur dengan ketentuan pajak yang bersifat *closed list*. Bonatua M. (2024) menambahkan bahwa pengaturan juga berlaku pada daerah-daerah khusus di Indonesia.

Ketiga, kebijakan disusun berdasarkan prinsip pajak yang menggunakan kriteria keadilan didasari dari teori Musgrave (1984) dalam Shah, et al (1994) yang merujuk pada konsistensi pendapatan dengan kebutuhan pengeluaran. Kebermanfaatan yang merupakan pengeluaran yang dibawa dari pendapatan pajak akan diberlakukan secara luas (Rozi B., 2024). Hasil pajak yang dipungut akan digunakan untuk pelayanan masyarakat dengan bantuan kebijakan opsen yang menambah pendapatan daerah tanpa menambahkan jenis pajak. Bonatua M. (2024) juga menyatakan hal yang sama bahwa pendapatan pajak akan direstribusikan kembali sebagai kebutuhan pengeluaran yang termasuk pembangunan di daerahnya. Selain dinamika tersebut, Bonatua M. (2024) menyatakan bahwa ada pula objek subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu apabila tarif untuk pendapatan pajak dinilai berat oleh wajib pajak.

Keempat, kebijakan disusun berdasarkan prinsip pajak yang menggunakan kriteria efisiensi oleh Musgrave (1984) dalam Shah, et al (1994) yang merujuk pada meminimalkan biaya sumber daya. Biaya sumber daya juga diminimalisir pada kebijakan PBJT dengan pengurangan formulir fisik dan *e-tax administration* dari kepemilikan *core tax* oleh pemerintah pusat dan sistem digitalisasi pajak oleh pemda masing-masing. Bonatua M. (2024), sebagai pengusul kebijakan, juga berpendapat demikian mengenai efisiensi. Dimulai dari pengelompokan lima pajak menjadi satu, biaya sumber daya diminimalisir dalam bentuk formulir yang disediakan. Selain itu, efisiensi kebijakan ini ditingkatkan dari sistem digital pula. Hal ini sesuai dengan penyampaian dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang menyatakan bahwa akan dilakukan transformasi digitalisasi yang sesuai dengan tuntutan UU HKPD (Rachman, 2023). Inayati (2024) menyebutnya *e-tax administration* dari kepemilikan *core tax* oleh pemerintah pusat dan sistem digitalisasi pajak oleh pemda masing-masing.

C. Dimensi *The Moderators*

Dimensi *the moderators* merupakan dimensi yang menjelaskan kondisi yang harus terjadi untuk mengaktifkan logika yang mendasari kebijakan, agar kebijakan penyederhanaan pajak dapat menghasilkan dampak yang diharapkan. Dimensi *the moderators* menganalisis beberapa indikator. Indikator pertama adalah perubahan dalam kebijakan PBJT sesuai dengan keperluan pemerintah. Kebijakan ini lebih sesuai kepada keperluan pemda daripada pemerintah pusat tetapi diakui bahwa pemerintah pusat punya kepentingan untuk meningkatkan kemampuan pemda dan menguatkan konsep desentralisasi (Dr. Syafrizal, 2024). Mengenai bentuk keperluannya, Inayati (2024) menghubungkan dengan *collection cost* di persoalan efisiensi bahwa biaya pengumpulan akan lebih ringan di pemda dan penerimaan kas daerah akan semakin tinggi. Kebijakan PBJT disusun atas konsiderasi pemerintah daerah untuk mandiri meningkatkan penerimaan daerahnya sehingga memenuhi kebutuhan pemerintah.

Indikator kedua adalah mengenai perubahan dalam kebijakan PBJT sesuai dengan keperluan sektor swasta. Keperluan swasta bukan merupakan pertimbangan yang banyak dipikirkan sehingga menimbulkan konflik dengan industri swasta yang menyatakan bahwa kebijakan PBJT melemahkan industri sehingga tidak

bisa bersaing dan mengancam keberlangsungan beberapa industri dan lingkungannya dalam pengaruh *multiplier effect*. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Anne Patricia Sutanto (2024) menyatakan:

Ini *multiplier effect* ya, kalau mengurangi *supply*, otomatis apa? Produksinya kita juga berkurang, berarti kalau pekerja yang harusnya tadinya menghasilkan 1000 orang, jadinya berkurang misalnya menjadi sebesar kapasitas yang memang diperlukan dengan adanya *demand* yang berkurang [...] Ojek-ojek yang tadinya mengantarkan para *sales promotion girl* atau *sales promotion boy* ini pasti berkurang, karena kan orangnya juga yang bekerja berkurang. Belum lagi juga warung-warung di sekitar mal itu juga akan berkurang karena *demandnya* berkurang kan. Plus yang produksi barang untuk yang dijual itu juga otomatis ada pengurangan.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani (2024), setuju dengan menambahkan mengenai lapangan kerja yang terancam, terutama untuk pekerja yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Pelemahan industri hiburan juga akan memunculkan usaha liar yang berbahaya. Pemerintah dinilai tidak menilai dampak kebijakan secara keseluruhan. Pihak Perancang Undang-Undang Ahli Madya DPR RI, Zaqiu Rahman, S.H., M.H. (2024), menyebutkan untuk swasta dapat menempuh jalur MK. Di luar itu, pemda mempunyai ruang yang dapat diatur untuk menyikapi sektor swasta, seperti pemberian insentif. Perbedaan perspektif antara pihak pemerintah dan pihak swasta menunjukkan penemuan yang menarik bahwa terdapat kepentingan lain atau kepentingan politik di balik kebijakan, berdasarkan beberapa narasumber.

Indikator ketiga, perubahan dalam kebijakan sesuai dengan keperluan masyarakat, dinyatakan bahwa kebutuhan masyarakat sebagai konsumen juga diperhatikan tetapi tidak sebanyak kepada kebutuhan pemerintah daerah karena masyarakat cenderung tidak menyadari perubahan yang terjadi. Inayati (2024) menyatakan bahwa keperluan masyarakat tidak terlalu diperhatikan karena tidak menjadi fokus kebijakan, sebagaimana:

Karena masyarakat itu lebih gak ribut. Coba deh, kamu misalnya makan di restoran, kamu ribut gak ketika bayar? Oh enggak, bayar-bayar aja kan. Paling dilihat bill-nya berapa gitu. Dan tuh kamu juga udah tau [...] Kalau saya mau murah, saya makan di sini. [...] Jadi kalau buat masyarakat itu tidak menjadi sesuatu yang Menjadi fokus barangkali ya Karena masyarakat itu ya membayar saja. [...] Secara umum masyarakat biasanya tidak terlalu terpengaruh. Dan karena dia pajak berbasis konsumsi, orang itu enggak terlalu merasa terbebani Kenapa? Karena orang akan menyesuaikan dengan kemampuan konsumsinya Kayak misalnya ya kalau saya enggak mampu makan di restoran yang mahal, ya saya makan di warteg. [...] Nah PBJT tuh sama kayak gitu.

Namun, Bonatua M. (2024) berpendapat bahwa masyarakat dipikirkan melalui tarif kebijakan yang membuat kebanyakan pajak di PBJT menjadi 10 persen sehingga memudahkan masyarakat. Bonatua M. (2024) menggunakan contoh pajak bioskop, yang merupakan pajak hiburan yang tidak terkena kenaikan tarif, yang sebelumnya bertarif 35 persen dan turun menjadi 10 persen.

Indikator keempat adalah perubahan dalam kebijakan dilaksanakan di saat yang tepat. Kebijakan dinilai sudah berjalan di waktu yang tepat dan seharusnya sudah dilakukan dari lama mengingat urgensinya yang cukup tinggi. Terkait hal ini, Sony H. P. (2024) melihat bahwa UU No.1/2022 sebagai bagian dari UU Cipta Kerja, dengan menyatakan:

Ini kan juga [...] dalam rangka untuk harmonisasi pengaturan di bidang perpanjangan terus kemudian juga kita juga pada saat itu sudah memang sudah [...] dalam rangka untuk mendorong investasi yang lebih mudah, yang bersahabat untuk usaha. Kemudian juga muncul juga cipta kerja. Memang ini rasanya memang momennya pas pada saat itu untuk bisa menyelamatkan, [...] jadi tidak hanya pusat saja yang berjuang untuk mendapatkan equilibrium dengan usaha yang baik.

Penetapan masa transisi dari disahkannya UU HKPD hingga tahun 2024 berjalan selama dua tahun, sehingga tidak terburu-buru (Dr. Syafrizal, 2024). Bonatua M. (2024) sependapat mengenai masa transisi, dengan menyatakan bahwa masa transisi ini dilaksanakan karena terdapat tuntutan pemulihan akibat pandemi Covid-19 mengingat UU HKPD disusun di masa pandemi. Maka, masa transisi dilaksanakan atas pemikiran bahwa waktu pelaksanaan akan terlalu cepat jika langsung dilaksanakan di tahun 2022. Bonatua M. (2024) melihat data bahwa industri-industri mulai bangkit pada tahun 2023.

Indikator kelima adalah mengenai perubahan dalam kebijakan yang sesuai dengan konteks sistem perpajakan Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa UU HKPD merupakan kunci untuk desentralisasi fiskal yang lebih kuat demi menciptakan keadilan sosial dan ekonomi

yang merata (Saputra, 2023). Sinergi kebijakan pusat dan daerah merupakan bagian yang diatur di UU HKPD karena merupakan pengganti UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Dr. Syafrizal, 2024). Ia menjelaskan bahwa UU HKPD merupakan gabungan antara UU No.33/2004 dan UU No.28/2009. Kebijakan sesuai dengan konteks sistem perpajakan Indonesia yang mendorong desentralisasi fiskal dan penguatan kemampuan perpajakan pemerintah daerah dengan menginkorporasikan perbankan dan teknologi, seperti QRIS dan kartu tap, dalam melengkapi administrasi kebijakan PBJT.

D. Dimensi *The Implementation*

Dimensi *the implementation* memperhatikan pertimbangan apakah kebijakan pemberlakuan PBJT akan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hambatan apa yang mungkin menghambat implementasi. Indikator pertama merujuk pada pemda memiliki pedoman pelaksanaan pajak PBJT sebagai pajak baru. Pemerintah pusat tidak memiliki pedoman untuk sendirinya tetapi memiliki petunjuk teknis (juknis). Sony H. P. (2024) juga menyatakan:

Undang-undang akan pasti pedoman ya karena ini sudah diundangkan. Ini menjadi panduan bagi semua pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah dan pajak. Kemudian juga biasanya ini aturan turunannya selain undang-undang ada peraturan pemerintah biasanya. [...] Jadi aturan menteri dalam negeri. Karena kan pemerintah daerah itu kan di bawah kewenangannya kementerian dalam negeri. Tapi ada peraturan dalam negeri. Dan biasanya ada petunjuk teknis yang disampaikan kementerian dalam negeri kepada pemerintah daerah. Tapi secara detail saya tidak begitu paham. Tetapi biasanya untuk kebijakan teknis yang di daerah itu menunggu juknis ya. Petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Sama halnya seperti dana transfer itu juga menunggu juknis dari kementerian keuangan.

Selain undang-undang ada aturan turunan, seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri, sesuai dengan kewenangan yang dipegang. Pedoman untuk pemda ada karena pemda melakukan kebijakan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat. Pedoman untuk UU HKPD merupakan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 yang sudah termasuk pedoman kebijakan PBJT tetapi tidak ada produk hukum yang spesifik untuk PBJT sendiri. Selain itu, terdapat pembinaan dan pengawasan dari Kemendagri untuk pemda. Terdapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu yang menyatakan bahwa kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha untuk membantu ekonomi pelaku usaha (Wildan, 2024). Selain melalui surat edaran, Kemendagri terus mendampingi kepala daerah dalam menyesuaikan peraturan daerah dengan UU HKPD melalui komunikasi. Dellieanie Ukman (2024) menyebutkan bahwa mereka menerima asistensi dari Kemenkeu dan Kemendagri melalui penerimaan mentor dari Kemenkeu dan konsultasi dari Kemendagri.

Indikator kedua adalah pemda memiliki arahan arus linimasa yang diberikan pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan. Terdapat masa transisi selama dua tahun bagi pemda untuk melakukan penyesuaian dalam peraturan daerahnya. Jangka waktu tersebut ditetapkan untuk memberi ruang bagi pemda untuk menyesuaikan karena terdapat proses penyusunan kembali yang termasuk konsultasi dengan DPRD, sebagaimana dijelaskan Sony H. P., (2024). Rozi B. (2024) menjelaskan bahwa masa transisi diadakan untuk memastikan peraturan daerah selesai. Bonatua M. (2024) menyebutkan bahwa tidak ada arahan waktu lainnya selain masa transisi tersebut.

Selanjutnya, indikator ketiga, pemda memiliki fasilitas dan kapabilitas dalam pengelolaan dan pelayanan pajak terkait perubahan penyederhanaan pajak menjadi PBJT. Pemda berjalan sama dengan sebelumnya, yaitu masalah dalam fasilitas dan kapabilitas umum sudah ada dari sebelumnya. Zaqiu R., (2024), menyatakan bahwa kemampuan pemda sudah berbeda-beda sehingga praktik penyelenggaraan anggaran di daerah juga akan berbeda-beda, tetapi diatur di UU No.23/2014 dan UU HKPD. Menurut data Badan Pemeriksa Keuangan (2020), dinyatakan bahwa sebanyak 70 persen pemda kota dan 98 persen pemda kabupaten berada pada status Belum Mandiri, sehingga menyatakan kapabilitas perda yang memang lemah. Indikator keempat merujuk pada perubahan dalam kebijakan berjalan merata pada semua daerah. Perubahan dalam kebijakan berjalan merata pada semua daerah ditunjukkan dengan pendampingan penyusunan peraturan daerah yang dapat diakses oleh seluruh daerah tetapi efektivitas pelaksanaan daerah tetap bergantung pada daerah masing-masing.

Indikator keempat merujuk pada perubahan dalam kebijakan berjalan merata pada semua daerah. Bagi pemda, UU HKPD yang termasuk kebijakan PBJT merupakan panduan untuk bisa mengikuti pemerintah pusat sehingga pemda akan berupaya secara optimal untuk mengikuti, sebagaimana disebutkan Sony H. P., (2024). Namun, efektivitas dari pelaksanaan pemda bisa tidak sesuai dan disamakan dengan munculnya kasus-kasus dalam suatu pajak konsumsi tertentu maupun inovasi yang membangun di suatu daerah. Inayati (2024) menyatakan bahwa pemda akan berusaha untuk melaksanakan kebijakan karena kebijakan PBJT berupaya meningkatkan efisiensi pelaksana pajak dan bermanfaat untuk meningkatkan uang yang masuk ke kas daerah. Selain itu, pelaksanaan menjadi berlaku merata di seluruh daerah karena dikeluarkannya UU HKPD tersebut yang diikuti oleh peraturan pemerintah dan diikuti kembali oleh peraturan daerah di seluruh Indonesia. Bonatua M. (2024) menyebutkan perihal yang sama bahwa pemda wajib membuat peraturan daerah yang mengikuti undang-undang. Rancangan peraturan daerah dievaluasi kemudian dikembalikan ke pemda untuk dilaksanakan. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan yang merata, pemerintah mendukung melalui sosialisasi (Dr. Syafrizal, 2024). Kemendagri juga memegang peran dalam pelaksanaan yang merata dengan melakukan fungsinya sebagai Binwas Umum. Rozi B. (2024) meluruskan definisi dalam undang-undang kepada pemda walaupun bukan berupa panduan yang berlaku imperatif atau perintah seperti peraturan pemerintah.

E. Dimensi *The Economics of an Intervention*

Dimensi *the economics of an intervention* mengacu pada antisipasi biaya-biaya dan sumber daya yang akan disalurkan, termasuk biaya tidak langsung dari kebijakan. Penelitian pada dimensi *the economics of an intervention* menganalisis beberapa indikator. Indikator pertama merujuk pada pemerintah pusat mempersiapkan anggaran untuk pemda dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh kebijakan. Pemerintah pusat terlihat tidak mempersiapkan anggaran khusus kepada pemerintah daerah terkait UU No.1/2022. Pemerintah pusat hanya memberikan melalui alokasi umum, tanpa adanya alokasi khusus terkait kebijakan PBJT. Bonatua (2024) menyatakan bahwa tidak diperlukan alokasi dana khusus karena pelaksanaan sistem yang sama.

Indikator kedua adalah pemda mempersiapkan anggaran kepada badan pengurus pajak daerah dalam menghadapi perubahan yang dibawa kebijakan. Pemerintah daerah mempersiapkan anggaran kepada badan pengurus pajak daerah adalah benar. Pemerintah daerah memiliki anggaran untuk sosialisasi, perubahan sistem, dan proses penyusunan peraturan daerah baru. Inayati (2024) menilai bahwa anggaran yang dibutuhkan cenderung pada perubahan sistem, baik *online* maupun *offline*. Ia juga menyatakan tidak diperlukan pergantian ataupun penambahan tenaga kerja manusia karena Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) sudah memiliki unit-unit yang menangani dan sistem bekerja seperti biasa pasca perubahan. Sesuai dengan hal tersebut, Wahid Suryono (2024) sebagai BKD Kota Depok mengelaborasi bahwa anggaran memiliki penyesuaian dalam sistem aplikasi dan sosialisasi. Selain alokasi anggaran dalam melaksanakan kebijakan, alokasi anggaran dalam menyusun kebijakan daerah juga termasuk. Dellieanie Ukman (2024) menyebutkan Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran pada proses pembuatan perda dan sosialisasi, dengan menyatakan:

Dalam proses perubahan undang-undang ini, jelas seluruh kabupaten dan kota ini kan mengalokasikan tentang kajian ilmiah. Sebelum dibikin perda suka bikin itu ya. [...] Lalu kemudian di tahun 2022 Kita mengalokasikan tentang proses menyusun regulasi ini. Jelas lah ada rapatnya. Kita undang narasumber rapatnya. Terus kita juga kunjungan ke beberapa, terutama ke provinsi karena harus ada sinergi antara regulasi provinsi dengan kita, karena ada opsen. Kalau pertanyaan apakah dialokasikan jelas iya. Nah, mengalokasikannya termasuk di dalamnya adalah menganggarkan tentang sosialisasi karena mengundang orang, pertemuan termasuk kita bikin spanduk bikin banner untuk ditaruh di restoran-restoran karena ada perubahan di PBJT. Kita sosialisasi sejak ditetapkan dari awal sudah. Mengundang narasumber kita dari Kementerian Keuangan Tentunya yang harus diedukasi lebih dulu kitanya nih. Lalu kemudian termasuk masyarakat misalnya PHRI bersama anggotanya. Terus kedua kita kan punya, Sekarang kan zaman teknologi ya kita punya sosial media, terinformasikan di website.

Rozi B. (2024) menyebutkan bahwa Permendagri No.120/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, berkaitan dengan program pembentukan peraturan daerah yang membutuhkan anggaran. Keperluan dalam prosedur tersebut membutuhkan anggaran, seperti dialog antara badan hukum dengan perangkat daerah terkait yang cenderung terjadi di satu tahun sebelum pembahasan kebijakan tahun tersebut.

Tabel 5. Matriks Hasil Analisis Kebijakan PBJT Melalui Kerangka EMMIE

No.	Indikator	Hasil
The Effect		
1.	Kebijakan PBJT memberikan dampak pada kenaikan kekuatan <i>collection rate</i> pajak daerah.	Pertimbangan dampak sangat minim karena lebih cenderung pada penyerahan kekuatan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah.
2.	Kebijakan PBJT memberikan dampak kemudahan operasional dalam pemungutan pajak daerah.	Kebijakan lebih banyak memperhitungkan operasional pemungutan pajak daerah walaupun dengan argumen perubahan pengelompokan tidak menyelesaikan masalah.
3.	Kebijakan PBJT memberikan dampak terhadap kemudahan wajib pajak dalam melengkapi pajak.	Dampak diangkat yang ditunjukkan dalam kemudahan dalam <i>compliance cost</i> atau biaya kepatuhan di wajib pajak, dan pengaturan tarif.
4.	Kebijakan PBJT memberikan dampak terhadap kemudahan audit pajak.	Kemudahan lapor pajak di pemerintah daerah juga menjadi pertimbangan dalam formulasi dan didukung dengan adanya keringanan dalam <i>enforcement cost</i> , yaitu biaya pelaporan, perubahan alur prosesi lapor pajak, dan pengawasan.
The Mechanism		
1.	Kebijakan disusun berdasarkan prinsip teori kriteria efisiensi administrasi perpajakan.	Indikator kebijakan disusun berdasarkan prinsip tingkat pemerintah yang paling mungkin untuk memiliki informasi terbaik mengenai basis suatu pajak, adalah tingkat yang bertanggung jawab untuk memungut suatu pajak tersebut.
2.	Kebijakan disusun berdasarkan prinsip teori kriteria kebutuhan fiskal.	Tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab atas suatu layanan memiliki instrumen perpajakan.
3.	Kebijakan disusun berdasarkan prinsip pajak yang menggunakan kriteria keadilan.	Kebijakan PBJT memberikan pendapatan pemerintah daerah dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak pada produk hukum.
4.	Kebijakan disusun berdasarkan prinsip pajak yang menggunakan kriteria efisiensi.	Biaya sumber daya diminimalisir pada kebijakan PBJT dengan sistem digitalisasi dan pengurangan formulir.
The Moderator		
1.	Perubahan dalam kebijakan PBJT sesuai dengan keperluan Pemerintah	Kebijakan PBJT disusun atas konsiderasi pemerintah daerah sehingga memenuhi kebutuhan pemerintah.
2.	Perubahan dalam kebijakan PBJT sesuai dengan keperluan sektor swasta.	Kebutuhan swasta bukan pertimbangan dalam PBJT sehingga kebijakan PBJT memberatkan pihak swasta.
3.	Perubahan dalam kebijakan sesuai dengan keperluan masyarakat.	Kebutuhan masyarakat sebagai konsumen juga diperhatikan tetapi tidak sebanyak kepada kebutuhan pemerintah daerah karena masyarakat cenderung tidak menyadari perubahan yang terjadi.
4.	Perubahan dalam kebijakan dilaksanakan di saat yang tepat.	Kebijakan dinilai sudah berjalan di waktu yang tepat dan seharusnya sudah dari lama karena sudah ada urgensinya dan sudah dalam proses disusun sejak lama.
5.	Perubahan dalam kebijakan sesuai dengan konteks sistem perpajakan Indonesia.	Kebijakan juga sesuai dengan konteks sistem perpajakan Indonesia yang mendorong desentralisasi fiskal dan penguatan kemampuan perpajakan pemerintah daerah.
The Implementation		
1.	Pemerintah daerah memiliki pedoman pelaksanaan pajak PBJT sebagai pajak baru.	Pemerintah daerah memiliki pedoman pelaksanaan PBJT, yaitu PP No.35/2023 dan pembinaan dan pengawasan dari Kemendagri.
2.	Pemerintah daerah memiliki arahan arus linimasa yang diberikan pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan.	Pemerintah daerah memiliki arahan transisi dua tahun yang membantu mereka menyusun peraturan daerah berdasarkan UU No.1/2022.
3.	Pemerintah pusat dan daerah memiliki fasilitas dan kapabilitas dalam pengelolaan dan pelayanan perubahan penyederhanaan pajak menjadi PBJT.	Pemerintah daerah memiliki fasilitas dan kapabilitas dalam pengelolaan dan pelayanan pajak. Pernyataan tersebut benar, tetapi karena keadaan tidak banyak yang berubah.

No.	Indikator	Hasil
4.	Perubahan berjalan merata pada semua daerah.	Perubahan dalam kebijakan berjalan merata pada semua daerah ditunjukkan dengan pendampingan penyusunan peraturan daerah yang dapat diakses oleh seluruh daerah tetapi efektivitas pelaksanaan daerah tetap bergantung pada daerah masing-masing.
<i>The economics of an intervention</i>		
1.	Pemerintah pusat mempersiapkan anggaran untuk pemerintah daerah menghadapi perubahan yang dibawa kebijakan.	Pemerintah pusat tidak mempersiapkan anggaran khusus kepada pemerintah daerah terkait UU No.1/2022. Pemerintah pusat hanya memberikan melalui alokasi umum.
2.	Pemerintah daerah mempersiapkan anggaran kepada badan pengurus pajak daerah dalam menghadapi perubahan yang dibawa kebijakan.	Pemerintah daerah mempersiapkan anggaran kepada badan pengurus pajak daerah adalah benar. Pemerintah daerah memiliki anggaran untuk sosialisasi, perubahan sistem, dan proses penyusunan peraturan daerah baru.

Sumber: olahan peneliti, 2024.

Kerangka EMMIE oleh Croci, Laycock, & Chainey (2022) membantu menetapkan aspek-aspek formulasi kebijakan. Berdasarkan analisis melalui dimensi yang dilakukan dan dijabarkan dalam bentuk matriks pada Tabel 5, proses formulasi kebijakan PBJT memperhatikan dampak kebijakan, teori yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan, konteks yang perlu terjadi, perkiraan pelaksanaan, dan kebutuhan biaya pelaksanaan. Kerangka memperjelas bahwa kebijakan PBJT disusun untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola penerimaannya. Formulasi kebijakan PBJT menunjukkan model *top-down*, yaitu penurunan arahan dari tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah dan mendetail, sebagaimana pedoman yang diturunkan pemerintah pusat untuk diadaptasi menjadi kebijakan di pemerintah daerah.

KESIMPULAN

UU HKPD memperkenalkan kebijakan PBJT yang memiliki pertimbangan dan urgensi dalam formulasi kebijakan PBJT. Dalam proses formulasi, kebijakan ini memperhitungkan bahwa urgensi di balik kebijakan ini adalah pertimbangan pada pemda sebagai target kebijakan pajak daerah yang mendukung kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan penerimaan daerah sehingga mengurangi depedensi terhadap transfer pemerintah pusat. Berdasarkan hasil penelitian, proses formulasi kebijakan perlu disempurnakan dalam aspek inklusivitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, sebagaimana ditegaskan dalam literatur formulasi kebijakan berbasis bukti.

Sebagai pembentuk undang undang, DPR RI mengemban tanggung jawab melibatkan seluruh pemangku kebijakan dalam formulasi kebijakan, di mana pihak swasta menjadi pihak paling terdampak oleh kebijakan PBJT. Ketidaktepatan pelaksanaan pendengaran aspirasi ini menyebabkan konflik dari pihak swasta yang menilai kebijakan PBJT melumpuhkan sejumlah industri. Selain penerimaan daerah sebagai titik fokus, DPR RI perlu mempertimbangkan industri swasta sebagai stimulan ekonomi dengan mendukung melalui pengaturan pajak yang inklusif. DPR RI perlu menyusun keseimbangan antara industri yang aman dan industri yang mendorong perekonomian. Industri swasta yang lemah di suatu daerah akan berdampak pada penerimaan Pemdanya serta mengurangi kepercayaan pihak swasta terhadap kebijakan pemerintah sehingga menjadi rintangan bagi pemberlakuan urgensi utama dilaksanakannya kebijakan PBJT. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan riset yang didukung evaluasi pasca implementasi kebijakan PBJT di berbagai daerah. Riset juga dapat dikembangkan dengan perbandingan evaluasi kebijakan dan urgensi awal kebijakan yang dinyatakan di penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustina, P., Irsyad, M., Khairunnas, M., Nuryani., Fadillah, Y., Agustino, M., Pratama, A., Setiawan, G., Bestari, R., Rangkuti, R., Marthalia, V. (2022). Modul Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kemenkumham. (2021). Naskah Akademik RUU tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.
- Peters, B. G., & Fontaine, G. (2022). "1: Introduction to the Research Handbook of Policy Design: operationalizing the policy design framework". In *Research Handbook of Policy Design*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Sidney, M. S. (2017). Policy formulation: design and tools. In *Handbook of public policy analysis* (pp. 105-114). Routledge.

JURNAL

- Bachtiar, A. (2022). Analisis perhitungan potensi pajak daerah kabupaten/kota dengan metoda Stochastic Frontier Analysis (SFA). *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 4(2), 128–142.
- Croci, G., Laycock, G., & Chainey, S., (2022) A realistic approach to policy formulation: the adapted EMMIE framework, *Policy Studies*, 44(4), 433-453,
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.
- Myles, G. D. (2000). Taxation and economic growth. *Fiscal Studies*, 21(1), 141-168.
- Nurmiati, Diana, F., & Murbayani. (2019). Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Prosiding Seminar Nasional Universitas Indonesia Timur, 1(1), 89-100.
- Shah, A., Qureshi, Z., Binder, B., & Zou, H. F. (1994). Intergovernmental fiscal relations in Indonesia. *World Bank Discussion Paper*, 239, 37-48.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 111-130.

SUMBER DIGITAL

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2020: Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemda Tahun 2020. Diperoleh tanggal 2 April 2024, dari https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2020/lkpp_2020_1624341245.pdf
- Chaniago S., & Prasetya A. (2024). GPII ajukan cabut pajak hiburan 40-75 persen, sejalan dengan Kemenparekraf. Kompas.com. Diperoleh tanggal 2 April 2024, dari <https://travel.kompas.com/read/2024/02/19/180742527/gipi-ajukan-cabut-pajak-hiburan-40-75-persen-sejalan-dengan-kemenparekraf>
- Kahfi, K. (2023). Menkeu: UU HKPD-digitalisasi perbaiki masalah pajak daerah. [Validnews.id](https://validnews.id). Diperoleh tanggal 2 April 2024, dari <https://validnews.id/ekonomi/menkeu-uu-hkpd-digitalisasi-perbaiki-masalah-pajak-daerah>
- Komisi XI. (2022). Komisi XI: UU HKPD bantu pemda tingkatkan PAD. Dpr.go.id. Diperoleh tanggal 2 April 2024, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39927/t/Komisi+XI%3A+UU+HKPD+Bantu+Pemda+Tingkatkan+PAD>
- Rachman, A. (2023). Kinerja pajak daerah rendah, Menkeu minta pemda beberes. CNBCIndonesia.com. Diperoleh tanggal 2 April 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231003134127-17-477463/kinerja-pajak-daerah-rendah-menkeu-minta-pemda-beberes>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

**Dampak Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kemiskinan di Indonesia**
(*The Impact of Presidential Regulation Number 15 of 2010 on the Acceleration of Poverty
Alleviation on Poverty in Indonesia*)

Muhammad Akbar Ramadhani¹ dan Muhammad Wakhid Musthofa²

¹Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta,
email: mhammadakbar75@gmail.com

²Matematika UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta,
email: muhammad.musthofa@uin-suka.ac.id

Naskah diterima: 10 Mei 2024
Naskah direvisi: 21 November 2024
Naskah diterbitkan: 30 Juni 2025

Abstract

Poverty is a crucial issue that needs to be addressed, as its existence contradicts the constitutional mandate and the aspirations of the Indonesian nation to promote general welfare. This article aims to examine the impact of the implementation of Presidential Regulation No. 15 of 2010 on the Acceleration of Poverty Alleviation on poverty in Indonesia from 2008 to 2022. The analysis employs the Ordinary Least Squares (OLS) method, with the regulation operationalized as a dummy variable in the first model and estimated based on relevant indicators in the second model. The research findings indicate that the enactment of the regulation has a significant negative effect on reducing poverty in Indonesia. With the regulation in place, poverty levels are lower compared to conditions when the regulation was not enforced. In the second model, expenditures on healthcare and the expansion of credit access have a negative but insignificant effect on poverty. Meanwhile, expenditures in education and subsidies have a negative and significant impact on reducing poverty. The Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) plays a vital role in designing policies and reevaluating existing programs. This process is essential to ensure the effectiveness and efficiency of program implementation.

Keywords: poverty; presidential regulation; acceleration of poverty alleviation

Abstrak

Kemiskinan menjadi masalah penting untuk ditangani karena eksistensinya bertentangan dengan amanat konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum. Artikel ini bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi Perpres No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terhadap kemiskinan di Indonesia selama tahun 2008 – 2022. Pendekatan pengujian menerapkan metode *Ordinary Least Square*, Perpres dioperasikan sebagai variabel dummy pada model pertama dan diestimasi berdasarkan indikator yang relevan pada model kedua. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan Perpres berdampak negatif signifikan bagi penurunan kemiskinan di Indonesia. Dengan diberlakukannya Perpres, angka kemiskinan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada saat tidak diberlakukannya Perpres. Pada model kedua, pengeluaran pada aspek kesehatan dan perluasan akses kredit berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan bagi kemiskinan. Sementara itu, pengeluaran di bidang pendidikan dan pengeluaran pada subsidi berdampak negatif dan juga signifikan bagi penurunan kemiskinan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting bagi penentuan rancangan kebijakan dan mengevaluasi Kembali program-program yang telah ada, hal ini perlu dilakukan agar efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan program benar-benar terwujud.

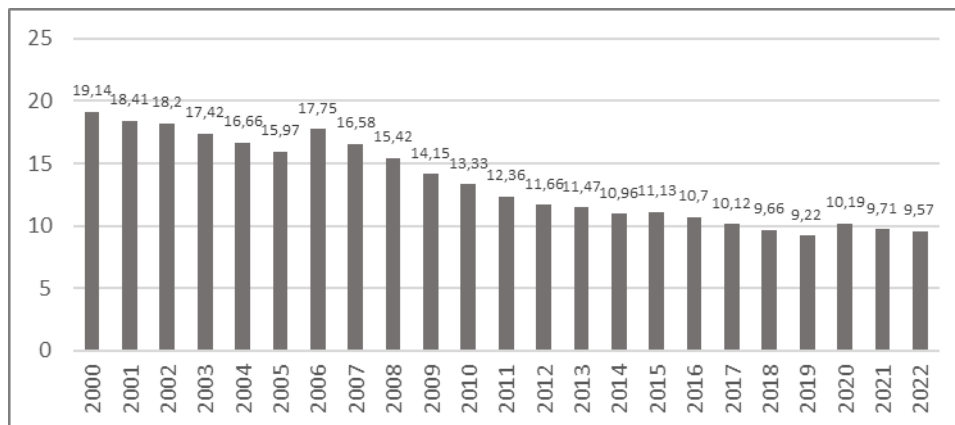
Kata kunci: kemiskinan; peraturan presiden; percepatan penanggulangan kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu pembangunan yang harus ditangani secara serius. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di Indonesia selama 20 tahun terakhir belum pernah menyentuh angka di bawah 6 persen, dan terus berfluktuasi dalam penurunannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian dari Warga Negara Indonesia yang hidup dalam keadaan yang tidak sejahtera. Fenomena kemiskinan di Indonesia terlihat melalui berbagai fenomena seperti banyaknya pengemis di pinggir jalan, banyaknya rumah yang tidak layak huni, ketiadaan akses pada layanan kesehatan, hingga anak-anak yang tidak dapat bersekolah. Masalah kemiskinan menjadi serius karena kemiskinan adalah suatu keadaan yang bertolak belakang dari amanat konstitusi, yaitu terwujudnya kesejahteraan umum. Artinya, kesejahteraan harus dapat dirasakan seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali, karena itulah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia semenjak berdirinya negara ini.

Kemiskinan yang berlaku tidak saja memberikan kesan ketidakadilan di antara masyarakat karena sebagian dari mereka hidupnya sejahtera sementara sebagian yang lain tidak, tetapi hal ini juga dapat memicu timbulnya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum (Setiawan et al., 2024). Beberapa tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, penipuan, maupun bentuk kejahatan

lain yang tujuannya adalah mengambil harta milik orang lain, seringkali dilatarbelakangi alasan keterhimpitan dalam ekonomi (Maipita, 2014). Maka jelaslah bahwa kemiskinan, pada sisi yang lain, dapat menjadi faktor pendorong bagi ketidakstabilan dalam kehidupan sosial dan juga keamanan.



Keterangan: Kemiskinan diukur dengan persentase penduduk miskin.

Sumber: BPS, 2024 (diolah).

Gambar 1. Kemiskinan di Indonesia selama 2000 -2022

Dari Gambar 1 diketahui bahwa kemiskinan di Indonesia selama 20 tahun terakhir sebenarnya mengalami tren penurunan, tetapi penurunannya tidak konsisten. Sepanjang waktu pengamatan, ada tiga momentum kenaikan yang terjadi yaitu pada tahun 2006, 2015 dan 2020. Artinya, secara keseluruhan kemiskinan mengalami penurunan hanya saja cenderung tidak stabil (fluktuatif). Maka dalam hal ini, segala macam bentuk upaya dalam menanggulangi kemiskinan harus terus dilaksanakan dengan tujuan menekan kemiskinan serendah-rendahnya atau bahkan sampai tidak ada sama sekali. Walaupun sebenarnya istilah kemiskinan mengandung ruang dan waktu serta dapat berubah tolak ukurnya, setidaknya pada konteks kemiskinan absolut (ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar), dapat terselesaikan.

Menghapus kemiskinan sendiri secara global merupakan salah satu point utama yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi oleh negara-negara yang tergabung di PBB. Hal ini lebih tepatnya dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati oleh 193 negara saat sidang majelis umum PBB pada tahun 2015 lalu. SDGs turut diadopsi oleh Indonesia dan menjadi orientasi pembangunan (Yulianto, 2024). Selain sebagai tujuan dari SDGs dalam penanggulangannya, kemiskinan juga merupakan permasalahan yang memberikan dampak tercapainya *point* SDGs lainnya. Kemiskinan dapat menghambat sinergi dan menciptakan *trade off* yang besar antara beberapa *point* SDGs (Yao Wei a, et al., 2022).

Upaya memerangi kemiskinan telah menjadi agenda politik utama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini terus mengemuka baik bagi negara berkembang maupun negara maju (Hofmarcher, 2021). Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, peran pemerintah sangat penting karena memiliki posisi sentral dalam hal penanggulangan kemiskinan. Sejahtera tidaknya suatu masyarakat sangatlah dipengaruhi bagaimana pemerintah menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini mengingat bahwa kemiskinan juga dipengaruhi oleh permasalahan struktural (Todaro & Smith, 2012), yaitu menyangkut orientasi pembangunan dan juga sistem birokrasi yang berjalan di dalamnya. Pemerintah yang bersikap inklusif tentu berpihak pada kesejahteraan masyarakatnya dan selalu mengupayakan perubahan ke arah yang lebih maju dalam pembangunan (Acemoglu & Robinson, 2017). Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam hal ini adalah memberlakukan suatu kebijakan yang membantu orang-orang miskin untuk keluar dari kemiskinan. Studi Ji et al., (2022) mendapati bukti bahwa intervensi pemerintah memiliki peran kunci bagi keterlibatan masyarakat miskin ke dalam industri pariwisata yang kemudian meningkatkan pendapatan mereka dan pada akhirnya menurunkan kemiskinan di China.

Dalam konteks Negara Indonesia, sejak tahun 2010, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Perpres No. 15 Tahun 2010). Implikasi dari Perpres tersebut adalah terbentuknya Tim Nasional dan Tim Kordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada tingkat provinsi dan daerah serta dibuatnya beberapa program-program yang bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan (M. & Faisal, 2014). Perpres tersebut selanjutnya

diimplementasikan dalam beberapa program: *pertama*, program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. *Kedua*, Program Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. *Ketiga*, Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. *Keempat*, Program Lainnya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun segala pendanaan yang diperlukan oleh Tim Nasional, TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota masing-masing dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten Kota.

Pada aspek kesehatan, upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat guna menciptakan generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan unggul terus ditingkatkan oleh pemerintah. Masyarakat yang kurang mampu dan rentan sering kali menghadapi tantangan kesehatan yang lebih besar, terutama karena keterbatasan akses ke layanan kesehatan yang disebabkan oleh kendala finansial. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyediakan jaminan kesehatan yang dirancang untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan, serta melindungi mereka dari beban biaya medis yang tinggi. Program ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya adalah layanan kesehatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh mereka yang membutuhkan. Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi alat untuk memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu memiliki akses ke layanan kesehatan, seperti yang disediakan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan (TNP2K, 2024a). Studi O'Donnell (2024) mengungkapkan bagaimana kesehatan dapat menjadi kontributor penting bagi kemiskinan. Kesehatan yang buruk membuat hilangnya potensi perolehan pendapatan yang bahkan kerugiannya jauh lebih besar dari pada biaya medis itu sendiri. Kondisi kesehatan yang buruk di masa kanak-kanak melalui kurangnya gizi dan aspek lainnya mengganggu pendidikan dan terbentuknya kompetensi individu di masa depan. Kondisi kesehatan yang buruk di masa dewasa akan mengurangi kapasitas kerja, baik secara sementara maupun permanen. Madi & Hussain (2007) menyebutkan pentingnya promosi pada bidang kesehatan dalam upaya penurunan kemiskinan. Hal ini juga melibatkan proses sosial dan politik yang kompleks guna mendorong kemajuan pada aspek kesehatan dan pendistribusian yang merata.

Pada aspek Pendidikan, pemerintah Indonesia telah mengembangkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) guna menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan. KIP diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di sekolah, madrasah, pondok pesantren, kelompok belajar atau lembaga pelatihan maupun kursus. Beberapa tujuan umum kebijakan ini antara lain: meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan, menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar-kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan dan antar-daerah, dan meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (TNP2K, 2024b). Pada tingkat perguruan tinggi terdapat KIP Kuliah yang ditujukan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi (Fathoni & Najicha, 2024). Pentingnya aspek pendidikan menurut Smith et al. (2023), menjadi aspek yang kesuksesan dan peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, studi Akbar et al. (2019) menyarankan alokasi terhadap sektor pendidikan karena dampaknya yang signifikan dalam menurunkan kemiskinan.

Pada aspek ketiga yang melibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan memiliki hubungan erat dengan upaya pengurangan kemiskinan. Di Indonesia, akses ini masih tergolong rendah, padahal inklusi keuangan melalui fasilitas seperti tabungan, kredit, asuransi, sistem pembayaran, dan dana pensiun, sangat penting bagi kelompok rentan dan berpendapatan rendah. Dengan memiliki akses tersebut, mereka dapat meningkatkan pendapatan, memperoleh modal usaha, mengelola risiko, dan keluar dari jerat kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dirancang untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan

potensi lokal. Kelompok sasaran dari program ini adalah masyarakat yang hampir miskin dengan usaha berskala kecil dan mikro yang layak menerima bantuan program tersebut. Salah satu karakteristik program ini adalah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha kecil. Ruang lingkup program ini mencakup perluasan distribusi kredit dan penguatan institusi terkait (TNP2K, 2024c). Kebijakan perluasan kredit ini berpotensi menurunkan kemiskinan sebagaimana dibuktikan oleh studi Roy et al. (2021). Di sisi lain, Yin et al. (2023) mendapati temuan bahwa aspek finansial memainkan peran penting dalam penanggulangan kemiskinan. Inklusi keuangan menurut Tran et al. (2022) memiliki dampak penting bagi penanggulangan kemiskinan melalui berbagai layanan keuangan yang diberikan. Inklusi keuangan bagi rumah tangga melalui berbagai layanan perbankan memiliki dampak penting bagi penanggulangan kemiskinan multidimensi.

Terakhir, aspek subsidi sebagai upaya mengurangi beban masyarakat miskin. Pemberlakuan kebijakan subsidi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Subsidi diartikan sebagai dana yang dialokasikan kepada badan usaha milik negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan untuk menyediakan barang atau jasa strategis yang menguasai kebutuhan hidup masyarakat, disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Tujuan pemerintah menyalurkan subsidi kepada perusahaan atau rumah tangga agar mereka dapat memproduksi atau mengonsumsi produk dalam jumlah lebih besar atau dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, terdapat sembilan jenis bantuan atau subsidi yang ditujukan untuk masyarakat miskin, mencakup sektor pangan, pendidikan, kesehatan, energi, ekonomi dan sosial, pertanian, perumahan, perikanan dan kelautan, serta dana desa. Program subsidi di sektor energi terdiri dari empat jenis, yaitu subsidi listrik, bantuan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 kg, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) (TNP2K, 2024d). Mankiw (2007) menjelaskan bagaimana dampak subsidi dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang menerimanya. Studi Hamzehi et al. (2022) mendapati jika subsidi memberikan manfaat yang besar bagi rumah tangga sehingga membantu mengurangi beban dalam pemenuhan kebutuhan.

Peninjauan literatur oleh penulis mengungkapkan beberapa penelitian terdahulu menyangkut analisis terhadap implementasi kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010. Studi Budhiati (2017) mengkaji tata kelola percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dengan pendekatan kualitatif yang temuannya menyebutkan masih kurangnya integrasi dan koordinasi antarberbagai pihak pada berbagai tingkatan, adanya konflik prosedural, hingga dampak program yang tidak benar-benar menyentuh aspek produktif, perdagangan, dan investasi. Studi Setiani (2022) menganalisis kinerja dari implementasi program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora dengan pendekatan kualitatif. Temuannya menunjukkan bahwa 85 persen dari program-program tersebut telah diimplementasikan dan menunjukkan hasil yang bagus dalam menurunkan kemiskinan, tetapi terdapat beberapa program yang belum berjalan efektif seperti efisiensi anggaran dan pemerataan program. Studi Rivani (2016) menyoroti pentingnya basis data tunggal dalam mendukung kinerja program dengan pendekatan kualitatif temuannya membuktikan bahwa basis data tentang penerima program membantu tercapainya sasaran penerima yang lebih tepat bagi rumah tangga miskin dan menghindari duplikasi biaya. Rakhmat & Firdaus (2019) menguji dinamika implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diberlakukan di Indonesia dengan pendekatan kualitatif. Temuannya menyimpulkan adanya diskresi di level petugas lapangan menyebabkan bias distribusi yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target.

Secara umum, penelitian terdahulu mengkaji implementasi Perpres dengan metode kualitatif. Penelitian ini selanjutnya bertujuan menguji dampak perbelakuan Perpres No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan terhadap kemiskinan yang berlaku di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan yang ditawarkan oleh penulis dan berguna untuk mengisi kesenjangan literatur yang telah ada. Pada teknisnya, Perpres tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang berupa data kualitatif dapat dikuantitatifkan dan dioperasikan sebagai variabel *dummy*. Tujuannya adalah agar perbedaan kondisi kemiskinan pada saat sebelum dan selama diberlakukannya Perpres dapat dianalisis. Hal ini dilakukan karena Perpres tersebut juga memberikan implikasi perubahan yang berarti pada agen-agen ekonomi, sehingga perlu untuk diteliti (Widarjono, 2018). Selain itu beberapa indikator yang berhubungan langsung dengan program kebijakan tersebut seperti perbaikan pada aspek pendidikan, aspek kesehatan, akses kredit dan subsidi juga diestimasi secara langsung. Pertumbuhan ekonomi telah banyak diteliti namun turut dimasukkan dan dijadikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian.

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang berupa data runtut waktu (*time series*). Data diperoleh dengan cara dokumentasi dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank. Data-data tersebut akan diuji secara statistik melalui *software* E-Views untuk kemudian melalui tahap analisis regresi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Informasi mengenai data dan indikator yang digunakan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Notasi	Indikator	Sumber Data
Kemiskinan	<i>PVT</i>	Persentase penduduk miskin	BPS
Kebijakan Perpres	<i>PERPRES</i>	0 sebelum tahun 2010, 1 pada tahun 2010 ke atas	-
Pengeluaran Kesehatan	<i>HEALTH</i>	Domestic general government health expenditure (Percent of general government expenditure)	World Bank
Pengeluaran Pendidikan	<i>EDUC</i>	Government expenditure on education, total (Percent of government expenditure)	World Bank
Akses Kredit	<i>CREDIT</i>	Domestic credit to private sector Percent of GDP)	World Bank
Subsidi Pemerintah	<i>SUBS</i>	Subsidies and other transfers (current LCU)	World Bank

Sumber: Diolah, 2024

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran karakteristik distribusi data penelitian. Beberapa hal yang ditunjukkan dalam statistik ini antara lain adalah *mean*, *median*, *modus*, nilai maksimum, nilai minimum, hingga standar deviasi dari data (Hartono, 2016).

Analisis Regresi *Ordinary Least Square*

Metode kuadrat terkecil (OLS) merupakan metode statistika yang digunakan dalam model regresi linier. Metode ini berusaha menemukan garis yang paling sesuai melalui sekumpulan titik data dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model linier (Allen, 2017). Selanjutnya analisis berlanjut pada membuat komparasi antara periode sebelum dan selama diberlakukannya Perpres tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Pada saat sebelum diberlakukannya perpres, nilai variabel *dummy* adalah 0 dan pada saat diberlakukannya perpres variabel *dummy* bernilai 1. Persamaan (1) adalah sebelum diberlakukan Perpres dan Persamaan (2) adalah selama diberlakukannya Perpres. Pada persamaan (2) nilai intersep ditotalkan dengan nilai koefisien dari variabel *dummy* ($\beta_0 + \beta D_t$) yang kemudian dapat diketahui bagaimana perbedaan saat sebelum dan selama diberlakukannya Perpres (Widarjono, 2018).

$$PVT_t = \beta_0 + \beta_1 PERPRES(D)_t + et \dots \dots \dots (1)$$

$$PVT_t = \beta_0 + \beta_1 PERPRES(D)_t + et \dots \dots \dots (2)$$

$$PVT_t = \beta_0 + \beta_1 Health(X1)_t + \beta_2 Educ(X2)_t + \beta_3 Credit(X3)_t + \beta_4 Subs(X4)_t + \beta_5 EcGrowth(C)_t + et \dots \dots \dots (3)$$

Di mana:

β_0 : Intersep

$\beta_1, \beta_{...n}$: Koefisien Regresi

t: periode waktu

X: Variabel Bebas

D: variabel *dummy*

C: Variabel Kontrol

e : Error

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan estimasi, data terlebih dahulu melalui serangkaian uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan data tersebut memenuhi asumsi metode kuadrat terkecil (OLS), sehingga menghasilkan estimator yang BLUE (*best, linear, unbiased estimator*). Uji asumsi ini meliputi (Widarjono, 2018):

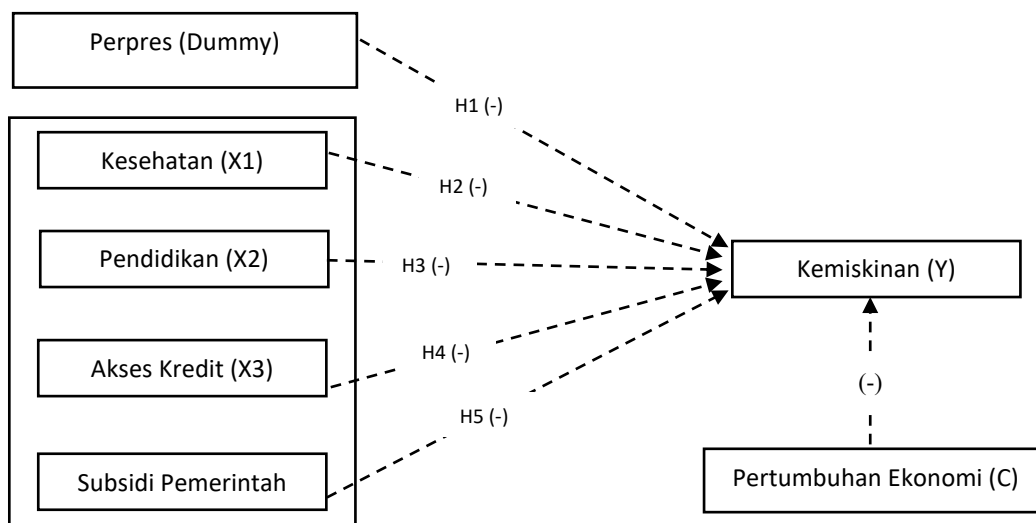
- Uji Normalitas, uji ini dilakukan untuk memastikan residual data berdistribusi normal. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai probabilitas Jarque Bera dengan nilai alpha 0,05 (5 persen), dengan kriteria jika nilai probabilitas lebih besar maka residual data berdistribusi normal dan begitupun sebaliknya.
- Uji Multikolinieritas, uji ini dilakukan guna memastikan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Dalam aturan mainnya (*rule of thumb*), sistem pengujian adalah melalui perbandingan antara nilai VIF dengan angka 10, dengan kriteria jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas dan begitupun sebaliknya.
- Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk memastikan variabel gangguan tidak saling berkorelasi satu sama lain. Pengujian menggunakan metode White, yaitu dengan membandingkan antara nilai Obs* R Squared dengan nilai alpha 0,05 dengan kriteria jika alpha lebih besar maka terdapat masalah heteroskedastisitas.
- Uji Autokorelasi, bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat hubungan (korelasi) antara variabel gangguan dari satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya. Pengujian dilakukan dengan metode Breusch Godfrey dengan membandingkan antara nilai Obs* R-Squared dengan nilai alpha 0,05, dengan kriteria jika alpha lebih besar maka terdapat masalah autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara parsial (individu) dan juga pengaruh secara simultan (bersamaan) dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini meliputi Uji t dan Uji F. Pada Uji t, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas t masing-masing variabel dengan nilai alfa sebesar 1 persen, 5 persen, dan 10 persen. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari alfa, maka variabel independen berpengaruh signifikan dan demikian pula sebaliknya (Widarjono, 2018). Adapun pada uji F, pengujian melalui perbandingan nilai probabilitas nilai statistik F dengan nilai alpha 1 persen, 5 persen dan 10 persen, jika nilai probabilitas lebih kecil dari alfa, maka secara simultan seluruh variabel independen secara signifikan memengaruhi variabel dependen dan demikian pula sebaliknya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat menerangkan variabel dependennya. Rentang nilainya antara 0 sampai 1, semakin mendekati angka 1 maka kemampuannya dalam menjelaskan variabel dependen semakin baik dan begitu pula sebaliknya.



Keterangan : Pengembangan Hipotesis Penelitian.

Sumber : Pengembangan kerangka teoritis

Gambar 2. Kerangka Berpikir Pengembangan Hipotesis

Gambar 2 di atas menunjukkan kerangka berpikir tentang hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini. Terdapat 5 hipotesis yaitu Perpres sebagai variabel *dummy* dan 4 variabel indikator program Perpres lainnya sebagai variabel independen terhadap kemiskinan yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi dioperasikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian. Sifat hubungan yang dibangun pada kerangka hipotesis didasarkan pada tujuan dari implementasi program percepatan penanggulangan kemiskinan dan juga bukti empiris dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya pada pendahuluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil pengujian statistik yang telah dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber terkait. Selanjutnya, hasil uji tersebut akan diinterpretasikan dan dianalisis dengan teori – teori ekonomi.

Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif di atas memberikan informasi dari variabel-variabel utama dalam penelitian ini. Analisis secara lebih spesifik hanya dilakukan pada nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std Dev	Max	Min
Kemiskinan	14	11.43	1.81	15.42	9.22
Kesehatan	14	6.69	2.59	12.11	3.91
Pendidikan	14	16.85	2.05	21.07	11.45
Kredit	14	35.90	2.2	39.40	27.25
Subsidi	14	948	233	1.255	520
Pertumbuhan ekonomi	14	4.74	2.08	6.20	-2.07

Note: Variabel Subsidi dibaca dalam Triliun Rupiah

Sumber: Diolah, 2024

Kemiskinan tertinggi yang terjadi di Indonesia selama periode penelitian adalah sebesar 15,42 persen pada tahun 2008. Rata rata sebesar 11,43 persen menunjukkan bahwa kemiskinan mendekati nilai minimumnya. Selain itu, standar deviasi mendekati nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa variasi kemiskinan relatif besar. Pengeluaran di bidang kesehatan tertinggi adalah sebesar 12,1 persen dari total pengeluaran pemerintah keseluruhan yang terjadi pada tahun 2021. Hal ini merupakan akibat dari pandemi Covid 19 yang terjadi pada waktu itu. Dengan nilai rata-rata sebesar 6,69 persen, artinya pengeluaran di bidang kesehatan lebih mendekati nilai minimumnya. Demikian pula nilai standar deviasi mendekati nilai rata-rata yang artinya varians dari pengeluaran di bidang kesehatan relatif rendah. Pengeluaran di bidang pendidikan tertinggi adalah sebesar 21,07 persen dari total pengeluaran pemerintah keseluruhan yang terjadi pada tahun 2016. Dengan rata-rata sebesar 16.85 persen dan standar deviasi sebesar 2,05 persen, maka variansnya relatif besar. Akses kredit terbesar adalah sebesar 39,40 persen yang terjadi pada tahun 2016. Dengan rata-rata sebesar 35,90 persen maka akses kredit lebih mendekati nilai maksimumnya. Sementara, standar deviasi relatif jauh dengan nilai rata-rata, artinya varians kredit relatif besar. Subsidi terbesar adalah sebesar 1.255 triliun yang terjadi pada tahun 2022. Dengan rata-rata sebesar 948 triliun, maka subsidi cenderung mendekati nilai maksimumnya. Sementara, nilai standar deviasi yang relatif jauh dengan rata-rata, artinya varians pengeluaran subsidi relatif besar.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian dilakukan dengan menggunakan pendekatan uji Jarque Bera, pengujian didasarkan pada nilai Jarque bera atau nilai probabilitas Jarque-Bera. Pada penilaian kedua, jika nilai Prob J lebih besar dari α (5 persen), maka dinyatakan residual berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Model	Jarque-Bera	Prob-J	Kesimpulan
Perpres <i>dummy</i> (1)	0.892	0.221	Residual Berdistribusi Normal
Indikator program perpres (2)	0.640	0.895	Residual Berdistribusi Normal

Sumber: Diolah, 2024

Pada *output* Tabel 3 diketahui nilai probabilitas Jarque-Berra untuk kedua model lebih besar dari nilai alfa ($0.892 > 0.05$) dan ($0.640 > 0.05$), artinya residual pada kedua model berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas hanya diterapkan pada model 2 yang mengestimasi indikator-indikator program Perpres. Hal ini dikarenakan model 2 melibatkan lebih dari satu variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai VIF. Jika nilai *centered* VIF yang diperoleh lebih kecil dari 10 maka dikatakan data terbebas masalah multikolinieritas. Pada Tabel 4 di bawah, diketahui jika seluruh variabel independen maupun kontrol tidak mengalami masalah autokorelasi karena seluruh nilai *centered* VIF dari masing-masing variabel tersebut berada di bawah 10.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Uncentered</i> VIF	<i>Centered</i> VIF	Kesimpulan
Kesehatan	22.635	2.772	Tidak terjadi Multikolinieritas
Pendidikan	87.940	1.195	Tidak terjadi Multikolinieritas
Kredit	271.120	4.549	Tidak terjadi Multikolinieritas
Subsidi	101.309	5.283	Tidak terjadi Multikolinieritas
Pertumbuhan ekonomi	11.752	1.781	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber: Diolah, 2024

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diterapkan pada kedua model, baik pada model 1 Perpres *dummy* maupun pada model 2 indikator program Perpres. Pengujian dilakukan dengan metode uji *Breusch-Pagan Godfrey* dan didasarkan pada perbandingan nilai probabilitas Chi Square dengan nilai *alpha* 5 persen. Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai *alpha* dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Instrumen Uji	Obs*R-Squared	Prob. Chi-Square	Kesimpulan
Perpres <i>dummy</i> (1)	5.952	0.310	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Indikator program perpres (2)	0.708	0.400	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Diolah, 2024

Pada Tabel 5 tersebut diperoleh nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari nilai alfa 5 persen ($5.952 > 0,05$) dan ($0.708 > 0.05$), artinya pada kedua model tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi diterapkan pada kedua model, baik pada model 1 Perpres *dummy* maupun pada model 2 indikator program Perpres. Pengujian dilakukan dengan metode uji *Lagrange Multiplier* dan didasarkan pada perbandingan nilai probabilitas Chi Square dengan nilai *alpha* 5 persen. Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai *alpha* dikatakan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Obs*R-Squared	Prob. Chi-Square	Kesimpulan
Perpres <i>dummy</i> (1)	0.789	0.673	Tidak terjadi masalah Autokorelasi
Indikator program perpres (2)	3.373	0.185	Tidak terjadi masalah Autokorelasi

Sumber: Diolah, 2024

Pada Output Tabel 6 tersebut diperoleh nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari nilai α ($0.673 > 0.05$) dan ($3.373 > 0.05$), artinya pada kedua model tidak terdapat masalah autokorelasi.

Analisis Regresi OLS

Tabel 7. Hasil Estimasi OLS

Variabel	Koefisien	Std Error	t-Statistic	Prob
<i>Model 1 (Perpres dummy)</i>				
C	16.970***	0.426	39.788	0.000
Perpres	-6.194***	0.567	-10.919	0.000
R-Squared			0.8502	
Prob F-Statistic			0.0000	
<i>Model 2 (Indikator program perpres)</i>				
C	24.705***	1.663	14.855	0.000
Kesehatan	-0.111	0.095	-1.170	0.275
Pendidikan	-0.203**	0.078	-2.583	0.032
Kredit	-0.099	0.066	-1.486	0.175
Subsidi	-5.08E-15***	1.51E-15	-3.363	0.009
Pertumbuhan Ekonomi	-0.192*	0.095	-2.027	0.077
R-Squared			0.9476	
Prob F-Statistic			0.0000	

Note: ***: signifikan pada 1 persen, **: signifikan pada 5 persen, *: signifikan pada 10 persen

Sumber: Diolah, 2024

Berdasarkan nilai dari koefisien regresi pada *output* di atas didapat model persamaan regresi berikut:

$$PVT_t = 16.970 - 6.194Perpres \dots\dots\dots(4)$$

$$PVT_t = 10.776 \dots\dots\dots(5)$$

$$PVT_t = 24.705 - 0.111HEALTH_t - 0.203EDUC_t - 0.099REDIT_t - 5.08SUBS_t - 0.192EcGROWTH_t \dots\dots\dots(6)$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pada estimasi model 1, diperoleh nilai intersep sebesar 16,970, artinya apabila Perpres belum diberlakukan, (bernilai nol) maka kemiskinan adalah sebesar 16,97 persen. Setelah Perpres diberlakukan (bernilai 1), maka kemiskinan berkurang menjadi 10,77 persen sebagaimana pada persamaan (5).
2. Pada estimasi model 2, diperoleh nilai intersep sebesar 24,705, artinya dengan mengasumsikan variabel indikator program Perpres bernilai konstan (nol), maka kemiskinan yang berlaku adalah sebesar 24,70.
3. Nilai koefisien Kesehatan adalah sebesar -0.111, artinya jika pengeluaran di bidang kesehatan meningkat sebesar 1 persen, maka kemiskinan menurun sebesar -0,111 persen dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan (bernilai nol).
4. Nilai koefisien Pendidikan adalah sebesar -0,203 artinya jika pengeluaran di bidang pendidikan meningkat sebesar 1 persen, maka kemiskinan menurun sebesar 0,203 persen dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan (bernilai nol).
5. Nilai koefisien akses kredit adalah sebesar -0,099, artinya jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen, maka kemiskinan menurun sebesar 0,099 persen dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan (bernilai nol).
6. Nilai koefisien subsidi adalah sebesar -5,08, artinya jika subsidi naik sebesar Rp1 Triliun, kemiskinan akan menurun sebesar 5,08 persen.

Uji Hipotesis

Uji t

Pada Tabel 7 diketahui terdapat beberapa variabel yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan antara lain Perpres, pengeluaran di bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah pada subsidi.

Uji F

Pada model 2 yang mengestimasi indikator-indikator program Perpres, didapat nilai probabilitas F sebesar 0,000 yang signifikan pada alpha 1 persen, artinya seluruh variabel independen secara simultan berdampak signifikan pada kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Uji koefisien Determinasi (R^2)

Pada Tabel 7 tersebut dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squared* adalah 0,9476 yang bermakna bahwa model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependennya (kemiskinan) sebesar 94,76 persen, sementara sisanya 5,24 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Pengaruh Pemberlakuan Perpres No. 15 Tahun 2010 terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi dan juga uji hipotesis, diketahui bahwa variabel *dummy* Perpres Nomor 15 tahun 2010 secara signifikan berpengaruh pada arah negatif terhadap kemiskinan yang berlaku di Indonesia. Dalam ungkapan lain, ketika Perpres tersebut diberlakukan, kemiskinan di Indonesia menurun secara signifikan. Kita bisa melihat perbedaan yang terjadi ketika sebelum dan selama diberlakukannya Perpres melalui persamaan (4) dan (5). Ketika Perpres diberlakukan, tingkat kemiskinan yang berlaku semakin mengecil.

Temuan ini menunjukkan bahwa melalui penajaman atas program-program kemiskinan dari adanya Perpres percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut, kemiskinan secara efektif menurun. Secara umum, program-program dari Perpres tersebut mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan juga peningkatan keterlibatan orang miskin dalam perekonomian yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi kemiskinan melalui pemberlakuan Perpres tersebut mencerminkan pemerintahan yang inklusif, yaitu pemerintah yang mendorong terwujudnya kemakmuran sebagaimana yang diungkapkan oleh Acemoglu & Robinson, (2017). Dengan demikian, kinerja dari pemberlakuan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dikatakan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Selain itu, kita juga dapat mengaitkan kinerja Perpres dengan tren kemiskinan di Indonesia yang terus menurun sejak diberlakukannya Perpres tersebut (lihat kembali Grafik 1). Walaupun demikian, kebijakan ini belum benar-benar menyelesaikan kemiskinan seutuhnya mengingat kemiskinan secara rata-rata masih berada di angka 11 persen dengan tingkat minimum yang pernah dicapai masih di angka 9 persen, artinya upaya berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan masih dibutuhkan.

Pengaruh Pengeluaran di Bidang Kesehatan terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi dan juga uji hipotesis, diketahui bahwa variabel pengeluaran di bidang kesehatan berdampak negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Artinya hipotesis penelitian ditolak dari segi signifikansinya, namun pada arah koefisien menunjukkan temuan yang selaras. Dengan demikian, temuan ini tidak sejalan dengan temuan Komarudin & Oak (2020) bahwa kenaikan pengeluaran di bidang kesehatan berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan, namun setidaknya mendukung temuan O'Donnell (2024) bahwa aspek kesehatan dapat menjadi kontributor penting bagi kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan nampaknya memiliki peran penting bagi penanggulangan kemiskinan, hanya saja dibutuhkan penyesuaian agar dampak yang diberikannya benar-benar besar. Layanan kesehatan yang memadai tetap menjadi syarat utama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin yang cenderung kesulitan menerima layanan tersebut. Mengacu kembali pada data statistik deskriptif, persentase pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan relatif kecil dengan nilai maksimum hanya sebesar 12 persen dari total pengeluaran pemerintah secara keseluruhan. Pengeluaran ini bahkan lebih rendah dari pada pengeluaran di bidang pendidikan, artinya pemerintah dapat mempertimbangkan kembali alokasi anggaran di bidang kesehatan. Di sisi lain, temuan ini juga menunjukkan indikasi inefektifitas dari implementasi program-program di bidang kesehatan. Dengan demikian, kinerja dari program KIS perlu dievaluasi kembali.

Evaluasi terhadap program tersebut juga perlu terus dilakukan guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi program yang dijalankan. Temuan Klemens et al. (2019) menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dari pelayanan kesehatan melalui program ini antara lain terlambatnya pembagian kartu, masih ada masyarakat yang tidak memanfaatkannya dan memilih metode pengobatan tradisional, minimnya informasi berkaitan

dengan program tersebut, hingga masalah ketersediaan obat-obatan dan bahan medis. Temuan Anggraini (2021) mengungkapkan bahwa kurang memadainya sumber daya maupun fasilitas kesehatan turut menjadi faktor penghambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, temuan Karunianingsih & Suryaningsih (2019) mengungkapkan minimnya sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat sebagai faktor penghambat keberhasilan program. Adapun temuan (Yaluwo, 2021) mengungkapkan minimnya pos anggaran sebagai alasan mengapa sosialisasi program KIS kurang tersebar luas di tengah masyarakat, sehingga turut memengaruhi keberhasilan dan manfaat program.

Pengaruh Pengeluaran di Bidang Pendidikan terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi dan juga uji hipotesis, diketahui bahwa variabel pengeluaran di bidang pendidikan berdampak negatif signifikan terhadap kemiskinan yang berlaku di Indonesia, artinya hipotesis penelitian diterima. Di sisi lain, temuan ini memperkuat ungkapan Smith et al. (2023) jika aspek pendidikan secara statistik berdampak signifikan bagi penurunan kemiskinan. Secara umum, pendidikan yang memadai sering dipertimbangkan sebagai jaminan kesuksesan dan peningkatan penghasilan di masa depan. Demikian pula temuan Hofmarcher (2021) bahwa pendidikan mempunyai dampak pengurangan kemiskinan yang sangat besar secara ekonomi. Pendidikan yang lebih tinggi mengurangi kemiskinan baik yang diukur secara objektif maupun subjektif. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pembangunan di aspek pendidikan dapat dilihat melalui alokasi anggaran ke sektor tersebut. Sejalan dengan temuan Akbar et al. (2019), mendapati jika belanja publik di sektor pendidikan memiliki dampak yang signifikan pada arah negatif pada penurunan kemiskinan di beberapa negara Asia.

Temuan ini menjadi dasar anggapan bahwa pendidikan memang berperan penting bagi pembangunan manusia dan juga peningkatan martabat manusia. Melalui pendidikan yang memadai setiap individu dapat memperoleh masa depan yang lebih baik dan kondisi kesejahteraan yang lebih tinggi. Artinya sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan yang ditujukan pada aspek pendidikan masyarakat Indonesia merupakan kebijakan yang tepat guna menangani kemiskinan yang berlaku di Indonesia. Pemberian program KIP secara umum dapat dikatakan cukup baik dalam meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat dari segi pendidikannya. Sejalan dengan temuan Fathoni & Najicha (2024) bahwa KIP secara signifikan meningkatkan akses ke pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi. Tidak hanya itu, program KIP menimbulkan dampak psikologis bagi penerimanya, memfasilitasi modal sosial budaya, dan mengubah pola pikir tentang potensi diri.

Pengaruh Akses Kredit terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi dan juga uji hipotesis, diketahui bahwa variabel akses kredit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan yang berlaku di Indonesia. Artinya hipotesis penelitian ditolak dari segi signifikansinya, namun arah koefisien menunjukkan temuan yang selaras dengan hipotesis yang dibangun. Dengan demikian, temuan ini tidak sejalan dengan temuan Roy et al. (2021) bahwa perluasan kredit memiliki dampak yang signifikan bagi penurunan angka kemiskinan, namun setidaknya tetap mendukung ungkapan Yin et al. (2023) bahwa aspek finansial yang berkelanjutan menjadi persyaratan dasar untuk melaksanakan pengentasan kemiskinan yang terarah. Temuan ini juga mendukung Tran et al. (2022) bahwa inklusi keuangan bagi rumah tangga melalui berbagai layanan perbankan memiliki dampak penting bagi penanggulangan kemiskinan multidimensi.

Akses kredit yang diberikan oleh sektor keuangan tetap memberikan peranan penting bagi sumber pendanaan modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tanpanya sektor usaha tersebut, UMKM tidak dapat berkembang. Sejalan dengan studi Khafifah et al. (2022) bahwa KUR berperan penting bagi produktivitas dan pertumbuhan UMKM. Adapun dampak yang tidak signifikan dari setiap perluasan kredit mengindikasikan bahwa perlunya evaluasi dari segi aspek manajemen usaha yang dikembangkan oleh UMKM agar selanjutnya memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan. Sejalan dengan temuan Naufalin (2020) bahwa di antara kendala penghambat kemajuan UMKM adalah aspek manajerial yang kurang efektif, administrasi yang tidak rapi hingga kurangnya inovasi. Sementara, Fitriyah et al. (2024) mengungkapkan kendala lain seperti kurangnya kemampuan pemasaran, persaingan hingga distribusi. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya pembekalan keterampilan manajemen usaha bagi para pengembang UMKM agar meningkatkan daya saing dan daya pasarnya. Pengembang UMKM ini dapat menjadi saluran yang memfasilitasi keterlibatan masyarakat miskin dalam produktifitas ekonomi.

Pengaruh Subsidi terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi dan uji hipotesis, diketahui bahwa variabel pengeluaran di bidang subsidi berdampak negatif signifikan terhadap kemiskinan yang berlaku di Indonesia, artinya hipotesis penelitian diterima. Dalam analisis makro ekonomi, subsidi meningkatkan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) rumah tangga (Mankiw, 2007). Sejalan dengan temuan Hamzehi et al. (2022), pemberian subsidi memberikan manfaat yang besar bagi rumah tangga melalui perubahan komposisi pengeluarannya. Daya beli yang meningkat dari subsidi meningkatkan pengeluaran pada makanan dan non-makanan. Pada sisi produksi, temuan Mwale & Kamninga (2022) menunjukkan bahwa subsidi *input* pertanian terbukti membangun ketahanan berkelanjutan produktifitas pertanian atas guncangan iklim yang selanjutnya membantu menangani ancaman kemiskinan. Hosan et al. (2023) mendapati temuan bahwa subsidi di sektor energi dapat mengantisipasi dampak kemiskinan akibat kenaikan energi yang peranannya amat penting bagi kehidupan manusia.

Temuan ini selanjutnya menjadi dasar pembuktian bahwa subsidi yang dikeluarkan pemerintah selama ini efektif menangani isu kemiskinan di Indonesia. Subsidi yang diarahkan pada sektor produksi dapat mengurangi beban biaya produksi sehingga dapat terus melanjutkan produktivitasnya dan lebih resisten terhadap guncangan ekonomi. Demikian pula subsidi bagi rumah tangga terutama masyarakat miskin, mampu mengurangi beban pengeluaran dan menguatkan daya beli masyarakat miskin. Dengan demikian, subsidi dapat menjadi instrumen yang dapat diterapkan bagi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

Dampak negatif dari penerapan subsidi juga perlu diperhatikan, Ansari & Khan (2023) mengungkapkan jika subsidi dapat berdampak bagi defisit fiskal, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan dalam jangka panjang. Subsidi mungkin dapat efektif menangani kemiskinan dalam jangka pendek, namun perlu perhatian pada pemberdayaan kemandirian sektor produktif dan pengembangan pendidikan dalam jangka panjang. Temuan Maipita et al. (2012) menunjukkan kemungkinan pengalihan subsidi dari sektor energi ke sektor tanaman non-pangan. Perubahan itu justru berdampak signifikan bagi peningkatan pendapatan rumah tangga dan menurunkan kemiskinan perdesaan dan perkotaan. Artinya pemerintah juga perlu mempertimbangkan ketepatan sasaran untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dapat dikatakan sebagai wujud kesadaran pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mendapati temuan bahwa pemberlakuan Perpres berdampak signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Dengan diimplementasikannya Perpres sebagai *dummy* terungkap bahwa kondisi kemiskinan menjadi lebih rendah. Selain itu, pengujian berlanjut pada beberapa indikator variabel dari program Perpres yang menjadi fokus penelitian. Hal ini melibatkan pengeluaran di bidang pendidikan, kesehatan, akses kredit, dan subsidi. Didapati temuan bahwa kenaikan pengeluaran di bidang Kesehatan berdampak negatif namun tidak signifikan, artinya segala pengeluaran pada program aspek kesehatan masih belum benar-benar optimal dalam menurunkan kemiskinan dan masih membutuhkan upaya perbaikan. Kenaikan pengeluaran di bidang pendidikan berdampak negatif signifikan, artinya program pendidikan menjadi aspek yang penting bagi pemerintah dalam upaya menurunkan kemiskinan. Aspek perluasan kredit berdampak negatif tidak signifikan, menandakan dampak inklusi keuangan yang masih kurang optimal. Sementara subsidi berdampak negatif signifikan terhadap kemiskinan, menunjukkan bahwa pemberian subsidi efektif membantu menurunkan kemiskinan melalui pengurangan beban masyarakat miskin di Indonesia.

Beberapa implikasi yang digarisbawahi berdasarkan temuan ini antara lain: *pertama*, Perpres percepatan penanggulangan masih menjadi kebijakan yang relevan untuk diterapkan guna menanggulangi permasalahan kemiskinan. Namun demikian, beberapa kendala yang menghambat tercapainya tujuan program perlu untuk terus diperbaiki guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran. *Kedua*, program di bidang kesehatan perlu terus dievaluasi dan diperbaiki, upaya perluasan sosialisasi tentang program KIS perlu dilakukan, ketersediaan infrastruktur dan sumber daya di bidang kesehatan yang memadai perlu terus ditingkatkan guna memberikan dampak optimal bagi penurunan kemiskinan melalui pelayanan kesehatan. *Ketiga*, program di bidang pendidikan menjadi sasaran yang tepat untuk terus ditingkatkan guna meningkatkan modal manusia dan juga kapabilitas individu yang selanjutnya menjadi faktor penting bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. *Keempat*, inklusi keuangan melalui perluasan

akses kredit perlu terus ditingkatkan dan dibarengi dengan peningkatan keterampilan manajerial dalam pengembangan usaha mikro. *Kelima*, subsidi menjadi instrumen penting dalam mengurangi beban masyarakat miskin, namun ketepatan sasaran menjadi hal yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan program. Dengan mempertimbangkan temuan penelitian, Dewan Perwakilan Rakyat memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak kesejahteraan masyarakat. Dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasannya, DPR dapat mengevaluasi kembali relevansi dan efektifitas perpres penanggulangan kemiskinan beserta program-programnya. Alokasi anggaran yang tepat terhadap program kemiskinan perlu dipertimbangkan kembali, alokasi terhadap program Kesehatan perlu ditingkatkan guna menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal. Pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan perlu terus dilakukan guna guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi sehingga program tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Acemoglu & Robinson. (2017). *Why Nation Fail*. Kompas Gramedia.
- Ansari, T. H. & Khan, M.A. (2023). *Role of Food Subsidy in Poverty Alleviation in India*. July.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis- Salah kaprah dan pengalaman-pengalaman*. BPFE.
- Maipita, I. (2014). *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. UPP STIM YKPN.
- Mankiw, N. G. (2007). *Macroeconomic*. Worth Publishers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development Twelfth Edition (12th ed.)*
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. UPP STIM YKPN.
- Yulianto, J. E. (2024). *Buku Ajar Psikologi Sosial*. Penerbit Universitas Ciputra

Website

- TNP2K. (2024a). *Healthy Indonesian Card*. <https://www.tnp2k.go.id/program/healthy-indonesian-card>
- TNP2K. (2024b). *Smart Indonesia Card*. <https://www.tnp2k.go.id/program/smart-indonesia-card>
- TNP2K. (2024c). *Strengthening Economic Policies to Increase the Economic Capacity of the Poor and Vulnerable Communities*. <https://www.tnp2k.go.id/program/strengthening-economic-policies-to-increase-the-economic-capacity-of-the-poor-and-vulnerable-communities>
- TNP2K. (2024d). *Subsidy Reform Towards Strengthening Social Protection and Increasing Productivity on Target*. <https://www.tnp2k.go.id/program/subsidy-reform-towards-strengthening-social-protection-and-increasing-productivity-on-target>

Artikel Jurnal

- Akbar, M., Khan, M., Farooqe, H., & Kaleemullah. (2019). Public Spending, Education and Poverty: A Cross Country Analysis. *Journal of Multidisciplinary Approaches in Science*, 4(1), 12–20. <https://www.researchgate.net/publication/352384075>
- Allen, M. (2017). Ordinary Least Squares. *The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods*, September. <https://doi.org/10.4135/9781483381411.n400>
- Budhiati, L. (2017). Tata Kelola Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah (Studi Kasus Kota Semarang). *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 13(4), 451–458.
- Fathoni, F., & Najicha, F. U. (2024). Pendidikan Cinta Tanah Air Dalam Pembentukan Karakter Kaum Milenial. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 4(3), 87–95. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v2i4.874>
- Fitriyah, I. R., Hariadi, S., Wibowo, J. M., & Setyaningrum, I. (2024). Analisis Profil, Kendala, Dan Strategi Pengembangan UMKM: Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Sampang Madura. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 2920–2930. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i2.8313>
- Hamzehi, M., Anabestani, A., & Javan, J. (2022). Impact of Targeted Subsidies Implementation on Poverty and Instability of Rural Household Economy in Iran (Case study: Villages of Neishabour county). *Regional Planning*, 12(45), 83–108.

- Hofmarcher, T. (2021). The effect of education on poverty: A European perspective. *Economics of Education Review*, 83, 102124. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2021.102124>
- Hosan, S., Sen, K. K., Rahman, M. M., Karmaker, S. C., Chapman, A. J., & Saha, B. B. (2023). Evaluating the mediating role of energy subsidies on social well-being and energy poverty alleviation in Bangladesh. *Energy Research & Social Science*, 100, 103088. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103088>
- Ji, Zhongjuan, Xu, Honggang & Cui, Q. (2022). Tourism and poverty alleviation in Tibet, China: the role of government in enhancing local linkages. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 27(2). <https://doi.org/10.1080/10941665.2021.2020312>
- Karunianingsih, Y., & Suryaningsih, M. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 149–159.
- Khafifah, A., Dianta, K., & Saparuddin. (2022). Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada UMKM Minuman Kekinian di Daerah Jakarta Selatan). *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital*, 1(1), 79–93.
- Klemens, L., Syahrani, & Apriani, F. (2019). Efektivitas Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Dalam Pelayanan Kesehatan Di Upt Puskesmas Kecamatan Sekolaq Dasar Kabupaten Kutai Barat. *Journal Administrasi Negara*, 7(1), 8579–8591.
- Komarudin, M., & Oak, M. (2020). Public Health Spending, Governance Quality and Poverty Alleviation. *Economics and Finance in Indonesia*, 66(2), 157. <https://doi.org/10.47291/efi.v66i2.751>
- M., Erman., & Faisal, T. M. (2014). Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Tkpk) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2012. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1(1).
- Maipita, I., Hermawan, W., & Fitrawaty, F. (2012). Reducing Poverty Through Subsidies: Simulation of Fuel Subsidy Diversion To Non-Food Crops. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 14(4), 349–366. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i4.412>
- Mwale, M. L., & Kamninga, T. M. (2022). Land rights and the impact of farm input subsidies on poverty convergence. *IDEAS Working Paper Series from RePEc*, 112431. <https://www.proquest.com/working-papers/land-rights-impact-farm-input-subsidies-on/docview/2643838786/se-2?accountid=46437%0Ahttps://ideas.repec.org/p/pramprapa/112431.html>
- Madi, Haifa Husni & Hussain, S. J. (2007). The Role of Helth Promotion in Poverty Reduction. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 13(6).
- Naufalin, L. R. (2020). Tantangan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(1), 95–102.
- O'Donnell, O. (2024). Health and health system effects on poverty: A narrative review of global evidence. *Health Policy*, 142, 105018. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2024.105018>
- Yaluwo, Primus (2021). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. *Jurnal Adhikari*, 1(1), 10–19. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i1.20>
- Rakhmat, R., & Firdaus, F. (2019). Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Journal PPS UNISTI*, 1(2), 33–38. <https://doi.org/10.48093/jiask.v1i2.11>
- Rivani, E. (2016). Peran Sumber Data Tunggal dalam Mendukung Ketepatan Sasaran Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 21(2), 87–103. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/769>
- Roy, T., Hossain, M. E., Jalal, M. J. E., Saha, J. K., Sharmin, E., & Khan, M. A. (2021). Effects of credit on national and agricultural GDP, and poverty: a developing country perspective. *SN Business & Economics*, 1(10), 140. <https://doi.org/10.1007/s43546-021-00146-6>
- Setiani, A. M. (2022). Evaluasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Blora Tahun 2021. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 385–404. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/33574>
- Setiawan, P., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 161–171. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.688>
- Smith, J., Anderson, R., & Johansen, A. (2023). The impact of education on poverty reduction in rural areas. *Journal of Development Studies*, 59(3), 445–467.

- Tran, H. T. T., Le, H. T. T., Nguyen, N. T., Pham, T. T. M., & Hoang, H. T. (2022). The effect of financial inclusion on multidimensional poverty: the case of Vietnam. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2132643>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. UPP STIM YKPN.
- Yao Wei, Fanglei Zhong b, Xiaoyu Song c, C. H. (2022). Exploring the impact of poverty on the sustainable development goals: Inhibiting synergies and magnifying trade-offs. *Sustainable Cities and Society*, 89. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104367>
- Yin, S., Chen, X., Zhou, X., Chen, C., & Liu, J. (2023). Effect of Micro-Credit for Poverty Alleviation on Income Growth and Poverty Alleviation—Empirical Evidence from Rural Areas in Hebei, China. *Agriculture (Switzerland)*, 13(5). <https://doi.org/10.3390/agriculture13051018>

Skripsi

- Anggraini, F. (2021). *Analisis Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Kartu Indonesia Sehat (Kis) Di Puskesmas Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Bibliometric Analysis: Green Economy Research on Poverty Eradication (Analisis Bibliometri: Riset Ekonomi Hijau Terhadap Pemberantasan Kemiskinan)

Atur Rejeki¹, Ali Akbar², dan Septiana Dwiputrianti³

¹Politeknik STIA LAN Bandung, Jl. Hayam Wuruk No. 34-38, Bandung, Indonesia. putriwulandari@poltek.stialanbandung.ac.id

²Politeknik STIA LAN Bandung, Jl. Hayam Wuruk No. 34-38, Bandung, Indonesia. aliakbar262003@gmail.com

³Politeknik STIA LAN Bandung, Jl. Hayam Wuruk No. 34-38, Bandung, Indonesia. septiana.dwiputrianti@poltek.stialanbandung.ac.id

Naskah diterima: 26 Mei 2024

Naskah direvisi: 9 Juni 2025

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2025

Abstract

The green economy is an approach that integrates environmental sustainability and social equity into economic policies to support sustainable development. Since 2009, global discussions on this topic have increasingly considered the needs of poor and vulnerable populations. This study aims to provide a comprehensive knowledge map connecting the green economy with poverty alleviation. Using bibliometric analysis, 102 publications indexed in the Scopus database from 2009 to 2023 were examined with the support of VOSviewer software. The analysis includes annual publication trends, contributing countries and funding institutions, key authors, author collaborations, and keyword co-occurrences. Findings reveal a fluctuating publication trend over the years, with a notable peak in 2022. China leads in the number of publications, largely supported by the National Natural Science Foundation of China. No single author dominates the field, although Middleton, Gyawali, Allouche, and Shahbaz stand out for having over 200 citations each. Five thematic clusters were identified, reflecting current research priorities related to the green economy and poverty. These clusters offer meaningful directions for future studies. The study underscores the importance of policy as a tool to integrate green economic strategies with poverty reduction efforts, highlighting the potential for systemic change through evidence-based, inclusive policy frameworks.

Keywords: green economy; poverty; bibliometric analysis

Abstrak

Ekonomi hijau merupakan pendekatan yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial ke dalam kebijakan ekonomi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sejak 2009, diskusi global mengenai topik ini semakin memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok rentan. Studi ini bertujuan untuk menyajikan peta pengetahuan yang komprehensif mengenai keterkaitan antara ekonomi hijau dan pengentasan kemiskinan. Melalui analisis bibliometrik terhadap 102 publikasi yang terindeks dalam database Scopus selama periode 2009 hingga 2023, serta bantuan perangkat lunak VOSviewer, dilakukan analisis terhadap tren publikasi per tahun, kontribusi negara dan lembaga pendanaan, penulis kunci, kolaborasi antarpengulis, serta keterkaitan kata kunci. Hasil menunjukkan tren publikasi yang berfluktuasi, dengan puncak signifikan pada tahun 2022. China menjadi negara teratas dalam jumlah publikasi, didukung oleh National Natural Science Foundation of China. Tidak ada penulis tunggal yang dominan, namun Middleton, Gyawali, Allouche, dan Shahbaz menonjol dengan lebih dari 200 sitasi. Lima klaster tematik berhasil diidentifikasi, mencerminkan fokus riset terkini mengenai ekonomi hijau dan kemiskinan. Klaster-klaster ini menawarkan arah yang bernilai bagi studi selanjutnya. Studi ini menekankan pentingnya kebijakan sebagai alat untuk mengintegrasikan strategi ekonomi hijau dalam pengentasan kemiskinan, serta potensi perubahan sistemik melalui kerangka kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti.

Kata kunci : ekonomi hijau; kemiskinan; analisis bibliometrik

INTRODUCTION

Economic growth is a phenomenon that describes the increase in the economic value of a country or region over a certain period of time. Economic growth can be measured by looking at the growth of gross domestic product (GDP), which includes the value of all goods and services produced within a country's geographic boundaries (Han & Gao, 2024). Economic growth can reflect an increase in production, investment, and national income (Puriwat & Tripopsakul, 2023). In recent decades, the assessment of a country's economic growth has no longer focused solely on the size of the economy. Currently, a more holistic approach integrates sustainability and equity as important components, recognizing that healthy economic growth must go hand in hand with environmental protection, social inclusiveness, and equality (Ambrósio et al., 2021). As in the conditions in Indonesia, the influence that arises in the rate of integration is able to proactively provide a multiplier effect on the level of GDP fluctuations based on several actions, one of which is investment in energy infrastructure that focuses on the green economy (Hartono et al., 2020).

The concept used to harmonize between sustainable economic growth in improving human welfare and reducing risks to the environment and natural resource scarcity is known as the green economy (Ali et al., 2021; Bonia, 2020; Kupika et al., 2019; Zhang et al., 2022; Zhu et al., 2021). This concept is an approach that integrates environmental and social aspects in economic policy to achieve sustainable development. The term "green economy" was first published in 1990 by R. Kerry Turner. In his publication *Blueprint for a green economy* written by David W. Pearce, Anil Markandya, and Edward B. Barbier which states that the green economy is an approach that integrates environmental and social aspects in economic policy to achieve sustainable development. The green economy aims to improve the efficient use of natural resources and energy, encourage technological innovation and environmentally friendly products, and improve the quality of the environment and the welfare of the community (Turner, 1990).

Subsequent studies on the green economy have mainly focused on how a new paradigm of sustainable and integrated water resources management can be achieved (Vlotman & Ballard, 2014), how green economy contributes to a project (Portner et al., 2014). Then the discussion of the implementation of green economy assumptions (Kasztelan, 2021), Green economy and climate change issues are integrated into policies and practices related to biodiversity and wildlife management (Kupika et al., 2019).

Until 2009, there was limited discussion on whether green economy initiatives considered their impact on poverty alleviation. Blanco et al (2009) highlighted how urban planning in the global South often overlooks the diverse needs of poor communities, treating them as a homogeneous group. The article stresses the importance of participatory democracy and a shift toward low-carbon, sustainable development strategies. It also calls for alternative research approaches and greater transparency in carbon content information to support informed decisions by consumers and policymakers. Although recent efforts aim to include vulnerable groups in green economy policies, existing studies remain fragmented. This research seeks to address that gap through a global bibliometric analysis of green economy studies related to poverty alleviation. For example, a green economy can improve human capital development, which leads to more sustainable poverty alleviation (Bonia, 2020). In addition, other studies have highlighted the need for Africa to take a more active role in mobilizing its own domestic financial resources if the SDGs are to become a vehicle for eradicating poverty on the continent (Nhamo, 2017). This research identifies several shortcomings in the SDGs that could act as barriers, such as the absence of reform of the UN and other global multilateral political institutions, lack of clarity on the issue of land grabbing, the popular green economy agenda, and association with equity issues. In addition, other discussions on the green economy also consider arguments relating to the possibility of reducing poverty without compromising the environment and social welfare (Hickel & Hallegatte, 2022).

To date, a bibliometric analysis of the green economy has been published by Alsmadi under the title *Green Economy: Bibliometric Analysis Approach*. This publication discusses the development of research in the topic of green economy from 1990 to 2020 (Alsmadi & Alzoubi, 2022). However, it does not discuss more specifically the development of green economy research related to poverty. Therefore, this research aims to present a comprehensive knowledge map of green economy studies related to poverty around the world. The analysis includes publications per year, publications per country and funding sponsor, most prolific authors, linkages between authors, and keywords used. Meanwhile, the results of the bibliometric analysis in this study show that the integration of green economy in poverty alleviation strategies in Indonesia has great potential if based on comprehensive global research mapping. Findings such as the dominance of sustainable development, renewable energy, and social justice themes in international publications, as well as strong institutional support in countries such as China and the UK, show that research collaboration, policy support, and investment in green innovation play an important role in driving real impacts on the welfare of poor people. For Indonesia, this bibliometric not only provides an overview of the country's position and contribution in the global discourse, but also opens up opportunities to strengthen evidence-based policies that encourage the creation of green jobs, increased access to environmentally friendly infrastructure, and community empowerment through the use of clean energy and inclusive governance.

THE GREEN ECONOMY TO SOLVE POVERTY

The green economy, which is a fundamental form of sustainability, directly infiltrates the development of economic space without damaging and exploiting natural resources excessively. In other words, the influence exerted by the role of the green economy on sustainable economic development tends to be crucial (Zeb et al., 2014). In addition, a definition that can be used as a reference in understanding the green economy as a whole is something that results in increased human welfare and social justice, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcity (UNEP in (Gu et al., 2018)). Thus, a green economy will promote economic growth and improve social welfare by maintaining the quality of the environment (Sara et al., 2023).

Various efforts that can be made to maintain a good quality of the environment require measurement parameters as a frame of reference used in development. There is a tendency for massive economic expansion to rely on the use of non-renewable energy, which is not small (Taridala et al., 2023). This shows that economic growth, which boils down to an indicator of increasing GDP per capita, has a correlation with high use of non-renewable energy, causing high production of carbon emission gases. Taridala also highlighted the use of renewable energy that can be used as a form of solution from existing alternative considerations, to be used as a second indicator of sustainable economic development. Using quartile regression, the results of this study show that GDP, an indicator of economic growth, is responsible for high emissions in Indonesia. However, evidence shows that of the variables, renewable energy consumption seems to be one of the perfect solutions for Indonesia as it helps the country mitigate the carbon challenge (Taridala et al., 2023).

Economic growth that is in line with the development of the green economy concept, represents the perceived ability of the wider community to accept the understanding of sustainable resource utilization (Hariram et al., 2023). Therefore, the utilization of resources within the scope of the discussion of the green economy is still insufficient if it ignores the discussion of the welfare obtained after the implementation of the green economy. With reference to the study titled "Poverty Eradication Through Green Economy: A Case Study Of Two Villages Of Lakhimpur District Under Narayanpur Region" explains that with all the potential available, the green economy can alleviate poverty through various strategies and implementations. By focusing on human resource development, the green economy can create new jobs in environmentally friendly sectors such as organic farming and renewable energy, providing opportunities for people to increase their income and welfare. In addition, investments in green infrastructure such as public transport and clean sanitation can improve accessibility and quality of life for previously marginalized communities. By addressing environmental sustainability and social equity, a green economy can also help reduce economic and social inequalities that are often the root causes of poverty. Through this approach, the green economy not only provides solutions for environmental protection, but also becomes an effective tool in achieving inclusive and sustainable economic development, which in turn can have a positive impact on poverty alleviation (Bonita, 2020).

In an effort to realize sustainable economic development, the concept of a green economy has many influencing factors in its development process. One factor that has an influence in the development of a green economy is the level of investment in the renewable energy sector (Gea-Bermúdez et al., 2021). Investment in the renewable energy sector is one of the crucial factors in the development of a green economy, as revealed in the journal. With sufficient investment levels, the renewable energy sector can play an important role in sector coupling, which is the foundation for a successful green energy transition. Through these investments, reductions in greenhouse gas emissions can be achieved, making a significant contribution to environmental protection efforts. In addition, investment in renewable energy is also a key driver in the transition to a sustainable green economy, creating new jobs, driving innovation and positively impacting overall economic growth. Thus, sufficient and sustained levels of investment in the renewable energy sector are key to accelerating the development of a green economy and achieving the goals of energy security, environmental sustainability, and sustainable economic growth (Gea-Bermúdez et al., 2021).

In addition, the number of jobs in the green economy sector is an influential factor in the development of the green economy (Dvořák et al., 2017). Job creation in green economy sectors has a significant impact on green economy development. Investments in the renewable energy sector not only create new jobs in various related economic sectors, such as construction and operations, but also make a positive contribution to overall economic growth. In addition, job creation in the renewable energy sector also has important

social impacts, including improved community welfare, social equity and reduced environmental risks. Public and private investments in green growth encourage the creation of new jobs in various sectors of the economy related to environmental issues, creating sustainable employment opportunities and positive impacts on the economy. In addition, the development of the renewable energy sector also encourages innovation and the development of new technologies, which in turn creates jobs in research and development, manufacturing, and operational sectors, contributing positively to the country's economic growth and competitiveness (Dvořák et al., 2017).

By implementing the process as a demonstration of the expected contribution, there is a need for critical reflection in a relevant economic context. According to what the Indonesian government has done, green economics as an alternative means of solving environmental problems was established at the 2007 National Action Plan (Dianjaya & Epira, 2020). In addition, throughout the implementation process, the Indonesian government provided consideration to several sectors that are closely related to environmental conditions, including agriculture, water, and energy (Raihan et al., 2023; Swastika et al., 2024; Siregar, 2024). Furthermore, the incentives provided by the Indonesian government in terms of the green economy do not address the issue of carbon emissions. The implications of the three preceding areas apply to market-based methods for carbon trading. According to Ammara et al (2024), in their study titled "Implementasi Perdagangan Emisi Karbon dalam Rangka Perwujudan Transformasi Indonesia Emas" carbon trading can generate additional state revenue, particularly through the use of mangrove forests, which have high economic value and play an important role in carbon absorption. However, the interesting consistency of the implementation of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 7 of 2023, which regulates the mechanisms and provisions for implementing carbon trading activities has not been fully realized, so a strong commitment from the government is required to ensure effectiveness. Furthermore, a lack of stringent consequences for environmental infractions, particularly mangrove destruction, undermines the carbon trading system's efficacy. Overall, although the carbon emissions trading mechanism is already in place, its effective implementation depends on efforts to resolve these issues and ensure government compliance with established regulations. In Indonesia, regulatory support for carbon trading has been developed through several legal instruments, such as Presidential Regulation No. 98 of 2021 concerning the Implementation of Carbon Economic Values for the Achievement of Nationally Determined Contribution Targets and Control of Greenhouse Gas Emissions in National Development and Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 21 of 2022 concerning Procedures for the Implementation of Carbon Economic Values. These regulations serve as the operational basis for the carbon trading scheme and demonstrate the government's commitment to integrating market-based mechanisms into broader climate and sustainable development policies.

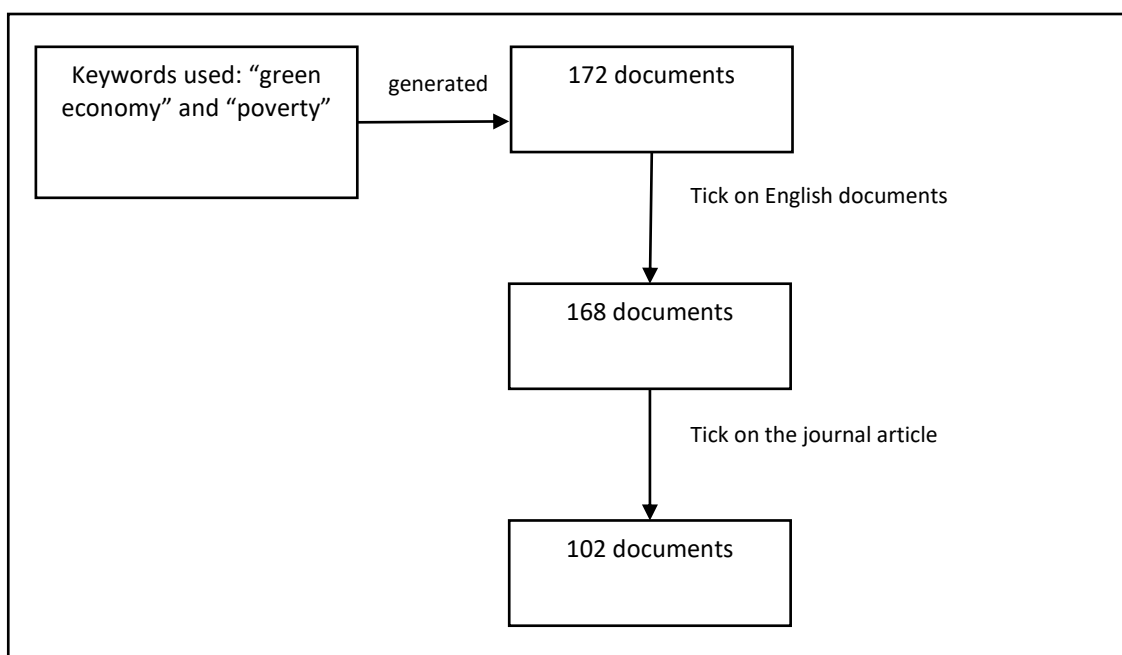
BIBLIOMETRIC ANALYSIS

Bibliometric analysis has been widely used in various disciplines, such as business economics (Harsanto & Firmansyah, 2023), education (Pradana et al., 2023), medical (Manoj Kumar L et al., 2023), finance (Goodell et al., 2023), agriculture (Rejeb et al., 2022), digital transformation (Chawla & Goyal, 2022), digital competencies (Andari, 2022), tourism and hospitality (Ülker et al., 2023), and more. In addition to observing a particular topic through bibliometric analysis, some researchers also evaluate the performance of a particular journal over a period of time to gain insight into the journal's progress or performance (Harsanto & Firmansyah, 2023). This study uses bibliometric analysis to determine the performance of all countries in research on the topic of green economy in relation to poverty.

The data used in this study were obtained from the Scopus database (Scopus indexed journals). Scopus compared to other tools such as Web of Science (WoS) may be justified based on research requirements. Scopus has a greater coverage, including more journals, conferences, and books, and excels in the social sciences, applied sciences, and interdisciplinary areas. It also has advantages in terms of geographical and linguistic variety, simplicity of use, and intuitive citation analysis software. Furthermore, Scopus is frequently less expensive and provides more recent data, making it an excellent alternative for monitoring current research trends. However, if the focus is on citation history or certain high-impact journals, WoS may be a better fit. This index is believed to have advantages over other indexing agencies in terms of very broad coverage, and most of the journals are written in English. The authors conducted a document search on January 11, 2024, using the keywords "green economy" and "poverty". According to the Scopus database,

publications on these topics began to grow in 2009 and peaked in 2023. There were 172 documents in that period. The year 2024 was not analyzed because it is predicted that many documents will be published on the same topic in that year.

The authors performs filtering by checking the documents that are only in English to the Scopus database, the documents obtained are 168 documents. The next step was filtering by document type. The search was narrowed by only including journal articles with the source journal only source. This type of document was chosen because it is a document that undergoes a rigorous procedure or peer review before publication. (Harsanto & Firmansyah, 2023). Therefore, the authors assumes that the quality of the reviewed journal articles is better than other types of documents and chooses them as the object of analysis in this study. Furthermore, the data obtained was done through searching with the search string: TITLE-ABS-KEY ("green economy" AND "poverty") AND (EXCLUDE (PUBYEAR , 2024)) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English")) AND (LIMIT-TO (SRCTYPE . "j")). As a result, 102 articles published in various journals were obtained. The document search flow on the Scopus database is shown in Figure 1.



Source: processed by the researcher

Figure 1. Flow of Document Search on the Topics "Green Economy" and "Poverty"

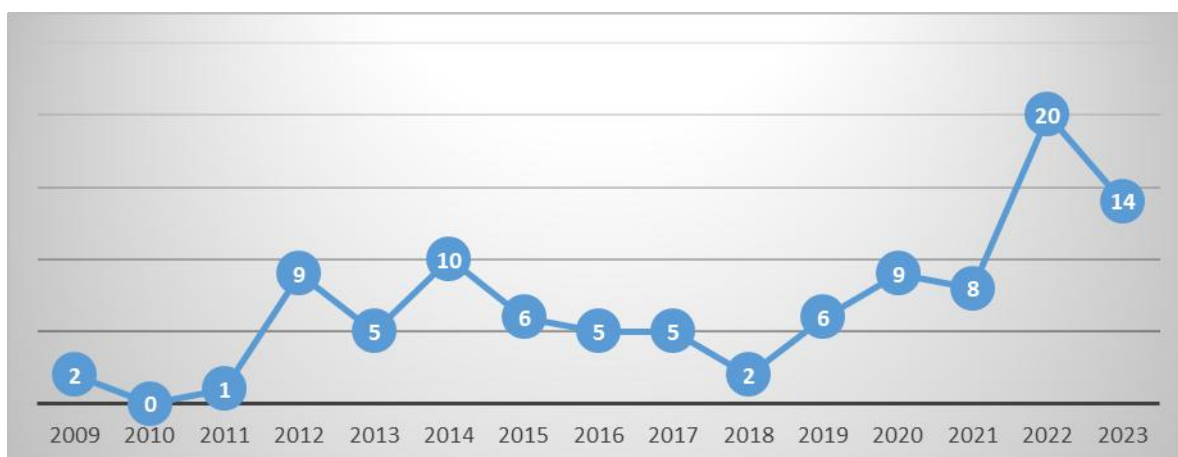
Based on the downloaded data, the authors utilized VOSviewer software. This software was chosen because it is considered a powerful software in conducting visualization and bibliometric analysis (Sokmen et al., 2022). To map the type of co-authorship analysis between countries, the unit countries analysis, full counting method, the maximum number of countries per document is 25, then the minimum number of documents for each country is 1, so there are 46 countries that meet the threshold. Furthermore, the analysis of the frequency of keyword occurrence is done by co-occurrence analysis. Mapping of co-occurrence analysis type is done with all keywords analysis unit, full counting method, minimum number of occurrences of a keyword is 5. From 743 keywords, there are 31 keywords that meet the threshold.

The assessment of a country's performance and other features is an important element in bibliometric studies, as documented, for example, in a recent bibliometric study. The results of this study include the number of publications per year, publications per country and funding sponsors. In addition, author performance (most prolific authors), linkages between authors, keywords, and keyword linkages used are also presented.

Publication per Year

Over the past 15 years, 102 documents were analyzed from 45 countries. The most publications on the topic of green economy associated with poverty were in 2022 with a total of 20 documents. Meanwhile, in

2010, not a single researcher published research on this topic. Graph 1 below shows the trend of publications on the topic of “green economy” associated with “poverty”.



Source: Scopus Database (2024)

Figure 1. Trend of Publications on the Topics of “Green Economy” and “Poverty”

There were two researchers from the United Kingdom who first published research on this topic in 2009, namely Benjamin Armstrong-Haworth from the Faculty of Management, City University London and Miriam Kennet from the Green Economics Institute. Both have different research focuses.

Benjamin discusses the green economy as seen from the perception of energy problems, responses and solutions. The results show that the needs of some global communities are highly dependent on fossil energy. On the other hand, the use of fossil energy has high costs, not only in financial terms, but also in environmental and social terms. Therefore, solutions include policies to support low-carbon technologies and penalize the use of high-carbon technologies, as well as programs aimed at changing consumer behavior. A green economy enables social and environmental justice for all, including those living in poverty (Armstrong-Haworth, 2009).

Meanwhile, Kennet discussed the green economy from the perspective of climate change, poverty and the economic crisis and its impact on women. Kennet believes that a green economy has great potential in reducing poverty. Better involvement of women in the economy and greater equality for women are considered solutions to poverty. The green economy can make a significant contribution to reducing poverty by creating new jobs in environmentally friendly sectors, improving access to clean water, and empowering local communities through active participation in environmental projects. The green economy is expected to bring positive changes in addressing the challenges of poverty and economic inequality (Kennet, 2009).

Publications by Country and Funding Sponsor

For the first time, publications on the topic of the snow economy in relation to poverty began in the United Kingdom (Armstrong-Haworth, 2009; Kennet, 2009). Over time, publications on this topic have spread to various countries. To recognize this, the authors select the affiliation (address and institution) to indicate the country of publication.

One publication document may contain more than one author from different countries. Thus the total number of documents based on the number of authors will exceed the total number of documents available. The total number of documents analyzed is 102, while the total number of authors from various countries is 151. There is a difference of 49 between the two numbers. This shows that 49 documents were written by more than one author from various countries and even continents. Table 1 below shows the total publications by continent and author country.

Table 1. Number of Publications by Continent

Continent	Country	Number of Publication
Asia	China, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, Uzbekistan	56
Europe	Belgium, Bulgaria, Denmark, Germany, Ireland, Italy, Latvia, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom	41
America	Brazil, Canada, Colombia, United States	21
Africa	South Africa, Ghana, Nigeria, Egypt, Zimbabwe, Uganda, Ethiopia	22
Australia	Australia	7
Undefined	-	4
Total Publications		151

Source: Scopus Database (2024)

From Table 1, it can be seen that the performance of authors who publish on the topic of “green economy” and “poverty” based on the origin of the continent is mostly from the Asian continent. In the second position are authors from the European continent. In the third and fourth positions are authors from Africa and America.

In Asia, publications with the theme of “green economy” associated with “poverty” began in 2012. A researcher named Mohan Munasinghe from Sri Lanka managed to publish on this topic for the first time in Asia. The result of the research is that the Millennium Consumption Goals (MCGs) are a practical step towards global sustainability by addressing unsustainable consumption and production patterns that threaten the future of humanity. The ultimate goal of the MCG is to reduce global poverty and inequality while reducing the burden on natural resources. This provides a vision for a more sustainable and equitable future.

Until 2023, the number of researchers publishing on this topic in Asia is 54 researchers from 15 countries. The most productive country to produce publications on the theme of “green economy” and “poverty” is China. The second position is India with 6 documents, followed by Pakistan with 5 documents, and Indonesia with 4 documents. The next position is Thailand, Taiwan, and Malaysia, each of which has 3 publications. Sri Lanka, Philippines, Nepal, and Japan are next with 2 publications each. Finally, Uzbekistan, United Arab Emirates, Singapore, and Kazakhstan each produced 1 document.

In Continental Europe, the United Kingdom is not only the first country to publish on the topics of “green economy” and “poverty”, but also the country with the most publications during the observation period. In second place are Spain, Russia, and Romania in third place. Then there are Sweden, Netherlands, Germany, Belgium in the fourth position. Finally, there are Ukraine, Switzerland, Poland, Norway, Latvia, Italy, Ireland, Denmark, and Bulgaria in fifth place.

In the Americas, the United States is the country with the most publications with 10 documents in the observation period. The second position is Brazil. The next positions are Canada and Columbia. On the African continent, South Africa has the first position of the most publications on this continent with 11 documents. The next position is Ghana with 4 documents. Nigeria and Egypt each with 2 documents. Zimbabwe, Uganda, and Ethiopia each with 1 publication. In Australia, research on the topics of “green economy” and “poverty” began in 2014. Until 2023, there will be relatively little research on these topics on the continent. Table 2 below shows the trend of publications made by researchers in each continent by country and year of publication.

Table 2 below shows the top five countries in publications on the topics of “green economy” and “poverty”.

Table 2. Top Five Countries in Publications on the Topics of “Green Economy” and “Poverty”

No.	Country	Number of Publications
1.	China	20
2.	United Kingdom	12
3.	South Africa	11
4.	United States	11
5.	Australia	7

Source: Scopus Database (2024)

The top five countries in Table 2 above show distinct focus areas that reflect their unique socio-economic contexts. China, leading with 20 publications, emphasizes the integration of green economy principles into national policies aimed at poverty alleviation, often highlighting sustainable development practices, renewable energy, and the role of green technologies in improving living standards for the impoverished. The United Kingdom, with 12 documents, explores the socio-economic impacts of transitioning to a green economy, particularly the relationship between climate change, economic policies, and social equity, focusing on how green initiatives can empower marginalized communities and reduce poverty. South Africa, also with 11 publications, addresses the challenges of implementing green economy strategies in the context of socio-economic disparities, with research centered on sustainable resource management, renewable energy access, and the role of governance in promoting environmental justice for impoverished populations. The United States, matching South Africa with 11 publications, focuses on innovative approaches to integrating green economy concepts into urban planning and community development, exploring the economic benefits of green jobs and the importance of policy frameworks that support sustainable practices while addressing poverty. Lastly, Australia, with 7 publications, tends to concentrate on the implications of climate change on vulnerable communities and the potential of green economy initiatives to foster resilience, investigating sustainable agriculture, conservation efforts, and community engagement in environmental projects aimed at poverty reduction. These diverse focus areas illustrate how each country leverages the green economy to address poverty in their respective contexts.

The National Natural Science Foundation of China, the European Commission, the Ministry of Education of the People's Republic of China, the National Office for Philosophy and Social Sciences, the United States Agency for International Development, and the University of Queensland are among the institutions/agencies that support research on the topics of "green economy" and "poverty".

The Most Productive Writer

This section provides an overview of the most prolific and influential contributors on “green economy” and “poverty”. Out of the 102 documents analyzed, there is no single author who is most prominent in research on the topic of “green economy” and “poverty”. Authors who conducted research on this topic produced at most two publications. Among these authors, there are Middleton, Gyawali, Allouche, and Shahbaz whose total citations exceed 200. Table 3 lists the authors with two publications and their total citations.

Middleton, Gyawali, and Allouche published together in 2015. Two publications in the same year were cited by 85 and 184 respectively, bringing the total citations for this author to 269. His work is related to the Water-Energy-Food Nexus. The link between green economy and poverty in this study is that the research notes that some organizations and governments in Southeast Asia have shown interest in nexus-oriented green growth, with an emphasis on green economic development as a way to improve the welfare of poor communities that depend on natural resources. However, the research also notes that there are critical views from some civil society groups and social movements that oppose the concept of green economy, with an emphasis on environmental justice and efforts to balance structural inequalities that affect local communities. Therefore, this research illustrates the complex relationship between the green economy, poverty and environmental justice in the context of the water-energy-food nexus in Southeast Asia.

Table 3. Most prolific and influential author on “Green Economy” and “Poverty” research

Author	Afiliation	Title	Key Findings	Total Citation
Shahbaz, M.	Center for Energy and Environmental Policy Research, Beijing Institute of Technology, 100081, Beijing, China; Department of Land Economy, University of Cambridge, Cambridge, CB2 1TN, UK, United Kingdom	- Causal links between renewable energy, environmental degradation and economic growth in selected SAARC countries: Progress towards green economy - Technological Forecasting & Social Change	- This study reveals the complex relationships between energy, GDP, poverty, carbon emissions and natural resource depletion in SAARC. - This research includes findings that eradicating energy poverty has a direct positive impact on green growth in China.	235
Setti, A.F.F.	Centro de Relações Internacionais em Saúde CRIS/Fiocruz, Manguinhos. 21040-360 Rio de Janeiro RJ, Av. Brasil 4.365, Brazil	- Governança Em Saúde E Ambiente Para O Desenvolvimento Sustentável	- This study addresses the challenges of sustainable development, green economy, poverty, and global, regional, and national governance for health and the environment.	32
Nhamo, G.	Institute for Corporate Citizenship, University of South Africa, South Africa	- Universities and Sustainable Development Goals localisation: insights from academic staff in Zimbabwe	- This study highlights that Zimbabwean academics' awareness of the SDGs is high (82.07%), but engagement, publications, institutional support and funding for the SDGs are still low.	45
Netto, F.d.A.F.	Atenção e Promoção da Saúde Fiocruz, Brazil; Buss P.M., Centro de Relações Internacionais em Saúde Fiocruz, Brazil	- Sustentabilidade, desenvolvimento e saúde: desafios contemporâneos	- Health is considered a critical element in sustainable development, linking it to the green economy, governance and regional development processes.	32
Middleton, C.	MA in International Development Studies Program, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand;	- The Rise and Implications of the Water-Energy-Food Nexus in Southeast Asia through an Environmental Justice Lens	- This study highlights the need to pay attention to trade-offs between water, energy and food resources, and how to manage scarcity with efficiency measures.	269
Magalhães, D.d.P.	Centro de Relações Internacionais em Saúde Fiocruz, Brazil;	- The green investment paradigm: Another headlong rush	- This article critiques the broad consensus of economists on green investment, highlighting the reductionist, normative, and apolitical views within this paradigm.	32
Machado, J.M.H.	Diretoria Regional de Brasília Fiocruz, Brazil;	- Saúde e economia verde: desafios para o desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza	- Green economic models can reduce ecological footprints, promote social justice, health, and sustainable development through social participation and democratic governance.	32
Gyawali, D	Nepal Academy of Science and Technology, Kathmandu, Nepal	- Epilogue (Re-imagining Nepal's Water: Institutional Blind Spots, Developmental Blind Alleys and the Lessons of the Century Past)	- Nepal, despite being rich in hydroelectric potential, faces recurrent energy crises with power outages and water shortages.	269
Gallo, E.	Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca	- Health and the green economy: Challenges for	- The green economy model supports ecological	32

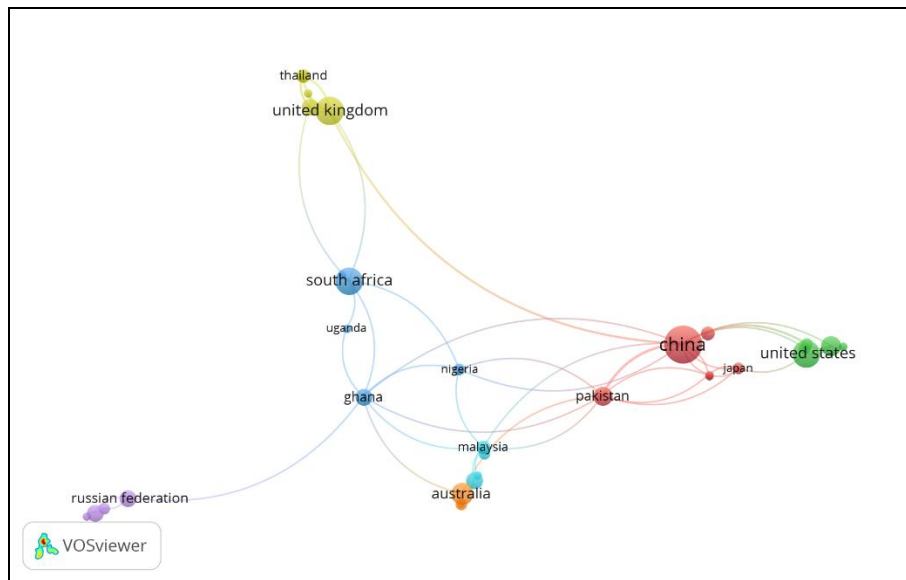
Author	Affiliation	Title	Key Findings	Total Citation
	Fiocruz, Manguinhos 21040-360 Rio de Janeiro RJ, Av. Brasil 4.365, Brazil	sustainable development and the eradication of poverty	footprint reduction, social equity, and health, by encouraging social participation and democratic governance.	
Dressler, W.H.	School of Geography, University of Melbourne, Melbourne, VIC, Australia	- The impact of swidden decline on livelihoods and ecosystem services in Southeast Asia: A review of the evidence from 1990 to 2015	- Transisi dari ladang berpindah ke penggunaan lahan alternatif meningkatkan pendapatan, tetapi menurunkan kesejahteraan sosial, keberlanjutan tanah, dan layanan ekosistem	33
Buss, P.M.	Centro de Relações Internacionais em Saúde Fiocruz, Brazil	- Health and the green economy: challenges for sustainable development and the eradication of poverty	- Model ekonomi hijau mengurangi jejak ekologis, mempromosikan keadilan sosial, dan kesehatan, dengan mendorong perubahan sosial dan tata kelola demokratis.	32
Buss, D.F.	Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental, Instituto Oswaldo Cruz, IOC/Fiocruz, Brazil	- Macroinvertebrados Aquáticos como Bioindicadores no Processo de Licenciamento Ambiental no Brasil	- Environmental licensing in Brazil lacks adequate use of aquatic bioindicators. Macroinvertebrates are proposed as essential tools for biomonitoring.	32
Barbier, E.B.	Department of Economics, Colorado State University, Fort Collins, 80523-1771, CO, United States	- The Green Economy Post Rio+20	- The Rio+20 conference discussed the green economy and green growth, but without new international commitments, further steps are needed.	43
Allouche, J.	Institute of Development Studies, STEPS Centre, Brighton, United Kingdom	- The Birth and Spread of IWRM – A Case Study of Global Policy - Diffusion and Translation	- IWRM developed as a global paradigm of water related to sustainable development, but is now being questioned, shifting to the water-food-energy nexus discourse.	269

Source: Scopus Database (2024)

Table 3 can be a reference for novice researchers in the field of “green economy” and “poverty” about authors who can be used as a knowledge base to further explore the green economy in poverty reduction.

Co-authorship Analysis

Furthermore, the distribution of publication cooperation between countries was carried out by co-authorship analysis. Mapping the type of co-authorship analysis between countries is done by analyzing unit countries, full counting method, the maximum number of countries per document is 25, then the minimum number of documents for each country is 1, so there are 46 countries that meet the threshold. Figure 2 below shows the distribution of publication cooperation between countries on the topics of “green economy” and “poverty”.



Sumber : Output VOSviewer (12 Februari 2024)

Figure 2. Mapping Co-authorship between countries on the topics of “Green Economy” and “Poverty”

The analysis of co-authorship between countries can help to evaluate the scientific performance of authors between countries. Countries that have the highest number of co-citations and degree of centrality can be identified as major contributors to research on the topics of “green economy” and “poverty”.

Figure 3 shows that publications with the topic “green economy” and “poverty” can be categorized into seven clusters. The first cluster is dominated by China with the number of links 12 and total link strength 16. The second cluster is dominated by Egypt with the number of links 3 and total link strength 4. The third cluster is dominated by Ghana with the number of links 8 and total link strength 8. The fourth cluster is dominated by Canada with the number of links 8 and total link strength 8.

When viewed further, the relationship between total link strength and the number of publications in each country can be measured through the correlation coefficient. With a correlation of 0.748, it shows that there is a positive and strong relationship between total link strength and the number of publications, with a correlation coefficient of 0.748. This means that when the number of publications increases, the total link strength in these countries will also increase. Table 4 below shows the mapping of co-authorship between countries on the topics of “green economy” and “poverty”.

Table 4. Mapping Co-authorship between countries on the topics of “Green Economy” and “Poverty”

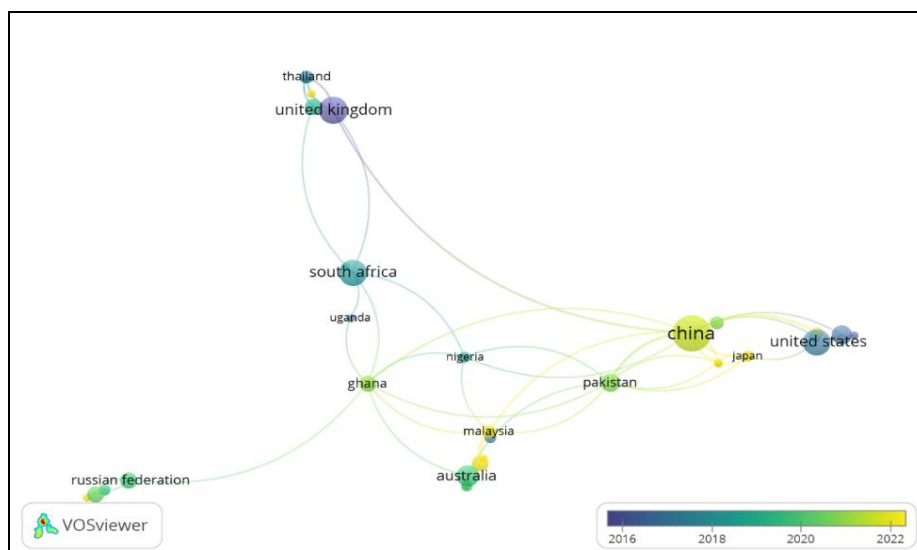
Cluster	Links	Total Link Strength	Documents	Citation
Cluster 1				
China	12	16	20	427
Japan	5	5	2	141
Kazakhstan	4	4	1	128
Pakistan	8	10	5	320
Taiwan	1	1	3	41
Uzbekistan	4	4	1	128
Custer 2				
Egypt	3	4	2	26
India	4	4	6	111
Italy	1	1	1	1
Sweden	3	3	2	61
United States	3	3	11	164
Cluster 3				
Ghana	8	8	4	79
Nigeria	5	5	2	0
South Africa	6	6	11	203

Cluster	Links	Total Link Strength	Documents	Citation
<i>Uganda</i>	2	2	1	15
<i>Zimbabwe</i>	1	1	1	10
Cluster 4				
<i>Canada</i>	5	6	4	122
<i>Colombia</i>	2	2	1	13
<i>Nepal</i>	3	5	2	269
<i>Thailand</i>	3	5	3	269
<i>United Kingdom</i>	6	10	12	560
Cluster 5				
<i>Ireland</i>	1	1	1	0
<i>Netherlands</i>	2	2	2	42
<i>Russian Federation</i>	3	3	4	85
<i>Spain</i>	3	3	4	32
Cluster 6				
<i>Indonesia</i>	3	3	4	7
<i>Malaysia</i>	7	7	3	4
<i>Sri Lanka</i>	1	1	2	22
<i>United Arab Emirates</i>	2	2	1	0
Cluster 7				
<i>Australia</i>	5	5	7	176
<i>Philippines</i>	1	1	2	30
<i>Singapore</i>	1	1	1	6

Source: VOSviewer output (February 12, 2024)

In Table 4 above, which presents the mapping of co-authorship between countries on the topics of "Green Economy" and "Poverty," the "Total Link Strength" is a metric that quantifies the collaborative relationships between countries based on their co-authored publications. This measure reflects the intensity and frequency of collaborative efforts in research related to these topics. A higher Total Link Strength indicates a stronger and more active collaboration network among countries, suggesting that they frequently co-author papers together. For instance, in the table, China has a Total Link Strength of 16, which signifies that it has established numerous collaborative links with other countries in the field of green economy and poverty research. This strong link strength can imply that China is a central player in this research area, engaging with multiple partners to produce significant scholarly work. Conversely, countries with lower Total Link Strength values may have fewer collaborative publications, indicating less interaction or partnership in research efforts. The Total Link Strength thus serves as an important indicator of the collaborative dynamics in the academic community focused on green economy and poverty, highlighting which countries are leading in research partnerships and contributing to a collective understanding of these critical issues.

Meanwhile, the countries that made the most recent publications (between 2021 and 2023) on the topic of "green economy" and "poverty" can be seen from the average publication year are authors from the United Arab Emirates, Ireland, Egypt, Uzbekistan, Colombia, Japan, Kazakhstan, Malaysia, Indonesia, and China as can be seen in Figure 3.

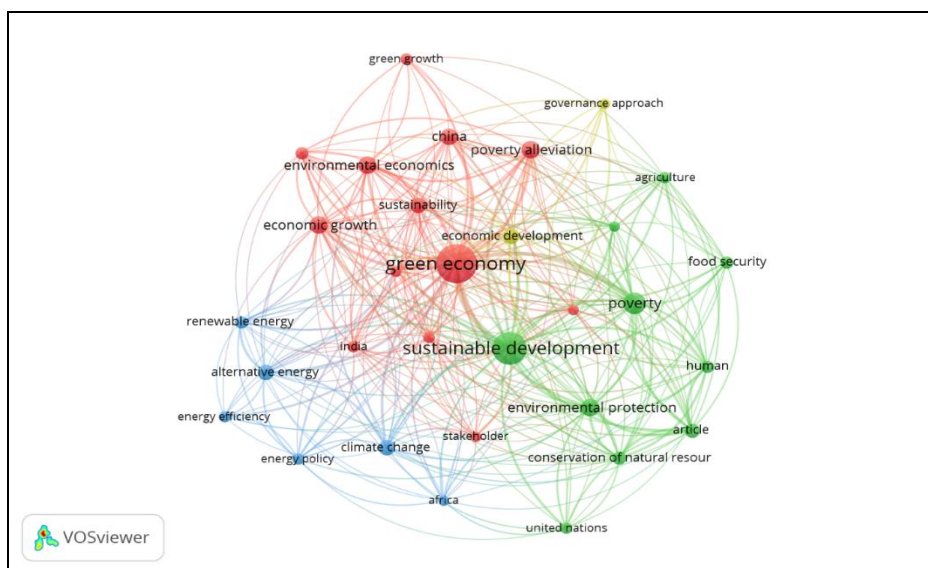


Source: VOSviewer (February 12, 2024)

Figure 3. Distribution of “Green Economy” and “Poverty” Publications

Keyword Co-Occurance Analysis

Furthermore, an analysis of the frequency of keyword occurrence was conducted with co-occurrence analysis. Mapping of co-occurrence analysis type is done with all keywords analysis unit, full counting method, minimum number of occurrences of a keyword is 5. From 743 keywords, there are 31 keywords that meet the threshold and are categorized into four clusters with 314 links and total link strength of 834 as shown in Figure 4.



Source : VOSviewer (February 12, 2024)

Figure 4. Co-occurrence Network of Keywords in “Green Economy” and “Poverty” Publications.

Figure 4 shows the keyword “Green Economy” in cluster 1 as the most significant keyword with 30 links and a total link strength of 217. The keyword “economic growth” has a link count of 25 and a total link strength of 71. Both keywords are included in the top 10 most influential keywords in publications with the topics “Green Economy” and “Poverty”.

Then in cluster 2, there are keywords “sustainable development” with 30 links and a total link strength of 182. The keyword “poverty” has 27 links and a total link strength of 182. Both keywords are included in the top 10 most influential keywords in publications with the topics “Green Economy” and “Poverty”.

In cluster 3, there is the keyword “alternative energy” with a total number of links of 20 and a total link strength of 46. The keyword “renewable energy” with a total number of links of 18 and a total link strength

of 34. Both keywords are not included in the top 10 most influential keywords in publications with the topics "Green Economy" and "Poverty".

Furthermore, in cluster 4 there are keywords "economic development" with a total number of links of 20 and a total link strength of 48. The keyword "governance approach" with a total number of links of 11 and a total link strength of 18. Both keywords are not included in the top 10 most influential keywords in publications with the topics "Green Economy" and "Poverty".

Table 6 below shows the 10 most influential keywords in green economy and poverty studies. The information in table 6 can be used as a reference for researchers who will study further related to publications on the topic of "green economy" and "poverty".

Table 5. Top 10 Most Influential Keywords in "Green Economy" and "Poverty" Studies

No.	Keywords	Links	Total Link Strength	Occurrences
1.	Green economy	30	217	70
2.	Sustainable development	30	182	48
3.	Poverty	27	89	22
4.	Environmental protection	28	87	14
5.	Economic growth	25	71	14
6.	Article	21	67	10
7.	Environmental economics	21	60	15
8.	Poverty alleviation	22	59	15
9.	Cina	23	56	12
10.	Conservation of natural resources	21	56	8

Source: VOS viewer (February 13, 2024)

The terms "Links" and "Total Link Strength" in Table 5, which shows the Top 10 Most Influential Keywords in "Green Economy" and "Poverty" studies, shed light on the importance and interconnectedness of these keywords in the research environment. "Links" refer to the number of connections a particular keyword has with other keywords in the context of the publications analyzed. A higher number of links indicates that the keyword is frequently associated with other terms in the literature, suggesting its relevance and importance in discussions surrounding green economy and poverty. For example, the keyword "Green economy" has 30 links, indicating that it is widely referenced alongside various other keywords, which underscores its central role in the research discourse. On the other hand, "Total Link Strength" quantifies the overall strength of these connections, reflecting not just the number of links but also the frequency and significance of the associations between keywords. A higher Total Link Strength indicates that a keyword is not only commonly linked to others but also plays a pivotal role in the thematic structure of the research. For instance, the keyword "Green economy" has a Total Link Strength of 217, suggesting that it is not only prevalent in the literature but also strongly interconnected with other influential concepts such as "sustainable development" and "poverty." This high link strength highlights the keyword's critical importance in shaping the discourse on how green economic practices can address poverty issues. Together, the metrics of Links and Total Link Strength in Table 6 illustrate the interconnected nature of research themes in the fields of green economy and poverty, revealing which concepts are most influential and how they relate to one another in scholarly discussions. This information can guide future research by identifying key areas of focus and potential avenues for exploration.

CONCLUSIONS

The authors identified fluctuations in the number of studies related to "green economy" and "poverty" since 2009, with a peak in 2022. China ranked at the top of publications in this topic with the main sponsor being the National Natural Science Foundation of China. During the study period, there was no most prominent author on this topic. Middleton, Gyawali, Allouche, and Shahbaz were the authors whose total citations exceeded 200.

In the co-citation analysis, the study conducted by Middleton, Gyawali, and Allouche became the most referenced document, as well as the most cited author. The research base on "green economy" and "poverty" mainly includes "green economy", "sustainable development", "poverty", "environmental

protection”, and “economic growth”. These keywords may reflect the current research focus on green economy and poverty, and thus deserve to be explored for further research.

Further study on the green economy and poverty should go deeper into the five specified research clusters, including sustainable development, alternative energy, and poverty alleviation. This work has the potential to increase the integration of green economy policies in local contexts, particularly in developing nations where poverty reduction is a key concern. Furthermore, international collaboration should be strengthened, particularly in Asia, Africa, and Europe, to exchange information and experiences in developing a green economy. Developing nations should also be encouraged to collaborate on research with established organizations, such as China's National Natural Science Foundation. Such collaboration can take the form of joint research initiatives, policy dialogues, technology transfer, and academic exchange programs, where advanced research institutions provide technical expertise and proven models of green economy implementation. In the context of Indonesia, this collaboration could be especially valuable for adapting best practices in renewable energy development, sustainable agriculture, and inclusive economic policies that address poverty. By tailoring these insights to local needs and capacities, Indonesia can accelerate its transition to a green economy while ensuring that poverty alleviation remains central to its sustainable development strategy.

On the other hand, expanding investment in renewable energy infrastructure is a high priority since it has the potential to generate new employment, cut carbon emissions, and improve people's access to clean energy. The government might offer incentives to the business sector to get more involved in promoting the transition to a green economy. On the other side, human resource capacity development is critical to meeting the demands of the green economy sector. Training and skill development initiatives should focus on industries such as organic agriculture, renewable energy, and sustainable transportation. Furthermore, empowering women and disadvantaged groups must be a key component of poverty reduction initiatives.

Meanwhile, the government's commitment must be strengthened by tightening rules and policies that promote the implementation of a green economy, such as robust carbon trading systems. The government must guarantee that these initiatives not only boost the economy but also directly improve the well-being of the poor. This collaborative endeavor is anticipated to promote inclusive and ecologically responsible sustainable development. In line with this, the commitment of politicians in Parliament also plays a crucial role, as ecological degradation is often the result of political agreements between the executive and legislative branches. Members of Parliament hold the authority to shape laws, approve budgets, and endorse projects that significantly impact environmental outcomes. Without strong and consistent support from political actors, government-led green initiatives may face resistance or dilution through legislative processes. Therefore, aligning parliamentary commitment with government efforts is essential to ensure coherent and effective ecological governance.

REFERENCES

- Ali, E. B., Anufriev, V. P., & Amfo, B. (2021). Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: A review. *Scientific African*, 12, e00756. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00756>
- Alsmadi, A. A., & Alzoubi, M. (2022). Green Economy: Bibliometric Analysis Approach. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(2), 282–289. <https://doi.org/10.32479/ijeep.12758>
- Ambrósio, G., Da Cunha, D. A., Pires, M. V., Costa, L., Faria, R. M., & Gurgel, A. C. (2021). Human development, greenhouse gas emissions and sub-national mitigation burdens: a Brazilian perspective. *Discover Sustainability*, 2(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-021-00044-9>
- Ammara, N., Trihandini, L. I., Syafriadi, D., Hukum, I., Hukum, F., & Andalas, U. (2024). *Implementasi Perdagangan Emisi Karbon dalam Rangka Perwujudan Transformasi Indonesia Emas*. 05(7).
- Andari, R. N. (2022). A Bibliometric Analysis of Digital Competency Studies in Rural Areas. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2022 (ICAST-SS 2022)*, 10–16. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-83-1_3
- Armstrong-Haworth, B. (2009). Energy issue perception, responses and solutions from green economics: a discussion paper. *International Journal of Green Economics*, 3(3–4), 351–366. <https://doi.org/10.1504/IJGE.2009.031328>

- Blanco, H., Alberti, M., Olshansky, R., Chang, S., Wheeler, S. M., Randolph, J., London, J. B., Hollander, J. B., Pallagst, K. M., Schwarz, T., Popper, F. J., Parnell, S., Pieterse, E., & Watson, V. (2009). Shaken, shrinking, hot, impoverished and informal: Emerging research agendas in planning. *Progress in Planning*, 72(4), 195–250. <https://doi.org/10.1016/j.progress.2009.09.001>
- Bonia, B. (2020). Poverty Eradication Through Green Economy: A Case Study Of Two Villages Of Lakhimpur District Under Narayanpur Region. *Indian Journal of Environmental Protection*, 40(5), 557–560.
- Chawla, R. N., & Goyal, P. (2022). Emerging trends in digital transformation: a bibliometric analysis. *Benchmarking*, 29(4), 1069–1112. <https://doi.org/10.1108/BIJ-01-2021-0009>
- Dianjaya, A. R., & Epira, P. (2020). Indonesia Green Economy Implementation Readiness of Greenhouse Gas Emissions Reduction. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i1.5>
- Dvořák, P., Martinát, S., der Horst, D. Van, Frantál, B., & Turečková, K. (2017). Renewable energy investment and job creation; a cross-sectoral assessment for the Czech Republic with reference to EU benchmarks. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 69(October 2015), 360–368. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.158>
- Gea-Bermúdez, J., Jensen, I. G., Münster, M., Koivisto, M., Kirkerud, J. G., Chen, Y. kuang, & Ravn, H. (2021). The role of sector coupling in the green transition: A least-cost energy system development in Northern-central Europe towards 2050. *Applied Energy*, 289(March), 116685. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116685>
- Goodell, J. W., Kumar, S., Lahmar, O., & Pandey, N. (2023). A bibliometric analysis of cultural finance. *International Review of Financial Analysis*, 85(November 2022), 102442. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102442>
- Gu, J., Renwick, N., & Xue, L. (2018). The BRICS and Africa's search for green growth, clean energy and sustainable development. *Energy Policy*, 120(May), 675–683. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.05.028>
- Han, J., & Gao, H. Y. (2024). Green finance, social inclusion, and sustainable economic growth in OECD member countries. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02662-w>
- Hariram, N. P., Mekha, K. B., Suganthan, V., & Sudhakar, K. (2023). Sustainalism: An Integrated Socio-Economic-Environmental Model to Address Sustainable Development and Sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 15(13). <https://doi.org/10.3390/su151310682>
- Harsanto, B., & Firmansyah, E. A. (2023). A twenty years bibliometric analysis (2002–2021) of business economics research in ASEAN. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2194467>
- Hartono, D., Hastuti, S. H., Halimatussadiah, A., Saraswati, A., Mita, A. F., & Indriani, V. (2020). Comparing the impacts of fossil and renewable energy investments in Indonesia: A simple general equilibrium analysis. *Heliyon*, 6(6), e04120. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04120>
- Hickel, J., & Hallegatte, S. (2022). Can we live within environmental limits and still reduce poverty? Degrowth or decoupling? *Development Policy Review*, 40(1), 1–24. <https://doi.org/10.1111/dpr.12584>
- Jaiswal, K. K., Chowdhury, C. R., Yadav, D., Verma, R., Dutta, S., Jaiswal, K. S., SangmeshB, & Karuppasamy, K. S. K. (2022). Renewable and sustainable clean energy development and impact on social, economic, and environmental health. *Energy Nexus*, 7(April), 100118. <https://doi.org/10.1016/j.nexus.2022.100118>
- Kasztelan, A. (2021). On the road to a green economy: How do european union countries 'do their homework'? *Energies*, 14(18). <https://doi.org/10.3390/en14185941>
- Kennet, M. (2009). The costs of women's unequal pay and opportunity: Transforming the unbalanced structure of our economy to meet the challenges of today: Climate change, poverty and the twin crises of the economy and economics. *International Journal of Green Economics*, 3(2), 107–129. <https://doi.org/10.1504/IJGE.2009.030988>
- Kupika, O. L., Gandiwa, E., & Nhamo, G. (2019). Green economy initiatives in the face of climate change: experiences from the Middle Zambezi Biosphere Reserve, Zimbabwe. *Environment, Development and Sustainability*, 21(5), 2507–2533. <https://doi.org/10.1007/s10668-018-0146-7>

- L, N. M. K., George, R. J., & PS, A. (2022). Bibliometric analysis for medical research. *Indian Journal of Psychological Medicine*, 45(3), 277–282. <https://doi.org/10.1177/02537176221103617>
- Nhamo, G. (2017). New Global Sustainable Development Agenda: A Focus on Africa. *Sustainable Development*, 25(3), 227–241. <https://doi.org/10.1002/sd.1648>
- Piwowar-Sulej, K. (2021). Human resources development as an element of sustainable HRM – with the focus on production engineers. *Journal of Cleaner Production*, 278, 124008. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124008>
- Portner, B., Ehrensperger, A., Nezir, Z., Breu, T., & Hurni, H. (2014). Biofuels for a greener economy? Insights from Jatropha production in northeastern Ethiopia. *Sustainability (Switzerland)*, 6(9), 6188–6202. <https://doi.org/10.3390/su6096188>
- Pradana, M., Elisa, H. P., & Syarifuddin, S. (2023). Discussing ChatGPT in education: A literature review and bibliometric analysis. *Cogent Education*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2243134>
- Puriwat, W., & Tripopsakul, S. (2023). Relationships between Brand Value and Country's GDP. *HighTech and Innovation Journal*, 4(4), 787–796. <https://doi.org/10.28991/HIJ-2023-04-04-08>
- Raihan, A., Pavel, M. I., Muhtasim, D. A., Farhana, S., Faruk, O., & Paul, A. (2023). The role of renewable energy use, technological innovation, and forest cover toward green development: Evidence from Indonesia. *Innovation and Green Development*, 2(1), 100035. <https://doi.org/10.1016/j.igd.2023.100035>
- Rejeb, A., Abdollahi, A., Rejeb, K., & Treiblmaier, H. (2022). Drones in agriculture: A review and bibliometric analysis. *Computers and Electronics in Agriculture*, 198(April), 107017. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.107017>
- Sara, I. M., Sudarma, M., & Saputra, K. A. K. (2023). The Green Economic Movement for Sustainable Development and The Role of Green Governance: A Study in Villages in Bali. *International Journal of Social Science and Business*, 7(4), 898–909. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i4.58601>
- Siregar, Y. I. (2024). Pathways towards net-zero emissions in Indonesia's energy sector. *Energy*, 308(July), 133014. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.133014>
- Sokmen, O., Gürçam, Ö. S., Dündar, A. N., & Saricaoğlu, F. T. (2022). What have been highly pointed in bread and sourdough researches: using bibliometric analysis as a powerful tool. *European Food Science and Engineering*, 3(1), 36–43. <https://doi.org/10.55147/efse.1121959>
- Swastika, D. K. S., Priyanti, A., Hasibuan, A. M., Sahara, D., Arya, N. N., Malik, A., Ilham, N., Sayekti, A. L., Triastono, J., Asnawi, R., Sugandi, D., Hayati, N. Q., & Atman, A. (2024). Pursuing circular economics through the integrated crop-livestock systems: An integrative review on practices, strategies and challenges post Green Revolution in Indonesia. *Journal of Agriculture and Food Research*, 18(September 2023), 101269. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.101269>
- Taridala, S. A. A., Alzarliani, W. O., Fauziyah, E., Rianse, I. S., & Arimbawa, P. (2023). Green Finance, Innovation, Agriculture Finance and Sustainable Economic Development: The Case of Indonesia's Provincial Carbon Emissions. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(1), 271–280. <https://doi.org/10.32479/ijeep.13959>
- Turner, R. K. (1990). Report on reports: Blueprint for a green economy. *Environment*, 32(5), 25–26. <https://doi.org/10.1080/00139157.1990.9929030>
- Ülker, P., Ülker, M., & Karamustafa, K. (2023). Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, 6(2), 797–818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- Vlotman, W. F., & Ballard, C. (2014). Water, food and energy supply chains for a green economy. *Irrigation and Drainage*, 63(2), 232–240. <https://doi.org/10.1002/ird.1835>
- Zeb, R., Salar, L., Awan, U., Zaman, K., & Shahbaz, M. (2014). Causal links between renewable energy, environmental degradation and economic growth in selected SAARC countries: Progress towards green economy. *Renewable Energy*, 71, 123–132. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.05.012>
- Zhang, L., Xu, M., Chen, H., Li, Y., & Chen, S. (2022). Globalization, Green Economy and Environmental Challenges: State of the Art Review for Practical Implications. *Frontiers in Environmental Science*, 10(March), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.870271>
- Zhu, G., Li, X., & Zhang, Y. (2021). Multi-stakeholder involvement mechanism in tourism management for maintaining terraced landscape in important agricultural heritage systems (lahs) sites: A case study of dazhai village in longji terraces, China. *Land*, 10(11). <https://doi.org/10.3390/land10111146>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Dampak Otonomi Khusus Dalam Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

(The Effect of Special Autonomy on Poverty Alleviation and Income Inequality in Indonesia)

Mu'amar Wicaksono¹, Nining Indroyono Soesilo²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo
UI Depok, Jawa Barat 16424, email: ¹wicaksono.amar@yahoo.com, ²niningsoesilo@gmail.com

Naskah diterima: 3 Januari 2025

Naskah direvisi: 13 Juni 2025

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2025

Abstract

Poverty and income inequality are the main problems faced in the world for both developed and developing countries, especially in Indonesia. Both are the main goals of global action that need to be addressed as mandated in the Sustainable Development Goals (SDGs) through the theme "Changing the Third World: The 2030 Agenda for Sustainable Development". In order to support SDGs, Indonesia has consistently implemented decentralization through regional autonomy in the management of its government system. The authority between the central government and regional government is divided through autonomy to create sustainable socio-economic development for the creation of a fair and prosperous social life. Indonesia had implemented special autonomy which was granted to several regions receiving special autonomy along with additional transfer funds from the central government. This study aims to assess the effectiveness of autonomy policy in poverty alleviation and reducing income inequality using fixed effect method with panel data from 34 provinces (2002-2019). This study proves that the special autonomy policy is appropriate in the context of poverty alleviation and reducing income inequality, however there are other external factors that need to be addressed that affect special autonomy policy so that it will run more effectively.

Keywords: special autonomy; poverty; income inequality

Abstrak

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah-masalah utama yang dihadapi di dunia baik bagi negara maju dan berkembang khususnya di Indonesia. Keduanya menjadi tujuan utama dari aksi global yang perlu dibenahi sebagaimana diamanatkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui tema "Mengubah Dunia Ketiga: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dalam rangka mendukung SDGs, Indonesia secara konsisten telah menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui otonomi untuk menciptakan pembangunan sosial ekonomi secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara khusus, Indonesia juga menerapkan otonomi khusus yang diberikan kepada beberapa daerah yang memperoleh otonomi khusus berikut tambahan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari otonomi khusus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau efektivitas dari penerapan kebijakan otonomi khusus terhadap upaya penurunan kemiskinan serta terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data panel 34 provinsi (2002-2019) dan pendekatan *fixed effect method*, digunakan untuk melihat efektivitas kebijakan pemberian otonomi khusus terhadap penurunan kemiskinan. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemberian otonomi khusus telah tepat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan, namun terdapat faktor eksternal lainnya yang perlu dibenahi yang memengaruhi kebijakan otonomi khusus sehingga akan berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: otonomi khusus; kemiskinan; ketimpangan pendapatan

PENDAHULUAN

Persoalan perekonomian merupakan masalah utama di dunia termasuk salah satunya Indonesia yakni berkaitan dengan kemiskinan. Sebagai salah satu masalah dasar, kemiskinan menjadi momok bersama bagi setiap bangsa di seluruh dunia. Hal tersebut merupakan dilema bagi negara yang sedang berkembang. Pengentasan kemiskinan adalah tujuan kebijakan utama di negara-negara berkembang (Cuong, 2011).

Selain itu, dalam upaya mendorong penurunan kemiskinan perlu juga untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang baik, akan tetapi terdapat tantangan yang juga harus diperhitungkan dalam pembangunan ekonomi yakni persoalan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal pokok, ketimpangan antar kawasan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Namun, pada hakekatnya persoalan ketimpangan merupakan persoalan universal yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, United Nations (UN) secara resmi pada September 2015 melalui 193 negara anggotanya melakukan pengesahan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan suatu kesepakatan dalam pembangunan global. Tema yang diusung oleh SDGs ini ialah

“Mengubah Dunia Ketiga: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisikan 17 tujuan merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan yang dimulai dari tahun 2016—2030.

Dalam kaitannya dengan pengesahan SDGs, Indonesia sebagai salah satu bagian dari 193 negara yang mendukung adanya program SDGs tersebut merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia dengan menduduki peringkat ke-empat dan dalam hubungannya dengan kemiskinan secara global menurut data World Bank pada tahun 2014 yang diukur berdasarkan kemampuan daya beli \$1,90 per hari, terlihat bahwa Indonesia memiliki posisi tawar yang baik di dunia Internasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia dalam tingkat domestik telah memperoleh hasil yang luar biasa dalam pengurangan kemiskinan, di mana tiap tahunnya berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara nasional. Terlihat bahwa pada tahun 2013, kemiskinan di Indonesia berada pada level 11,46% dan lambat laun mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 9,22% pada tahun 2019.¹ Hal ini menandakan bahwa Indonesia berperan aktif dalam mendukung dan mendorong penurunan kemiskinan dalam skala global dan juga pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung program SDGs dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya agar dapat memperoleh hidup yang lebih layak dan bermartabat serta dapat bersaing nantinya dalam dunia internasional.

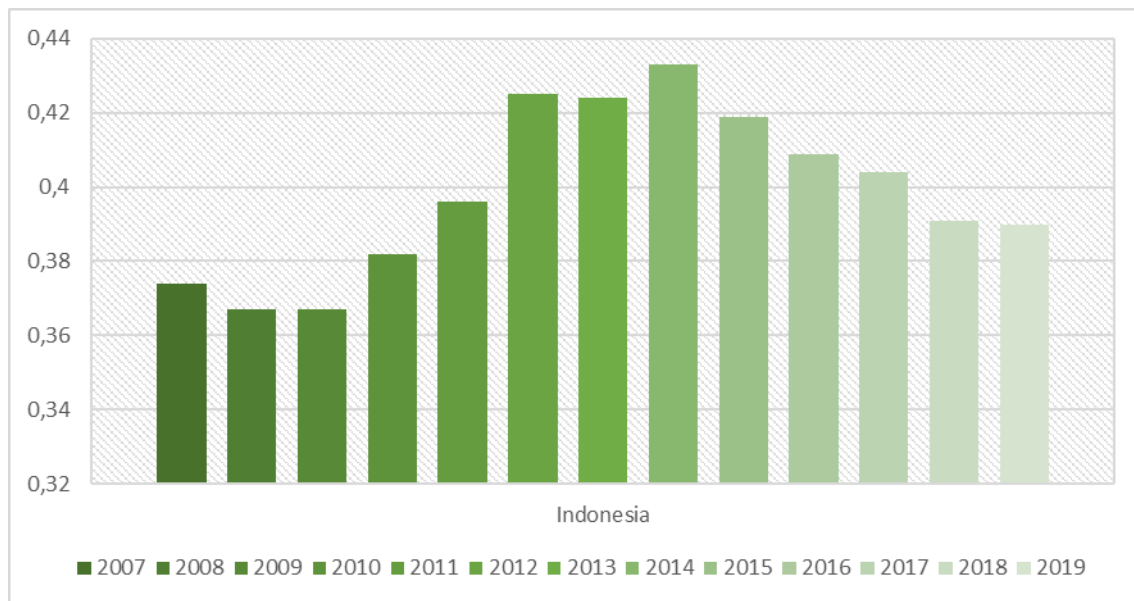
Selain itu, dalam kaitannya dengan perbaikan terhadap ketimpangan yang terdapat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia juga belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan tujuan dari pembangunan daerah yang diarahkan pada meningkatnya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, serta terciptanya pengurangan ketimpangan pada masing-masing daerah dalam ruang lingkup NKRI.² Namun demikian, dalam pelaksanaan pembangunan tersebut perlu juga memperhatikan sejarah yang menjadi latar belakang pembangunan itu sendiri. Pemerintahan NKRI pernah mengedepankan sistem pemerintahan terpusat, di mana pemerintah pusat memegang penuh kendali terhadap seluruh kekayaan ekonomi yang ada pada negara ini. Penguasaan yang begitu besar dari pemerintah pusat dalam mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki berdampak pada munculnya ketidakpuasan terhadap pembagian hasil yang tidak merata. Sehubungan dengan hal tersebut, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat yang dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun tertinggal dalam segi pembangunan apabila dilakukan perbandingan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Sehubungan dengan persentase penduduk miskin, pada tahun 2015 sampai dengan 2019 secara nasional, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara berurutan menduduki posisi ke-1 dan ke-2 sedangkan Provinsi Aceh menduduki posisi ke-6. Hal ini membuktikan bahwa ketiga provinsi tersebut mengalami ketinggalan dalam pembangunan dan kesejahteraan. Selain itu, dalam kaitannya dengan ketimpangan pendapatan perbedaan wilayah adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari di Indonesia. Hal ini dikarenakan karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi di Indonesia yang tidak seragam. Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada akhirnya mengakibatkan beberapa wilayah tidak memiliki ataupun menikmati meratanya pertumbuhan sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah.

Kondisi ini merupakan tantangan pembangunan yang harus dihadapi mengingat persoalan kesenjangan dapat menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat mempersulit dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan. Ketimpangan merupakan permasalahan klasik yang tidak dapat dihindarkan, melainkan hanya dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keseluruhan dalam sistem tersebut tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Sehubungan dengan ketimpangan pendapatan, secara nasional ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan dengan Gini Ratio di Indonesia berlangsung fluktuatif pada tiap tahunnya mulai dari tahun 2007-2019 (Gambar 1).

¹ Laporan Badan Pusat Statistik, diakses pada tahun 2021

² Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



Sumber: BPS (diolah kembali)

Gambar 1. Gini Ratio di Indonesia Tahun 2007—2009

Adanya momentum reformasi yang digulirkan pada tahun 1998, menciptakan ruang dalam diri bangsa Indonesia yang berkaitan dalam mengatasi permasalahan bangsa, khususnya yang terkait dengan pemerataan pembangunan. Konsep pemerintahan yang tadinya bersifat terpusat diubah dengan menganut sistem desentralisasi yang menyediakan keleluasaan kepada masing-masing daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunannya sesuai dengan karakteristik dan ciri khas dari masing-masing daerah tersebut yang dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014), diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengejawantahan dari otonomi daerah tersebut dilakukan melalui desentralisasi yang merupakan penyerahan kewenangan yang dimiliki oleh pusat kepada daerah otonom dalam rangka pengaturan urusan pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.³ Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat dua pandangan terhadap desentralisasi, (i) dalam perspektif positif dijelaskan bahwa desentralisasi merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi sektor publik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Desentralisasi dipercaya sebagai kebijakan dan solusi atas persoalan ekonomi dan politik (Bahl & Linn, 1992; Gramlich, 1993); (ii) dalam perspektif negatif desentralisasi tidak sesuai jika diterapkan pada daerah dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang buruk serta anggaran yang terbatas dalam mengakomodasi preferensi masyarakat (West & Wong, 1995; Prud'homme, 1995).

Pemerintah daerah diberikan kekuasaan dalam menyelenggarakan kewenangannya yang merupakan urusan pemerintah, kecuali hal tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat⁴. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh berdasarkan asas otonomi dalam melakukan pengaturan dan pengurusan dari urusan pemerintahan berikut menentukan dan melaksanakan kebijakan demi kepentingan masyarakat daerah terkait dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan karakteristik dari masing-masing daerahnya sendiri.

Perlu diperhatikan juga bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat beberapa daerah di Indonesia yang memperoleh hak otonomi khusus. Dalam kaitannya dengan otonomi khusus, terdapat setidaknya terdapat 5 (lima) daerah yang memperoleh kebijakan otonomi khusus, antara lain: (i) Provinsi Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006), (ii) Provinsi Papua

³ Pasal 1 angka 8 UU 23/2014

⁴ Pasal 10 UU 23/2014

dan Provinsi Papua Barat diatur berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001); (iii) Provinsi DKI Jakarta berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU 29/2007); dan (iv) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU 13/2012).

Pemberian hak otonomi khusus oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, percepatan pembangunan ekonomi, pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM), penegakan supremasi hukum, peningkatan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat daerah, dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan kemajuan provinsi lain yang lebih maju. Salah satu wujud dari pemberian hak otonomi khusus tersebut dilakukan melalui pemberian dana kepada Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pemberian dana otonomi khusus (dana otsus) ini merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah. Pemberian dana otsus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian dilanjutkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh bagi Provinsi Aceh. Sedangkan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diatur berdasarkan UU 21/2001 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Dana otsus merupakan bagian dari belanja transfer kepada daerah yang diberikan dalam APBN dengan besaran yang ditetapkan melalui persentase tertentu yang dialokasikan sesuai dengan pagu Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan berlaku dalam suatu periode waktu. Pengalokasian dana otonomi khusus ditetapkan senilai 2 (dua) persen dari pagu DAU nasional untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang berlaku dalam jangka waktu 20 tahun mulai dari tahun 2002 hingga tahun 2021. Sedangkan bagi Provinsi Aceh berlaku selama 20 tahun mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2027, dengan alokasi pemberian pada tahun ke-1 sampai tahun ke-15 ditetapkan senilai 2% sedangkan tahun ke-16 sampai tahun ke-20 ditetapkan senilai 1% dari pagu DAU nasional. Sedangkan dalam kaitannya dengan dana keistimewaan diberikan kepada Pemerintah Provinsi DIY berdasarkan UU 13/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan 15/2020.

Dalam hubungannya dengan kemiskinan, kebijakan pemberian Otonomi Khusus diharapkan dapat berperan penting dalam mendorong dan melakukan percepatan terhadap pembangunan dan meningkatnya kemakmuran masyarakat pada daerah otonomi khusus. Dengan Otonomi Khusus pula diharapkan masing-masing daerah yang menerimanya dituntut untuk mampu mengelola potensi daerah yang dimilikinya secara tepat sehingga akan mendorong terciptanya proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, ketimpangan pembangunan pada masing-masing daerah serta pendapatan antar masyarakat ataupun daerah akan semakin menurun.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa meskipun terdapat pemberian kebijakan Dana Otonomi Khusus terhadap Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Dana Keistimewaan bagi Provinsi DIY namun masing-masing provinsi tersebut berada dalam peringkat bawah dalam jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini dirasa perlu untuk meninjau efektivitas dari penerapan kebijakan Otonomi Khusus terhadap upaya penurunan kemiskinan serta terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

METODE

Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan sifat dan karakteristik permasalahannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk berfokus terhadap pengukuran dan jumlah, dalam suatu penelitian kuantitatif juga dilihat perbedaan terhadap indikator pengukuran dalam subyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karenanya, metode ini digunakan karena peneliti ingin mengungkap permasalahan yang sifatnya aktual dan faktual, juga bertujuan untuk mengungkapkan dan menggambarkan gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini yaitu efektivitas kebijakan otonomi khusus dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan berbentuk data panel berupa data sekunder BPS dan Kementerian Keuangan pada 34 Provinsi di seluruh Indonesia dalam jangka waktu Tahun 2002 hingga Tahun 2019. Rangkuman terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Tanda Yang Diharapkan	Sumber
Kemiskinan (dep var)	PDRB Produk Domestik Regional Bruto (dalam harga konstan, tahunan)	-	BPS
	IPM Indeks Pembangunan Manusia (dalam indeks, tahunan)	-	BPS
	TPT Tingkat Pengangguran Terbuka (dalam %, tahunan)	+	BPS
	DAU Dana Alokasi Umum (dalam miliar, tahunan)	-	Kementerian Keuangan
	Dummy_Otsus Kebijakan Otonomi Khusus (dalam Dummy. Nilai 0 untuk daerah yang tidak memperoleh otonomi khusus, sedangkan nilai 1 untuk daerah yang memperoleh otonomi khusus)	-	Olahan
Gini Ratio (dep var)	PDRB Produk Domestik Regional Bruto (dalam harga konstan, tahunan)	+	BPS
	IPM Indeks Pembangunan Manusia (dalam indeks, tahunan)	-	BPS
	TPT Tingkat Pengangguran Terbuka (dalam %, tahunan)	+	BPS
	DAU Dana Alokasi Umum (dalam miliar, tahunan)	-	Kementerian Keuangan
	Dummy_Otsus Kebijakan Otonomi Khusus (dalam Dummy. Nilai 0 untuk daerah yang tidak memperoleh otonomi khusus, sedangkan nilai 1 untuk daerah yang memperoleh otonomi khusus)	-	Olahan

Sumber: Data diolah

Teknis Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dan analisa regresi. Analisa deskriptif digunakan untuk mengetahui distribusi data serta menilai karakteristik dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, baik variabel dependen, independen maupun kontrol. Sedangkan analisa regresi menggunakan *fixed effect method* (FEM) memakai data panel digunakan untuk menjawab keseluruhan hipotesis dan juga untuk menghasilkan inferensi parameter model yang lebih akurat, dengan *degree of freedom* yang lebih besar.

Model penelitian yang digunakan dibagi kedalam 2 (dua) bentuk yakni dalam kaitannya untuk menjelaskan keterkaitan penerapan kebijakan otonomi khusus terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan dengan Gini Ratio. Model pertama adalah pengujian awal yang dilakukan untuk melihat hubungan kebijakan Otonomi Khusus dengan penurunan kemiskinan terhadap seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kemiskinan} &= \alpha_{it} + \beta_1 \text{LogPDRB}_{it} + \beta_2 \text{LogIPM}_{it} + \beta_3 \text{TPT}_{it} + \beta_4 \text{LogDAU}_{it} + \\
 &\quad \beta_5 \text{Dummy}_{it} + \beta_6 \text{Otsus}_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (\text{Persamaan 1})
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, model pengujian yang kedua akan dilakukan untuk melihat hubungan antara kebijakan Otonomi Khusus terhadap Gini Ratio yang dilihat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Gini Ratio} &= \alpha_{it} + \beta_1 \text{LogPDRB}_{it} + \beta_2 \text{IPM}_{it} + \beta_3 \text{LogTPT}_{it} + \beta_4 \text{LogDAU} + \\ &\quad \beta_5 \text{Dummy} \quad \text{Otsus}_{it} + \\ &\quad \varepsilon_{it} \dots \dots \dots \text{(Persamaan 2)} \end{aligned}$$

Kerangka Analitis

Di dalam penelitian ini berusaha menganalisis apakah penerapan kebijakan otonomi khusus dapat mempengaruhi penurunan kemiskinan dan apakah ada faktor lain yang mempengaruhi penurunan kemiskinan. Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan, peningkatan terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan yang dikhususkan terhadap persoalan pendidikan, sosial, dan kesehatan pemerintah mengalokasikan Dalam penerapan kebijakan otonomi khusus terdapat Dana Otsus dan Dana Keistimewaan yang bertujuan menyejahterakan penduduk di daerah otonom. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa daerah otonom yang memperoleh Dana Otsus, yakni Provinsi Aceh melalui UU 11/2006 serta Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui UU 21/2001, sedangkan daerah otonom yang memperoleh Dana Keistimewaan adalah Provinsi DIY melalui UU 13/2012. Namun demikian, meskipun telah terdapat penambahan pendapatan daerah berupa Dana Otsus dan Dana Keistimewaan, beberapa provinsi-provinsi tersebut termasuk ke dalam provinsi termiskin di Indonesia. Dengan adanya pendapatan daerah yang meningkat, diharapkan akan menciptakan peningkatan kualitas masyarakat yang nantinya dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan dalam mengelola kekayaan alam dari masing-masing daerah otonom sehingga menyebabkan upaya penurunan kemiskinan dapat tercapai.

Dalam penelitian ini juga akan melihat mengenai distribusi pendapatan pada masing-masing provinsi yang direpresentasikan oleh Gini Ratio. Hal ini untuk dapat melihat sejauh mana hal tersebut mencerminkan pemerataan bagi masing-masing penduduknya pada suatu negara. Dalam hal terdapat ketidakmerataan distribusi pendapatan akan menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan sebagai awal permasalahan kemiskinan. Selain itu, penggunaan Gini Ratio dalam penelitian ini juga didasarkan terhadap tujuan dari otonomi khusus itu sendiri yang pelaksanaannya terdapat pemberian Dana Otsus dan Dana Keistimewaan dalam rangka memberikan keadilan kepada masyarakat daerah otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk Provinsi Aceh dan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Provinsi DIY.

Selain itu, dalam kaitannya untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh sehubungan dengan pengaruh kebijakan Otonomi Khusus yang menjadi indikator utama, terdapat pula indikator lain yang memiliki pengaruh baik terhadap kemiskinan maupun pemerataan distribusi pendapatan diantaranya PDRB, IPM, TPT dan DAU.

Hipotesis

Berdasarkan literatur yang telah disampaikan sebelumnya, terlihat bahwa kebijakan pemberian Otonomi Khusus menjadi salah satu faktor yang mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, hipotesa yang menjadi dasar penelitian ini:

1. Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia
2. Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus memiliki pengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia

Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menggunakan beberapa faktor dalam melakukan analisa terhadap dampak penerapan kebijakan otonomi khusus terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Beberapa faktor yang ditinjau, antara lain:

Kemiskinan

Dari generasi ke generasi, kemiskinan telah merusak kelangsungan hidup manusia. Akibat dari kemiskinan berdampak terhadap timbulnya kelaparan, penyakit, kekerasan, perpecahan keluarga, penghinaan dan bahkan kematian. Kemiskinan telah begitu meluas dan bertahan selama berabad-abad sehingga orang percaya bahwa kemiskinan adalah fakta kehidupan yang tak terelakkan atau kehendak Tuhan dan oleh karena itu orang-orang miskin diterima dan diberi bantuan, meskipun tingkat bantuannya jarang mencukupi (Kammermand & Kahn, 1997).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga, dengan kata lain penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Hal ini sejalan dengan ukuran dalam mengukur garis kemiskinan menurut Sajogyo (1996) dimana pengukuran garis kemiskinan dibagi menjadi 2 (dua) ciri, antara lain: (a) spesifikasi atas tiga garis kemiskinan yang mencakup konsepsi “nilai ambang batas kecukupan pangan” (*food threshold*); (b) menghubungkan tingkat pengeluaran rumah tangga dengan ukuran kecukupan pangan (kalori dan protein).

Selain itu, penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), dimana terdapat suatu hubungan antara tindakan dan reaksi yang sedemikian rupa untuk menjadikan suatu negara miskin tetap dalam keadaan miskin atau dengan kata lain “*a country is poor because it is poor*”. *Vicious circle of poverty* ini berada di sisi penawaran maupun permintaan, sehingga pembangunan ekonomi hanya bisa terjadi jika *vicious circle of poverty* diputus. Dengan demikian, kondisi-kondisi tersebut yang menyebabkan suatu negara menjadi tetap miskin meskipun terdapat faktor lainnya yang mendukung hal tersebut. Sehingga, untuk dapat memutus lingkaran setan kemiskinan di negara-negara berkembang penting untuk memiliki keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio

Secara umum pengukuran yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap distribusi pendapatan dibedakan menjadi 2 (dua) macam pokok. Dua ukuran yang pada umumnya digunakan dalam menganalisa distribusi pendapatan tersebut adalah *size distribution of income* (distribusi ukuran pendapatan) dan *functional or factor share distribution of income* (distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi) (Todaro & Smith, 2006). Guna mengukur ketimpangan pendapatan di antara penduduk, ukuran yang digunakan berdasarkan pada ukuran *size distribution of income*.

Terkait dengan hal tersebut, untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan salah satunya dengan menggunakan Gini Ratio. Suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Gini Ratio mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Gini Ratio-nya makin mendekati satu. Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Gini Ratio adalah sebagai berikut:

- a. Lebih kecil dari 0,4: tingkat ketimpangan rendah;
- b. Antara 0,4—0,5 : tingkat ketimpangan moderat;
- c. Lebih tinggi dari 0,5: tingkat ketimpangan tinggi.

Otonomi Khusus

Secara konseptual pemahaman mengenai otonomi dapat didasarkan pada pendapat James Crawford (2006) yang menyatakan bahwa “*daerah otonom adalah wilayah suatu Negara, biasanya memiliki kekhasan etnis atau budaya, yang telah diberikan kekuasaan administrasi internal yang terpisah, pada tingkat apa pun, tanpa terlepas dari negara bagiannya*”. Selain itu, Hurst Hannum dan Richard B. Lillich (2018) juga memberikan pandangan terkait otonomi yang dipahami sebagai kebebasan dalam melakukan tindakan dalam tingkat internal ataupun domestik, dimana urusan luar negeri dan pertahanan secara umum berada dalam kekuasaan pemerintah pusat atau pemerintah nasional.

Pada dasarnya bentuk dari otonomi sangat bermacam-macam tidak ada pengaturan khusus dari satu rezim terhadap rezim yang lainnya yang mengatur dimensi dari pengaturan pemerintahan sendiri untuk dapat dilaksanakan. Tidak ada kriteria minimum yang dipersyaratkan agar status dari otonomi tersebut dapat terlaksana, pembentukan dari rezim otonomi di suatu negara berasal dari penciptaan negara tersebut berdasarkan pengaturan peraturan perundangan-undangan ataupun konstitusi secara internal dari negara yang bersangkutan.

Terkait dengan konsep otonomi tersebut, selain di Indonesia terdapat beberapa negara yang menerapkan sistem otonomi dalam sistem pemerintahannya, antara lain Tiongkok dengan menerapkan otonomi kepada Hong Kong dan Macau, serta Inggris terhadap Skotlandia. Dalam pelaksanaannya masing-masing daerah memiliki derajat otonomi masing-masing dimana penentuan derajat otonomi tersebut bergantung pada karakteristik ekonomi, budaya, sosio-politik dan hukum dari masing-masing daerah tersebut. Dalam kaitannya dengan sektor keuangan misalnya, baik di Hong Kong, Macau, dan Skotlandia memiliki derajat otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia, di mana terdapat hak dalam hal finansial dan sistem perpajakan yang tidak terdapat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Selain itu, dari sisi politik dan budaya, baik Hong Kong, Macau, dan Skotlandia memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional serta memiliki mata uang dan bendera tersendiri. Hal tersebut yang tidak dimiliki oleh Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Provinsi DKI Jakarta, serta Provinsi DIY dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan otonomi pada wilayah lain seperti Hong Kong, Macau, dan Skotlandia berbeda dengan Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Provinsi DKI Jakarta, serta Provinsi DIY, dimana dalam ketiga daerah tersebut tidak ditemukan ketentuan ataupun kebijakan yang secara spesifik menunjukkan adanya otonomi khusus dalam kaitannya dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Transfer Pusat kepada Daerah

Dalam kaitannya untuk mendukung pelaksanaan dari otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU 23/2014, masing-masing daerah yang diberikan hak otonomi khusus memperoleh tambahan dana dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendukung dan mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Tambahan dana ini merupakan bagian dari transfer daerah yang dialokasikan di dalam bagian belanja negara yang ditujukan untuk mendanai desentralisasi fiskal yang salah satunya berasal dari dana otsus.

Dalam kaitannya dengan transfer pusat kepada daerah tersebut, dana otsus untuk Provinsi Aceh ini diberikan mulai pada tahun 2008 dengan rincian untuk sebesar 2% dari pagu DAU Nasional untuk tahun ke-1 hingga ke-15 dan senilai 1% dari pagu DAU Nasional untuk tahun ke-16 hingga ke-20. Sedangkan besaran dari dana otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan senilai 2% dari pagu DAU Nasional untuk jangka waktu 20 tahun. Pembagian porsi dana otsus tersebut dibagi untuk Provinsi Papua sebesar 70% dan untuk Provinsi Papua Barat sebesar 30%. Sedangkan untuk dana keistimewaan diberikan kepada Provinsi DIY berdasarkan usulan yang diajukan oleh Gubernur DIY kepada Menteri Keuangan yang didasarkan pada kerangka acuan kegiatan yang disusun berdasarkan Perdas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Terkait dengan kemiskinan dalam Pasal 183 UU 11/2006 dijelaskan bahwa *"Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, **pengentasan kemiskinan**, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan."* Sedangkan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Khusus Nomor 13 Tahun 2016 Provinsi Papua dijelaskan bahwa *"Dana Otonomi Khusus dialokasikan untuk ... subsidi harga kebutuhan pokok yang dikelola secara profesional dan diperuntukkan bagi **warga miskin** orang asli Papua."*

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini juga akan dibahas beberapa indikator lainnya yang diharapkan dapat mendukung penelitian dalam melihat dampak penerapan kebijakan Otonomi Khusus terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Beberapa indikator pendukung yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini ialah produk domestik regional bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan dana alokasi umum (DAU).

Penelitian ini juga mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk melihat dampak pengaruh kebijakan penerapan otonomi khusus terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Terkait dengan kemiskinan, berdasarkan penelitian dari Mwiathi Peter Silas, Prof. Nelson H.W. Wawire dan Perez A. Onono Okelo (2018) dapat dilihat adanya pengaruh desentralisasi fiskal yang diwakilkan oleh transfer pemerintah pusat kepada daerah dan pendapatan per kapita terhadap

kemiskinan. Selain itu, Nursini dan Tawakkal (2019) juga melakukan penelitian atas 33 Provinsi di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2010–2016 dengan melihat pengaruh dari desentralisasi fiskal yang salah satunya merupakan transfer pusat kepada daerah. Hasil penelitian menunjukkan transfer pusat kepada daerah dan pendapatan per kapita berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Cristian F Sepulveda dan Jorge Martinez-Vazquez (2011) terhadap 34 negara berkembang dalam kurun waktu 1976–2000 diketahui bahwa PDRB berpengaruh signifikan dalam penurunan kemiskinan. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amaluddin, Rukmui W. Payapo, Abdul A. Laitupa, Mohammad R. Serang (2018) terhadap 6 kecamatan atau 32 desa di Kabupaten Seram Barat terbukti bahwa IPM memiliki peran penting dalam pengurangan kemiskinan serta meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seram Barat. Sedangkan terkait dengan pengaruh dari TPT, Peter Siyan et al. (2016) menyimpulkan bahwa pengangguran secara statistik memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nigeria dalam rentang waktu tahun 1980–2014. Implikasi dari hal tersebut memperlihatkan terjadinya peningkatan pengangguran akan memiliki dampak terhadap meningkatnya kemiskinan pada Nigeria. Oleh karenanya, peningkatan kemiskinan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya jalan keluar dalam upaya menurunkan kemiskinan, melainkan perlu untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok ekonomi yang rentan dijaga dengan baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, perlu ditekankan untuk meningkatkan skill dan kemampuan dalam pendidikan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi persyaratan tenaga kerja.

Selain itu, sehubungan dengan ketimpangan pendapatan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh N.P. Ravindra Desyshappriya (2017) dapat dipahami bahwa GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan serta pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Arzu Alvan (2018) dan Katherine C. Theyson dan Lauren R. Heller (2015) memperlihatkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suzana Makreshanska-Mladebovska and Goran Petrevski (2018) dapat dipahami bahwa intergovernmental transfer memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Gini Ratio.

Pada Tabel 3 di bawah ini merangkum penelitian yang pernah dilakukan dalam rangka mendukung hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Hipotesis
Mwiathi Peter Silas, Prof. Nelson H.W.Wawire dan Perez A. Onono Okelo	<i>Effects of Fiscal Decentralization on Poverty Reduction in Kenya</i> (2018)	(i) transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (<i>intergovernmental transfer</i>) dapat mengurangi kemiskinan apabila berada pada level tertentu. Efek dari desentralisasi fiskal terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pengembangan manusia bergantung pada sifat dari desentralisasi fiskal itu sendiri dan karakteristik daerah (ii) pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan dalam penurunan kemiskinan	(i) <i>Intergovernmental transfer</i> sebagai salah satu indikator memiliki pengaruh dalam pengurangan kemiskinan (ii) pendapatan perkapita berpengaruh dalam pengurangan kemiskinan
Nursini dan Tawakkal	<i>Poverty alleviation in the contex of fiscal decentralization in Indonesia</i> (2019)	(i) <i>intergovernmental transfer</i> memilki efek signifikan terhadap penurunan kemiskinan; (ii) pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan	(i) Semakin besar dana transfer yang diterima pemerintah daerah maka akan semakin besar kemampuan finansial daerah untuk membiayai pembangunan dan pengurangan kemiskinan (ii) semakin tinggi pendapatan per kapita mengurangi tingkat kemiskinan

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Hipotesis
Cristian F Sepulveda dan Jorge Martinez-Vazquez	<i>The consequences of fiscal decentralization on poverty and income equality</i> (2011)	PDRB berpengaruh negatif dan berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan	Negara dengan tingkat pendapatan perkapita GDP memiliki kemampuan untuk menurunkan kemiskinan
Amaluddin, Rukmui W. Payapo, Abdul A. Laitupa, Mohammad R. Serang	<i>A Modified Human Development Index and Poverty in the Villages of West Seram Regency, Maluku Province, Indonesia</i> (2018)	Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif secara statistik terhadap kemiskinan.	Indeks Pembangunan Manusia dapat menurunkan kemiskinan
Peter Siyan et al.	<i>Unemployment and Inflation: Implication on Poverty Level in Nigeria</i> (2016)	Tingkat Pengangguran secara statistik memiliki efek signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nigeria pada tahun 1980 – 2014. Peningkatan tingkat pengangguran secara signifikan menyebabkan kemiskinan di Nigeria	Tingkat pengangguran meningkatkan kemiskinan
N.P. Ravindra Desyshappriya	<i>Impact of Macroeconomic Factors on Income Inequality and Income Distribution in Asian Countries</i> (2017)	(i) GDP merupakan salah satu faktor penting dari ketimpangan pendapatan, dimana GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (ii) pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	(i) Kenaikan GDP memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan (ii) Tingginya pengangguran memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan
Arzu Alvan	<i>Forging a Link Between Human Development and Income Inequality Cross-Country Evidence</i> (2007)	Penelitian yang dilakukan terhadap 90 negara baik itu berkembang dan negara maju menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	Indeks Pembangunan Manusia dapat menurunkan ketimpangan pendapatan
Katherine C. Theyson dan Lauren R. Heller	<i>Development and Income Inequality: A New Specification of the Kuznets Hypothesis</i> (2015)	Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap ketimpangan pendapatan	Indeks Pembangunan Manusia dapat menurunkan ketimpangan pendapatan
Suzana Makreshanska-Mladebovska and Goran Petrevski	<i>Decentralisation and Income Inequality in Central and Eastern European Countries</i> (2018)	Intergovernmental transfer memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Gini Ratio	Intergovernmental transfer menurunkan Gini Ratio

Sumber: Data Diolah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat 2 (dua) metode analisis yang dipakai yakni analisis deskriptif dan analisis regresi dengan menggunakan data dalam bentuk panel melalui metode FEM untuk melihat dampak kebijakan pemberian Otonomi Khusus terhadap penurunan kemiskinan. Berikut disajikan hasil statistik deskriptif atas variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini:

Tabel 4. Statistik Deskriptif Data Penelitian

VARIABEL	MEAN	MAX	MIN	STD DEV.
Kemiskinan	0,143931	0,443900	0,031800	0,081587
Gini Ratio	0,348771	0,475000	0,209000	0,048461
PDRB	173040,6	1838501	1655,330	300606,9
IPM	68,77912	80,76000	54,45000	4,165351
TPT	0,070653	0,189100	0,013700	0,032223
DAU	811,8409	3998,43	2,710000	650,1703
Dummy_Otsus	0,111111	1	0	0,314527

Sumber: Data Diolah.

Sehubungan dengan data yang diperoleh dalam Tabel 4 di atas, terdapat persebaran data yang beragam terhadap variabel-variabel yang dipilih. Hal ini mengingat banyak faktor atau kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pengukuran tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatann dalam suatu wilayah.

Secara umum terhadap rata-rata indikator kemiskinan adalah 0,143931, di mana kemiskinan tertinggi berada di wilayah Provinsi Papua pada tahun 2002 dengan nilai sebesar 0,443900, sedangkan nilai kemiskinan terendah dapat dilihat di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki nilai sebesar 0,031800. Selain itu, untuk Gini Ratio rata-ratanya berada pada angka 0,3348771, dimana Gini Ratio tertinggi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 0,475000, sedangkan nilai Gini Ratio terendah dapat dilihat di wilayah Provinsi Gorontalo pada tahun 2005 pada angka 0,209000.

Tekait 5 (lima) indikator yang diteliti dalam penelitian ini, terlihat bahwa nilai rata-rata dari PDRB adalah 173040,6, dimana PDRB tertinggi berada pada Provinsi DKI Jakarta dalam tahun 2019 yaitu sebesar 1838501, sedangkan jumlah PDRB terendah terdapat di Gorontalo pada tahun 2002 yaitu sebesar 1655,330. Selain itu, untuk indikator IPM nilai rata-rata yang diperoleh dari 34 Provinsi di Indonesia adalah sebesar 68,77912 dengan nilai tertinggi sebesar 80,76000 yang diperoleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Sementara itu, perolehan nilai terendah dalam IPM selama kurun waktu 2002—2019 berada di wilayah Provinsi Papua sebesar 54,45000 pada tahun 2010. Untuk indikator TPT, nilai rata-rata TPT berada pada nilai 0,070653. Wilayah yang memiliki nilai TPT tertinggi yaitu Provinsi Banten pada tahun 2006 dengan nilai sebesar 0,189100, sedangkan nilai TPT terendah berada di wilayah Provinsi Bali pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 0,013700.

Selanjutnya, terkait dengan indikator DAU, nilai rata-rata DAU berada pada nilai 811,8409. Wilayah yang memperoleh DAU terbesar yaitu Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar 3998,43, sedangkan yang memperoleh DAU terkecil yaitu Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2004 dengan jumlah sebesar 2,710000

Adapun hasil dari analisis tersebut yang ditujukan untuk menganalisis dampak program kebijakan pemberian otonomi khusus terhadap penurunan kemiskinan dengan menggunakan metode FEM sebagai berikut (Tabel 5):

Tabel 5. Hasil Uji Regresi I –

Pengaruh Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan

<i>Fixed Effect Model</i>	
Konstanta	0,571828 (0,0000)
LogPDRB	-0,022622*** (0,0000)
LogIPM	-0,022295 (0,3914)
TPT	0,039629 (0,3924)
LogDAU	-0,013383*** (0,0000)
Dummy Otsus	-0,013645*** (0,0000)

R-squared	0,950678
Jumlah observasi	612
Derajat Signifikan	*** signifikan pada 1% ** signifikan pada 5% * signifikan pada 10%
Catatan: Dalam pemodelan ini penggunaan <i>log</i> diterapkan dalam masing-masing variabel kontrol dikarenakan memiliki unit-unit variabel yang berbeda	
Sumber: Data Diolah.	

Apabila melihat hasil dari penelitian dapat dipahami bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan di antara PDRB di suatu wilayah dengan kemiskinan. Hasil regresi dari variabel ini menunjukkan nilai -0,02 serta memiliki probabilitas dengan nilai 0,0000 artinya setiap peningkatan PDRB menurunkan kemiskinan sebesar 0,02%. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cristian F Sepulveda dan Jorge Martinez-Vazquez (2011), Nursini dan Tawakkal (2019), Mwiathi Peter Silas, Prof. Nelson H.W.Wawire dan Perez A. Onono Okelo (2018) di mana PDRB memiliki pengaruh negatif dalam pengurangan kemiskinan.

Hasil estimasi IPM terhadap kemiskinan menunjukkan adanya hubungan negatif dan tidak signifikan. Hasil regresi dari variabel ini menunjukkan nilai -0,02 serta memiliki probabilitas dengan nilai 0,3914 artinya setiap peningkatan IPM menurunkan kemiskinan sebesar 0,02%. Sejalan dengan penelitian terdahulu dimana IPM pada dasarnya memiliki faktor-faktor yang berpengaruh dalam menurunkan nilai kemiskinan. IPM sendiri terdiri dari beberapa faktor yakni indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak.

Selanjutnya, variabel TPT menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hasil regresi dari variabel ini menunjukkan nilai 0.03 serta memiliki probabilitas dengan nilai 0.3924 artinya setiap peningkatan TPT berpengaruh dalam meningkatkan kemiskinan. Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan Peter Siyan et al (2016) maka dapat dilihat bahwa variabel tingkat pengangguran berpengaruh meningkatkan kemiskinan.

Selain itu, berdasarkan penelitian terlihat adanya hubungan negatif dan signifikan antara DAU terhadap kemiskinan. Hasil regresi dari variabel ini menunjukkan nilai -0,013 serta memiliki probabilitas dengan nilai 0,0000 artinya setiap peningkatan DAU berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Lebih lanjut, berdasarkan penelitian juga dapat dilihat bahwa ada hubungan negatif dan signifikan antara kebijakan otonomi khusus yang diestimasi dengan menggunakan variabel Dummy Otsus terhadap kemiskinan. Hasil regresi dari variabel ini menunjukkan nilai -0,013 serta memiliki probabilitas dengan nilai 0,0000 artinya setiap peningkatan transfer pusat kepada daerah otonomi khusus menurunkan kemiskinan sebesar 0,013%. Hal ini menjelaskan fakta yang ada saat ini bahwa kebijakan pemberian otonomi khusus tersebut berdampak terhadap penurunan kemiskinan, dimana persentase kemiskinan pada provinsi di Indonesia khususnya daerah yang memperoleh otonomi khusus pada tiap tahunnya mengalami penurunan mengikuti penurunan persentase kemiskinan penduduk miskin di Indonesia. Namun demikian, berdasarkan fakta yang ada bahwa daerah yang memperoleh otonomi khusus masih berada pada kategori provinsi dengan presentase kemiskinan terbesar di Indonesia, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Hal ini mengingat pemberian otonomi khusus erat juga kaitannya dengan faktor sosial dan politik daripada faktor ekonomi semata.

Tabel 6. *Intercept* pada 34 Provinsi di Indonesia

PROVINSI	INTERCEPT
Papua	0,216313
Papua Barat	0,165694
Aceh	0,08518
Nusa Tenggara Timur	0,079306
Jawa Timur	0,076138
Jawa Tengah	0,075222
Maluku	0,067629
Nusa Tenggara Barat	0,052937

PROVINSI	INTERCEPT
Lampung	0,044055
Sumatera Selatan	0,036315
Gorontalo	0,029078
Sulawesi Tengah	0,024118
Jawa Barat	0,021945
Bengkulu	0,017617
DI Yogyakarta	0,017533
Sumatera Utara	0,008978
Sulawesi Tenggara	0,007527
Sulawesi Selatan	-0,010727
Riau	-0,028683
Kalimantan Barat	-0,039491
Sulawesi Barat	-0,041052
DKI Jakarta	-0,047914
Sumatera Barat	-0,049588
Kalimantan Timur	-0,05234
Jambi	-0,05599
Banten	-0,056771
Kepulauan Riau	-0,060008
Kalimantan Utara	-0,060617
Sulawesi Utara	-0,06782
Kalimantan Tengah	-0,0756
Kalimantan Selatan	-0,090579
Bali	-0,092319
Maluku Utara	-0,096993
Kepulauan Bangka Belitung	-0,099093

Sumber: Data Diolah.

Adapun *intercept* di masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Tabel 6 menjelaskan pengaruh kebijakan otonomi khusus terhadap tingkat penurunan kemiskinan di masing-masing provinsi. Provinsi yang paling terpengaruh dalam hal diberikan kebijakan otonomi khusus tercermin pada provinsi dengan *intercept* tertinggi secara beturut-turut yakni Papua (0,21), Papua Barat (0,16), Aceh (0,08), Nusa Tenggara Timur (0,07), Jawa Timur (0,07), Jawa Tengah (0,07) dan Maluku (0,06). Sedangkan kebijakan pemberian kebijakan Otonomi Khusus ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap provinsi dengan *intercept* terendah, yakni Kepulauan Bangka Belitung (-0,09), Maluku Utara (-0,09), Bali (-0,09), Kalimantan Selatan (-0,09) dan Kalimantan Tengah (-0,07).

Dari hasil penjabaran di atas membuktikan bahwa memang terbukti kebijakan pemberian otonomi khusus berdampak terhadap upaya dalam penurunan kemiskinan dan provinsi yang berhak untuk mendapatkan kebijakan otonomi khusus antara lain Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Namun demikian sampai saat ini kebijakan pemberian otonomi khusus belum membuahkan hasil, khususnya terhadap ketiga provinsi tersebut. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga menganalisis data dalam bentuk panel melalui metode FEM untuk melihat dampak kebijakan pemberian otonomi khusus terhadap penurunan Gini Ratio. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa salah satu tujuan diadakannya otonomi khusus berikut pemberian dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa Dana Otsus yang secara spesifik ditujukan bagi masyarakat miskin di daerah Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat adalah untuk pengentasan kemiskinan dalam rangka menciptakan pembangunan sosial ekonomi secara berkelanjutan terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera serta Dana Kesitimewaan untuk Provinsi DIY.

Dalam hal ini konsep keadilan dan kesejahteraan merupakan representasi dari tidak adanya ketimpangan atau kesenjangan dalam distribusi pendapatan di masing-masing daerah di Indonesia. Menurut Sen (1976) dan Forster et al. (1984) dalam Annim et al. (2012), hubungan yang erat antara kesenjangan dan kemiskinan adalah bahwa kesenjangan merupakan bagian dari kemiskinan. Sedangkan

Barber (2008) dalam Annim et al. (2012) memandang hubungan antara kesenjangan dan kemiskinan sebagai hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa kesenjangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau kesenjangan adalah bentuk dari kemiskinan.

Oleh karenanya dalam penelitian ini konsep keadilan dalam kebijakan pemberian Otonomi Khusus direpresentasikan dengan Gini Ratio dalam rangka melihat sejauh mana pengaruh dari kebijakan otonomi khusus tersebut terhadap ketimpangan pendapatan. Adapun hasil dari analisis tersebut yang ditujukan untuk menganalisis dampak program kebijakan pemberian otonomi khusus terhadap Gini Ratio sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Regresi II - Pengaruh Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Gini Ratio

<i>Fixed Effect Model</i>	
Konstanta	0,076435 (0,1457)
LogPDRB	0,020897*** (0,0000)
IPM	-0,000700 (0,3057)
LogTPT	-0,038799*** (0,0000)
LogDAU	-0,002627 (0,3439)
Dummy Otsus	-0,000413 (0,9673)
R-squared	0,558389
Jumlah observasi	612
Derajat Signifikan	*** signifikan pada 1% ** signifikan pada 5% * signifikan pada 10%

Catatan: Dalam pemodelan ini penggunaan *log* diterapkan dalam masing-masing variabel kontrol dikarenakan memiliki unit-unit variabel yang berbeda

Sumber: Data diolah.

Dalam Tabel 6 di atas, apabila melihat hasil dari penelitian dapat dipahami bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan diantara PDRB di suatu wilayah dengan Gini Ratio. Hasil regresi dari variabel ini menunjukkan nilai 0,02 serta memiliki probabilitas dengan nilai 0,0000 artinya setiap peningkatan PDRB meningkatkan Gini Ratio sebesar 0,02%. Sejalan dengan hipotesis awal dan penelitian yang dilakukan oleh N.P. Ravindra Desyshappriya (2017) dimana GDP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Hasil estimasi IPM terhadap kemiskinan menunjukkan adanya hubungan negatif dan tidak signifikan. Hasil regresi dari variabel ini menunjukkan nilai -0,000700 serta memiliki probabilitas dengan nilai 0,3057 artinya setiap peningkatan IPM berpengaruh terhadap Gini Ratio. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arzu Alvan (2007) serta Katherine C. Theyson dan Lauren R. Heller (2015) dimana menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Selanjutnya, variabel TPT menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Gini Ratio. Hasil regresi dari variabel ini menunjukkan nilai -0,038 serta memiliki probabilitas dengan nilai 0,0000 artinya setiap peningkatan TPT berpengaruh terhadap Gini Ratio. Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan N.P. Ravindra Desyshappriya (2017) serta hipotesis, maka dapat dilihat bahwa variabel tingkat pengangguran memiliki hasil yang berbeda. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terkait dengan pengangguran adanya ekspansi tenaga kerja kepada sektor informal dapat menjadi justifikasi adanya hal ini. Ketentuan tersebut mengingat sektor informal yang bersifat padat karya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga sektor informal tersebut berperan besar khususnya terhadap negara dengan jumlah penduduk yang besar (Bappenas, 2009). Namun demikian, dengan pangsa pekerja yang besar di sektor perekonomian informal yang memiliki kualitas dan upah yang rendah dan pengaturan kerja yang intermiten dan tidak aman, fokus lebih besar perlu diberikan pada upaya untuk mengatasi tantangan

pekerjaan rentan dan pekerjaan informal karena kemajuan di bidang ini kemungkinan besar memiliki dampak pembangunan yang signifikan, termasuk dalam hal pencapaian kesetaraan gender.

Selain itu, berdasarkan penelitian terlihat adanya hubungan negatif dan tidak signifikan antara DAU serta *Dummy* Otsus terhadap Gini Ratio. Hasil regresi dari variabel ini menunjukkan nilai -0,002627 serta memiliki probabilitas dengan nilai 0,3439 untuk DAU. Sedangkan untuk *Dummy* Otsus hasil regresi menunjukkan nilai -0,000413 serta memiliki probabilitas dengan nilai 0,9673. Berdasarkan hasil analisa di atas, hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suzana Makreshanska-Mladebovska and Goran Petrevski (2018) di mana terdapat hubungan negatif antara transfer pemerintah pusat kepada daerah (*intergovernmental transfer*) dan ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan oleh Gini Ratio. Hasil ini juga sejalan dengan fakta yang ada saat ini bahwa kebijakan pemberian otonomi khusus tersebut berdampak terhadap penurunan ketimpangan pendapatan, di mana persentase ketimpangan pendapatan pada provinsi di Indonesia, khususnya daerah yang memperoleh otonomi khusus pada tiap tahunnya, mengalami penurunan mengikuti penurunan persentase ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Mempertimbangkan penjabaran di atas dalam kaitannya juga terhadap relevansi dampak kebijakan otonomi khusus terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan perlu juga diperhatikan adanya faktor-faktor lain salah satunya adanya faktor sosial politik yang berpengaruh terhadap penerapan kebijakan pemberian otonomi khusus termasuk pemberian dana otsus. Faktor sosial dan politik yang memengaruhi, menurut Tryatmoko (2012) ialah pemerintah memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Aceh dan Papua dikarenakan persoalan politik. Otonomi khusus Papua lahir untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan masa lalu yang memunculkan sumber-sumber ketegangan dalam wujud ketimpangan di pelbagai sektor pembangunan, pelanggaran hak asasi manusia dan pengabaian hak dasar penduduk asal. Sementara itu, pemberian otonomi khusus kepada Aceh juga tidak jauh berbeda dengan latar belakang yang dialami oleh Papua. Dengan menggunakan terminologi yang lebih lugas, otonomi khusus Papua dan Aceh sebenarnya merupakan pilihan lunak yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat atas tuntutan separatisme masyarakat di sana yang mempersoalkan keadilan, kejelasan identitas, dan sejarah integrasi serta kelayakan hidup mereka.

Sehubungan dengan hal di atas, kebijakan yang diberikan kepada Aceh dan Papua, antara lain: (i) pemberian kewenangan yang lebih luas dalam bidang perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sosial, yang dititikberatkan di tingkat provinsi; (ii) Aceh dan Papua sama-sama diberi alokasi Dana Otsus dan dana bagi hasil SDA yang persentasenya sama; (iii) Aceh maupun Papua diberikan keleluasaan untuk mengekspresikan identitas lokal melalui lambang daerah dan penamaan lembaga-lembaga lokal; (iv) Aceh dan Papua memiliki hak untuk membentuk partai lokal; (v) kedua provinsi tersebut sama-sama memiliki otoritas membentuk lembaga perwakilan lain di samping DPRD, yang di Aceh disebut dengan Wali Nangroe sedangkan di Papua disebut Majelis Rakyat Papua. Kesamaan-kesamaan ini sebenarnya menunjukkan desain yang serupa, yang diatur oleh pemerintah nasional untuk melunakkan gerakan-gerakan separatisme di kedua provinsi tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan evaluasi pemanfaatan Dana Otsus di Aceh yang dilakukan oleh Kompak (2017) terdapat setidaknya 5 (lima) catatan berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan aparatur pemerintahan, antara lain: (i) pembagian antara Provinsi dan Kabupaten/kota, belum berbasis pemetaan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/kota; (ii) untuk 7 (tujuh) bidang yang didanai dengan Otsus, belum secara tegas ditentukan bidang apa yang ditangani oleh masing-masing satuan kerja pemerintah aceh; (iii) terdapat perbedaan persepsi saat menentukan kegiatan yang masuk kategori program/kegiatan bersama; (iv) proporsi penggunaan dana otsus perlu dikaji ulang khususnya terkait dengan kecilnya dana untuk pengentasan kemiskinan; (v) bidang infrastruktur paling mudah menentukan program/kegiatannya dan juga membagi kewenangan antara Provinsi dengan Kabupaten/kota, sehingga cenderung mendapat banyak alokasi.

Selain itu, berkaitan dengan pemanfaatan Dana Otsus di Papua dan Papua Barat, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kompak (2018), terdapat beberapa catatan yang terbagi dalam 3 (tiga) bidang utama berdasarkan FGD yang dilakukan dengan aparatur pemerintahan (Tabel 7), antara lain:

Tabel 7. *Catan Focus Group Discussion*

Sektor	Catatan
Pendidikan	• Diharapkan dalam pengalokasian dana otsus untuk pendidikan tidak ada intervensi politik dari kepala daerah secara khusus • Ketersediaan SDM pendidikan juga ditentukan dari kondisi geografis wilayah di Papua • Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga masih menjadi masalah untuk mendukung pendidikan di Papua • Dana Otsus diharapkan juga dapat mendukung rekrutmen guru untuk sekolah di wilayah pinggiran dan terpencil
Kesehatan	• Pembagian alokasi Dana Otsus masih sama rata antar daerah, belum disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah • Pelayanan kesehatan di beberapa wilayah di Papua membutuhkan pelayanan yang berbeda dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit • Dana Otsus untuk kesehatan belum sesuai dengan harapan di Papua dan Papua Barat, sehingga perlu perbaikan pengelolaan ke depannya
Infrastuktur	• Memerlukan kejelasan regulasi terkait alokasi Dana Otsus untuk infrastruktur dasar • Ketersediaan infrastruktur di Papua masih perlu ditingkatkan agar kenyamanan masyarakat cukup terjamin • Dana Otsus untuk infrastruktur belum sesuai dengan harapan di Papua dan Papua Barat, sehingga perlu perbaikan pengelolaan ke depannya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dampak otonomi khusus dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia tidak hanya terbatas pada analisa berdasarkan variable-varibel yang telah dijabarkan berdasarkan hasil analisa regresi. Dalam menentukan kebijakan otonomi khusus termasuk didalamnya dengan pengalokasian Dana Otsus, perlu dipertimbangkan adanya faktor-faktor sosial dan politik agar dapat menentukan bahwa pemberian Dana Otsus tersebut tepat sasaran dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta dapat memberikan hasil yang signifikan.

Kesimpulan

Upaya penurunan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan merupakan tujuan utama dari adanya SDGs yang merupakan kelanjutan dari MDGs. Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs telah berada dalam koridor yang tepat dalam rangka menurunkan kemiskinan yang dibuktikan dengan menurunnya persentase kemiskinan di Indonesia serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pemangku kepentingan, salah satunya kebijakan otonomi khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kebijakan Dana Otonomi Khusus secara signifikan menurunkan kemiskinan. Hal ini juga didukung dengan tren penurunan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Provinsi DIY. Namun demikian, meskipun terdapat tren penurunan kemiskinan Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Provinsi DIY tetap berada di tingkat terbawah dalam tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan Otonomi Khusus belum dapat berjalan dengan efektif dan membuahkan hasil.

Hal lainnya yang dapat dijadikan tolak ukur dari kebijakan Otonomi Khusus terhadap penurunan kemiskinan adalah kaitannya dengan ketimpangan pendapatan. Dalam penelitian dapat dipahami bahwa terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan antara DAU dan Dummy Otsus dengan Gini Ratio, hal tersebut sesuai dengan fakta yang ada saat ini dimana proyeksi ketimpangan pendapatan di Indonesia mengalami penurunan.

Saran

Sehubungan dengan telah dilakukannya penelitian, maka dipandang perlu untuk memberikan masukan sehingga hasil penelitian ini dapat menyempurnakan kebijakan yang telah ada atau merumuskan kebijakan yang baru terkait dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dalam pembuatan suatu kebijakan perlu ditelaah lebih lanjut tujuan atas dibuatnya suatu kebijakan

tersebut sehingga dapat ditentukan instrumen-instrumen yang tepat. Selain itu, dalam perumusan kebijakan, khususnya terhadap pemberian kebijakan Otonomi Khusus bagi daerah-daerah yang memperoleh otonomi khusus (dhi. Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) perlu dikaji kembali efektivitas dari pelaksanaannya untuk menghindari terjadinya faktor eksternal seperti faktor sosial dan politik yang dapat mempengaruhi penyerapan dana transfer dari otonomi khusus tersebut sehingga pemberian dana transfer kepada daerah yang memperoleh otonomi khusus akan lebih efektif serta tepat sasaran. Dalam hal lain, efektivitas penganggaran otonomi khusus sangat bergantung pada sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan, serta pengawasan yang kuat oleh DPR dan lembaga lain. DPR memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa dana otonomi khusus benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang memiliki kekhususan termasuk dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahl, R.W., & Linn, J. 1992. *Urban Public Finance in Developing Countries*. Oxford University Press.
- Crawford. James. 2006. *The Creation of States in International Law*. Second Edition. Oxford University.
- Sajogyo. 1996. *Garis Kemiskinan Dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi* (edisi kesembilan, jilid I). Jakarta: Erlangga.

Jurnal dan Working Paper

- Alvan, A. 2009. Forging a Link Between Human Development and Income Inequality: Cross-Country Evidence. *Review of Social, Economic & Business Studies*, 7(8), 31-43.
- Amaluddin, Rukmui W. Payapo, Abdul A. Laitupa, Mohammad R. Serang. 2018. A Modified Human Development Index and Poverty in the Villages of West Seram Regency, Maluku Province, Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(2), 325–330.
- Cristian F Sepulveda dan Jorge Martinez-Vazquez. 2011. The consequences of fiscal decentralization on poverty and income equality. *Environment and Planning C: Government and Policy 2011*, Vol. 29, 321-343.
- Cuong, N. V., 2011. Poverty projection using a small area estimation method: Evidence from Vietnam. *Journal of Comparative Economics*, 39(3), p. 368–382.
- Gramlich, E. (1993). A Policymaker's Guide to Fiscal Decentralization. *National Tax Journal*, 46(2), 229–235
- Hurst Hannum & Richard B. Lillich, The Concept of Autonomy in International Law, 74 AM. J. INT'L L. 858, 885 (1980).
- Katherine C. Theyson & Lauren R. Heller, 2015. Development and income inequality: A new specification of the Kuznets hypothesis. *Journal of Developing Areas*, Tennessee State University, College of Business, vol. 49(3), pages 103-118, July-Sepe.
- Mwiathi Peter Silas, Prof. Nelson H. W. Wawire dan Perez A. Onono Okelo. 2018. Effects of Fiscal Decentralization on Poverty Reduction in Kenya. *International Journal for Innovation Education and Research*.
- Prud'homme, R. (1995). The Dangers of Decentralization. *The World Bank Research Observer*, 10(2), 201–220.
- Sadler, B. 1996. *International Study of the Effectiveness of Environmental assessment – Final Report*. Environmental assessment in a changing world: Evaluating practice to improve performance. Ottawa: Canadian Environmental Assessment Agency.
- Siyan, Peter and Adegoriola, Adewale E. and Adolphus, James Ademola. 2016. *Unemployment and Inflation: Implication on Poverty Level in Nigeria*. Munich Personal RePEc Archive.
- Suzana Makreshanska-Mladenovska & Goran Petrevski. 2019. *Decentralisation and income inequality in Central and Eastern European countries. Post-Communit Economies*. Routledge Taylor & Francis Group.

- Tryatmoko, Mardyanto Wahyu. 2012. *Problem Demokratisasi Dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru. Masyarakat Indonesia Volumen 38. No.2*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- West, L. A., & Wong, C. P. W. 1995. Fiscal Decentralization and Growing Regional Disparities in Rural China: Some Evidence in the Provision of Social Services. *Oxford Review of Economic Policy*, 11(4), 70–84

Assessing Green Financing Opportunities and Challenges in Indonesia's Climate Mitigation and Adaptation Priority Sectors

(Menilai Peluang dan Tantangan Pembiayaan Hijau di Sektor Prioritas Mitigasi dan Adaptasi Iklim di Indonesia)

Lenny Hidayat¹, Michael Timothy Tasliman², dan Cholisa Amalia³

Greenwise Consulting, Jl. MH Thamrin Kav. 9, Menteng, Kota Jakarta Pusat, 10340, DKI Jakarta, Indonesia,

¹lennyhidayat@greenwise.co.id

²PT Surveyor Indonesia, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 56, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12950, DKI Jakarta, Indonesia,
mt.tasliman@ptsi.co.id

Naskah diterima: 4 Oktober 2024

Naskah direvisi: 13 Mei 2025

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2025

Abstract

Indonesia faces significant and unavoidable challenges due to climate change, including flooding, droughts, and sea-level rise, which disproportionately affect vulnerable coastal communities. This study assesses the opportunities and barriers for accessing green financing across four priority sectors: water and wastewater, renewable energy, Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU), and food security. Utilizing qualitative methods such as desk reviews, in-depth interviews, and focus group discussions, the research identifies critical drivers and obstacles across political, economic, social, technological, legal, and environmental dimensions through the PESTLE analysis framework. Additionally, an Impact Investment Matchmaking Model is applied to evaluate alignment between green financing goals and investor expectations, enhancing the identification of potential financing sources and partnerships. The findings reveal that the renewable energy sector has the greatest potential for attracting green investment due to its established business models and abundant resources. Conversely, the AFOLU and food sectors encounter significant barriers, including regulatory complexities, land acquisition challenges, and inefficiencies in food distribution systems. This study underscores the necessity of integrated policy frameworks and enhanced public-private partnerships to unlock green financing opportunities. By addressing these challenges, Indonesia can strengthen its climate mitigation and adaptation efforts, promoting sustainable development and resilience in its key sectors.

Keywords: green financing; climate mitigation; climate adaptation; priority sectors

Abstrak

Ancaman perubahan iklim semakin nyata dirasakan oleh Indonesia. Beberapa dampak termasuk banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut yang mempengaruhi aktivitas perekonomian, sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Studi ini melihat peluang dan tantangan dalam mengakses pembiayaan hijau di empat sektor prioritas: air dan air limbah, energi terbarukan, pertanian, pangan dan penggunaan lahan (AFOLU). Dengan menggunakan metode kualitatif seperti tinjauan pustaka, wawancara, dan diskusi kelompok terarah, penelitian ini mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat utama di dimensi politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan melalui analisis PESTLE. Selain itu, Model Pencocokan Investasi Berdampak diterapkan untuk mengevaluasi keselarasan antara tujuan pembiayaan hijau dan ekspektasi investor, sehingga dapat memperkuat identifikasi sumber pendanaan potensial dan kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor energi terbarukan memiliki potensi terbesar untuk menarik investasi hijau karena model bisnis yang mapan dan sumber daya melimpah. Sebaliknya, sektor AFOLU dan ketahanan pangan menghadapi hambatan signifikan, termasuk kompleksitas regulasi, tantangan dalam akuisisi lahan, dan ketidakefisienan dalam sistem distribusi pangan. Studi ini menekankan pentingnya kerangka kebijakan yang terintegrasi dan peningkatan kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk membuka peluang pembiayaan hijau. Dengan mengatasi tantangan ini, Indonesia dapat memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi iklimnya, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan ketahanan di sektor-sektor utama.

Kata kunci: pembiayaan hijau; mitigasi iklim; adaptasi iklim; sektor prioritas

INTRODUCTION

Despite the increasing exposure to different climate risks, Indonesia also experiences inadequate financial resources in facing the problem (The World Bank Group and Asia Development Bank, 2021). In the INFORM Risk, Indonesia has been positioned in the third cluster of nations most vulnerable to climate risks (47th out of 191) from flooding, dry seasons, and heatwaves (Inter-Agency Standing Committee and the European Commission, 2024). With Indonesia's 5th position as the largest coastal country in the world, the nation is highly vulnerable to the impacts of flooding and sea-level rise, especially for communities living in coastal zones, as well as for farmers and fishermen (Neumann et al., 2015). For illustration, up to 95% of Jakarta's coastal regions might be submerged due to sea-level rise by 2050 (The World Bank Group and Asia

Development Bank, 2021). Given that the majority of Indonesia's population lives in coastal regions, especially on the island of Java, numerous communities, particularly rural communities, are at an increased risk of climate change-related threats, including tidal surges and storms (Rudiarto et al., 2018).

Looking at future trends, the Government of Indonesia has started to take critical policy actions to lay the foundations for economic and social recovery to face the challenges of climate impacts. Several preventive initiatives prioritize green investment that boosts employment and financial benefits. For example, at the G20, Indonesia has pledged the retirement of coal power plants and has received strong support of an estimated US\$20 billion from the US and its allies for the Just Energy Transition Partnership (JETP) (Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia, 2022; Rosana, 2022). This proves that mobilizing green financing is key in the energy and other sectors' transitions.

To achieve the Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) targets, noteworthy reserves are required for financing climate actions. Based on the GCF Country Programme Document (CPD) of Indonesia updated in 2021, the planned financing to meet the unconditional target is Rp3,461 trillion (or US\$247.2 billion). Government spending on climate change was recorded at a total of Rp373,507 billion (or US\$26.68 billion) within the period of 2016-2019. With steady macroeconomic conditions, Indonesia's economic growth is anticipated to climb to 5.5% to 6.1% in 2024. Public and private partnerships are anticipated to continue driving the economy in the upcoming years. With global economic uncertainty, to meet the targeted green financing, more global resources should be accessed. The Green Climate Fund (GCF) is one of the largest climate change trust funds with an estimated commitment of US\$10.3 billion and it is expected to grow in the coming years. The fund is utilized for both adaptation and mitigation projects around the world (Dudi et al., 2021).

The latest study conducted by the NDA in 2023 prioritized five sectors: Forest and Land Use (FOLU), energy and transportation, Industrial Processes and Product Use (IPPU), waste, and agriculture. It is noted that FOLU, along with energy and transportation, are responsible for 97% of the total emissions reduction target. The latest study conducted by the NDA in 2023 added two more sectors: water and wastewater, and food (Secretariat NDA-GCF Indonesia, 2023). To seek opportunities for new ventures to build a green ecosystem in Indonesia, the authors, fully supported by the Fiscal Policy Agency (FPA), as the National Designated Authority (NDA) of GCF in Indonesia and the Global Green Growth Institute, have conducted a situation analysis in four priority sectors: (a) environmental services such as water and wastewater, (b) energy, (c) agriculture, forestry, and other land use (AFOLU), and (d) food. These priority sectors were selected based on findings from the GCF Readiness project, where the NDA's sector prioritization study for climate finance identified two sectors for mitigation—Energy, and Forest and Land Use (FOLU)—and two sectors for adaptation: food, and water.

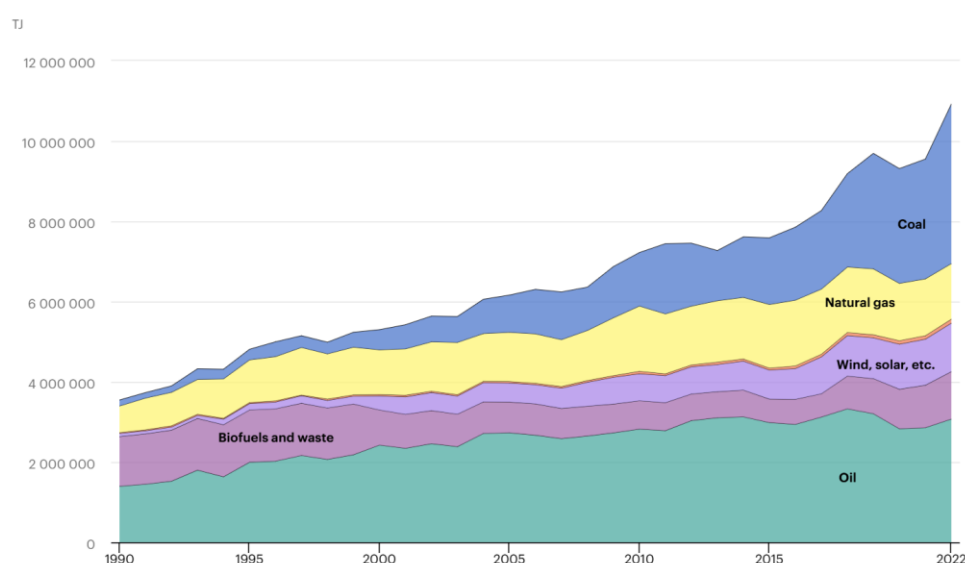
Environmental Services (Water and Wastewater): Climate modeling has shown an increase in water shortages in Indonesia over the following decades. Indonesia's report to the UNFCCC (2010) shows that 14% of its 453 districts have no months with a greater quantity of water compared to their needs. It is anticipated that this would rise to 20% by 2025 and 31% by 2050. The province of Nusa Tenggara Barat's study modeling future seasonal rainfall variations revealed important ramifications for the water industry. Crop water demand projections indicate that anticipated changes will affect the growing season for rice, which runs from November to March. It also indicates that there will probably not be enough water for the second growing season, which runs from March to June and is when tobacco and chilies are grown.

In addition to water scarcity, saltwater intrusion is an issue confronting Indonesia's coastal area. This is often experienced along Indonesia's coastline and is exacerbated by variables including land subsidence, sea-level rise, and groundwater overuse. Sea-level rise driven by climate change will likely result in greater saltwater intrusion over the following century (Secretariat NDA-GCF Indonesia, 2023). Thus, increasing access to clean water and the use of recycled water could become one of the main adaptation strategies to face imminent climate risks.

The water and wastewater sectors are central to climate action, economic growth, and health recovery. This sector is imperative to address to achieve other SDG areas. Annually, 115,000 children under five in Indonesia suffer from diarrhea because of untreated wastewater contaminating groundwater. More than 60% of diarrhea cases are caused by poor sanitation and poor quality of water. If this condition continues, the issue of 7 million stunted children in Indonesia will worsen, which could lead to an increase of 31% in post-neonatal mortality and 25% in child mortality annually.

The widespread problem in accessing clean water has hindered the national target to reduce stunting by 14% in 2024. A survey by UNICEF showed that families with no access to drinking water and sanitation have more than three times higher risks of stunting (UNICEF, 2023). Access to water and treated wastewater is vital to reduce stunting from 24.4% in 2021 to 14% by 2024 (Secretariat NDA-GCF Indonesia, 2023).

Renewable Energy: While the world is recovering from the pandemic period, Indonesia remains committed to prioritizing the advancement of renewable sources as a national priority toward decarbonization in the energy sector. As a country that has great potential supply of renewable energy as shown in **Figure 1**, as well as one of the largest coal and gas providers in Southeast Asia, Indonesia has ambitious plans to become one of the world's largest biofuel producers (International Energy Agency, 2024), and to cut emissions by around 32% on its own, or 43% with international support, surpassing the objectives set by the Paris Agreement (Sulaiman et al., 2022). ASEAN countries have set a regional target for each member. Indonesia has committed to achieving 25% of renewable energy in the power supply by 2030 (Simanjuntak, 2022).



Source: International Energy Agency, 2022.

Figure 1. Total Energy Supply (TES) by source, Indonesia 1990-2022

Indonesia launched the Just Energy Transition Partnership (JETP) with support from international funding sources during the G20 Summit in November 2022. In addition, G7 countries have also promised to provide US\$20 billion in funds to support Indonesia's early coal-fired plant retirement (Jong, 2022). At the same time, the Asian Development Bank (ADB) incorporates climate change adaptation and mitigation measures into its infrastructure investments and assists Indonesia's nationally set contribution goal of 23% renewable energy production by 2025. These strong commitments and foreign investments signal Indonesia's high potential in both solar photovoltaic and wind assets, which can be utilized on a gigantic scale (International Energy Agency, 2024). To achieve this goal, Indonesia is at a crossroads in fulfilling the domestic power supply with reasonably priced energy and cutting-edge technology. Take the smart grid, for example: this technology allows for reasonably priced energy by balancing with the current business model of the national power supply.

Nature-Based Solution (Agriculture, Forest, and Other Land Use): Indonesia is one of the world's most biodiverse countries because of its vast tropical rainforests. Nevertheless, these carbon-rich woodlands are threatened by deforestation and degradation (including peatlands), mainly due to agribusiness advances (palm oil plantations and illegal logging, for example), which have impeded efforts to mitigate and adapt to climate change. It is estimated that from 2001 to 2021, Indonesia's deforestation loss reached over 28 million hectares of tree cover – a size larger than Java Island (Leiserowitz et al., 2023; Global Forest Watch, 2023).

Degradation and deforestation of mangroves, in particular, were responsible for 10% of the country's overall forestry-related emissions, despite the fact that mangroves only make up 2.6% of Indonesia's forested area. The forest fires across Indonesia in 2018 (primarily among peatlands) emitted twice the amount of carbon pollution discharged by fires in the Amazon in the same year. It is noted that the Indonesian fires released at least 708 million tons of carbon dioxide equivalent (CO₂e) into the atmosphere (Jong, 2019). To address these issues, the Indonesian government has issued several policies, e.g. the moratorium on new permits for primary natural forest and peatland utilization (Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia, 2019; Republic of Indonesia, 2019), and expanded the conservation area of forests and peatlands through the project called Sustainable Management of Peatland Ecosystems in Indonesia (SMPEI) (Ministry of Environment and Forestry, 2023). In 2015, President Jokowi initiated a social ranger service program to monitor 12.7 million hectares of forests. The activity incorporates land rezoning, capacity building, and upgrading the supply chain for employment (The World Bank, 2021). However, the regulation on the Provision of Forest Area for Food Estates in 2020 has driven up the deforestation rate in Indonesia, contradicting government commitments such as the Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) targets and Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 (Wihardja et al., 2023).

As for other land use, one-third of Indonesia's 192 million hectares of land area is used for agriculture. Between 2014 and 2018, Indonesia's agriculture expansion was the second highest in Southeast Asia, after Vietnam. However, Indonesian food production is very rice-and-palm-oil-centric compared to, for example, China, which has much more diversified food crops in its agriculture sector (Wihardja et al., 2023). Meanwhile, it is known that rice and palm oil production have significant climate implications due to their contributions to carbon emissions, deforestation, and land-use change (Booth, 2017; Kumar & Kumar, 2022).

Looking at the aforementioned policies, business-as-usual (BaU) strategies to improve agro-food systems in Indonesia are no longer sustainable nor effective. Agro-food systems have been both a contributor to and a victim of climate change. Indonesia's ambitious target of net-zero carbon emissions by 2060 will be unachievable without more sustainable agricultural practices and improved efficiency along the food value chain (Wihardja et al., 2023).

Food: Indonesia's agriculture and food security are at very high risk due to climate change effects. The areas of East and West Nusa Tenggara, which are prone to drought, are the most at risk from food insecurity. For example, rice production, the main staple food in Indonesia, is sensitive to fluctuations in the onset and duration of the rainy season. El Niño events affect rice production by delaying precipitation and increasing the likelihood of annual rice shortages, and these events are anticipated to become more frequent due to climate change (The World Bank Group and Asian Development Bank, 2021).

Based on a Bappenas study in 2021, Indonesia experienced inefficiency in its food system due to food waste across the entire food supply chain, from planting to post-consumption. This has placed Indonesia as the second largest food loss and food waste-producing country in the world, at 300 kilograms per capita per year, which amounts to 5 to 19 million tons of food wasted annually (Bappenas - Ministry of National Development Planning, 2021). Thus, there is a gap where demand is insufficient, but at the same time, available supply is wasted. If Indonesia could anticipate food waste from the beginning, more just and equitable access to food security might be achieved.

Based on the facts in these four targeted sectors, this work aims to identify drivers and barriers in each sector for developing and accessing green financing, as well as identifying the prospective sector to access green financing. The main aim is to enhance public-private partnerships in financing, supporting, and implementing climate actions. At the same time, the Indonesian Parliament holds a unique position of power through its legislative, budgetary, and oversight functions. Enacting and endorsing laws such as the Financial Sector Development Law (UU PPSK) and pushing for the long-awaited Renewable Energy Bill (RUU EBT) represent key parliamentary actions that can catalyze investor confidence and unlock sustainable financing flows. Moreover, Parliament's commitment to integrating climate objectives into the state budget and monitoring green financial instruments such as green sukuk underscores its pivotal role in enhancing public-private collaboration.

METHODS

This study uses qualitative methodology with several data collection methods, such as desk reviews, in-depth interviews, and focus group discussions. In this study, the authors aim to comprehensively analyze the drivers and barriers in each targeted sector in efforts to access green financing. The information gathered from a sample of respondents, including private companies, investors, associations, and government entities, was further analyzed using the Impact Investment Matchmaking Model framework combined with PESTLE analysis.

The findings are synthesized with results from in-depth interviews with key actors, including private investors and financiers, to provide a real picture of the actual situation in each sector. The final research has been triangulated with focus group discussions attended by targeted respondents and resource persons. In selecting the resource persons for in-depth interviews, the authors used purposive sampling from an existing network. This sampling method was chosen because of the limited time frame and specific criteria. For private sector participants, the authors chose companies that are interested in or currently in the process of accessing green financing. For financial institutions and private investors, the authors looked for impact investors or other financiers that have green financing facilities, such as sustainability-linked loans. Due to the resource and time constraints, the total number of companies, organizations and institutions that participated as resource persons is 20. As a general guideline for interviews, **Table 1** shows the list of baseline questions for each in-depth interview.

Table 1. List of Questions for In-Depth Interviews

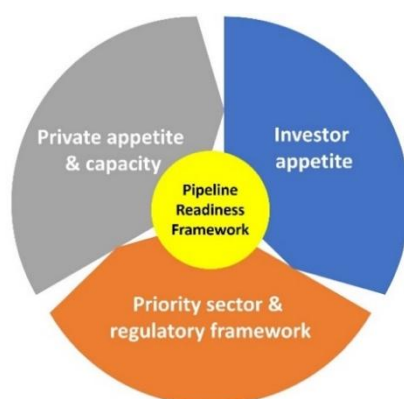
Type of Entity	Questions		
Private Sector	Investment Needs		
	• Could you please share the nature of business of your company? • Market size of your sector? • Have you ever heard about green financing, especially green climate funds? Source of information? • From scale 1-10, how urgent is this funding potential for your business? • What is the business plan for the investment? • What is the range of investment sizes you are looking for? What instruments do you intend to seek? Do you seek a joint venture or just a loan? Or blended finance? • Could you please share your near future business plan or green projects?		
	Readiness (PESTLE)		
	<table><tr><td>Project acquisition</td><td> • Location • Size • Potential emission reduction • Impact </td></tr></table>	Project acquisition	• Location • Size • Potential emission reduction • Impact
	Project acquisition	• Location • Size • Potential emission reduction • Impact	
<table><tr><td>Political & Stakeholder Mapping</td><td> • Is current legislation supporting the project and or investment? • How many stakeholders are involved in the project? </td></tr></table>	Political & Stakeholder Mapping	• Is current legislation supporting the project and or investment? • How many stakeholders are involved in the project?	
Political & Stakeholder Mapping	• Is current legislation supporting the project and or investment? • How many stakeholders are involved in the project?		
<table><tr><td>Economy</td><td> • Potential IRR • Financial model • Investment team or outsource? • If it is a joint venture, what is the composition offered to investors • What if there is a loan from a different exchange rate? If there is foreign ownership, is your company open/not to this? • If there is blended finance such as equity and loans, is it possible with the current resources? </td></tr></table>	Economy	• Potential IRR • Financial model • Investment team or outsource? • If it is a joint venture, what is the composition offered to investors • What if there is a loan from a different exchange rate? If there is foreign ownership, is your company open/not to this? • If there is blended finance such as equity and loans, is it possible with the current resources?	
Economy	• Potential IRR • Financial model • Investment team or outsource? • If it is a joint venture, what is the composition offered to investors • What if there is a loan from a different exchange rate? If there is foreign ownership, is your company open/not to this? • If there is blended finance such as equity and loans, is it possible with the current resources?		

Type of Entity	Questions
	Technological • Engineering plan • Plant/specific technology used • Business process flowchart
	Legal • Do you have 100% ownership towards the project or location? Project Permit? • Do you have any in-house or partner with an agency or consultant? • For negotiation or deal with investors?
	Environmental • In which process does your business emit carbon? Estimated total carbon footprint from the business? • How do you handle the risk? In house HSE, certification, etc? • Do you have any in-house sustainability team? Or an interested partner with a consulting team? • Do you have sustainability reporting? Are you planning to have it? • Do you adopt any ESG related document/policy/sop? • Are you interested in carbon offset?
	Engagement • In what way and channel did you hear about green financing? • What are the regulatory supports and barriers to green financing for the private sector? • Have you ever been invited before into an investment matchmaking event? • Usually how do you seek potential investment? • In what way do you think best to invite the private owner to come? • What are the annual important events in the sector that you or most of the players in the sector attend? • What type of incentive do you think is best to attract private? ○ Tax ○ Grant for proposal and feasibility? ○ Concession
Investors & Special Mission Vehicles (SMVs)	Project Acquisition • Currently, do you have any active projects for climate change in Indonesia? ○ If yes, what makes the project stand out? How did you acquire the project? Were there any issues during the acquisition process? ○ If not, what are your hurdles in acquiring projects in Indonesia? Was it the lack of interest, inadequate engagement process, too small ticket size, or others? • How long does the project acquisition usually take, from Technical Assistance (TA) request until the start of the project? • If there are some aspects of the project that do not meet the fund's criteria, would they be given another chance to revise their proposal? Would you provide feedback on what to improve?
	PESTLE
	Political • Is current legislation supporting the project and or investment? • How many stakeholders are involved in the project? • Economy
	Economy • What are the drivers and barriers in the economy? • In what way do you think the economic incentive and disincentive can improve private engagement? • Based on your experience, what are the lessons learned and good/best practices in engaging the private sector?

Type of Entity	Questions
	Social - What are the drivers and barriers in society? - In what way do you think the economic incentive and disincentive can improve private engagement?
	Technology - Do you have any preference or barriers regarding technology used in your pipeline? - Has your pipeline ever had any issue in deploying their technology?
	Legal - Have you ever had any legal issues in the country that you invested in? - Based on your experience, what are the lessons learned and good/best practices in engaging the private sector?
	Environmental - How do you ensure all portfolios adhere to ESG impact? - Do you have an in-house ESMS system to monitor? - How do you measure impact? What is the role of the investee?
	Capacity Building - How do you ensure the investee is ready to take on? Do you have a capacity building program? Do you have incentive mechanism ie. development fund to attract private funds? Example of success? - If the entity could not make a proposal or case, what will you do to help them?
	Engagement - In what way do you think is best to engage the privates, word of mouth, one-on-one, workshop matchmaking, seminar, other ways? - In what way can private individuals attract your attention to help their business? - Have you ever hosted any investment matchmaking events in Indonesia before? What was the response like from the private sector?
	Criteria - How many programs can be accessed by private? - What are the criteria for accessing investment? - Sector? - Ticket size? - Instruments? - Stage? - Impact? - Current size of portfolio?
Business Associations	Relevance - What is the nature of your association? - What sectors are thriving in your association? percentage export import? - From scale 1-10, how do you see the importance of ESG practice for the members? - From scale 1-10, how do you see the importance of green financing to the members? - Does the Association especially [name association] have a database of companies that require funding? - Which sector currently requires the most funding?
	Engagement

Type of Entity	Questions
	• In the last one year, how many times has the exposure of green financing come across your association path? Which entity has the most active part in promoting green financing? govt/financiers/investor? • What is the Association's engagement strategy towards companies, especially in the private sector, in accessing green financing? • What are the gaps in the way private engagement in accessing green financing? • Does the Association have a special approach to companies in accessing green financing? • What incentives will attract private citizens to work extra miles to access green financing? • Does [name association] have an ESG unit or standard used or mainstreamed to the members? • What types of cooperation do you have currently to increase the capacity of members? Which annual event embraces the overall members?
Supervisory Bodies	General • What are the policies that have supported green investing? • What is the plan to instill and make the market demand more ESG Driven? • What do you think is the best strategy to involve the private? Financing • OJK plays a very important role in the green financing ecosystem in Indonesia. What are the pathways to make the green financing ecosystem in Indonesia thriving? • What are the incentive and disincentive instruments that OJK could use to make it mandatory? • What policy instruments can be seen to encourage the acceleration of private contributions further?

Impact Investment Matchmaking Model Framework: This framework is designed to connect investors interested in making impact investments with projects or companies seeking funding for initiatives that deliver both financial returns and positive social or environmental impacts. Investors are categorized based on their specific interests, risk tolerance, desired impact outcomes (e.g., environmental sustainability, social equity), and financial return expectations, while projects or companies are assessed and categorized based on their impact goals, sector, geographical focus, and funding needs. In this study, the aim of this framework is to analyze the gap between investors' requirements and the private sector's appetite. The framework is illustrated as shown in **Figure 2**.



Source: Greenwise Consulting, 2024.

Figure 2. Proposed Impact Investment Matchmaking Model Framework

PESTLE Analysis. This method is used to measure readiness for green financing opportunities in each sector. PESTLE identifies drivers and barriers from six main aspects – Political, Economic, Social, Technology, Legal, and Environmental – that are crucial in impact investing. The PESTLE method is highly relevant due to its prevailing use in the green financing due diligence stage, infrastructure feasibility studies, as well as stakeholder mapping in the ESG sphere.

The findings are synthesized with results from in-depth interviews with key actors, including private investors and financiers, to provide a real picture of the actual situation in each sector. The final research has been triangulated with focus group discussions (FGDs) attended by targeted respondents and resource persons. The scope of this study focuses on the selected sectors from the prioritization study rather than the sectors in CPD.

This study has several limitations due to time and resource constraints. In terms of the scope of the study: a) green financing is defined broadly, not specific to one platform or program; b) the effects of external factors on the private sector are not included within the scope of the study, i.e., political and economic conditions influencing the readiness of the private sector; c) the legal analysis does not involve a regulatory impact assessment. In terms of methodology, the limitations include: a) the interviews were conducted online based on the Board of Directors and/or management statements, and the readiness assessment did not involve an actual Organization Capacity Assessment (OCA) for each private entity; b) the selection of respondents was purposive, using a snowball method within limited time, thus the selection was based on the existing network and limited in number and size.

In terms of the PESTLE Analysis, there are advantages to using the framework, such as facilitating a broader understanding of the wider business environment, encouraging strategic thinking, enabling anticipation of business threats, minimizing impact, and identifying business opportunities. However, there are also limitations, such as oversimplifying complex issues and not coping well with fast-paced changes. The best way to use the tool is to conduct assessments on a regular basis with consistent data collection.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Water

Overall, in the water sector, there are potentially four drivers in political, economic, technological, and environmental, and five barriers in political, legal, economic, social, and environmental to access green financing. Even so, based on in-depth interviews and FGDs, the drivers still outweigh the barriers as they could be solved through impact investing to de-risk the tariff, continuous advocacy to the government, and public campaigns.

The major barriers in the sector are the low public water tariff (economic) and low willingness to pay (social). Public water tariff is still perceived as the government's obligation to keep it as minimum as possible with subsidy. This situation has caused the public water sector to be not bankable and became a barrier for private companies to enter the market. Findings on PESTLE in the Water Sector are listed in Table 2.

Table 2. PESTLE in Water Sector

PESTLE	FINDINGS
Political	Driver Water has become a priority sector in climate adaptation, and access to water has yet put as an urgent national priority.
	Barrier • Lack of infrastructure development at the local level i.e piping. • Pricing policy.
Legal	Barrier • Distribution is under the sole authority of PDAM, so synchronization with PDAM needs to be more intensive and requires more time. • State-Owned Enterprises (SOEs) are prohibited to access green financing unless approved by shareholders (local government), which takes a long period of time. • PPP takes long time to implement (> 20 years).
Economic	Driver • Water sector is a lucrative business in long term. • Water is urgently needed in commercial industries. • Water is the basis of all infrastructure and zone development.
	Barrier For coastal areas, Seawater Reverse Osmosis (SWRO) seen as expensive.

PESTLE	FINDINGS
Social	Barrier • Water is seen as a public commodity. • Water is perceived as a public service, so it has to be cheap. • Lack of skilled workforce to produce frontier technology in the sector.
Environmental	Driver • The urgent need to use clean water as a basic need has urged more industries to have water reservoirs. • Sustainable reporting and ESG awards appreciate actors who use or have water treatment plants. Barrier Large scale water projects, i.e., large water dam and SWRO, have environmental externalities with high risks.
Technological	Driver The use of IoT and software to ensure the accuracy of clean water. Barrier Players see technology as expensive and only want to use it if there is an investor or other de-risking financial instruments.

The political landscape significantly influences the water sector in Indonesia, with the Government of Indonesia (GOI) aiming to achieve 100% access to drinking water supply by 2024, as outlined in the National Medium-Term Plan (RPJMN) 2020-2024. To achieve this target, an estimated Rp253.8 trillion (US\$16 billion) is required for developing the water supply system. Additionally, in 2018, the GOI allocated Rp16 trillion (US\$1.163 billion) to improve sanitation, which includes managing wastewater for 853,000 family units and constructing clean water and treatment plants (International Energy Agency, 2024). This demonstrates a strong political commitment to prioritizing water policy and budgeting. However, there are notable gaps in policies, particularly regarding pricing and infrastructure, which hinder efficient water distribution to remote areas. Public water pricing significantly influences market prices, which are heavily subsidized, while the political process within the Regional Legislative Council often deviates from practical business considerations. This misalignment has resulted in several failed tender processes for the private sector due to incompatible pricing schemes, particularly in municipal water treatment plants. Furthermore, the reluctance of private investors to provide services in these areas stems from lengthy bureaucratic processes required for implementing Public-Private Partnerships (PPP).

From an economic perspective, Southeast Asia's water and wastewater treatment market is projected to reach US\$5 billion by 2024, with Indonesia identified as a key player due to its significant economy. Failure to address issues within the WASH sector could lead to economic losses of up to Rp56 trillion (US\$6.3 billion), approximately 2% of the country's GDP, primarily impacting the health and water resource sectors (The World Bank Group and Asian Development Bank, 2021). Despite the water and energy sectors being at similar maturity levels, pricing remains a major barrier to investment. An interview with the regional-owned enterprise (Perusahaan Umum Daerah/Perumda), PAL Jakarta, highlighted a stark contrast between public and private water prices, with 98% of annual revenue coming from just 25% of commercial customers, emphasizing a preference for private business models over public-private partnerships. This disparity discourages private sector interest, particularly when public tenders fail to attract investment due to unfeasible pricing (Rayda, 2022).

Socially, water is perceived as a public commodity that should be subsidized, leading to a lack of willingness to pay more for communal facilities. For instance, a class-action lawsuit in 2017 led by Jakarta citizens resulted in public agencies resuming control over water services, but inadequate service coverage and poor quality have driven increased groundwater usage, contributing to rapid land subsidence (Charmila, 2017; Mayuri et al., 2018). Furthermore, despite an increase in purchasing power, willingness to pay for water tariffs remains low, with surveys indicating that many households prefer to pay below Rp100,000 per month for clean water (Arista et al., 2024; Rizani et al., 2023; Rayda, 2022).

Wastewater

Overall, in the wastewater sub-sector, there are potentially four drivers in economic, technological, legal, and environmental, and five barriers in most aspects except technological. However, looking into the nature of the drivers and barriers, the barriers are still workable as the players in the sub-sector stated that they could be tackled by involving impact investing to de-risk the long-term business model.

The most prominent barriers in the sector are similar to those in the water sector, such as the public water tariff and lack of priority for wastewater. Thus, most industrial and settlement developers will not build the facility if it is not mandatory. The overall findings on PESTLE in the Wastewater Sector are listed in Table 3.

Table 3. PESTLE in Wastewater Sector

PESTLE	FINDINGS
Political	Barrier - Wastewater has not become a priority sector in national planning. - Adjust pricing policy so that all wastewater projects become bankable.
Legal	Driver The Ministry of Health has put wastewater treatment plants as mandatory for certain sectors. Barrier Public Private Partnership (PPP) takes long time to implement (likely more than 20 years).
Economic	Driver - Wastewater business is steady in the long term. - Wastewater could contribute 20-30% cost efficiency. Barrier - Wastewater is not directly seen as urgent needs in commercial industries if not mandatory. - Wastewater treatment plant is not seen important in infrastructure and zone development.
Social	Barrier - Wastewater is seen as a tertiary need for domestic use, and if not mandatory, commercial entities will not use it. - Wastewater is perceived as the responsibility of the commercial sector only, not domestic.
Environmental	Driver - Sparing KLHK has made wastewater treatment as mandatory for certain sectors. - Sustainable reporting and ESG awards identify wastewater usage as a plus. Barrier Large scale wastewater project has environmental externalities with medium to high risk materiality.
Technological	Driver - The use of IoT and software to ensure the accuracy of environment indicators. - More efficient and lean wastewater treatment technology is available in Indonesia.

In Indonesia, wastewater treatment plants (WWTP) are critically needed, particularly in urban areas where untreated household wastewater, including blackwater and greywater, leads to significant groundwater and surface water contamination (Naufal & Ihsanuddin, 2022). Although the total volume of wastewater in urban areas reaches approximately 14.3 km³ per year, the treatment capacity is only 0.3 km³ per year, revealing a substantial gap. Unfortunately, there is no clear incentive or penalty system in place to encourage household wastewater treatment. Legally, WWTPs are regulated by several government frameworks, such as Government Regulation Number 82 of 2001 on Water Quality Management and Pollution Control, as well as the 2023 Ministry of Health Decree on Clean Water Standards. While these regulations drive the WWTP market, slow bureaucratic processes, such as those seen in Public-Private

Partnership (PPP) projects in Jakarta, hinder timely development (Widyarani et al., 2022; The World Bank Group and Asian Development Bank, 2021).

Economically, the global water and wastewater market is projected to reach \$956.48 billion by 2032 (UNICEF, 2021), with significant growth potential in Indonesia due to the development of the new capital city and industrial sectors, particularly in Kalimantan and Sulawesi. Public willingness to pay for clean water is higher than for wastewater treatment, especially in rural areas. On the environmental front, monitoring systems such as SPARING and the PROPER Award encourage compliance in wastewater treatment. Technologically, WWTP solutions are becoming more efficient, with the use of IoT improving water quality by up to 97.98%. However, WWTP technology for domestic use remains expensive, necessitating further research into more affordable alternatives (Kumar & Hong, 2022; Firdayati et al., 2015).

Renewable Energy

In the renewable energy sector, there are potentially five key drivers across most aspects, with the exception of social factors, and barriers present in all areas. Environmental drivers, for instance, highlight the abundance of natural resources available for renewable energy. However, the sector still faces significant challenges, such as high perceived costs, inadequate infrastructure, and limited human capital, all of which hinder the development of sustainable business models. These barriers underscore the complexity of achieving a smooth transition, even in the presence of strong environmental potential. The overall findings on PESTLE in the Renewable Energy Sector are listed in **Table 4**.

Table 4. PESTLE in Renewable Energy Sector

PESTLE	FINDINGS
Political	Driver Energy transition has gained momentum since G-20 and COP 28 in 2023.
	Barrier • The carbon trading market has received less market attention. • The current regulation has limited coverage to cover the country's transition roadmap. • Several task forces create redundancy and confusion for the private sector to contribute. • Unclear implementation of renewable energy policy.
Legal	Driver Presidential Regulation Number 112 of 2022 on Acceleration of Renewable Energy Development to Provide Electrical Energy.
	Barrier • Need and end-to-end Presidential Regulation to regulate interministerial decrees on the energy transition roadmap to give market certainty. • Energy conservation has been regulated in Presidential Regulation Number 33 of 2023 on Energy Conservation, but it only regulates incentives and disincentives without penalties/sanctions, which does not put high levels of urgency.
Economic	Driver • Energy has the most steady and clear business model. • Financiers and investors have common interest in the sector.
	Barrier The average breakeven point for investment is around 8-10 years, or even more.
Social	Barrier As public goods, the willingness to pay for higher electricity price is still low and makes renewable energy projects less bankable.
Environmental	Driver Renewable energy supply from nature is abundant.
	Barrier More research needs to be done to find the right business model. Renewable energy is still seen as more expensive than fossil fuel due to lack of infrastructure, supply chain, and human capital.

PESTLE	FINDINGS
Technological	Driver More research and new technologies to create energy have provided alternative solutions.
	Barrier The development of the interconnected grid took time to accommodate different types of renewable energy.

In 2022, the Indonesian government showcased its political commitment to energy sector transformation through national strategic documents and ministerial regulations, such as Energy Law Number 30 of 2007 and the National Energy Policy (KEN) (Yudha & Tjahjono, 2019). The Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance outlined a strategic pathway for energy transition, focusing on four major strategies: (1) a fair and just energy transition investment plan; (2) the early retirement of coal power plants; (3) a “just transition” to compensate for losses during the early retirement phases; and (4) increasing renewable energy (RE) supply and project development (Yudha & Tjahjono, 2019). Despite these initiatives, stakeholders emphasize the need for an overarching Presidential Regulation to guide energy transition plans, as reliance solely on PLN's National Energy Power Plan (RUPTL) does not provide sufficient certainty for investors (JDIH Marves, 2023; Government of Indonesia, 2023). The introduction of a targeted carbon tax is essential to diminish the competitive advantage of fossil energy products and facilitate a more integrated clean energy ecosystem (Yudha & Tjahjono, 2019).

Economically, the RE sector possesses a promising business model due to clear policies and fiscal incentives; however, challenges persist due to heavily subsidized sectors and unclear pricing mechanisms that deter investment in newer technologies (Yudha & Tjahjono, 2019). The social aspect is driven by employment opportunities, with the RE sector expected to create approximately 3 million jobs in Indonesia by 2050 (IESR, 2021; Muhammad, 2023). To shift public perception of RE as more expensive than traditional technologies, more fiscal policies and clearer carbon tax policies are needed to increase the value of Certified Emission Reductions (CER) (Muhammad, 2023). Furthermore, as noted by the International Labour Organization (ILO), the transition to renewable energy can significantly contribute to job creation (ILO, 2022). Environmentally, not all energy sources can be classified as renewable, with large hydropower plants facing high-risk classifications despite afforestation programs (Yudha & Tjahjono, 2019). Strategies such as decentralized power supply models are necessary to minimize environmental harm, but further research funding is essential for these projects to become bankable and scalable (IESR, 2021).

Nature-Based Solution (Agriculture, Forest, and Other Land Use)

The Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU) sector in Indonesia faces a complex mix of drivers and barriers that influence its sustainability and climate change mitigation potential. Politically, the sector benefits from strong governmental support through various subsidies and policies, such as those promoting carbon trading. These initiatives help position the sector as having substantial value. However, certain policies, particularly those related to fertilizers, have had counterproductive effects, creating challenges rather than solutions.

On the legal front, regulatory measures pose significant barriers. For instance, the Ministry of Environment and Forestry's Regulation Number 24 of 2020, which allows for the conversion of forest areas and peatlands for food estate programs, raises concerns about environmental degradation. Land acquisition continues to be a major hurdle for sectoral expansion, while the verification process for carbon under Nature-Based Solutions (NBS) remains prohibitively expensive, limiting widespread adoption. The overall findings on PESTLE in the Nature-Based Solution Sector are listed in **Table 5**.

Table 5. PESTLE in Nature-Based Solution

PESTLE	FINDINGS
Political	Driver • The sector is supported by strong political commitment with many subsidies and policies. • Carbon trading policy has urged the AFOLU sector to have more potential value. Barrier Several policies, such as those related to fertilizers, have caused counterproductive effects.
Legal	Barrier • The issuance of the Ministry of Environment and Forestry Regulation Number 24 of 2020 on the Provision of Forest Area for Food Estates allows the conversion of forest areas and peatlands for food estate programs in Kalimantan, Sulawesi, and Papua. • Land acquisition has become the main barrier in the sector. • Verifying carbon for NBS is expensive.
Economic	Barrier Agriculture has expensive costs due to inappropriate subsidies, long supply chains, and lack of human capital.
Social	Barrier • Human capital to manage the NBS is still rare. • Indonesia has not provided sufficient education for farmers on mitigation or adaptation to climate change, despite the fact that climate change affects crop production.
Environmental	Barrier Excessive use of fertilizers, triggered by subsidies, causes water pollution, soil degradation, and nitrous oxide emissions.
Technological	Driver Many smart farming and agroforestry monitoring technologies are available in the market. Barrier New technology is costly and requires highly paid talent to operate and maintain.

President Jokowi has consistently promoted self-reliance in the agriculture sector; however, this approach has been marked by controversial policies that contradict this very notion. According to World Bank data from 2021, the GOI provided the highest level of fertilizer subsidy to the agriculture sector, amounting to Rp25.27 trillion (US\$1.68 billion) (The World Bank, 2020). Additionally, agricultural support has mainly taken the form of market price supports, such as fixed prices and trade barriers, and direct subsidies, like fertilizers and seeds, with a focus on rice production (Anitasari, 2019). This emphasis has neglected essential public goods, including rural and urban infrastructure and post-harvest technologies to reduce food losses (Utomo & Pieter, 2022). Consequently, these policies have resulted in agricultural production losses, leading Indonesia to rely heavily on imports, which highlights a significant gap in the effectiveness of current agricultural policies.

Historically, agricultural land policy in Indonesia has undergone several changes influenced by both internal and external politics. Internal influences span from guided democracy to the reform period, while external factors stem from the green revolution's political landscape, which impacted many Asian countries (Anitasari, 2019). Notably, the Presidential Regulation Number 59 of 2019 concerning Control over Conversion of Rice Fields Function provides incentives for farmers through assistance such as agricultural facilities, infrastructure, and land certification. However, this regulation lacks necessary environmental and social safeguards (Utomo & Pieter, 2022). Moreover, government regulations intended to address agricultural sector issues often have competing goals that render them counterproductive. For instance, biofuel regulations that mix fossil fuel with palm oil waste have contributed to accelerated deforestation, while initiatives aimed at enhancing food security, such as food estates, have faltered (Anitasari, 2019). In summary, the political commitment remains insufficient to meet farmers' needs, especially in mitigating

the unpredictable harvest outcomes driven by climate change, indicating a need for a more integrated and farmer-centric policy approach (The World Bank, 2020).

Food

In the food sector, there are potentially four drivers in political, economic, social and technological, and barriers are present in all areas. The Indonesian food sector faces both opportunities and challenges across various dimensions. Politically, the government shows strong support through subsidies and policies. However, food waste poses a significant threat, adding pressure to the environment. The overall findings on PESTLE in the Food Sector are listed in **Table 6**.

Table 6. PESTLE in Food Sector

PESTLE	FINDINGS
Political	Driver High commitment from the government with many subsidies and policies.
	Barrier • The sector for basic commodities still has competition problems. • The main six commodities such as rice, sugar, shallot, beef, chili, still experience high distribution costs and high consumer prices.
Legal	Barrier Competition regulations still need to be fixed to create more competitive prices with the right supporting policies.
Economic	Driver Food is one of the largest economies in Indonesia with a strong business model.
	Barrier Inefficient supply chains have an expensive effect on costs, since lower production costs will not necessarily lower prices, and vice versa, the rise of prices will not directly benefit the producers.
Social	Driver The food sector has the largest workforce in Indonesia.
	Barrier Child labour and weak human rights based in the food manufacturing sector.
Environmental	Barrier Food waste still becomes the biggest problem for the environment that could give the biggest pressure for the environment.
Technological	Driver Many smart factories and Green IoT monitoring are available in the market.
	Barrier Lack of human capital to adopt newer technologies.

In the third quarter of 2022, Indonesia's food industry contributed 37.82% to the GDP of the non-oil and gas processing sector, making it a significant economic force (Raturaya, 2023). The agricultural, forestry, fisheries, and food sectors are highly labor-intensive, employing over 40 million people, or 28.21% of the national workforce as of August 2023 (Muhamad, 2023). However, inefficiencies persist in the market structure of basic commodities like rice, sugar, and beef, where too many intermediaries drive up distribution costs and consumer prices. To address this, the government has been urged to improve infrastructure and regulations to make the sector more attractive to investors. In 2024, the national food security budget increased by 10%, with priorities including irrigation projects and new dams aimed at boosting rice, corn, and soybean production. Nonetheless, policies such as encouraging imports during harvest seasons have negatively impacted local prices, as seen with annual rice imports of around 20 million tons between 2014 and 2019 (Rozaki, 2020). A balanced approach is needed to address both demand and productivity, with concerns raised about the scalability of innovative local products like purple rice and sustainable processed foods.

Indonesia's food sector is regulated by Law Number 18 of 2012 concerning Food and Government Regulation Number 17 of 2015 concerning Food Security and Nutrition, both of which encourage food diversification. However, derivative policies remain overly focused on rice due to concerns over shortages. The sector is heavily regulated, requiring numerous permits, such as those from the Indonesia Food and Drug Authority (BPOM) and Halal certification, which present particular challenges for SMEs. The lengthy permit process, which can take 1-2 years, delays product development and increases costs. To assist businesses, the Indonesian Chamber of Commerce Trading House (KADIN) offers technical support to help navigate complex certification processes, especially for markets like Australia and Europe, which have high standards for food health and environmental, social, and governance (ESG) compliance. However, regulatory socialization has been insufficient, as seen with the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) in 2021, leading to confusion and operational disruptions in some companies (Wihardja et al., 2023). Despite these challenges, the sector has strong potential for growth, supported by increasing investments in post-harvest logistics and technological advancements, which are essential for improving efficiency and sustainability.

CONCLUSION

Accessing green financing is largely driven by supportive policies and regulations that foster a stable market, with clear political direction, price policies, and consistent demand being key elements. Among the sectors, renewable energy has the strongest drivers due to its well-established business model and abundant renewable resources, followed by the food and water sectors. In contrast, the AFOLU sector faces more significant challenges, such as land acquisition complexities and ESG risk assessment. From a barrier perspective, AFOLU also encounters more political, legal, and economic obstacles compared to energy, water, and food sectors.

Sectors with clearer policies and regulatory frameworks are more likely to access green financing. Renewable energy leads in this regard, followed by water and food, while the AFOLU sector remains the most challenging. Factors such as lack of incentive mechanisms and complex supply chains hinder AFOLU's access to green financing.

In terms of business models, the energy and water sectors are well-suited to Public-Private Partnership (PPP) models, with decentralized approaches offering flexibility and efficiency. Integrated models are more appropriate for AFOLU and food sectors, given the need for economies of scale to achieve returns on investment. Across all sectors, the use of equity, loans, and blended finance is prevalent, with development funds or grants playing a critical role in de-risking projects and facilitating proposal development and feasibility studies.

Several recommendations are synthesized based on these findings. In general, the government has to adjust and refine policies that would ensure the market for private sectors and investors could thrive. Under the new presidency, this could involve implementing policies that strengthen the market's sustainability profile, such as tax incentives for green investments and tighter regulations on emissions standards. Effective marketing and communication strategies should also be developed to increase demand for sustainable products and services. The strategies must consider public attitudes toward climate change and environmental issues, as their success depends on understanding how Indonesians respond to environmental challenges as citizens, customers, and communities, including their knowledge, beliefs, and misconceptions. As demonstrated in Taiwan, the Republic of Korea, and Malaysia, stronger public support for sustainability leads to thriving green markets and increased green investment opportunities.

In the water and energy sectors, the government must focus on developing better pricing policies. Competitive pricing can transform access to clean water and wastewater treatment into a viable market. Additionally, regulations should encourage private companies to develop robust WWTPs and limit surface water extraction to promote water recycling. FGD participants from the energy sector also recommend a government-led roadmap for energy transition, along with a curator to accelerate green financing in Indonesia.

To address the drivers and barriers in the AFOLU sector, the government should shift from subsidies that only boost productivity to policies that meet farmers' needs and attract younger generations. By integrating technology and agrometeorological knowledge, the sector can become more appealing to youth, enhancing agribusiness productivity. Long-term education, training, and consistent technology

transfer are critical to building farmers' resilience to climate variability. Improved targeting, monitoring, and evaluation of government programs, along with private sector involvement, can ensure effective technology adoption and incentivize high-quality harvests. A sustainable agro-food system can be achieved through supply chain efficiency, climate adaptation, and policies that discourage unsustainable practices. The government should also increase business opportunities in the AFOLU sector beyond state-owned enterprises and establish consistent regulations to attract both domestic and international investors.

For the food sector, the government should focus on investment in harvest logistics, storage, and technology, with a focus on standardizing cold chain logistics in areas like temperature control, security, and operations. Funds would be better directed toward helping farmers purchase dryers and millers acquire modern milling machines to reduce post-harvest losses, as well as technology transfer to ensure the workforce is able to adapt with the technology.

In order for the green financing ecosystem to thrive, the Republic of Indonesia's People's Representative Council must prioritize discussions and approval of the draft Climate Change Management Bill proposed by the Regional Representative Council as part of the National Legislation Program (Prolegnas) Priority. This bill could serve as an umbrella regulation, enabling the government to craft a National Long-Term Development Plan with a clear roadmap to achieve Net Zero emissions by 2060. Its approval would lay the groundwork for comprehensive policies that better enable public-private partnerships in mitigation and adaptation projects. Such projects, driven by regulatory pressure and opportunities for innovation, would inevitably require significant funding—funding that could be accessed through Indonesia's emerging green financing facilities in the form of blended finance, both from global and local sources. Bridging this regulatory gap is essential to unlocking the private sector's potential to contribute meaningfully to the nation's sustainability goals.

In conclusion, this study serves as a situation analysis of the current landscape for private sector engagement in accessing green financing in Indonesia. By highlighting key sector-specific drivers and barriers, it lays the groundwork for deeper strategic insights. Building on this analysis, a comprehensive strategic document, such as a National Green Finance Roadmap or a Parliamentary White Paper on Sustainable Investment Incentives, will be proposed to offer targeted and practical recommendations. The Indonesian Parliament plays a crucial role in this process through legislative, budgetary, and oversight functions. Parliament can push for the development of a supportive regulatory framework, advocate for fiscal and non-fiscal incentives to attract green investment, and oversee the implementation of public-private partnership (PPP) mechanisms in climate priority sectors. Furthermore, Parliament can encourage the creation of a Green Investment Priority List to signal investable sectors and a Climate Finance Scorecard to track funding flows and ensure transparency. Ultimately, this initiative aims to provide actionable strategies that enhance access to sustainable finance, while fostering stronger alignment between public policy and private sector participation in advancing Indonesia's green economy and climate commitments.

ACKNOWLEDGMENT

The authors would like to express profound gratitude to PT Gapura Ligua Solutions, PT Panca Jasa Lingkungan, PT Agrapana Damayanti Biotek, PT Perumda PAL Jaya, PT Energy Management Indonesia (EMI), PT Sekar Laut Tbk, PT Rebana Metropolitan, PT Alam Siak Lestari, PT Terra Forma Nusantara, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kamar Dagang dan Industri Indonesia/KADIN), Indonesia Venture Capital Association for Startups (Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia/Amvesindo), Mirova, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Catalytic Finance, CI Ventures, and The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) for their support in accomplishing this work.

REFERENCES

Journal

- Anitasari, R. F. (2019). Agrarian law: Perspective of Indonesian agricultural policies. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 20(4), 2–5.
- Arista, N. I. D., Negoro, H. A., & Purba, D. E. (2024). Evaluation of willingness to pay and challenges to community empowerment in urban drinkable water. *Global Journal of Environmental Science and Management*, 10(2), 557–572. <https://doi.org/10.22035/gjesm.2024.02.09>
- Firdayati, M., Indiyani, A., Prihandrijanti, M., & Otterpohl, R. (2015). Greywater in Indonesia: Characteristic and treatment systems. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 21(2), 98–114. <https://doi.org/10.5614/jtl.2015.21.2.1>
- Kumar, P. M., & Hong, C. S. (2022). Internet of things for secure surveillance for sewage wastewater treatment systems. *Environmental Research*, 203, 111899. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111899>
- Kumar, R., Kumar, A., & Saikia, P. (2022). Deforestation and Forests Degradation Impacts on the Environment. *Water Science and Technology Library Environmental Degradation: Challenges and Strategies for Mitigation*, 19-46. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95542-7_2
- Neumann, B., Vafeidis, A. T., Zimmermann, J., & Nicholls, R. J. (2015). Future coastal population growth and exposure to sea-level rise and coastal flooding - A global assessment. *PLoS ONE*, 10(3). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118571>
- Rizani, A., Norrahman, R. A., Harsono, I., Yahya, A. S., & Syifa, D. M. (2023). Efek inflasi terhadap daya beli masyarakat pada tinjauan ekonomi makro. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 344–358. <https://doi.org/10.62504/4w0gee05>
- Rozaki, Z. (2020). Food security challenges and opportunities in indonesia post COVID-19. *Advances in Food Security and Sustainability*, 6(January), 1–51. <https://doi.org/10.1016/bs.af2s.2021.07.002>
- Rudiarto, I., Handayani, W., & Setyono, J. S. (2018). A regional perspective on urbanization and climate-related disasters in the northern coastal region of central Java, Indonesia. *Land*, 7(1). <https://doi.org/10.3390/land7010034>
- Utomo, M., & Pieter, L. (2022). Strengthening Indonesian farmers' resilience capacity of disasters and climate change through development of decision support system: challenges lie ahead. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 950(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/950/1/012002>
- Widyanani, Wulan, D. R., Hamidah, U., Komarulzaman, A., Rosmalina, R. T., & Sintawardani, N. (2022). Domestic wastewater in Indonesia: generation, characteristics and treatment. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(22), 32397–32414. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-19057-6>
- Yudha, W. S., & Tjahjono, B. (2019). Stakeholder mapping and analysis of the renewable energy industry in Indonesia. *Energies*, 12(4), 602. <https://doi.org/10.3390/en12040602>

Digital Resources

- Bappenas - Ministry of National Development Planning. (2021). Food loss and waste in Indonesia: supporting the implementation of circular economy and low carbon development. Accessed March 3rd 2022, retrieved from <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/07/Report-Kajian-FLW-ENG.pdf>
- Booth, S. L. (2017). The relationship between carbon emissions, land use change and the oil pPalm industry within Southeast Asia (The University of San Francisco). The University of San Francisco. Accessed March 3rd 2022, retrieved from <https://repository.usfca.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1591&context=capstone>
- Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia. (2019, August 20th). Gov't stops issuance of new permit for primary forests, peatlands. Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, pp. 1–2. Accessed March 3rd 2022, retrieved from <https://setkab.go.id/en/govt- stops-issuance-of-new-permit-for-primary-forests-peatlands/>
- Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia. (2022). Keberhasilan keketuaan Indonesia pada forum G20 (Success of the Indonesian presidency at the G20 forum). Accessed March 3rd, 2022, retrieved from <https://setkab.go.id/keberhasilan-keketuaan-indonesia-pada-forum-g20/>

- Charmila, W. A. (2017). Coalition opposing Jakarta water privatization wins appeal. *The Jakarta Post*, 4–5. Accessed March 3rd 2022, retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2017/10/10/coalition-opposing-jakarta-water-privatization-wins-appeal.html>
- Dudi, R., Dewa, E., Dessi, Y., Vidya, F., Faradina, S., Esther, A. M., & Liana, L. (2021). Indonesia's GCF country programme document. Jakarta. Accessed March 3rd 2022, retrieved from https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/en
- Global Forest Watch. (2023). Indonesia. Accessed April 4th, 2024, retrieved from <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN>
- IESR. (2021). Deep decarbonization of Indonesia's energy system: A pathway to zero emissions. In Institute for Essential Services Reform (IESR). Jakarta. Accessed April 3rd 2022, retrieved from <https://iesr.or.id>
- Inter-Agency Standing Committee and the European Commission. (2024). INFORM report 2024: 10 years of INFORM. Accessed April 3rd 2024, retrieved from <https://doi.org/10.2760/817042>
- Internasional Energi Agency. (2022). Total energy supply by source, Indonesia 1990–2022. Accessed April 3rd 2022, retrieved from <https://www.iea.org>
- International Energy Agency. (2024). Energy system of Indonesia. Accessed June 10th 2024, retrieved from <https://www.iea.org/countries/indonesia>
- JDIH Marves. (2023). Perpres 11/2023: Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan pada Subbidang Energi Baru Terbarukan. Accessed April 4th 2024, retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>
- Jong, H. N. (2019). Indonesia fires emitted double the carbon of Amazon fires, research shows. *Mongabay*, pp. 2–7. Accessed April 3rd 2024, retrieved from <https://news.mongabay.com/2019/11/indonesia-fires-amazon-carbon-emissions-peatland/>
- Jong, H. N. (2022). Indonesia seals \$ 20 billion deal with G7 to speed up clean energy transition conversation. *Mongabay Series: Indonesian Coal*, p. 1. Accessed April 3rd 2024, retrieved from <https://news.mongabay.com>
- Leiserowitz, A., Rosenthal, S., Verner, M., Lee, S., Ballew, M., Carman, J., Goldberg, M., Marlon, J., Paramita, E., Chamim, P. M. M., and M. D. F. (2023). Climate change in the Indonesian mind. *Yale*. Accessed April 3rd 2024, retrieved from <https://climatecommunication.yale.edu/wp-content/uploads/2023/09/climate-change-in-the-indonesian-mind-e.pdf>
- Mayuri, B., Lin, M., & Hidayat, R. (2018). Jakarta, the fastest-sinking city in the world. *BBC Indonesian*, pp. 24–26. Accessed April 3rd 2024, retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-44636934>
- Ministry of Environment and Forestry. (2023). Program SMPEI. Accessed April 3rd 2024, retrieved from <http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/smpei/>
- Muhamad, N. (2023). Ini lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak pada Agustus 2023. Jakarta. Accessed April 3rd 2024, retrieved from [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/08/ ini-lapangan-usaha-yang-menyerap-tenaga-kerja-terbanyak-pada-agustus 2023#:~:text=Lapangan usaha yang paling banyak,dari total penduduk bekerja nasional](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/08/ini-lapangan-usaha-yang-menyerap-tenaga-kerja-terbanyak-pada-agustus-2023#:~:text=Lapangan%20usaha%20yang%20paling%20banyak,dari%20total%20penduduk%20bekerja%20nasional)
- Naufal, M., & Ihsanuddin. (2022). PAM Jaya akui air tanah pesisir Jakarta tercemar E Coli, ini dugaan penyebabnya. *Megapolitan Kompas*, pp. 1–8. Accessed April 3rd 2024, retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/14/21283031/pam-jaya-akui-air-tanah-pesisir-jakarta-tercemar-e-coli-ini-dugaan>
- Raturaya, S. (2023). Food industry in Indonesia: everything you should know. Accessed April 4th, 2024, retrieved from <https://www.sriboga.com/news/food-Industry-in-indonesia-everything-you-should-know>
- Rayda, N. (2022). Jakarta people are digging their own wells for water, but this makes the city sink faster. *Channel News Asia*, pp. 1–8. Accessed April 3rd 2024, retrieved from <https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-jakarta-groundwater-dig-own-wells-city-sinking-2785126>
- Rosana, F. C. (2022). Jokowi unveils 4 solid results from G20 summit. *Tempo.Co English Version*, p. 1. Accessed April 3rd 2024, retrieved from <https://en.tempo.co/read/1657622/jokowi-unveils-4-solid-results-from-g20-summit>

- Secretariat NDA-GCF Indonesia. (2023). Indonesia country programme for the green climate fund. Jakarta. Accessed April 3rd 2024, retrieved from https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/wp-content/uploads/2023/10/x3qj-web-low-res-country-programme-document-version-10.pdf
- Simanjuntak, U. (2022). IESR: renewable energy integration in electricity plan can reach 129 GW by 2030. Institute for Essential Services Reform (IESR), pp. 8–10. Accessed April 3rd 2024, retrieved from <https://iesr.or.id/en/iesr-renewable-energy-integration-in-electricity-plan-can-reach-129-gw-by-2030>
- Sulaiman, S., Suroyo, G., & Petty, M. (2022). Indonesia pledges more ambitious carbon emission cut. Reuters, pp. 1–10. Accessed May 25th 2024, retrieved from <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-pledges-more-ambitious-carbon-emission-cut-2022-10-25/>
- The World Bank. (2020). Toward a secure and fast recovery. Accessed June 4th 2024, retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/af52df00-94c5-5db0-bf7f-fcf21286f3f4/content>
- The World Bank. (2021). Opening the door to community forest access and management in Indonesia. Feature Story World Bank. Accessed June 5th 2024, retrieved from <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/10/21/opening-the-door-to-community-forest-access-and-management-in-indonesia>
- The World Bank Group and Asian Development Bank. (2021). Climate risk country profile: Indonesia. The World Bank Group and Asian Development Bank, 1–30. Accessed June 5th 2024, retrieved from [https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-05/15504-Indonesia Country Profile-WEB_0.pdf](https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-05/15504-Indonesia%20Country%20Profile-WEB_0.pdf)
- UNICEF. (2021). Regional sanitation expo summary report: Explore, learn, and develop innovative solution. Accessed April 4th 2024, retrieved from <https://www.unicef.org/eap/media/10561/file>
- UNICEF. (2023). Triple threat, how disease, climate risks, and unsafe water, sanitation and hygiene create a deadly combination for children. In UNICEF. New York. Accessed April 4th 2024, retrieved from <https://www.unicef.org/media/137206/file/triple-threat-wash-EN.pdf>

Other Sources

- Government of Indonesia. (2015). Presidential Regulation Number 38 of 2015 concerning Government Cooperation with Business Entities in Providing Infrastructure. Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia. Jakarta.
- Government of Indonesia. (2019). Presidential Instruction Number 5 of 2019 concerning Termination of the Granting of New Permits and Improvement of Primary Natural Forest Governance and Peatlands. Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia. Jakarta.
- Government of Indonesia. (2023). Presidential Regulation Number 11 of 2023 concerning Additional Concurrent Government Affairs in the Energy and Mineral Resources Sector in the New and Renewable Energy sub-sector. Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia. Jakarta.
- Wihardja, M., Arifin, B., & Amir, M. (2023). Towards more sustainable agro-food systems in Indonesia. *Center for Indonesian Policy Studies*. Jakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.35497/565196>

Analisis Permasalahan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2019-2024 (Analysis of Clean Water Supply Challenges in Banyumas Regency Period 2019-2024)

Yanuar Arif Wibowo

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270, email: tjahyojakarta@gmail.com

Naskah diterima: 20 Mei 2025
Naskah direvisi: 24 Juni 2025
Naskah diterbitkan: 30 Juni 2025

Abstract

The drought that struck Banyumas Regency during 2019–2024 has triggered a clean water crisis, particularly in the southern region, which is geographically vulnerable due to its distance from natural springs, proximity to coastal areas, and the influence of climate phenomena such as El Niño. Global climate change, environmental degradation, and development policies that overlook water resource conservation have further exacerbated this condition. This study aims to map drought-related problems in Banyumas, assess the effectiveness of artificial infrastructure such as reservoirs (embung), and analyze policy dynamics and sectoral disparities in water resource management. The research employs a qualitative descriptive approach through field observations, interviews with village officials, the Housing and Settlement Agency, the Regional Disaster Management Agency (BPBD), and affected communities, complemented by literature studies grounded in a political economy perspective. The findings reveal that interventions by BPBD, the local government, and BAZNAS through clean water distribution (dropping) provide only short-term relief without addressing the root causes. The construction of reservoirs, which should serve as water reserves, has been primarily directed toward aesthetic and tourism purposes, neglecting the agricultural sector that is crucial for food and water security. This sectoral disparity reflects the dominance of short-term political-economic interests over the fundamental needs of the community. In conclusion, drought mitigation in Banyumas requires research-based policies, proper spatial planning, and synergy between the executive and legislative bodies to ensure that clean water infrastructure is built according to priority needs and effectively supports long-term water security.

Keywords: clean water; water infrastructure; local policy; political economy

Abstrak

Kekeringan yang melanda Kabupaten Banyumas periode 2019–2024 menimbulkan krisis penyediaan air bersih, terutama di wilayah selatan yang rentan secara geografis akibat jarak dari sumber mata air, kedekatan dengan wilayah pesisir, dan pengaruh fenomena iklim seperti El Niño. Perubahan iklim global, degradasi lingkungan, dan kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan konservasi sumber daya air memperburuk kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan memetakan permasalahan kekeringan di Banyumas, menilai efektivitas infrastruktur buatan seperti embung, serta menganalisis dinamika kebijakan dan ketimpangan sektoral dalam pengelolaan sumber daya air. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara dengan pejabat desa, Dinas Perumahan dan Permukiman, BPBD, serta masyarakat terdampak, yang dilengkapi studi literatur berbasis perspektif ekonomi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi penanggulangan yang dilakukan BPBD, Pemerintah Daerah, dan BAZNAS melalui distribusi air bersih (*dropping*) hanya memberikan solusi jangka pendek dan belum menyentuh akar permasalahan. Pembangunan embung yang seharusnya menjadi cadangan air justru lebih diarahkan untuk kepentingan estetika dan pariwisata, sehingga mengabaikan sektor agraria yang krusial bagi ketahanan pangan dan air. Ketimpangan sektoral ini memperlihatkan dominasi kepentingan politik-ekonomi jangka pendek dibandingkan kebutuhan dasar masyarakat. Kesimpulannya, penanggulangan kekeringan di Banyumas memerlukan kebijakan berbasis riset, perencanaan tata ruang yang tepat, serta sinergi eksekutif-legislatif untuk memastikan infrastruktur air bersih dibangun sesuai prioritas kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung ketahanan air jangka panjang.

Kata kunci: air bersih; infrastruktur air; kebijakan daerah; ekonomi politik

PENDAHULUAN

Ketersediaan air bersih merupakan faktor krusial yang tidak hanya penting untuk kesehatan, tetapi juga untuk pendidikan dan penghidupan. Kekurangan air bersih mengakibatkan penyakit yang dapat mengganggu produktivitas masyarakat, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Menurut riset yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 60 persen kasus *stunting* diakibatkan karena permasalahan air bersih, sedangkan 40 persen dikarenakan faktor gizi buruk. Banyaknya *micro organisme* dalam air dapat mengganggu sistem dalam tubuh yang berakibat pada *stunting*.

Perubahan iklim dan pertumbuhan jumlah penduduk semakin memperburuk tantangan dalam mengakses air bersih. Ketidakpastian pola cuaca dan meningkatnya frekuensi bencana alam turut memperparah kondisi tersebut. Akibatnya, ketersediaan air bersih semakin terancam, terutama di wilayah yang telah mengalami tekanan terhadap sumber daya. Salah satu daerah yang dalam mengalami kekeringan adalah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas berbatasan langsung dengan

Kabupaten Brebes di utara, Kabupaten Cilacap di selatan dan barat, serta Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara di timur. Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk sekitar 1.864.665 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, 2024). Wilayah ini memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan, dan dikelilingi oleh Pegunungan Serayu. Sungai Serayu yang melintasi wilayah ini berperan penting sebagai sumber air utama bagi masyarakat. Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis dengan pola musim hujan yang berlangsung dari November hingga Maret dan musim kemarau dari April hingga Oktober. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim telah menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan pola hujan yang semakin tidak menentu, meningkatkan risiko kekeringan di wilayah ini.

Kekeringan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Banyumas telah mengakibatkan penurunan signifikan dalam ketersediaan sumber air bersih. Hal ini memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat (Adi, 2024). Berdasarkan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, ketersediaan air di Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 adalah sebesar 1.359.208.044 m³/tahun, sedangkan kebutuhan air di Kabupaten Banyumas sebesar 1.120.877.035 m³/tahun. Dengan membandingkan ketersediaan air dengan kebutuhan air, diperoleh nilai daya dukung air permukaan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 adalah 1,21, yaitu kelompok daya dukung air bersyarat atau sedang. Berdasarkan proyeksi terhadap berbagai variabel yang memengaruhi daya dukung air, disimpulkan bahwa tanpa adanya upaya pengendalian dan konservasi sumber daya air, daya dukung air di Kabupaten Banyumas akan terus menurun. Diperkirakan akan terjadi defisit air permukaan sebesar 0,1 miliar m³ per tahun, yang menyebabkan penurunan indeks daya dukung air permukaan dari 1,21 pada tahun 2017 menjadi 0,93 pada tahun 2023. Oleh karena itu, penanggulangan kekeringan di Kabupaten Banyumas perlu diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan yang lebih luas, dengan melibatkan pemerintah provinsi dan pusat. Upaya ini harus mencakup mitigasi perubahan iklim serta mengaitkan isu kekeringan dengan agenda penurunan tingkat kemiskinan.

Kekeringan yang melanda 56 desa di 18 kecamatan (Patikraja, Sumpiuh, Karanglewas, Rawalo, Kalibangor, Jatilawang, Purwojati, Cilongok, Tambak, Kebasen, Gumelar, Somagede, Lumbir, Kemranjen, Banyumas, Pekuncen, Kedungbanteng, dan Ajibarang) di Kabupaten Banyumas (Puspitasari, 2025), tidak semata-mata merupakan isu lingkungan, namun mencerminkan kompleksitas dinamika ekonomi dan politik yang memengaruhi akses masyarakat terhadap air bersih. Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya air, kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya responsif, serta kepentingan korporasi yang turut membentuk lanskap pengelolaan sumber daya. Dalam konteks perubahan iklim global, kondisi tersebut menuntut pendekatan lintas sektor dan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kabupaten Banyumas memiliki potensi lahan untuk menampung air hujan, khususnya saat musim hujan November-Maret. Dengan curah hujan yang relatif tinggi, wilayah ini seharusnya mampu menyediakan pasokan air bersih yang memadai. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan karena keterbatasan infrastruktur resapan, degradasi lahan, dan belum optimalnya kebijakan konservasi. Strategi pengelolaan air berbasis lanskap dan pemanfaatan lahan sebagai zona tangkapan air perlu menjadi bagian dari agenda adaptasi iklim dan ketahanan air daerah.

Kekeringan di Kabupaten Banyumas menjadi masalah mendesak yang perlu segera ditangani, terutama terkait kebutuhan air bersih dan sektor pertanian yang sangat penting untuk kehidupan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas telah aktif menangani isu ini sejak 2019 dengan menyalurkan bantuan air bersih melalui sistem *dropping* (Puspitasari, 2019). Bantuan tersebut telah diberikan ke berbagai kecamatan, yaitu Kecamatan Sumpiuh, Patikraja, dan Jatilawang (Budiman, 2019). Pada September 2020, meskipun distribusi air bersih masih berlanjut, hanya 4 (empat) desa (Kedungpring, Banjarparakan, Cibangkong, dan Kaliputih) yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan air bersih (Sumarwoto, 2020).

Pada 2021 dan 2022, kekeringan di Kabupaten Banyumas cenderung tidak terlalu signifikan, karena curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahunnya. Budi Nugroho, Kepala Pelaksana BPBD Banyumas, menjelaskan bahwa tahun 2023 curah hujan rendah, sehingga kekeringan kembali terjadi di Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2023, kekeringan kembali melanda Kabupaten Banyumas, sekitar 91 desa atau kelurahan di 21 kecamatan. Kemudian, pada tahun 2024 terdapat 43 desa di 10 kecamatan yang mengalami kekeringan (Sumarwoto, 2024).

Untuk mengatasi kekeringan yang terjadi pada tahun 2023, BPBD menyediakan tangki air untuk desa-desa yang terkena dampak kekeringan. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banyumas secara langsung membagikan 70.000 liter air bersih di Kecamatan Sumpiuh pada 2023 untuk memenuhi kebutuhan 15.000 warga dari 9 desa (Banyumas Kab, 2023). Kantor Kecamatan Sumpiuh mencatat dari 56.000 penduduk di kecamatan tersebut, 15.000 mengalami dampak kekeringan. Untuk mengatasi kekeringan pada tahun 2023, BAZNAS juga berkontribusi dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok (Raihan, 2023). Pendistribusian dilakukan BAZNAS dan pemda, melibatkan 99 tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk masyarakat, dan penyerahan bantuan dilakukan secara bertahap dalam program Baznas Peduli.

Meninjau kasus kekeringan yang terjadi di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2019 hingga 2024, terlihat bahwa respons Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam mengatasi permasalahan air bersih masih terbatas pada pemberian bantuan air bersih kepada masyarakat. Bantuan tersebut disalurkan melalui BPBD, Pemerintah Daerah, serta lembaga pemerintah nonstruktural seperti BAZNAS. Hingga saat ini, belum terdapat kebijakan yang bersifat fundamental atau strategis untuk memperbaiki daerah aliran sungai maupun memperbanyak pembangunan infrastruktur buatan, seperti embung, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penyediaan air bersih. Di sisi lain, lembaga legislatif yang terdiri atas wakil-wakil rakyat dari masing-masing daerah pemilihan (dapil), belum menjalankan fungsinya secara optimal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat terkait isu air bersih, khususnya di dapil mereka masing-masing. Para legislator cenderung lebih memprioritaskan isu pembangunan infrastruktur jalan dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur air bersih.

Upaya penyelesaian yang lebih komprehensif mulai dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, salah satunya dengan pembuatan fasilitas embung. Embung merupakan bangunan reservoir berukuran kecil yang berfungsi untuk menampung dan mengelola air, terutama untuk keperluan irigasi, penyediaan air bersih, dan pengendalian banjir. Dengan demikian, embung memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya air serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dewi dan Wahidin (2020) menyebutkan bahwa embung juga berfungsi sebagai penadah air hujan, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan konsumsi air bersih. Di Kabupaten Banyumas, terdapat sejumlah wilayah yang telah memiliki embung sebagai penadah air hujan untuk kepentingan irigasi, antara lain: Sumpiuh, Patikraja, Karanglewas, Kalibagor, Purwojati, Jatilawang, Cilongok, Kebasen, Gumelar, dan Somagede. Wilayah-wilayah tersebut termasuk dalam kategori daerah rawan kekeringan di Kabupaten Banyumas (Sejati, 2024).

Terdapat 5 (lima) embung baru di Kabupaten Banyumas yang telah diselesaikan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak pada tahun 2024, yakni Embung Karangangka di Kecamatan Kedung Banteng, Embung Sawangan di Kecamatan Ajibarang, Embung Klapagading di Kecamatan Wangon, Embung Watuagung di Kecamatan Tambak, dan Embung Kemutug Lor di Kecamatan Baturraden (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, 2024). Namun, keseluruhan embung tersebut digunakan untuk kepentingan estetika atau pariwisata, tidak ada yang dipergunakan untuk kepentingan air bersih.

Pembangunan embung hingga 2024 belum mampu menyelesaikan masalah air bersih. Pembangunan infrastruktur desa dan kecamatan terus berjalan, namun kekeringan saat kemarau masih terjadi. Konteks ini menunjukkan adanya hal kontras di antara pembangunan infrastruktur masyarakat dan pemenuhan sumber daya vital yakni air. Seperti yang telah disampaikan oleh salah satu carik di Kecamatan Patikraja, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti pengaspalan jalan, penanganannya berlangsung cepat, tidak seperti pemenuhan sumber daya vital, sedangkan seluruh masyarakat sejatinya lebih membutuhkan air dibandingkan perbaikan jalan (Supriyanto, 2024). Hal ini menunjukkan ketimpangan sektoral akibat rendahnya prioritas kebijakan oleh para pembuat kebijakan terhadap aspirasi masyarakat.

Meninjau dari uraian sebelumnya, fokus penelitian ini diarahkan untuk memetakan permasalahan kekeringan yang terjadi di Kabupaten Banyumas, khususnya di wilayah-wilayah yang secara geografis rentan terhadap defisit air bersih saat musim kemarau. Kekeringan yang berulang di beberapa kecamatan menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya bersifat temporer, melainkan telah menjadi isu struktural yang membutuhkan penanganan jangka panjang. Penelitian ini secara khusus menyoroti sejauh mana ketersediaan infrastruktur buatan, seperti embung, telah dimanfaatkan secara efektif untuk mengatasi krisis air bersih.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *field research* atau penelitian lapangan, yang memungkinkan peneliti untuk menggali data secara langsung dari sumbernya di lingkungan alamiah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti, bukan sekadar mengukur atau menguji hipotesis. Dalam pelaksanaannya, peneliti memanfaatkan berbagai sumber data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan partisipasi aktif di lapangan guna memperoleh informasi yang komprehensif dan kontekstual.

Metode *field research* sendiri merupakan teknik penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi objek penelitian, dengan tujuan utama untuk memahami dinamika sosial, perilaku, atau fenomena tertentu berdasarkan pengamatan sistematis dan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Menurut Van & Poole (2017), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan kompleksitas yang tidak dapat dijangkau melalui metode kuantitatif atau eksperimen laboratorium. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya valid secara akademik, tetapi juga relevan secara praktis dalam konteks kehidupan nyata.

Jenis dan Sumber Data

Proses penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari pengumpulan informasi melalui studi terdahulu, serta pelaksanaan wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan pada 22-28 Juli 2024. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait, antara lain pejabat desa, Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinperkim), BPBD, serta masyarakat yang terkait dengan isu penelitian. Pejabat desa dipilih sebagai informan karena mereka merupakan pihak yang secara langsung menangani kebijakan pembangunan sektoral di tingkat desa dan memiliki akses komunikasi dengan elite eksekutif atau Pemerintah Daerah. Dinperkim memiliki peran penting dalam penyediaan dan pemantauan air bersih yang layak konsumsi, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Banyumas serta desa dan kecamatan yang terdampak kekeringan. Sementara itu, BPBD berperan sebagai aktor utama dalam penanganan bencana kekeringan, terutama melalui kegiatan distribusi (*dropping*) air bersih ke desa-desa yang membutuhkan. BPBD menjadi pihak yang paling sering terlibat dalam penanganan dan penyediaan air, baik untuk kebutuhan pertanian maupun konsumsi masyarakat di wilayah terdampak. Adapun perbedaan peran antara BPBD dan Dinperkim terletak pada cakupan pemantauan dan distribusi air. BPBD menyuplai air untuk berbagai kebutuhan masyarakat, sedangkan Dinperkim fokus pada pemantauan dan penyediaan air bersih yang layak konsumsi.

Selanjutnya, peneliti menelusuri berbagai referensi, khususnya studi yang berkaitan dengan isu kekeringan dan konsep ketimpangan sektoral dalam perspektif ilmu politik. Literatur yang digunakan mencakup teori-teori dalam ekonomi politik yang relevan untuk mendukung analisis terhadap fenomena ketimpangan dalam penanganan sektor air bersih.

Ekonomi politik secara umum merujuk pada kajian mengenai bagaimana teori dan metode ekonomi memengaruhi ideologi serta kebijakan politik, dan sebaliknya. Kajian ini menelusuri hubungan antara individu, pemerintah, dan kebijakan publik, serta bagaimana interaksi di antara ketiganya memengaruhi distribusi sumber daya dan kekayaan dalam masyarakat. Jessop (2007) menyatakan bahwa ekonomi politik mengeksplorasi dampak institusi dan proses politik terhadap sistem ekonomi, serta bagaimana kepentingan dan struktur ekonomi membentuk keputusan politik. Studi ekonomi politik tidak hanya berfokus pada pertumbuhan infrastruktur dan jaringan ekonomi, tetapi juga mencakup pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari keberlanjutan kehidupan manusia.

Perspektif ekonomi politik secara klasik, telah disebutkan di beberapa karya-karya dasar para ekonom dan filsuf seperti Adam Smith, Karl Marx, dan David Ricardo. Para pemikir tersebut mengaitkan bagaimana sistem kapitalisme berfungsi dengan fokus pada produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, serta peran pasar dan persaingan. Bonefeld dan Holloway, menyebutkan bahwa Adam Smith meletakkan dasar untuk memahami mekanisme kapitalisme dengan menekankan pada istilah *invisible hand* atau “tangan tak terlihat” (Bonefeld & Holloway, 1995). Connor menjelaskan bahwa Karl Marx mengkritik kapitalisme dengan menganalisis perjuangan kelas yang melekat dan eksploitasi tenaga kerja, yang diyakini akan menyebabkan kesenjangan sistemik dan pada akhirnya perubahan masyarakat (Connor, 1994).

Saat ini, perspektif ekonomi politik telah berkembang menjadi lebih luas dan kontekstual. Ekonomi politik telah dikritik oleh Peter Newell, di mana seharusnya ekonomi politik kini juga perlu adanya pendekatan kritis yang mengatasi kompleksitas dan dinamika kekuasaan yang terlibat dalam tata kelola

lingkungan global (Newell, 2021). Dilanjutkan, Newell menyoroti pentingnya memahami bagaimana kepentingan ekonomi dan kekuatan politik membentuk kebijakan baik bagi manusia dan lingkungan hidup, serta mengadvokasi perubahan transformatif yang melampaui solusi berbasis pasar untuk mengatasi kesenjangan lingkungan hidup dan mendorong transisi yang adil. Artinya, perspektif ekonomi politik kini tidak hanya mengkaji tentang struktur ekonomi politik secara klasik, yakni laba dan rugi, masyarakat dan penguasa, namun kini telah bergerak pada konsep yang realistis, bahwa lingkungan juga merupakan bahasan kritis dalam ekonomi politik.

Dalam konteks perubahan iklim, perspektif ekonomi politik menyoroti peran kekuasaan dan kepentingan ekonomi dalam membentuk kebijakan lingkungan. Pembuat kebijakan sering memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan solusi berbasis pasar, yang mengurangi efektivitas tindakan iklim (Babic & Sharma, 2023). Pendekatan transformatif diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan dan mendukung kebijakan yang mendorong transisi adil dan berkelanjutan.

Dalam pembahasan ekonomi secara umum, kerap dipersoalkan mengenai surplus dan defisit, atau untung dan rugi. Ketika berhadapan dengan politik, dan istilah-istilah yang bergema di dalamnya, seperti pengaruh, kekuasaan, dan daya paksa, seolah-olah istilah ekonomi tersebut menjadi tepat jika disandingkan ke beberapa istilah yang terkenal dalam bidang ilmu politik. Artinya, keterkaitan antara istilah ekonomi seperti surplus, defisit, untung dan rugi dengan konsep politik, yakni pengaruh, kekuasaan dan daya paksa, menggarisbawahi keterkaitan kondisi ekonomi dan dinamika politik yang membentuk hubungan domestik dan internasional suatu negara dan antarnegara.

Ide mengenai konektivitas konsep ekonomi dan politik telah diperkenalkan oleh berbagai ahli, seperti Karl Marx dalam "*Grundrisse*" yang diulas oleh Hesketh, bahwa Marx mengkaji interaksi ekonomi dan politik dengan menyatakan bahwa basis ekonomi masyarakat memengaruhi suprastruktur politiknya, termasuk hukum dan pemerintahan (Hesketh, 2024). Marx menekankan perjuangan kelas, di mana kelas sosial yang berbeda dengan kepentingan yang bertentangan mendorong perubahan politik. Marx menyoroti tenaga kerja sebagai nilai, menghubungkan produksi ekonomi dengan kondisi sosial, dan mengkritik kapitalisme karena memprioritaskan keuntungan di atas kesejahteraan sosial, sehingga menyebabkan konflik dan krisis. Dengan demikian, pemahaman tentang hubungan antara istilah-istilah ekonomi dan kaitannya dengan istilah politik menjadi penting untuk menganalisis dinamika sosial dan politik yang mempengaruhi masyarakat dan hubungan antarnegara.

Istilah untung-rugi dalam ekonomi dan kekuasaan dalam ilmu politik saling berkaitan dalam teorisasi konsep ekonomi politik, khususnya dalam pembahasan mengenai ketimpangan atau kesenjangan sektoral. Dalam perspektif ekonomi politik, ketimpangan sektoral merujuk pada distribusi yang tidak merata atas sumber daya, kekayaan, dan akses terhadap layanan publik antarsektor dalam masyarakat. Piketty, sebagaimana dikutip dalam ulasan oleh Abulhul (2020), menyoroti bahwa ketimpangan sektoral terjadi ketika kekayaan dan modal terkonsentrasi di tangan segelintir individu. Kondisi ini membatasi akses masyarakat terhadap layanan sosial, pendidikan, pangan, dan kesehatan yang pada akhirnya memperdalam kemiskinan struktural.

Daron Acemoglu dan James A. Robinson, sebagaimana dijelaskan oleh Machado & Fuinhas (2023), menekankan peran institusi politik dan ekonomi dalam membentuk kemakmuran dan kesenjangan sektoral suatu negara. Lembaga-lembaga inklusif mendorong distribusi sumber daya secara merata dan partisipasi yang luas dalam proses ekonomi dan politik. Sebaliknya, lembaga-lembaga eksklusif cenderung memusatkan kekayaan dan kekuasaan di tangan elit, sehingga memperkuat ketimpangan sektoral. Konsentrasi kekuasaan politik di kalangan elit sering kali menghasilkan kebijakan yang berpihak pada sektor tertentu, seperti sektor ekonomi atau industri, dengan mengabaikan atau bahkan memperburuk kondisi sektor lainnya. Fenomena ini memperjelas bagaimana dinamika kekuasaan dan kepentingan ekonomi dapat menciptakan dan mempertahankan kesenjangan sektoral dalam masyarakat.

Ketimpangan sektoral, sebagaimana dijelaskan oleh Piketty, Acemoglu, dan Robinson, merupakan konsekuensi dari dominasi sektor-sektor ekonomi tertentu yang memiliki daya tarik politik dan nilai ekonomi tinggi, seperti sektor teknologi. Sektor-sektor ini cenderung memperoleh perhatian dan dukungan kebijakan karena mampu memperkuat posisi dan kepentingan elit politik serta ekonomi. Sebaliknya, sektor-sektor yang kurang menguntungkan secara ekonomi, seperti pertanian atau layanan publik di daerah terpencil, sering kali terpinggirkan dalam proses perumusan kebijakan. Ketidaksetaraan perhatian ini menciptakan siklus ketimpangan yang berulang, di mana sumber daya dan investasi terus mengalir ke

sektor dominan, sementara sektor-sektor yang rentan semakin terabaikan. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin melebar, distribusi sumber daya menjadi tidak merata, dan stabilitas sosial pun terancam. Ketimpangan sektoral tidak hanya berdampak pada akses terhadap layanan dasar, tetapi juga memperkuat eksklusi politik dan ekonomi, sehingga memperlemah kohesi sosial dan memperbesar potensi konflik struktural dalam masyarakat.

Metode Analisis

Teknik analisis data merupakan komponen esensial dalam proses penelitian ilmiah, karena memungkinkan peneliti untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam studi mengenai permasalahan kekeringan di Kabupaten Banyumas, analisis data tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami fenomena secara empiris, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berorientasi pada solusi. Informasi yang diperoleh dari lapangan disusun dalam bentuk narasi analitis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola permasalahan, aktor yang terlibat, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis interaktif, sebagaimana dirumuskan oleh Miles dan Huberman, yang menekankan pada proses kualitatif yang bersifat siklikal dan saling berkelindan antara tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sutopo, 1998). Reduksi data dilakukan melalui proses seleksi, kategorisasi, dan penyederhanaan informasi yang relevan; penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks, grafik, atau narasi yang sistematis; sementara penarikan kesimpulan dilakukan secara reflektif dan terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Model ini memungkinkan peneliti untuk tetap terbuka terhadap dinamika temuan di lapangan dan melakukan revisi terhadap interpretasi awal berdasarkan data yang terus berkembang.

Lebih lanjut, analisis ini diperkaya dengan kajian literatur dari disiplin ilmu politik, khususnya ekonomi politik, yang memberikan kerangka teoritis dalam memahami relasi kekuasaan, distribusi sumber daya, dan ketimpangan sektoral yang memengaruhi kebijakan penanganan kekeringan. Pendekatan interdisipliner ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengungkap kompleksitas kebijakan publik di tingkat lokal, serta membuka ruang bagi evaluasi kritis terhadap efektivitas dan keadilan distribusi intervensi pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan pemetaan empiris atas permasalahan kekeringan, tetapi juga menawarkan perspektif analitis yang dapat digunakan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Permasalahan kekeringan di Kabupaten Banyumas berkaitan erat dengan tiga aspek utama: ketersediaan sumber air, penerapan teknologi pengolahan air, dan sarana distribusi air yang belum memadai. Di antara ketiga aspek tersebut, ketersediaan air baku menjadi tantangan terbesar, terutama pada musim kemarau ketika sumber air mengalami penurunan drastis. Kekeringan merupakan fenomena kompleks yang ditandai oleh defisit air akibat rendahnya curah hujan dalam jangka waktu yang panjang. Glantz (1999) menekankan bahwa kekeringan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga menimbulkan konsekuensi lingkungan dan sosial yang signifikan.

Secara klasik, kekeringan didefinisikan sebagai kekurangan dalam variabel hidrologis seperti curah hujan dan kelembapan tanah (AghaKouchak et al., 2021), yang umumnya dipengaruhi oleh faktor alamiah. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa aktivitas manusia turut memperburuk kondisi kekeringan. Hagenlocher et al (2023) menggarisbawahi bahwa intervensi manusia, seperti eksploitasi sumber daya air yang berlebihan dan kurangnya kebijakan konservasi, dapat memperkuat defisit air dan menjadikannya lebih permanen seiring waktu. Dengan demikian, kekeringan tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena alam, melainkan sebagai hasil interaksi antara faktor klimatologis dan dinamika sosial-politik yang memengaruhi pengelolaan sumber daya air.

Pernyataan Hagenlocher telah diperkuat oleh David and Hughes, melalui artikelnya, bahwa kebijakan yang diputuskan oleh para pembuat kebijakan dapat berdampak pada lingkungan, salah satunya krisis air yang menyebabkan kesenjangan di sekitarnya. Contohnya di California, di mana keputusan kebijakan selama musim kemarau menyebabkan kesenjangan antara kaum elit dan komunitas kecil di pedesaan menderita karena berkurangnya pasokan air ke lokasi kaum miskin di pedesaan (David & Hughes, 2023). Permasalahan ini diperburuk dengan adanya sumur-sumur rumah tangga berlebih yang justru mengurangi

pasokan air di daerah tertentu, yakni pedesaan. Adanya bantuan air terhadap warga desa memang terbilang cukup membantu, namun itu hanya sementara, hal itu justru membuat mereka bergantung pada bantuan eksternal dan kurang berdaya untuk mengelola ketahanan air sendiri.

Krisis dalam pengelolaan sumber daya air sering kali berakar pada kebijakan publik yang tidak responsif terhadap kebutuhan lintas sektor. Para pembuat kebijakan menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan sektor pertanian, industri, dan rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan ini berujung pada distribusi dan akses air yang tidak merata, memperkuat ketimpangan sektoral.

Mahdavifar et al. (2024) menjelaskan bahwa ketimpangan sektoral dalam pengelolaan air tidak hanya dipicu oleh faktor ekologis, tetapi juga diperburuk oleh kelemahan dalam perumusan kebijakan, regulasi, dan implementasi. Ketidakefisienan ini dapat menyebabkan degradasi sumber daya air dan memperlemah kapasitas adaptif masyarakat terhadap krisis kekeringan. Selain itu, kurangnya strategi pengelolaan terpadu serta kegagalan dalam mengatasi keterbatasan kelembagaan, teknis, finansial, dan sumber daya manusia turut memperumit upaya pemerataan akses air. Ketimpangan ini sering kali berakar pada dimensi politik dalam manajemen krisis, di mana upaya mempertahankan otoritas dan legitimasi politik dapat mengaburkan prinsip keadilan dalam alokasi sumber daya. Akibatnya, sektor-sektor yang dianggap strategis dan menguntungkan secara ekonomi cenderung mendapatkan perhatian dan pemeliharaan yang memadai, sementara sektor lain yang kurang menguntungkan seperti pertanian subsisten atau wilayah pedesaan terpinggirkan. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan konflik antarsektor, terutama dalam perebutan akses terhadap sumber daya air yang semakin terbatas.

Kekeringan di Kabupaten Banyumas merupakan contoh nyata dari fenomena hidrometeorologis yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Per Jumat, 18 Oktober 2024, tercatat sebanyak 55 desa mengalami kekeringan (Banyumas, 2024). Menurut laporan BPBD, kekeringan di wilayah ini telah berlangsung sejak tahun 2019, namun tidak menunjukkan gejala signifikan karena wilayah terdampak kembali menjadi tanah lembab saat musim penghujan tiba. Kondisi tersebut menyebabkan kekeringan masih dipandang sebagai fenomena musiman, bukan sebagai bencana ekologis yang memerlukan penanganan struktural. Padahal, seperti dijelaskan oleh Anwar (2024), kekeringan seharusnya dipahami sebagai bencana ketika curah hujan yang sangat rendah menyebabkan defisit air, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber air baku. Ketika debit air yang tersedia lebih kecil daripada kebutuhan masyarakat, maka terjadi defisit air yang mengarah pada krisis sumber daya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekeringan bukan semata akibat faktor alamiah, melainkan juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan kebijakan publik dalam mengelola sumber daya air. Ketika wilayah-wilayah yang rentan tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam perencanaan dan alokasi sumber daya, maka kekeringan berpotensi menjadi bencana sosial yang memperkuat ketimpangan sektoral.

Kekeringan di Kabupaten Banyumas tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena musiman yang bersifat sementara, melainkan telah berkembang menjadi bencana alam yang berdampak luas. Perubahan ini penting untuk ditegaskan karena persepsi terhadap kekeringan akan menentukan arah kebijakan dan strategi penanganan yang diambil oleh pemerintah. Dhawale et al. (2024) menekankan bahwa kekeringan sebagai bencana memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem masyarakat dan perekonomian. Berbeda dengan fenomena iklim biasa, kekeringan menyebabkan kelangkaan air, kerugian sektor pertanian, dan dampak sosial-ekonomi yang bersifat kronis. Oleh karena itu, kekeringan memerlukan pendekatan pembangunan ketahanan yang berkelanjutan serta strategi adaptif lintas sektor. Dampak kekeringan yang meluas dan berkepanjangan menjadikannya setara dengan bencana alam lain seperti banjir yang dapat merusak infrastruktur, mengancam keselamatan jiwa, dan menimbulkan kerusakan ekologis. Kekeringan memperburuk kerentanan dalam pengelolaan air, pertanian, dan sistem sosial-ekonomi, sehingga secara substansial memenuhi kriteria sebagai bencana ekologis dan sosial. Kekeringan dapat mengurangi luas tanam dan luas panen sehingga menurunkan hasil produksi, utamanya pada tanaman yang membutuhkan banyak air. Curah hujan rendah serta distribusi hujan yang tidak merata dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan defisit air pada area pertanaman dan terjadinya kekeringan fisiologis yang kurang baik bagi pertumbuhan tanaman. Dengan demikian, pengkategorian kekeringan sebagai bencana bukan hanya penting secara terminologis, tetapi juga secara politis dan strategis. Hal ini membuka ruang bagi intervensi kebijakan yang lebih serius, alokasi anggaran yang lebih adil, dan penguatan kelembagaan dalam menghadapi krisis air yang semakin kompleks.

Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik geografis yang sangat beragam, yang secara langsung memengaruhi ketersediaan sumber daya air dan potensi kekeringan di wilayah tersebut. Secara topografis, Banyumas terbagi menjadi dua sisi utama: wilayah utara yang berada di sekitar lereng Gunung Slamet, dan wilayah selatan yang lebih datar serta mendekati kawasan pesisir.

Wilayah utara, yang mencakup daerah-daerah di sekitar lereng Gunung Slamet, memiliki vegetasi yang lebih baik dan sumber mata air yang melimpah. Kedekatan dengan lereng gunung memungkinkan wilayah ini tetap memiliki cadangan air meskipun curah hujan menurun. Vegetasi yang lebat dan sistem hidrologi alami di wilayah utara berfungsi sebagai penyangga ekologis yang menjaga ketersediaan air sepanjang tahun. Sebaliknya, wilayah selatan Banyumas meliputi daerah seperti Lumbir, Rawalo, Jatilawang, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, hingga Tambak cenderung lebih kering dan rentan terhadap kekeringan. Wilayah ini berada jauh dari lereng Gunung Slamet dan lebih dekat ke arah pantai, sehingga tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber air alami. Ketimpangan topografi ini menyebabkan distribusi air yang tidak merata dan memperkuat kerentanan wilayah selatan terhadap defisit air, terutama saat musim kemarau (Anwar, 2024). Perbedaan geografis ini memperjelas bahwa kekeringan di Kabupaten Banyumas bukan hanya persoalan iklim, tetapi juga persoalan spasial dan struktural. Ketimpangan akses terhadap sumber daya air berdasarkan lokasi geografis menuntut pendekatan kebijakan yang berbasis wilayah, agar intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan lokal secara adil dan efektif.

Kekeringan yang terjadi di Kabupaten Banyumas merupakan hasil dari interaksi antara faktor alamiah dan antropogenik. Dari sisi alamiah, topografi dan kedekatan wilayah dengan kawasan pesisir menjadi penentu utama dalam distribusi air dan kelembapan tanah. Wilayah utara Banyumas yang berada di sekitar lereng Gunung Slamet cenderung memiliki vegetasi yang lebih lebat dan sumber air yang melimpah, sehingga lebih tahan terhadap musim kemarau. Sebaliknya, wilayah selatan seperti Lumbir, Rawalo, Jatilawang, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, hingga Tambak, yang jauh dari lereng gunung dan lebih dekat ke arah pantai, memiliki kelembapan udara yang lebih rendah dan akses terbatas terhadap sumber air alami. Hal ini menjadikan wilayah selatan lebih rentan terhadap kekeringan.

Topografi juga memainkan peran penting dalam menentukan pola aliran air. Seperti dijelaskan oleh Hoag (2022), daerah dengan kemiringan curam cenderung memiliki aliran air yang cepat, sehingga air tidak sempat meresap ke dalam tanah. Akibatnya, kelembapan tanah menurun dan potensi kekeringan meningkat. Selain itu, limpasan permukaan yang cepat dapat mempercepat proses erosi, yang pada gilirannya menurunkan kemampuan tanah untuk menyimpan air. Sebaliknya, wilayah dengan topografi cekungan seperti lembah dapat menampung air lebih lama dan berpotensi mengurangi dampak kekeringan secara lokal. Namun, jika wilayah-wilayah ini tidak dikelola dengan baik, ketimpangan distribusi air antarwilayah justru dapat semakin parah.

Di sisi lain, faktor antropogenik seperti perubahan tata guna lahan, eksploitasi sumber air tanah secara berlebihan, dan minimnya sistem irigasi yang adaptif terhadap musim kemarau turut memperburuk kondisi kekeringan. Ketika aktivitas manusia tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan, maka ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan air menjadi tak terhindarkan. Oleh karena itu, penanganan kekeringan di Kabupaten Banyumas harus dilakukan melalui pendekatan multidimensi yang menggabungkan pemahaman geografis, rekayasa lingkungan, pengelolaan tata ruang, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan.

Kondisi kering yang dialami oleh wilayah selatan Kabupaten Banyumas tidak hanya disebabkan oleh jaraknya yang jauh dari lereng Gunung Slamet, tetapi juga dipengaruhi oleh kedekatannya dengan wilayah pesisir, yakni Kabupaten Cilacap. Meskipun secara umum daerah pesisir dikenal memiliki kelembapan yang lebih tinggi, cuaca di kawasan pantai dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap wilayah sekitarnya, terutama dalam konteks perubahan iklim. Wilayah pesisir dapat mengalami kondisi kering apabila terjadi peristiwa iklim seperti El Niño, yang mengganggu pola cuaca normal. El Niño ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudera Pasifik bagian tengah dan timur, yang kemudian memicu perubahan sirkulasi atmosfer secara global. Dampaknya, wilayah pesisir yang biasanya menerima curah hujan cukup tinggi justru mengalami penurunan intensitas hujan dan peningkatan suhu udara. Perubahan ini dapat menekan kelembapan atmosfer dan memperpanjang musim kering, sehingga memperburuk kondisi kekeringan, termasuk di wilayah selatan Banyumas yang berbatasan langsung dengan Cilacap. Dengan demikian, faktor pesisir dan fenomena El Niño menjadi elemen penting dalam memahami dinamika kekeringan yang terjadi di kawasan tersebut.

Fenomena kekeringan di wilayah pesisir juga diperkuat oleh temuan Griggs dan Reguero (2021), yang menyoroti kasus Delta Mekong sebagai contoh nyata bagaimana daerah dekat pantai dapat mengalami krisis air bersih. Salah satu faktor utama yang mereka identifikasi adalah naiknya permukaan laut, yang berkontribusi terhadap intrusi air laut ke dalam akuifer pesisir, air permukaan, dan tanah. Proses ini menyebabkan peningkatan salinitas air, yang berdampak langsung pada kualitas air untuk konsumsi dan produktivitas pertanian. Ketika intrusi air laut terjadi bersamaan dengan kekeringan dan penurunan debit sungai, maka tekanan terhadap sumber air tawar semakin besar. Kondisi ini diperparah oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan, yang mempercepat penurunan ketersediaan air bersih. Oleh karena itu, wilayah pesisir seperti selatan Banyumas yang berbatasan dengan Cilacap perlu memerhatikan dinamika salinitas air, terutama dalam kaitannya dengan sedimentasi dan kualitas air tanah. Jika tidak dikelola dengan baik, dampak gabungan antara kekeringan dan salinisasi dapat mengancam ketahanan air dan produktivitas wilayah secara keseluruhan.

Keberadaan air dengan tingkat salinitas tinggi juga ditemukan di sebagian wilayah selatan Kabupaten Banyumas, khususnya di Kecamatan Sumpiuh yang terletak di bagian tenggara dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap. Sumpiuh memiliki topografi dataran rendah dan kedekatan geografis dengan pesisir selatan Pulau Jawa, sehingga menjadikannya rentan terhadap intrusi air laut. Beberapa daerah di kawasan Sumpiuh dan Tambak dilaporkan memiliki air tanah yang payau akibat pengaruh salinisasi, yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami keterbatasan akses terhadap air layak guna (Anwar, 2024). Secara alamiah, kondisi ini memperkuat argumen bahwa topografi, kemiringan tanah, dan kedekatan dengan zona pesisir merupakan faktor utama yang memengaruhi terjadinya kekeringan di sebagian desa di Kabupaten Banyumas.

Namun, kekeringan di Kabupaten Banyumas tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Faktor antropogenik atau aktivitas manusia juga memainkan peran signifikan dalam memperburuk kondisi lingkungan. Dalam konteks ekologi politik, istilah "anthropogenic" merujuk pada perubahan lingkungan yang dihasilkan oleh tindakan manusia. Konsep ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *anthropos* yang berarti manusia, dan *gen* yang berarti lahir dari atau diproduksi oleh, dan digunakan untuk menjelaskan dampak manusia terhadap sistem alam (Korolev et al., 2024). Aktivitas manusia seperti peningkatan konsumsi air, pembangunan infrastruktur, dan eksploitasi sumber daya alam telah menyebabkan peningkatan suhu global dan gelombang panas yang memperbesar kebutuhan air, sekaligus memperparah defisit air di berbagai wilayah (Cheng et al., 2019; AghaKouchak et al., 2021). Ketika konsumsi air melebihi kapasitas alam untuk menyediakannya, maka kekeringan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Dengan demikian, kekeringan di Banyumas merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kondisi geografis dan tekanan antropogenik, yang menuntut pendekatan mitigasi yang holistik dan berbasis wilayah.

Di Kabupaten Banyumas, penyebab utama kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di bagian selatan, secara dominan dipengaruhi oleh faktor alamiah berupa kondisi geografis dan lokasi topografis yang tidak mendukung ketersediaan air. Kondisi ini diperburuk oleh pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Faktor antropogenik dalam konteks Kabupaten Banyumas tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan air untuk pembangunan, seperti sektor pariwisata, tetapi mencerminkan adanya pemikiran dan kebijakan yang kurang selaras dengan urgensi konservasi sumber daya alam. Salah satu contoh adalah pembangunan embung, yang dirancang sebagai waduk atau tampungan air untuk mengatur aliran dan menyediakan cadangan air, terutama di musim kemarau. Sayangnya, beberapa embung di Banyumas dibangun dengan orientasi estetika dan lokasi strategis untuk menarik wisatawan, sehingga fungsi utamanya sebagai sarana konservasi air terabaikan (Sakti, 2024).

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi embung dari sektor vital seperti agraria dan ketahanan air menuju sektor tersier seperti pariwisata. Bahkan, terdapat kasus di mana embung dibangun di atas lahan produktif yang seharusnya digunakan untuk pertanian, seperti persawahan. Kebijakan semacam ini secara tidak langsung mengesampingkan sektor agraria yang justru menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan air di wilayah tersebut. Dalam konteks ekologi politik, pembangunan yang tidak mempertimbangkan kondisi alam dan kebutuhan primer masyarakat dapat memperburuk kerentanan terhadap bencana ekologis seperti kekeringan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meninjau ulang prioritas pembangunan, dengan menempatkan sektor agraria dan konservasi air sebagai fokus utama, bukan sekadar mengejar potensi ekonomi jangka pendek dari sektor pariwisata yang bersifat temporer dan tidak berkelanjutan.

Tabel 1. Peruntukan Embung per Kabupaten Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten/ Kota	Mandi/ Cuci	Minum/ Masak	Bahan Baku Air Minum	Pengairan/ Irigasi	Pariwisata	Perikanan	Pembangkit Listrik	Industri/ Pabrik	Lainnya	Tidak Digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Cilacap	4	2	2	16	1	7	-	2	-	3
Banyumas	1	-	-	48	5	11	-	-	1	2
Purbalingga	4	4	-	13	1	1	-	-	-	1
Banjarnegara	-	-	-	18	1	7	-	-	-	2
Kebumen	2	-	-	14	5	6	1	-	1	7
Purworejo	7	8	8	20	1	13	-	-	1	8
Wonosobo	-	-	-	11	-	4	-	-	-	4
Magelang	-	1	-	14	4	3	-	-	-	2
Boyolali	11	3	3	59	8	14	-	-	3	8
Klaten	2	-	-	37	9	10	-	-	7	8
Sukoharjo	-	-	-	18	2	5	-	-	-	1
Wonogiri	15	2	1	40	3	12	-	-	2	6
Karanganyar	2	-	1	32	3	2	-	-	-	2
Sragen	-	-	-	51	6	11	1	-	2	14
Grobogan	1	-	1	103	1	10	-	-	4	13
Blora	8	2	1	133	2	3	-	1	4	10
Rembang	11	2	-	136	1	5	-	-	12	25
Pati	30	-	3	108	3	7	-	1	2	5
Kudus	-	-	-	13	2	7	-	-	-	1
Jepara	2	1	1	36	1	-	-	-	1	5
Demak	10	2	1	32	1	4	-	-	1	4
Semarang	4	1	1	51	6	17	-	-	-	13
Temanggung	1	-	-	15	6	2	-	-	-	4
Kendal	-	-	-	13	3	4	-	-	-	2
Batang	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1
Pekalongan	3	1	1	12	1	5	-	-	-	2
Pemalang	3	3	2	24	1	4	-	-	2	12

Kabupaten/ Kota	Mandi/ Cuci	Minum/ Masak	Bahan Baku Air Minum	Pengairan/ Irigasi	Pariwisata	Perikanan	Pembangkit Listrik	Industri/ Pabrik	Lainnya	Tidak Digunakan
Tegal	3	2	4	49	3	4	-	1	2	5
Brebes	1	-	-	41	2	1	-	-	-	3
Kota Magelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Surakarta	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kota Salatiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Semarang	-	-	-	5	-	-	-	-	2	3
Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAWA TENGAH	125	34	30	1.165	84	179	2	5	47	176

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021.

Kekeringan yang melanda sebagian desa di Kabupaten Banyumas merupakan hasil dari kombinasi antara faktor alamiah dan dampak kebijakan pembangunan yang tidak sepenuhnya berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Secara alamiah, kekeringan di wilayah selatan Banyumas memang sulit dihindari karena kondisi geografis yang tidak mendukung ketersediaan air. Namun, persoalan ini menjadi semakin kompleks dan meluas akibat arah kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi kapitalistik. Pendekatan pembangunan yang lebih menekankan pada kepentingan ekonomi jangka pendek, seperti pengembangan sektor pariwisata, sering kali mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat dan daya dukung ekologis wilayah. Dalam kerangka ekologi politik, pendekatan semacam ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dan kepentingan ekonomi dapat membentuk kebijakan yang berdampak langsung terhadap kerentanan lingkungan dan sosial.

Meski demikian, terdapat sejumlah aktor politik yang telah berperan aktif dalam upaya penanggulangan kekeringan di Kabupaten Banyumas. Beberapa di antaranya adalah BPBD, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta PJ Bupati Banyumas, yang secara langsung turun tangan dalam mendistribusikan air bersih ke desa-desa terdampak. Langkah dropping air bersih menjadi solusi paling realistis dalam jangka pendek, mengingat keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis yang tidak memungkinkan akses air secara merata. Namun, intervensi semacam ini perlu diiringi dengan evaluasi kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan ekologis, agar penanganan kekeringan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu membangun ketahanan air jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Banyumas.

Tabel 2. Curah Hujan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan
Januari	332	26
Februari	267	21
Maret	320	25
April	238	20
Mei	156	12
Juni	143	11
Juli	100	8
Agustus	3	0
September	7	1
Oktober	20	2
November	339	26
Desember	271	20
Jumlah	2.196	172

Sumber: BPS, 2020.

Dalam menghadapi kekeringan yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Banyumas, berbagai aktor politik dan kelembagaan telah menunjukkan peran aktif dalam upaya penanggulangan krisis air. BPBD menjadi salah satu lembaga yang bergerak langsung di lapangan dengan mendistribusikan tangki-tangki air ke seluruh desa terdampak. Menurut Saeful dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD, bantuan ini merupakan bentuk respons cepat terhadap kebutuhan air bersih masyarakat (Saeful, 2024). Selain BPBD, PJ Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro, juga turut terlibat secara langsung dalam aksi kemanusiaan tersebut. Pada tahun 2023, ia membagikan sebanyak 70.000 liter air bersih kepada warga Kecamatan Sumpiuh, yang terdampak kekeringan cukup parah. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bagi sekitar 15.000 warga dari sembilan desa, dari total 56.000 penduduk di kecamatan tersebut (Banyumas Kab, 2023).

Tak hanya lembaga pemerintah daerah, Baznas juga mengambil peran penting dalam penyaluran bantuan air bersih. Salah satu aksi nyata dilakukan di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, yang mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Pendistribusian air dipimpin langsung oleh Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah, KH Ahmad Darodji, bersama PJ Bupati Banyumas dan Ketua Baznas Banyumas, Khasanatul Mufidah. Dalam program Baznas Peduli, tim Baznas Tanggap Darurat Bencana telah menyiapkan 99 tangki air berkapasitas masing-masing lima ribu liter, yang akan disalurkan secara bertahap

kepada masyarakat Banyumas (Raihan, 2023). Kehadiran berbagai aktor ini menunjukkan bahwa penanggulangan kekeringan tidak hanya menjadi tanggung jawab struktural pemerintah, tetapi juga melibatkan kolaborasi lintas lembaga dan pendekatan kemanusiaan yang berbasis solidaritas sosial.

Meninjau kasus kekeringan yang terjadi di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2019 hingga 2024, terlihat bahwa peran pemerintah daerah cukup signifikan dalam hal bantuan langsung, terutama melalui distribusi air bersih. Lembaga seperti BPBD, PJ Bupati, dan institusi non-struktural seperti Baznas telah menunjukkan respons konkret terhadap krisis air yang melanda sejumlah desa. Namun, jika ditelaah lebih dalam dari perspektif kelembagaan politik, terdapat kesenjangan dalam kontribusi aktor-aktor formal yang memiliki mandat struktural untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak masyarakat. Dalam sistem pemerintahan daerah, eksekutif berfungsi sebagai pelaksana kebijakan sekaligus simbol pemerintahan, sementara legislatif memiliki peran utama dalam merumuskan, mengubah, dan membatalkan regulasi, serta menyuarakan aspirasi rakyat melalui wakil-wakil daerah pemilihan. Dalam konteks kekeringan, legislatif seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada ketahanan air dan perlindungan lingkungan, terutama karena mereka mewakili suara masyarakat terdampak.

Namun, kasus kekeringan di Kabupaten Banyumas justru mengindikasikan minimnya kontribusi legislatif maupun eksekutif dalam merumuskan kebijakan jangka panjang yang solutif dan berkelanjutan. Bantuan yang bersifat darurat seperti dropping air bersih memang penting, namun belum cukup untuk menjawab akar persoalan kekeringan yang bersifat struktural dan ekologis. Ketidakhadiran peran legislatif dalam mendorong regulasi yang mendukung konservasi air, pengelolaan tata ruang berbasis lingkungan, serta perlindungan lahan produktif menunjukkan lemahnya fungsi representasi dan advokasi politik terhadap isu-isu ekologis. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terhadap kinerja kelembagaan politik daerah, agar penanggulangan kekeringan tidak hanya bergantung pada respons darurat, tetapi juga didukung oleh kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan dan keadilan ekologis.

Secara ideal, anggota legislatif memiliki dana aspirasi, yang merupakan anggaran yang dialokasikan oleh badan legislatif untuk mendukung program dan kegiatan di dapil masing-masing anggota legislatif. Dana aspirasi merupakan salah satu hak anggota DPRD melalui dibentuknya Peraturan DPRD Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, yang menjelaskan bahwa dana aspirasi diusulkan oleh perorangan anggota DPRD maupun bersama, yang mana program yang diusulkan nantinya akan terintegrasi dalam pembangunan nasional APBN. Susanto menyebutkan bahwa secara lebih spesifik, program dana aspirasi dapat mencakup pembangunan, perbaikan, atau peningkatan dalam hal: (a) penyediaan air bersih; (b) fasilitas sanitasi, termasuk mandi, cuci, kakus/jamban, dan pengelolaan sampah/limbah rumah tangga; (d) penerapan hasil riset dan teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembangunan; (e) tempat ibadah serta sarana dan prasarana keagamaan; (f) pembangunan kantor desa, desa adat, kelurahan, atau nama sejenis lainnya; (g) sarana olahraga atau kesenian; (h) perpustakaan atau taman bacaan umum, panti sosial; (i) penyediaan sarana internet; (j) penyediaan penerangan jalan umum; (k) pembangunan jalan atau jembatan di desa, desa adat, kelurahan, atau nama sejenis; (l) pengembangan irigasi tersier; (m) pemakaman umum; (n) sarana dan prasarana untuk pertanian/perikanan; (o) fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pondok bersalin desa, dan ambulans; (p) ruang kelas, fasilitas pendidikan, dan pesantren; (q) pasar rakyat atau pasar tradisional; (r) pengadaan benih, bibit, dan ternak; dan/atau (s) pembangunan fisik lainnya (Susanto, 2017).

Seperti yang telah disampaikan oleh Sakti, kurangnya evaluasi kebijakan justru memunculkan ketimpangan sektoral. Dalam kasus di Banyumas, ketimpangan sektoral yang menjelaskan bencana kekeringan, disebabkan oleh kurangnya pemerhatian kebijakan dari legislator sendiri, dan kurang adanya riset dari legislator, terutama mengenai lahan yang akan dijadikan embung. Padahal, seharusnya embung dibuat untuk konservasi air dan yang nantinya dapat digunakan secara optimal ketika musim kering. Ia telah menyampaikan, bahwa beberapa embung yang dibuat justru tidak sesuai pada tempatnya, karena kurang memerhatikan tata ruang (Sakti, 2024). Kurangnya kontribusi ahli tata ruang dan birokrat dalam perencanaan embung menunjukkan minimnya riset kebijakan oleh legislator. Alhasil, munculah ketimpangan sektoral yang dalam konteks Kabupaten Banyumas disebabkan oleh kurangnya riset kebijakan dari legislator. Ketimpangan sektoral ini menyebabkan sektor-sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas naik, dengan dibangunnya embung. Pembangunan embung tersebut kurang memerhatikan tata ruang dan kebutuhan sektor agraria, sehingga lebih menguntungkan sektor tersier seperti pariwisata.

KESIMPULAN

Kabupaten Banyumas, yang terletak di Jawa Tengah, menghadapi tantangan serius terkait kekeringan, terutama di musim kemarau. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, kondisi geografis dan iklim yang tidak menentu, diperburuk oleh perubahan iklim global, telah mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air bersih dan ancaman bagi sektor pertanian. Upaya penanggulangan kekeringan telah melibatkan berbagai pihak, seperti BPBD yang aktif mendistribusikan air bersih, serta pemerintah daerah dan BAZNAS yang memberikan bantuan. Namun, penyelesaian masalah ini membutuhkan sinergi antara eksekutif dan legislatif, di mana eksekutif berperan sebagai pelaksana kebijakan dan legislatif sebagai pembuat regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ketimpangan sektoral menjadi akar persoalan kekeringan di Banyumas, khususnya di wilayah selatan. Sektor agraria yang seharusnya menjadi prioritas justru terpinggirkan oleh kepentingan politik yang lebih mengutamakan sektor pariwisata. Faktor alamiah seperti topografi dan iklim memang berkontribusi terhadap kerentanan kekeringan, namun faktor antropogenik seperti perencanaan pembangunan yang tidak berbasis riset memperburuk keadaan. Pembangunan embung yang seharusnya mendukung konservasi air dan pengairan pertanian malah difokuskan untuk estetika dan pariwisata. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih holistik dan berbasis riset, agar pembangunan infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam mendukung ketahanan air dan sektor pertanian di musim kemarau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bonefeld, W., & Holloway, J. (1995). *Global capital, national state and the politics of money*. MacMillan Press.
- Connor, M. O. (1994). *Is capitalism sustainable? Political economy and the politics of ecology*. Guilford.
- Glantz, M. H. (1999). *Drought follows the plough: A cautionary note*. In D. A. Wilhite (Ed.), *Drought: A global assessment*. Routledge Hazards and Disasters.
- Hoag, C. (2022). *The soil problem*. In C. Hoag (Ed.), *The fluvial imagination: On Lesotho's water-export economy*. University of California Press.
- Jessop, B. (2007). *State power: A strategic-relational approach*. Polity.
- Newell, P. (2021). *Critical political economy*. In *Essential concepts of global environmental governance*. Routledge.
- Sutopo. (1998). *Pengantar penelitian kualitatif: Dasar-dasar penelitian dan praktis*. Universitas Sebelas Maret.
- Van De Ven, A. H., & Poole, M. S. (2017). *Field Research Methods*. In J. A. C. Baum (Ed.), *The Blackwell Companion to Organizations*. Blackwell Publishing Ltd..
<https://doi.org/10.1002/9781405164061.ch38>

Jurnal

- Abulhul, Z. (2020). Capital in the twenty – first century by Thomas Piketty: Book review. *Technium Social Sciences Journal*, vol. 12, 2020, pp. 330-332
- AghaKouchak, A., Mirchi, A., Madani, K., Di Baldassarre, G., Nazemi, A., Alborzi, A., et al. (2021). Anthropogenic drought: Definition, challenges, and opportunities. *Reviews of Geophysics* (1985), 59(2). <https://doi.org/10.1029/2019RG000683>
- Babic, M., & Sharma, S. E. (2023). Mobilising critical international political economy for the age of climate breakdown. *New Political Economy*, 28(5), 758–779.
<https://doi.org/10.1080/13563467.2023.2184468>
- Cheng, L., Hoerling, M., Liu, Z., & Eischeid, J. (2019). Physical understanding of human-induced changes in U.S. hot droughts using equilibrium climate simulations. *Journal of Climate*, 32(14), 4431–4443.

- David, O., & Hughes, S. (2023). Whose water crisis? How policy responses to acute environmental change widen inequality. *Policy Studies Journal*, 52(2): 425-450. <https://doi.org/10.1111/psj.12524>
- Dewi, R. & Wahidin. (2020). Embung sebagai alternatif cadangan air pada sawah tadah hujan (Studi kasus Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu). *Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains*, 4(1), 1–6.
- Dhawale, R., Schuster-Wallace, C. J., Pietroniro, A. (2024). Assessing the multidimensional nature of flood and drought vulnerability indeks: A systematic review of literature. *Internasional Journal of Disaster Risk Reduction*, 112 (2024) 104764: 1-19. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.104764>
- Griggs, G., & Reguero, B. G. (2021). Coastal adaptation to climate change and sea-level rise. *Water*, 13(2151), 1–26.
- Hagenlocher, M., Naumann, G., Meza, I., Blauhut, V., Cotti, D., Döll, P., Wens, M. (2023). Tackling growing drought risks—The need for a systemic perspective. *Earth's Future*, 11(9), 1–10.
- Hesketh, C. (2024). Indigenous environmentalism: For a political economy where people (and planet) matter. *European Journal of Social Theory*. 27(3), <https://doi.org/10.1177/13684310241244524>
- Machado, D., & Fuinhas, J. A. (2023). Income Inequality and Economic Freedom Revisited: Are Freedom and equality conflicting values? Evidence from the twenty-first century. *International Economic Journal*, 37(2): 294-323. <https://doi.org/10.1080/10168737.2023.2212251>
- Mahdavifar, S. H., Kebria, B. S., Hamidifar, F., Khorshidi, A. (2024). Validation Model of Water Crisis Management Policy in Iran. *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*, 3(2): 39-48. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.3.2.7>
- Susanto, M. (2017). Kedudukan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*, volume 24 issue 2.

Sumber Digital

- Adi, Y. (2024, Agustus 27). Lebih dari 20 ribu jiwa terdampak kekeringan di Banyumas. RRI. <https://rri.co.id/daerah/931918/lebih-dari-20-ribu-jiwa-terdampak-kekeringan-di-banyumas>
- Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. (2024, Februari 5). Pembangunan 5 embung di Banyumas tingkatkan kesejahteraan masyarakat. <https://sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak/beritas/pembangunan-5-embung-di-banyumas-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat>
- Banyumas Kab. (2023, Oktober 2). 70.000 liter air bersih dibagikan di Sumpiuh. <https://www.banyumaskab.go.id/read/44693/70000-liter-air-bersih-dibagikan-di-sumpiuh>
- Budiman, A. (2019, September 30). Kekeringan di Banyumas meluas, BPBD intensifkan penyaluran air bersih. Jateng Pos. <https://jatengpos.co.id/kekeringan-di-banyumas-meluas-bpbd-intensifkan-penyaluran-air-bersih/arif/>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. (2024, Juni 30). Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 30 Juni 2024. <https://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/48177/jumlah-penduduk-laki-laki-dan-perempuan-per-30-juni-2024>
- Puspitasari, W. (2019, September 30). Kekeringan meluas, BPBD Banyumas intensifkan penyaluran bantuan air. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/1088300/kekeringan-meluas-bpbd-banyumas-intensifkan-penyaluran-bantuan-air>
- Puspitasari, W. (2019, September 11). Meluas, 18 kecamatan terdampak kekeringan di Banyumas. Antara News. <https://jateng.antaranews.com/berita/262020/meluas-18-kecamatan-terdampak-kekeringan-di-banyumas>
- Raihan, F. (2023, November 8). Baznas Jateng salurkan bantuan air bersih di Panusupan Banyumas. RRI Purwokerto. <https://www.rri.co.id/purwokerto/daerah/434447/baznas-jateng-salurkan-bantuan-air-bersih-di-panusupan-banyumas>
- Sejati, P. P. (2024, September 3). Daftar 35 desa terdampak kekeringan di Banyumas, 1 juta liter air bersih telah disalurkan tak cukup. Banyumas Tribun. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/09/03/daftar-35-desa-terdampak-kekeringan-di-banyumas-1-juta-liter-air-bersih-telah-disalurkan-tak-cukup>
- Sumarwoto. (2020, September 2). Desa krisis air bersih di Banyumas-Jateng bertambah, sebut BPBD. <https://www.antaranews.com/berita/1702246/desa-krisis-air-bersih-di-banyumas-jateng-bertambah-sebut-bpbd>

Sumarwoto. (2024, September 18). 43 desa di Banyumas terdampak kekeringan. [https://jateng.antaranews.com/berita/549703/43-desa-di-banyumas-terdampak-kekeringan#:~:text=Purwokerto%20\(ANTARA\)%20%2D%20Kepala%20Pelaksana%20Badan%20Penanggulangan,\(Rabu%2C%2018/9\)%2C%20ada%20sebanyak%2011.109%20keluarga%20yang](https://jateng.antaranews.com/berita/549703/43-desa-di-banyumas-terdampak-kekeringan#:~:text=Purwokerto%20(ANTARA)%20%2D%20Kepala%20Pelaksana%20Badan%20Penanggulangan,(Rabu%2C%2018/9)%2C%20ada%20sebanyak%2011.109%20keluarga%20yang)

Sumber Lainnya

Banyumas, B. (2024, Oktober 18). Data desa kekeringan di Banyumas (Y. A. Wibowo, Interviewer).

Korolev, I., Kravchenko, M., Fedorova, E., Ozerova, N., & Vasileva, N. (2024). Global warming: Anthopogenic or natural factor?. International Conference on Ensuring Sustainable Development: Ecology, Energy, Earth Science and Agriculture 494, (2024) 01024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449401024>

Wawancara dengan Supriyanto, carik Kecamatan Patikraja, 2024

Wawancara dengan Anwar Burhani, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, 2024.

Wawancara dengan Saeful Amin, Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, 2024

Wawancara dengan Sakti, Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, 2024